

BALIKPAPAN

DARI RAWA MENJADI
SUMBER HARTA 1907 – 1942



PENGARAH

SALMON BATUALLO

Balai Pelestarian Nilai Budaya

PENULIS

LISYAWATI NURCAHYANI

HARTO JUWONO

DIAN SULISTYORINI

50-959)





**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

2
10-04-15

BALIKPAPAN : DARI RAWA MENJADI SUMBER HARTA 1907-1942



PENGARAH:
SALMON BATUALLO

PENULIS;

LISYAWATI NURCAHYANI
HARTO JUWONO
DIAN SULISTYORINI

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



**BALIKPAPAN : DARI RAWA
MENJADI SUMBER HARTA
1907–1942**

© Penerbit Kepel Press

Pengarah : Salmon Batuallo
Oleh : Lisyawati Nurcahyani
Harto Juwono
Dian Sulistyorini
Desain sampul : Arief Budhi Setyawan
Layout : Tim Kreatif Kepel Press

Cetakan pertama, 2014

Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6

Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp. : (0274) 884500

Hp. : 081 227 10912

e-mail : amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-1228-93-7

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data baik kepada nara sumber maupun kepada kawan-kawan yang ada di Balikpapan maupun Samarinda.

Penelitian ini mengambil tema Balikpapan : Dari rawa Menjadi Sumber Harta 1907- 1942 dengan harapan agar penelitian ini dapat memberikan pengayaan kepada siapapun yang tertarik untuk mengetahui sejarah tentang Balikpapan. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak penelitian ini tidak akan selesai. Untuk itu ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Dirjen Kebudayaan dan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya beserta seluruh staf.. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu kami ucapkan penghargaan yang setinggi- tingginya atas semua bantuannya.

Kami menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangannya dan belum sempurna dan berharap agar semua pihak dapat memberikan saran dan masukan agar kedepan tulisan ini bisa tampil lebih bagus lagi. Semoga saja tulisan ini dapat memberikan sumbangan bagi kasanah sejarah Balikpapan dari perspektif sosial dan ekonomi. Akhir kata salam sejarah bagi semua generasi muda dan para pembaca.

Tim Penulis



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sumber yang Digunakan	9
F. Metodologi	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II SINGA MENGAUM DI TANAH MINYAK: SEJARAH POLITIK DAN BIROKRASI KOLONIAL	19
A. Perkembangan Politik Daerah	20
B. Pembagian Wilayah Administratif	30
C. Infrastruktur Pendukung	38
D. Simpulan	46
BAB III MENUJU KOTA MODERN: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS TRANSPORTASI	49
A. Pelabuhan Balikpapan	50
B. Infrastruktur Transportasi Darat	62
C. Infrastruktur Komunikasi Lain	72
D. Simpulan	78
BAB IV MENUJU KEMAKMURAN KOLONI: EKSPLOITASI EKONOMI ATAS BALIKPAPAN	81
A. Pertanian	81
B. Perdagangan	89

C. Kehutanan	96
BAB V WAJAH LAIN DARI KOLONIALISME: PERKEMBANGAN INSTITUSI SOSIAL	103
A. Pendidikan	104
B. Pelayanan Kesehatan	113
C. Bidang Kerohanian	122
D. Simpulan	129
BAB VI INVESTOR DAN MOTIVATOR: PERAN BPM DALAM PERKEMBANGAN KOTA	131
A. BPM dan Konsesi bagi Eksploitasi Minyak	131
B. Pengadaan Instalasi Perminyakan	144
C. Pelayanan Publik	157
D. Simpulan	160
BAB VII MENUJU KOTA MULTI ETNIS: PERKEMBANGAN PENDUDUK DAN PEMUKIMAN	163
A. Orang Belanda	163
B. Orang Asing	172
C. Penduduk Pribumi	183
D. Simpulan	191
BAB VIII PENUTUP	193
BIBLIOGRAFI	197
A. Arsip	197
B. Artikel Koran	202
C. Buku dan Majalah	212

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balikpapan merupakan sebuah lokasi yang sekarang ini identik dan sekaligus menjadi simbol eksplorasi kekayaan alam Indonesia di pulau Kalimantan, khususnya kandungan minyak bumi. Hubungan antara kota ini dan perkembangan pertambangan minyak bumi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dan kehadiran investasi modal yang mengeksplorasi kekayaan alam ini bukan hanya menentukan pertumbuhan kota tersebut bersama morfologinya namun juga memberikan corak khusus bagi perkembangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Meskipun sepanjang sejarah kehadirannya, eksploitasi minyak bumi telah mengakibatkan kota Balikpapan dua kali dilanda oleh kehancuran sebagai akibat dari perang, perkembangan dan pertumbuhan kota ini tetap terkait dan tergantung terutama pada keberhasilan dan peningkatan eskalasi produksi kekayaan alam tersebut. Produktivitas mineral yang bernilai strategis bagi kepentingan industri dunia ini tidak hanya menentukan tingkat penghasilan bagi masyarakat pemilik lahan melainkan juga membuktikan peran dan kontribusi kota dan sekitarnya bagi operasional mesin industrialisasi internasional, lewat pengeboran dan ekspor produk minyak mentah oleh kekuatan modal asing. Dari proses eksploitasi dan transaksi yang berlangsung di Balikpapan, dampak yang muncul tidak hanya terbatas di sektor pertambangan melainkan berpengaruh pada sektor-sektor perekonomian lainnya bahkan juga di tingkat ekonomi mikro.

Penemuan kandungan mineral yang merupakan kekayaan alam bernilai strategis di perut bumi Kalimantan Timur dan khususnya di sekitar Balikpapan ini telah mengangkat daerah tersebut

dari sebuah pemukiman kecil di tepi teluk yang penuh dengan rawa dan dihuni oleh perkampungan nelayan, menjadi sebuah sentra eksplorasi pertambangan besar-besaran dan akhirnya juga memunculkan sebuah kota yang diatur dan dikelola menurut model dan kepentingan pemilik modal. Unsur sosial ekonomi yang tumbuh disertai dengan sektor demografi yang dinamis telah memberikan corak tertentu bagi pertumbuhan kota Balikpapan dalam konteks historisnya.

Meskipun banyak aspek khususnya dalam dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya yang mewarnai kondisi sosial kota Balikpapan, kehadiran industri pertambangan dan potensi kekayaan mineral minyak bumi tidak bisa dibantah menjadi motivator utama bagi pertumbuhan kota dan akhirnya juga perubahan dalam kehidupan sosial yang dialami oleh penduduknya. Bisa diprediksi bahwa tanpa penemuan kandungan minyak bumi dan kehadiran perusahaan sarat modal yang menjadi eksploitatornya, perkembangan Balikpapan tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain di Kalimantan yang lebih ditopang oleh kekuatan sosial dan budaya agraris.

Dengan mengakui arti penting hadirnya investasi modal asing bagi pertambangan ini, tahun 1907 menjadi awal dari periodisasi pertumbuhan dan perkembangan kota Balikpapan. Tahun ini menandai kehadiran perusahaan swasta sarat modal milik Belanda yaitu *Bataafsche Petroleum Maatschappij* yang membuka pabrik parafin di Balikpapan dalam kapasitas yang besar.¹ Keberadaan pabrik ini menandai awal dari eksploitasi kekayaan mineral minyak bumi oleh perusahaan swasta Belanda tersebut yang menunjukkan peningkatan eskalasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan ini untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber minyak bumi dan

1 "Petroleum", dalam D.G. Stibbe en H.J. de Graaff, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indië, derde deel* ('s Gravenhage, 1919, Martinus Nijhoff), halaman 400.

mineral di koloni ini (*het opsporen en exploiteeren van petroleumbronnen en delfstoffen in Ned. Indië*).²

Dengan keberhasilan produksi parafin pada lima tahun keberadaannya, jajaran direksi perusahaan ini kemudian bertekad untuk meningkatkan eksploitasi dan produktivitas lahan yang telah diperolehnya sebagai hasil konsesi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perusahaan ini kemudian memperluas lahan konsesinya ketika hasil eksplorasi yang dilakukan oleh para teknisinya menunjukkan kandungan minyak bumi dan juga batubara serta gas cukup banyak di daerah sekitar Balikpapan. Di samping itu juga, jajaran direksi BPM juga merasa perlu bertindak karena sejumlah perusahaan lain telah berhasil mendapatkan konsesi dengan objek yang sama di *Afdeeling* Samarinda yang berdekatan dengan Balikpapan.³

Dari perjuangan para direksi perusahaan ini, pada bulan Oktober 1921 BPM memperoleh hak konsesi atas lahan minyak bumi di daerah Semberah, *Afdeeling* Samarinda. Luas lahan konsesinya mencapai 3885 hektar dengan cukai tahunan 4% dari hasil brutto yang harus dibayarkan kepada pemerintah kolonial.⁴ Setelah berlangsung selama tiga tahun, eskalasi perluasan lahan atas dasar hasil eksplorasi perusahaan ini menunjukkan peningkatan. Kini BPM tidak hanya terbatas pada produk minyak mentah tetapi juga unsur-unsur lain yang berkaitan dengan minyak bumi, seperti gas dan batubara. Kandungan dari tiga komponen mineral ini ditemukan di wilayah *Afdeeling* yang sama sebagai daerah

2 *Staatscourant*, tanggal 23 Juli 1907. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Den Haag dan mempunyai hak konsesi yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1997.

3 Sebuah perusahaan pertambangan swasta Belanda lainnya yaitu N.V. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch Indië telah mendapatkan konsesinya yang berlaku selama 75 tahun terhitung sejak 1 Januari 1906 di pulau Tarakan yang menjadi bagian dari *Afdeeling* Samarinda. Objeknya adalah minyak bumi dan unsur-unsur lainnya. Bahkan perusahaan ini telah membagi daerah operasinya menjadi Tarakan I dan Tarakan II. Periksa *ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 24 December 1905 no. 17*, bundel *Algemeene Secretarie*. Begitu juga dengan NV. Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij, perusahaan ini sejak bulan Maret 1916 telah memperoleh konsesi bagi eksploitasi minyak bumi selama 75 tahun dari pemerintah di daerah Tungkudasing dan Mintut, *Afdeeling* Samarinda. Periksa *ANRI, Besluit van Gouverneur generaal 18 Maart 1916 no. 61*, bundel *Algemeene Secretarie*,

4 *ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 10 October 1921 no. 8*, bundel *Algemeene Secretarie*.

konsesinya. Untuk itu jajaran direksi BPM kemudian memutuskan untuk meminta dan akhirnya mendapatkan konsesi dari pemerintah kolonial di Sembakung, dengan masa berlaku selama 75 tahun.⁵

Dengan lokasi eksploitasi lahan konsesinya, BPM memusatkan kantor perwakilan cabang sekaligus menjadi sentra industri pengolahan produk mineral ini di kota Balikpapan. Sejak tahun 1913 BPM membangun pabrik pengolahan minyak mentah dengan perangkat mesin berat yang didatangkan dari Belanda untuk kepentingan itu. Dari pabrik ini produk minyak mentah bukan hanya diolah untuk menjadi produk bahan bakar tetapi juga dihasilkan produk lain seperti asam belerang, asam belerang cair, bahan asam cair, asam salpeter dan produk yang mengandung unsur besi.

Semua perkembangan yang dialami dan diciptakan oleh BPM ini membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat pribumi baik yang langsung terkait dengan keberadaan dan kinerja pabrik ini maupun yang tidak. Di samping pada individu, kinerja BPM juga mempengaruhi perkembangan kota Balikpapan dan morfologinya. Di samping perubahan dalam sektor demografi yang dipicu oleh kedatangan imigran dari luar terkait dengan operasional BPM, juga pembangunan dan pengembangan infrastruktur kota tampak jelas dari pengaruh perusahaan ini. Sebagai suatu ibukota *Onderafdeeling*, Balikpapan tampil menduduki posisi dan peranan yang tidak kalah dibandingkan ibukota *Afdeeling*, dalam hal ini Samarinda.⁶

Infrastuktur yang menjadi pendukung pertumbuhan kota dan dinamika yang berlangsung di dalamnya, khususnya per-

5 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 6 Maart 1924 no. 26*, bundel *Algemeene Secretarie*. Lokasi Sembakung dibagi dua karena menunjuk pada empat lahan yang terpisah. Lahan bagi daerah konsesi Sembakung I mencakup luas 1000 hektar, sementara lahan bagi Sembakung II mencakup luas 996 hektar dan lahan bagi Sembakung III mencakup luas 997 hektar. Lahan terakhir, yaitu Sembakung IV, memiliki luas 998 hektar.

6 Menurut *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1821 nomor 767, secara administratif Balikpapan ditetapkan sebagai suatu *Onderafdeeling* bersama Kutei Timur, Mahakam Hulu dan Berau yang semuanya menjadi bagian dari *Afdeeling* Samarinda, dengan ibukota Samarinda. *Onderafdeeling* Balikpapan sendiri terbagi dalam distrik Balikpapan dan Onderdistrik Samboja yang bersifat otonom. Semuanya ini menjadi bagian dari pemeritahan karesidenan *Zuid en Oost Borneo* yang berpusat di Banjarmasin.

usaha pertambangan di atas, dibangun oleh pemerintah kolonial dan juga oleh perusahaan, terlepas dari kerjasama antara keduanya atau penerapan rancangan bangunan masing-masing. Untuk mengusahakan peningkatan pemasukan bagi kas negara, pemerintah di Batavia berkepentingan untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang bisa memberikan pendapatan dari penggunaannya. Dermaga pelabuhan di teluk Balikpapan, tempat pertemuan antara muara sungai Semui dan sungai Riko, setelah melalui pengukuran oleh dinas topografi dan geologi, dibangun oleh pemerintah kolonial dan kompleksnya disediakan bagi pembangunan gudang-gudang demi kepentingan perusahaan swasta. Dari infrastruktur tersebut, bukan hanya peningkatan sinergi antara pemerintah dan modal swasta yang terjamin, melainkan juga pertumbuhan daerah dan partisipasi masyarakat yang menghuninya.

Di samping fasilitas transportasi laut, yang dilayani oleh kapal penumpang tetapi terutama juga kapal-kapal tanker pengangkut minyak mentah, sarana komunikasi dan transportasi darat juga mulai diperhatikan oleh pemerintah kolonial. Sejumlah jalan baru dibuka dan beberapa jalan setapak yang sudah ada sebelumnya (*voetpad*) diperlebar dan dibangun menjadi bentuk jalan raya yang menghubungkan Balikpapan dengan sejumlah kota penting di Kalimantan Timur atau Selatan. Di samping itu prasarana jalan ini juga bisa dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk mempercepat proses komunikasi dari pedalaman ke pusat perkotaan. Hal ini sangat mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi dan interaksi sosial budaya antara kehidupan kota dan pedalaman.

Kondisi pertumbuhan ini berlangsung selama era kolonial hingga tahun 1942. Pada tahun ini bukan hanya terjadi perubahan rezim yang otomatis diikuti dengan perubahan sistem, yaitu dari rezim kolonial Belanda menjadi rezim militer Jepang, namun juga ada suatu peristiwa penting yang berkaitan erat dengan perubahan rezim itu tetapi meninggalkan sisa-sisa fisik di Balikpapan. Ketika tentara Belanda menarik diri dari Balikpapan akibat ancaman gempuran tentara Jepang, mereka melakukan politik bumi hangus

dengan cara membakar persediaan minyak dan menghancurkan infrastruktur penambangan agar tidak jatuh ke tangan tentara Jepang. Peristiwa ini praktis melenyapkan sebagian peninggalan kolonial selama hampir empat puluh tahun.⁷

Namun demikian periode 1907-1942 tetap menjadi periode penting dalam sejarah kota Balikpapan. Pada periode ini pemerintah kolonial telah meletakkan fondasi bagi pembangunan sebuah kota yang akan dikembangkan dan diperluas lebih jauh. Fondasi yang dimaksudkan di sini bukan hanya dalam arti fisik tetapi juga dalam arti perencanaan, yaitu tahap perancangan tata ruang dan morfologi kota. Dengan rancangan ini, rezim kolonial telah memperhitungkan akan dibawa ke mana arah pemekaran dan perluasan kota ini dan identitas dominan apa yang menonjol dalam perkembangan kota Balikpapan.

B. Permasalahan Penelitian

Sejarah perkembangan kota Balikpapan, baik infrastruktur, sosial maupun morfologinya, menjadi suatu fenomena historis yang menarik untuk dicermati. Daya tariknya tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan kota itu sejak dari pemukiman tradisional pada awal abad XX dan berubah menjadi kota metropolitan pada awal abad XXI. Di mana-mana di Indonesia, pertumbuhan pesat suatu kota dalam kurun waktu seabad hanya bisa dialami oleh pusat-pusat pemerintahan besar dan sentra kegiatan ekonomi, baik di Jawa maupun luar Jawa. Sementara itu Balikpapan sendiri sejak zaman kolonial tidak pernah menjadi

⁷ Joice F. Kater-Hoeke, "Liberated, yet not free" dalam Jan A. Krancher, *The defining years of the Dutch East Indies, 1942-1949: Survivor's account of Japanese invasion and enslavements of Europeans and the revolution that created free Indonesia* (North Carolina, 2003, MacFarlane Company), halaman 259. Tindakan pembakaran terhadap instalasi pertambangan oleh tentara Belanda pada tanggal 20 Januari 1942 ini merupakan reaksi ketakutan dari orang-orang Belanda terhadap pemboman kota Banjarmasin oleh pesawat-pesawat Jepang dan kejatuhan Tarakan sehari sebelumnya. Pengrusakan ini begitu parah sehingga komandan pasukan Jepang mengirimkan ultimatum untuk menghentikannya dengan ancaman akan membunuh semua tawanan perang Belanda.

pusat pemerintahan daerah yang luas seperti karesidenan dan kemudian propinsi.⁸

Bertolak dari fenomena perkembangan di atas, permasalahan penelitian tersebut akan diangkat dalam sejumlah pertanyaan. Pertanyaan ini tampak sebagai berikut

1. Faktor apa yang paling mendasari terjadinya pertumbuhan dan perkembangan kota itu.
2. Pola apa yang menjadi identitas kolektif dalam proses perkembangan di berbagai sektor.
3. Kontribusi apa yang diberikan oleh unsur-unsur lokal dari proses pembentukan struktur baru yang diterapkan dari kekuatan luar terhadap perkembangan kota Balikpapan.
4. Arah apa yang ditempuh oleh para pembuat kebijakan terhadap masa depan kota Balikpapan

Semua pertanyaan di atas akan dijawab sebagai kesimpulan dari penelitian ini pada bagian terakhir laporan hasil penelitian.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

- a. Mengangkat kekuatan yang berada di balik proses pertumbuhan kota Balikpapan sebagai motivator utama. Kekuatan ini menjadi penting karena akan tetap melekat pada perkembangan kota sepanjang masa.
- b. Menarik suatu benang merah dari perkembangan di berbagai faktor yang menentukan kehidupan kota. Maksudnya lebih menekankan pada proses sinergi dari berbagai unsur yang mendorong dan mengarahkan proses perkembangan

8 Sebelum Balikpapan pada akhir abad XIX masih dikenal sebagai sebuah kampung nelayan kecil, dengan Klandasan di sebelah timur dan kampung Baru di sebelah barat. Pertumbuhan pesat terjadi pada pertengahan pertama abad XX akibat dari investasi modal global dan pengembangannya di tempat ini sehingga bahkan melebihi ibukota propinsi sekarang, Samarinda. Periksa United Nations Centre for Human Settlements, *The management of secondary cities in Southeast Asia* (Nairobi, 1996, Habitat Publ.), halaman 143.

- sehingga bisa diangkat sebagai pola yang khusus berlaku bagi kota Balikpapan dalam rangka waktu penelitian.
- c. Menggali potensi lokal yang ikut berperan dalam membangun dan mengembangkan kota sesuai dengan konteks makro yang diterapkan oleh kekuatan dari supralokal. Dalam hal ini interaksi antara kekuatan lokal dan supralokal sangat penting.
 - d. Menunjukkan sasaran dari perkembangan kota Balikpapan sesuai dengan tujuan para perancang dan pembuat kebijakannya, dengan maksud untuk menyelaraskan bagi program pengembangan periode selanjutnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat praktis dan manfaat akademis. Keduanya bisa juga saling dipadukan atau dikaitkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari proses penelitian ini.

Manfaat praktis adalah manfaat yang langsung bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan dan penataan ruang kota Balikpapan. Untuk itu hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukan hanya gambaran dan informasi tentang masa lalu, namun juga bisa memberikan gambaran tentang fondasi kota dan arah yang ingin dicapai oleh para peletak fondasi tersebut. lebih lanjut lagi, penelitian ini diharapkan juga bisa mampu memberikan kontribusi bagi solusi yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan khususnya mereka yang bertanggungjawab bagi penataan ruang dan morfologi kota.

Manfaat akademis lebih ditujukan pada bidang penelitian, yaitu sebagai kontribusi bagi khasanah ilmiah terutama dalam bidang kajian perkotaan dan sejarah pertumbuhan kota. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelusuran data atau memberikan kontribusi bagi penelitian lebih lanjut, baik yang dimaksudkan dalam konteks ilmiah maupun demi kepentingan aplikatif.

E. Sumber yang Digunakan

Karya ini merupakan hasil penelitian sejarah, karena peristiwa yang terjadi sudah berlalu dari aspek temporal. Sebagai sumber data utama dari penelitian ini tentu saja adalah arsip atau dokumen yang dianggap sebagai sumber primer dalam metode ilmu sejarah. Arsip ini bukan hanya merupakan warisan dari peninggalan masa lalu melainkan juga menjadi bukti utama dari kegiatan administrasi pada zaman pembuatannya, sekaligus juga menjadi deskripsi dan informasi utama untuk mendasari rekonstruksi bagi peristiwa masa lampau dalam bentuk karya sejarah ilmiah.

Sumber arsip untuk karya ini tersimpan di dalam dan di luar negeri. Penelusuran yang dilakukan di luar negeri, khususnya Negeri Belanda, menemukan sejumlah khasanah arsip Zuid en Oost Borneo di *Nationaal Archief Nederland* (NAN) di Den Haag. Khususnya koleksi arsip ini menyangkut tentang arsip pertambangan yang memuat bekas-bekas aktivitas perusahaan tambang minyak bumi di sekitar kota Balikpapan. Selain itu di lembaga ini juga ditemukan sejumlah arsip yang memberikan informasi tentang kota Balikpapan. Salah satu bundel arsip ini adalah *Stukken betreffende de besteding van geheime politiefondsen in Balikpapan* (berkas-berkas mengenai penggunaan dana polisi rahasia di Balikpapan).

Di kota Leiden, lembaga yang menyimpan koleksi data sehubungan dengan sejarah Balikpapan adalah *Koninklijk Instituut voor Indische Taal, Land en Volkenkunde* (KITLV). Di lembaga ini sejumlah peta tentang Borneo Timur khususnya *Afdeeling Samarinda* dan daerah Balikpapan bisa ditemukan. Di samping itu juga ada sejumlah sumber data yang berkaitan dengan perkembangan sejarah kota Balikpapan.

Di Indonesia, pusat penyimpanan dan penelusuran data bagi kepentingan penelitian ini adalah Arsip Nasional RI (ANRI). Lembaga ini sebagai pusat penyimpanan arsip warisan pemerintah kolonial terbesar, memiliki sejumlah koleksi yang akan dikaji sebagai sumber informasi utama. Koleksi ini diklasifikasikan menurut

daerah pembuatan atau obyek arsip, maupun berdasarkan struktur kelembagaan yang berlaku pada saat arsip itu dibuat. Keduanya bisa digunakan saling melengkapi, mengingat kedua arsip ini memiliki nilai otentisitas dan originalitas yang sama tingginya.

Koleksi arsip kewilayahan yang langsung berkaitan dengan tema penelitian adalah *memorie van overgave* atau memori serah terima setiap kepala daerah pada akhir masa jabatannya yang diserahkan sebagai laporan pertanggungjawaban kerja kepada pemerintah pusat, sekaligus menjadi informasi penting bagi penggantinya. Dalam laporan ini, kepala daerah menguraikan kondisi daerahnya dan semua kejadian yang muncul di masa pemerintahannya. Untuk wilayah Zuid en Oost Borneo, *Memorie van overgave* serie 1e memuat koleksi laporan dari tingkat *Afdeeling*. Dalam hal ini memori bekas asisten residen Samarinda yang berlangsung dari tahun 1907 sampai tahun 1942 menjadi sumber informasi utama dan penting sebagai dasar rekonstruksi peristiwa yang diteliti ini.

Selain *Memorie van Overgave*, yang kebanyakan memberikan informasi tentang sosial dan ekonomi serta demografi, ANRI mempunyai khasanah arsip laporan daerah bidang politik. Jenis arsip ini sering disebut sebagai *Politiek Verslag* atau *Memorie van Overgave* serie 4e. Meskipun tidak dibuat oleh asisten residen atau kontrolir melainkan oleh petugas reserse setempat, laporan politik yang dimulai sejak tahun 1927 sampai tahun 1942 ini memberikan gambaran yang lengkap tentang peristiwa politik dan peristiwa lain yang terkait dengan kegiatan politik seperti pers, orang asing dan elite pribumi di tempat laporan itu dibuat. Untuk wilayah Balikpapan, *Politiek Verslag* yang melaporkannya adalah dari Zuid en Oost Borneo.

Koleksi ketiga dari ANRI yang sangat penting sebagai sumber informasi tentang sejarah Balikpapan adalah *Algemeene Secretarie*. Koleksi yang mencakup periode 1892-1942 ini dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan sektor kerjanya. Beberapa departemen atau dinas/instansi yang mewakili sektor ini memiliki koleksi arsip dalam bundel ini. Salah satunya yang penting adalah

bundel *Openbare Werken* atau Pekerjaan Umum. Dalam bundel yang mencakup arsip pembangunan infrastruktur baik sipil maupun militer ini, sejumlah arsip yang disusun secara periodik untuk melukiskan proses pembangunan infrastruktur kota Balikpapan bisa ditemukan.

Mengingat sektor pertambangan sangat dominan dan menentukan dalam perkembangan kota Balikpapan, arsip pertambangan yang terkumpul dalam bundel *Arsip Mijnwezen* (pertambangan) di ANRI menjadi salah satu obyek penelusuran. Koleksi arsip yang mencakup periode dari tahun 1880 hingga 1942 ini memberikan sejumlah berkas yang penting untuk digali informasinya sebagai bentuk deskripsi yang menjelaskan tentang kinerja dan peran aktif sektor ini serta pengaruhnya bagi perkembangan kota Balikpapan.

Jika di ANRI bundel arsip yang disimpan lebih banyak merupakan koleksi arsip rahasia (manuskrip), di Perpustakaan Nasional RI koleksi arsip yang dipublikasikan untuk umum ditemukan. Koleksi ini terdiri atas kumpulan arsip peraturan dan leksikografi. Kumpulan arsip peraturan yang diberlakukan sebagai pedoman dan ketentuan hukum era kolonial seperti *Staatsblad van Nederlandsch Indie* (Lembaran Negara Hindia Belanda), *Bijblad op het Staatsblad* (Tambahan Berita Negara) dan *Regeerings Almanak* (Almanak Pemerintah) bisa dijumpai di sini.

Jika kumpulan peraturan merupakan koleksi arsip terbitan yang bersifat pasif, koleksi leksikografi merupakan terbitan arsip untuk umum yang bersifat dinamis. Apa yang termasuk dalam koleksi arsip ini adalah laporan-laporan resmi yang diterbitkan. Di antaranya adalah *Koloniaal Verslag* (Laporan Kolonial) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kerja dan penerapan kebijakan kolonial oleh Menteri Koloni dalam sidang tahunan parlemen Belanda di Den Haag. Periode yang dicakup oleh bundel ini adalah antara tahun 1849 dan 1930. Setelah tahun itu, laporan ini tetap diterbitkan dengan nama *Indisch Verslag*. Selain koleksi *verslag* ini, juga diterbitkan sejumlah laporan oleh dinas atau badan usaha sebagai bentuk koleksi arsip leksikografi lainnya.

Di lembaga ini, juga terdapat suatu koleksi dari berita acara pengadilan era kolonial, baik mengenai kasus perdata maupun pidana, yang diperoleh dari seluruh proses litigasi yang berlangsung di berbagai pusat lembaga peradilan Hindia Belanda. Nama koleksi ini adalah *Indisch Tijdschrift van het Recht*. Beberapa kasus hukum yang diadili oleh *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) Zuid en Oost Borneo di Banjarmasin juga ditemukan di dalam koleksi ini, yang terbit mulai tahun 1897 sampai tahun 1942. Dari situ sejumlah informasi kasus hukum yang pernah terjadi di wilayah ini bisa diketahui dan diangkat sebagai suatu data rekonstruksi.

Koleksi majalah langka lainnya yang terbit pada era kolonial dan menjadi sumber informasi penting dapat dijumpai di Perpustakaan Nasional RI. Apa yang dimaksudkan sebagai majalah di sini bukan majalah populer melainkan majalah ilmiah. Nilainya sebagai sumber informasi terletak pada penulis dan bentuk tulisan yang dimuat di dalamnya. Artikel yang ada sebagai informasi ini ditulis oleh para ahli atau ilmuwan dan sering juga bekas pejabat yang pernah ditempatkan dan bertugas di daerah yang dituliskannya, termasuk di Kalimantan Timur. Dengan demikian artikel itu sering merupakan hasil kajian atau kesaksian dari seseorang yang mengalami sendiri peristiwanya. Di antara majalah langka yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah *Koloniaal Tijdschrift*, *Koloniale Studien* (sebelumnya *Yijdschrift van Binnenlandsch Bestuur*), *De Indisch Gids*, *Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap*, dan *Bijdragen tot Koninklijk Instituut*.

Di samping koleksi majalah langka, sumber informasi lain yang bisa diperoleh di Perpustakaan Nasional RI adalah surat kabar masa lalu. Lembaga ini mempunyai koleksi surat kabar mulai dari tahun 1810 hingga sekarang. Sejumlah surat kabar terbitan lokal termasuk yang diterbitkan di Banjarmasin, dengan cakupan berita seluruh Borneo Timur, bisa ditemukan di khasanah ini. Arti penting dari berita surat kabar adalah informasi yang diperoleh memiliki nilai otentisitas tinggi karena memiliki kedekatan temporal dengan peristiwanya. Di samping itu umumnya juga penulisnya merupakan saksi utama, meskipun tidak selalu berwenang untuk

menyampaikannya secara rinci atau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa.

Sebagai khasanah terakhir dari Perpustakaan Nasional RI, bisa disebutkan dalam hal ini adalah koleksi buku text sebagai sumber sekunder bagi penelitian. Buku yang dimaksudkan di sini bukan buku populer melainkan hasil kajian dari para ahli sebelumnya baik dengan fokus pada obyek yang sama maupun dengan obyek yang berbeda tetapi melibatkan obyek penelitian. Meskipun tidak memiliki nilai legalitas yang tinggi, karya ilmiah ini memiliki nilai akademis karena telah melewati proses verifikasi yang memadai. Sejumlah disertasi atau tesis yang telah diujikan dan diterbitkan bisa diklasifikasikan sebagai buku tekst.

F. Metodologi

Berdasarkan tema yang diangkat dalam penelitian ini, karya ini merupakan karya penelitian sejarah. Untuk melaksanakan penelitian dan mencapai tujuan sebagai suatu bentuk karya sejarah yang disusun secara ilmiah dan memiliki nilai verifikasi yang tinggi, langkah-langkah penelitian yang metodis harus dilakukan berdasarkan metode penelitian sejarah.

Sifat penelitian sejarah dibatasi oleh tiga hal, yaitu temporal, spasial dan tematis. Temporal menunjuk pada batasan waktu, mengingat sifat penelitian sejarah adalah diakronis yaitu tidak terpisahkan dengan periode sebelum dan sesudahnya serta menunjukkan kontinuitas pemaknaan. Dengan demikian hubungan antara peristiwa masa lalu berdasarkan kurun waktu dengan masa sekarang masih bisa dilacak kembali dan diangkat maknanya untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal ini sangat penting karena sejarah bertugas memberikan visi bagi periode setelah ini, yaitu periode masa depan.⁹

⁹ Djoko Suryo, *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern* (Yogyakarta, 2009, STPN Press), halaman 13. Pandangan ini sering disebut sebagai pandangan visioner, yaitu bahwa sejarah bermakna bukan hanya untuk masa lalu (*antiquarian*) tetapi juga bagi masa kini dan

Dengan adanya perbedaan waktu antara peristiwa dan peneliti yang akan mengkajinya, atau dengan kata lain peneliti tidak lagi bisa menyaksikan kembali peristiwa yang akan menjadi obyeknya dan tidak mungkin menampilkannya kembali, peneliti harus berpaling pada sumber data sebagai informasinya. Mengangkat makna dari informasi dalam data tersebut dan menjadikannya sebagai bentuk laporan akhir disebut dengan istilah rekonstruksi historis. Proses tersebut memerlukan tahap-tahap yang dirangkum dalam metode penelitian sejarah.

Tahap pertama adalah *Heuristik*, yakni tahap pengumpulan dan penelusuran data ke berbagai tempat penyimpanan data seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Dalam hal ini pengetahuan peneliti tentang di mana data itu tersimpan harus dimiliki untuk bisa bekerja secara efisien dan tepat guna. Kemampuan ini bukan hanya mengetahui di mana penyimpanan data, tetapi juga bagaimana bisa memperoleh data tersebut mengingat tidak semua data bisa terbuka bagi pelayanan publik.

Tahap kedua adalah kritik data. Semua data yang diperoleh dari proses *heuristik* akan melewati tahap kritik. Tahap kritik yang dimaksudkan di sini terdiri atas dua macam: kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern lebih menekankan pada aspek fisik data, sementara kritik intern menunjuk pada materi data. Kritik ekstern dilakukan berdasarkan kaidah otentisitas, originalitas, subyektivitas dan integritas. Otentisitas data menguji apakah data dibuat oleh orang yang berwenang membuatnya. Originalitas akan menentukan apakah data dibuat pada zaman yang tertera dalam data termasuk unsur-unsur yang mendukung pembuatannya. Subyektivitas menentukan tujuan pembuatan data, sementara integritas menguji kelengkapan data tersebut.

Kritik intern menggunakan tiga standard yaitu konteks data, isi data dan struktur dalam data. Konteks data menekankan relevansi data terhadap obyek penelitian, yaitu apakah data tersebut

masa depan. Oleh karena itu sejarah akan memberikan visi dan arah untuk memahami terjadinya peristiwa masa kini.

mempunyai informasi yang terkait dan diperlukan bagi rekonstruksi peristiwa. Isi data lebih menguji pada sisi fisik materi seperti bentuk tulisan, jenis huruf, kalimat dan sebagainya. Sementara itu struktur data lebih menyoroti perangkat korespondensi administratif, seperti laporan, surat dinas, surat pengantar, dan sebagainya.

Setelah melewati tahap kritik, tahap ketiga adalah interpretasi yaitu proses mengambil makna dari dalam data. Makna yang dikandung dalam struktur kalimat akan diangkat dan ditafsirkan. Untuk itu, pada tahap ini terdapat dua bagian yaitu analisis data dan sintesa. Analisis data merupakan proses pengambilan makna sebagai unit dasar dari sarana rekonstruksi peristiwa. Makna yang telah diambil dan berada dalam pemikiran sejarawan disebut sebagai fakta sejarah. Mengingat data tidak hanya terdiri atas satu lembar atau satu jenis melainkan bervariasi, tentu saja akan ditemukan banyak makna atau fakta dari hasil analisis. Agar bisa menjadi dasar rekonstruksi yang obyektif dan tepat, semua fakta ini harus dirangkai dan dicari titik temunya. Proses merangkai fakta ini disebut sebagai sintesa.

Setelah berhasil melakukan sintesa fakta, tahap terakhir dari metode sejarah akan dimasuki, yaitu tahap rekonstruksi. Tahap ini adalah menyajikan rangkaian fakta dalam susunan periodik dengan batas-batas temporal, spasial dan tematis yang jelas sehingga akan bisa diwujudkan dalam bentuk pengkisahan sebagai laporan hasil penelitian sejarah. Mengingat laporan ini bersifat ilmiah, bagian akhir dari laporan akan dilengkapi dengan kesimpulan sebagai hasil analisa.

Akan tetapi untuk melakukan rekonstruksi, diperlukan bentuk pendekatan atau metodologi. Manfaat dari metodologi ini adalah untuk mendasari dan mengarahkan rekonstruksi agar menjadi suatu bentuk karya ilmiah yang bisa diverifikasi dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu juga dengan menggunakan metodologi, kesimpulan yang ditarik oleh peneliti akan bisa dilakukan seobyektif mungkin. Metodologi juga akan menunjukkan arah dari penelitian ini yang melihat pada sejumlah aspek dari obyek.

Dalam proses rekonstruksi dari penelitian ini, metodologi naratif akan digunakan. Pertimbangan penggunaan metodologi naratif ini adalah kenyataan bahwa tema dari penelitian ini menyoroti perkembangan suatu obyek dalam rentang waktu tertentu. Untuk mengetahui arah dan dinamika perkembangan, diperlukan adanya kesinambungan fakta yaitu antara peristiwa yang satu dan peristiwa yang lain sehingga bisa ditemukan arah perkembangan tersebut. Untuk itu metodologi naratif dianggap paling sesuai karena menekankan pada tiga aspek.

Aspek pertama adalah bahwa metodologi naratif mengarahkan rekonstruksi dengan cara menghubungkan satu peristiwa dan peristiwa lain yang memiliki tingkat relevansi. Dengan kata lain, peristiwa yang dianggap tidak relevan dengan proses perkembangan tidak akan dimasukkan dalam rekonstruksi. Aspek kedua adalah saling keterkaitan antara peristiwa itu harus dapat dibuktikan sebagai hukum kausalitas, yaitu peristiwa yang satu akan menyebabkan peristiwa kedua sementara peristiwa kedua menyebabkan peristiwa ketiga dan seterusnya. Rangkaian peristiwa dengan dasar kausalitas ini harus dibingkai dalam batasan temporal yang ketat untuk menempatkannya dalam konteks zaman. Oleh karena itu metodologi naratif memasukkan unsur kronologis dalam aspek ketiganya. Dengan menggunakan metodologi naratif, bisa diketahui pola apa yang muncul dalam perkembangan sehingga akan membedakannya dari obyek lain atau dari periode yang berbeda.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari laporan hasil rekonstruksi akan terdiri atas beberapa bab berikut ini.

¹⁰ M.C. Lemon, *The philosophy of History* (London, 2003, Routledge), halaman 300. Metodologi naratif akan membedakan sejarah dengan kronik, karena ada dua unsur dalam rangkaian peristiwa yang tidak ditemukan dalam kronik, yaitu kausalitas dan pola.

Bab satu merupakan pendahuluan yang akan terdiri atas latar belakang dan permasalahan, kajian sumber dan sistematika penulisan.

Bab dua akan membahas perkembangan sistem administrasi pemerintahan di kota Balikpapan selama kurun waktu penelitian. Sistem ini penting karena akan memberikan gambaran tentang struktur yang berlaku dalam melingkupi batas-batas administratif masa itu.

Bab tiga mencakup perkembangan infrastruktur kota. Dalam hal ini akan dilihat juga perkembangan sarana komunikasi (jalan dan jembatan), bangunan air serta bangunan fisik yang mendukung kehidupan kota termasuk bangunan pendukung pemerintahan.

Bab empat menjelaskan tentang perkembangan pertambangan dan pengaruhnya di kota Balikpapan. Pertambangan khususnya minyak bumi merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh pada pertumbuhan kota Balikpapan serta perilaku kehidupan penduduknya. Di samping itu juga keterkaitan erat antara perluasan infrastruktur pertambangan dalam kaitannya dengan tata ruang kota.

Bab lima membahas perekonomian kota, termasuk sektor perdagangan, keuangan, mata pencaharian penduduk, transportasi, dan kesehatan. Semua ini menjadi komponen yang mendasari kehidupan ekonomi kota Balikpapan dan juga dalam hubungannya dengan kota-kota lain.

Bab enam mencoba untuk mengangkat aspek demografi kota. Dalam bab ini diupayakan bisa memberikan gambaran tentang penduduk termasuk dalam komposisi rasial serta imigrasi dan emigrasi yang terjadi. Juga dalam bab ini akan dibahas tentang perekrutan tenaga kerja dari luar untuk ditempatkan di pemukiman kota.

Bab tujuh meliputi pelayanan dan fungsi sosial yang ada di kota Balikpapan selama ini. Apa yang dimaksudkan di sini adalah pelayanan pendidikan, kesehatan, penerangan pertanian dan sebagainya.

Bab delapan merupakan penutup yang akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian.



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB II

SINGA MENGAUM DI TANAH MINYAK: SEJARAH POLITIK DAN BIROKRASI KOLONIAL

Periode yang dicakup dalam pembahasan karya ini adalah masa ketika struktur pemerintahan colonial Belanda ditegakkan dan berfungsi di Kota Balikpapan dan sekitarnya. Meskipun secara aspek spasial apa yang dimaksudkan adalah daerah kota, dari aspek politis dan administrative tidak mungkin memisahkan Balikpapan dari perkembangan politik makro yang terjadi di wilayah sekitarnya, terutama satuan politik yang langsung berkaitan dengan perkembangan sistem pemerintahan di kota ini. Keberadaan unit-unit politik yang besar dan berpengaruh, di samping tentu saja rezim colonial Belanda sendiri, tidak bisa diingkari memberikan dampak dan arah bagi perkembangan struktur birokrasi dan sistem administrasi yang berlangsung selama lebih dari empat decade.

Bab ini akan membahas tiga hal penting yang terkait dengan perkembangan kota Balikpapan selama periode ini dan menyiapkan fondasi bagi perkembangannya di masa setelah itu. Ketiganya adalah perkembangan politik yang terjadi, struktur pemerintahan, dan kemudian juga prasarana pendukung struktur pemerintahan. Mengenai bagian terakhir ini, keberadaan prasarana tidak bisa dilepaskan dari tata ruang atau morfologi kota Balikpapan. Dalam hal ini, infrastruktur yang mendukung kinerja administrative akan menghubungkan aspek fisik kota dan aspek ideal dari proses perkembangan politik. Untuk itu simbolisasi infrastuktur akan menjadi produk tetapi sekaligus menjadi sentra bagi keterkaitan antara keduanya.

A. Perkembangan Politik Daerah

Balikpapan berada di pantai timur Kalimantan yang sebelum intensifikasi dan pasifikasi oleh kekuatan politik colonial berada di bawah lingkup pengaruh dan kekuasaan kerajaan pribumi. Setidaknya dua kerajaan besar yang berada di pesisir Kalimantan ini, yakni Pasir dan Kutai, mempunyai keterkaitan dan pengaruh yang luas dengan perkembangan dan keberadaan kota Balikpapan sebelum abad XX.¹¹

Sejak awal abad XX, khususnya sejak keberhasilan militer Belanda untuk melakukan isolasi daerah konflik di pedalaman Kalimantan Tengah dan mencegah perluasannya ke pantai timur Kalimantan,¹² Kalimantan Timur terbuka bagi penetrasi politik dan ekonomi kekuatan kolonial Eropa. Pengaruh Inggris yang meluas di utara dan potensi alam yang muncul dari sektor kekayaan mineral telah menjadi dasar pertimbangan utama bagi perluasan pengaruh Belanda ke wilayah ini, yang diikuti dengan penegakkan birokrasi pemerintahan di sana.¹³

Pada saat intensifikasi penetrasi politik dimulai, Belanda menemukan bahwa struktur politik yang ada di Kalimantan Timur didominasi oleh sejumlah kerajaan. Balikpapan sebagai sebuah

Balai Pelestarian Nilai Budaya

- 11 Di wilayah pantai timur Kalimantan, ada sejumlah kerajaan yang berkuasa di sana. Mereka adalah Kutai, Pasir, Bulungan, dan Gunung Tabur. Meskipun pada tahun 1825 pemerintah Belanda telah melakukan pendekatan dengan kerajaan Kutai, sampai pertengahan kedua abad XIX tidak ada intervensi langsung dengan persoalan intern kerajaan-kerajaan ini atau intensifikasi hubungan. Focus Belanda di Kalimantan adalah pada pasifikasi bagian selatan, khususnya Kesultanan Banjarmasin yang bukan hanya merupakan kekuatan pribumi terbesar melainkan juga membuka pintu bagi eksploitasi atas pedalaman pulau ini. E.B. Kielstra, *De vestiging van het Nederlandsche gezag in den Indischen Archipel* (Haarlem, 1920, De erven F. Bohn), halaman 188-189
- 12 Sejak pertengahan abad XIX pergolakan di pedalaman Kalimantan yang merupakan kelanjutan dari peperangan di Banjarmasin pada tahun 1860-an, dipusatkan di sepanjang aliran sungai Barito. Perlawanan yang dipimpin oleh keturunan Pangeran Antasari dan para bangsawan Banjar ini berhasil ditekan setelah kesatuan marsose diturunkan oleh Belanda untuk menggempur mereka. Beberapa orang Banjar berusaha menghubungi Sultan Pasir untuk meminta bantuan, namun hubungan ini segera diketahui oleh Belanda dan Sultan Pasir diperingatkan agar tidak terlibat dalam persoalan ini. A.J. van der Aa, *Biographisch woordenboek der Nederlanden* (Haarlem, 1862, J.J. van Brederode), halaman 108.
- 13 *ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 13 April 1900 no. 2, bundel Algemeen Secretarie.* Dalam keputusan ini dimuat garis besar politik dan kebijakan pemerintah untuk wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dengan demikian sejak awal abad XX pemerintah Belanda telah memiliki rencana untuk memisahkan kedua wilayah itu dari Karesidenan Borneo Selatan dan Timur yang berpusat di Banjarmasin.

tempat yang mulai diperhitungkan oleh kalangan pejabat Eropa karena potensinya yang bisa mengundang intervensi asing, menjadi salah satu prioritas dalam perluasan pengaruh kolonial Belanda di Kalimantan Timur. Mengingat kota ini berada di bawah kekuasaan dan lingkup pengaruh Sultan Pasir, langkah pertama pemerintah Batavia adalah menjalin hubungan yang intensif dengan penguasa swapraja tersebut.



Injong van de boei van Bahik Papan

Oprems De G. Krause

**Pintu masuk ke teluk Balikpapan (12 maret 1928)
(Nederlandsch Indie Oud & Nieuw Jrg)**

Dengan dalih untuk mencegah perluasan konflik di pedalaman Kalimantan Tengah, Residen Belanda di Banjarmasin menghubungi calon Sultan Pasir, Pangeran Mangku Jayakesuma Adiningrat¹⁴, pada bulan Januari 1900. Hubungan ini dimaksudkan

¹⁴ Tokoh ini pada tanggal 28 Juli 1901 dikukuhkan menjadi Sultan dengan gelar Ibrahim Chaliludin dan menandatangani kontrak politik *akte van verband*. Sementara itu sebagai putra mahkota, pada bulan September 1900 telah diangkat Aji Nyesei, putra Pangeran Natakkesuma saudara Sultan, cucu dari Sultan Adam. *Koloniaal Verslag over het jaar 1902*, halaman 33.

untuk mendesak Pangeran itu agar bersedia mengakui kekuasaan Belanda di wilayahnya dan menjalin hubungan persahabatan dengan pemerintah Hindia Belanda. Setelah menerima jawaban positif dari penguasa Pasir, pemerintah di Batavia mengirimkan seorang pejabat ke sana yang ditempatkan sebagai seorang kontrolir di Pasir pada bulan Agustus 1900.¹⁵

Penempatan kontrolir ini menandai awal dari penerapan struktur birokrasi Eropa di wilayah Kesultanan Pasir. Secara administratif wilayah kekuasaan Sultan Pasir dijadikan sebagai *Onderafdeeling* Pasir,¹⁶ yang di bawah kontrolir tersebut, jangkauan pengawasan dan kewenangannya mencakup juga Balikpapan. Tugas dan tanggungjawab kontrolir tersebut adalah membuat aturan yang dianggap lebih baik, melalui kerjasama dengan pihak kesultanan, dalam hal pemungutan pajak dan kerja wajib. Dua sumber pendapatan utama bagi penguasa swapraja ini secara perlahan dialihkan penggunaannya bagi kepentingan pemerintah kolonial. Melalui pembayaran tunjangan tahunan yang dibuat lewat kontrak politik,¹⁷ pemerintah kolonial mengambil alih hak pemungutan pajak yang disetorkan ke kas daerah di bawah pengawasan kontrolir. Sementara itu penggunaan tenaga kerja wajib yang sebelumnya diarahkan bagi kepentingan Sultan dan kesultanan kemudian dimanfaatkan bagi pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung kepentingan kolonial, seperti pembuatan dan perawatan jalan, jembatan, bendungan, dermaga dan sebagainya.

Di samping kedua hal di atas, kewenangan kontrolir adalah melakukan pembenahan di bidang peradilan. Mengingat sebelumnya institusi peradilan dipegang langsung oleh Sultan dan diatur

15 *Koloniaal Verslag over het jaar 1901-1902, hoofdstuk C*, halaman 76-77. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga melakukan tindakan yang sama terhadap Sultan Kutai. Hasilnya adalah pada bulan Desember 1900 seorang kontrolir ditempatkan di Tenggarong, ibukota Kesultanan Kutai.

16 *ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 3 Augustus 1900 no. 1, bundel Algemeen Secretarie*. Bersama dengan penempatan kontrolir ini, juga ditempatkan suatu kesatuan aparat kepolisian bersenjata yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah di daerah Pasir.

17 *Koloniaal Verslag over het jaar 1901, hoofdstuk C*, halaman 35. Kontrak politik ini dibuat pada saat pengakuan dan sekaligus pelantikan Pangeran Mangku Jayakesuma sebagai sultan yang dilakukan oleh Residen Belanda di Banjarmasin atas nama Gubernur Jenderal.

dengan menggunakan aturan dalam hukum adat setempat, kontrolir diberi tugas untuk membentuk institusi peradilan sendiri yang menggunakan hukum positif Barat. Fungsi dari lembaga peradilan ini adalah untuk memutuskan perkara dan membuat vonis terhadap mereka yang tercatat sebagai kawula pemerintah (*gouvernements onderdaan*), termasuk jika tersangka memiliki urusan perkara dengan kawula swapraja. Dalam hal ini kontrolir juga bertindak sebagai hakim atau kepala pengadilan.

Akan tetapi kondisi tersebut mengawali pergolakan yang terjadi di kalangan masyarakat Pasir. Pada tahun-tahun pertama pemerintahan Sultan Ibrahim Chaliludin, kelemahan penguasa ini tampak jelas dan penetrasi politik kolonial berlangsung secara intensif. Terutama pemungutan pajak yang bergeser dari bentuk upeti hasil bumi menjadi pajak uang menciptakan pergolakan di dalam kehidupan sosial ekonomi penduduk Pasir. Hal ini mencapai puncaknya pada bulan Juli 1904 ketika sekelompok orang bergerak dari daerah pedalaman dan berangkat menuju Tanah Grogot. Tempat ini dianggap sebagai pusat kekuatan pemerintah kolonial, karena sebuah tangsi aparat kepolisian bersenjata yang bertugas untuk menjaga keamanan kontrolir dan sekaligus memantau pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk juga kontrak yang wajib dilaksanakan oleh Sultan, dibangun di sana. Tangsi ini segera menjadi sasaran penyerangan massa.¹⁸

Sultan sendiri, yang oleh kontrolir telah diberitahu tentang potensi kerawanan akibat keresahan kawulanya, tidak terlalu mengindahkan peringatan yang berulang kali diberikan, termasuk juga terhadap peristiwa penyerangan atas tangsi Belanda di Tanah Grogot. Kontrolir yang segera melakukan penyelidikan terhadap para pelaku penyerangan berhasil mengungkapkan keterlibatan sejumlah bangsawan dan bahkan ada salah seorang anak Sultan sendiri yang terlibat langsung dalam penyerangan itu. Hal ini dan sikap Sultan yang tidak merespon peringatan kontrolir menjadi bukti bahwa secara tidak langsung Sultan terlibat atau setidaknya

¹⁸ *Koloniaal Verslag over het jaar 1905, hoofdstuk C*, halaman 61.

mengetahui rencana penyerangan itu. Oleh karena itu sebagai tindak penghukuman pertama, Sultan tidak diturunkan atau ditahan melainkan diberi peringatan keras dan dijatuhi dengan denda sebesar f 300.

Hukuman tersebut tidak hanya memiliki pengaruh pada aspek legal tetapi juga membawa dampak dalam struktur administrasi pemerintahan. Pemerintah kolonial menyadari bahwa daerah yang berada di bawah pemerintahan Kontrolir Pasir, yang disebut sebagai *Afdeeling Pasir en Tanah Boemboe* terlalu luas. Sebagai akibatnya pengawasan oleh aparat pemerintah kolonial yang terbatas tidak mencukupi dan tidak menjangkau penduduk setempat. Untuk menanggulangi kesulitan itu, pemerintah kemudian mengambil keputusan bahwa Tanah Bumbu harus dipisahkan dari Pasir dan dijadikan sebagai daerah yang langsung diperintah oleh pemerintah, bukan oleh Sultan Pasir lagi.¹⁹

Di samping reorganisasi tersebut, pemerintah kemudian juga membentuk sebuah komisi khusus yang ditugasi untuk mempelajari pemerintahan atas daerah Kesultanan Pasir dan terutama mendengar atau melihat kondisi penduduk yang ada di sana. Komisi yang dibentuk pada akhir Oktober 1904 ini memiliki tugas untuk menyusun peraturan struktur pemerintahan yang baru ketika dibutuhkan akan dibentuk di daerah ini.²⁰ Dari hasil penyelidikan komisi ini di lapangan, mereka mengajukan usul kepada Gubernur Jenderal W. Rooseboom tentang tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah terhadap Kesultanan Pasir. Berdasarkan usul mereka dan atas masukan dari Direktur Pemerintahan, Rooseboom akhirnya memutuskan bahwa kecuali pemisahan daerah Tanah Bumbu, struktur pemerintahan di Kesultanan Pasir khususnya menyangkut sistem administrasi kolonial tetap dipertahankan seperti pada tahun 1901.²¹

19 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 10 Juni 1905 no. 37*, bundel *Algemeen Secretarie*. Terhitung sejak 1 Januari 1905, daerah Tanah Bumbu langsung diletakkan di bawah pemerintahan kolonial dan diperintah langsung oleh asisten residen Kutai.

20 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 27 October 1904 no. 2*, bundel *Algemeen Secretarie*.

21 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 9 Februarie 1905 no. 22*, bundel *Algemeen Secretarie*.

Bersama dengan perubahan di atas, wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kontrolir Pasir kemudian dialihkan menjadi di bawah asisten residen Kutai dan Pantai Timur Laut (*Noordoostkust*), termasuk juga Balikpapan. Suatu perubahan segera terasa di kota ini ketika berada di bawah Kutai secara administratif. Terutama hal ini akan bermanfaat bagi pengembangan daerah dan peningkatan kemakmuran penduduknya.

Berbeda dengan Pasir yang sejak itu selalu dilanda oleh pergolakan, Kutai merupakan daerah yang relatif tenang. Penguasa Kutai, Sultan Mohamad Alimudin Adil Khalifatul Muminin mempunyai wawasan yang luas bagi kemajuan daerahnya. Salah satu kebijakan yang diambil olehnya pada tahun 1905 adalah memulai pembangunan sebuah jalan yang memiliki lebar lima meter. Jalan ini mencakup lokasi beberapa kilometer yang menghubungkan kota Tenggarong dan Samarinda, dua kota yang akan mempunyai peran penting bagi perkembangan daerah Kalimantan Timur, bukan hanya dari aspek pemerintahan kolonial melainkan juga bagi penduduk setempat.²²

Bersamaan dengan pembangunan jalan di atas, Samarinda menjadi sebuah kota yang semakin penting karena menjadi tempat kedudukan asisten residen Kutai dan Pantai Timur Laut di sana. Sesuai dengan statusnya, kota ini dikembangkan menjadi pusat pemerintahan daerah yang memiliki jaringan hubungan baik darat maupun laut ke sejumlah penjurur, termasuk dengan pusat pemerintahan kesultanan di Kutai dan juga dengan kota Balikpapan. Jaringan jalan yang dibangun oleh pihak Kesultanan Kutai jelas bermanfaat bagi kontrol lebih jauh oleh asisten residen terhadap Sultan dan aktivitasnya, sementara pembukaan sekolah Eropa bagi anak-anak Eropa dan penduduk pribumi lain di kota Samarinda menambah pesona kota ini sebagai tempat berinteraksi.

22 *Koloniaal Verslag over het jaar 1906*, halaman 43. Di samping pembangunan daerahnya, Sultan ini juga mengakhiri penutupan sungai bagi perdagangan dan pemungutan cukai tinggi pada produk hutan yang diambil dari wilayah kekuasaannya. Untuk mengganti hilangnya penghasilan itu, melalui *akta van verband*, Sultan menerima tunjangan tahunan dari pemerintah. Juga aspek keamanan dijamin terhadap perluasan kerusuhan di Pasir dengan kesepakatan antara dua Sultan pada tanggal 23 Maret 1904 dan disahkan oleh pemerintah pada tanggal 31 Juli 1904.

Salah satunya terbukti dari keinginan Sultan Kutai mengirimkan putranya Aji Mohamad Parikesit untuk belajar ke sana, agar mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan sebelum menduduki jabatan sebagai pengganti Sultan.²³

Selain pembangunan daerah, Sultan Kutai juga melakukan pembagian wilayahnya dalam distrik, atau *penjawatan*. Ada sembilan distrik yang berada di bawah pemerintahannya, yang dipilih oleh para penguasa adat. Para penguasa ini dipilih dari kalangan kerabat raja oleh Sultan dan dilengkapi dengan akta pengangkatan. Penunjukan dan pengangkatan mereka dilakukan dengan pengambilan sumpah secara agama Islam.²⁴ Sementara itu dari pemerintah kolonial, pembagian wilayah oleh Sultan ini juga dimanfaatkan bagi pembagian distrik baru yang berada di bawah asisten residen. Pembentukan distrik ini diikuti dengan pembentukan kas daerah yang berfungsi untuk menampung penghasilan lokal (*landschapkas*). Kas daerah ini ditangani oleh seorang petugas administrasi khusus yang berwenang untuk itu dan dananya digunakan untuk membiayai berbagai program daerah seperti subsidi pendidikan dan kesehatan, perawatan dan perbaikan jembatan dan jalan serta juga menggaji staf pemerintahan distrik.²⁵

Banyaknya sektor yang bisa didanai dari kas daerah Kutai ini disebabkan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh dalam kas ini terutama karena royalty dari sector pertambangan minyak.²⁶ Bahkan Menteri Koloni sendiri mengakui dengan menyampaikannya dalam laporan tahunan pertanggungjawabannya di depan parlemen

23 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 28 Augustus 1906 no. 32*, bundel *Algemeen Secretarie*. Parikesit adalah satu dari tiga orang putra Sultan yang dikirim untuk belajar di sekolah Eropa di Samarinda ini. Juga para putra Sultan Gunung Tabur belajar di sekolah ini.

24 *Koloniaal Verslag 1907 hoofdstuk C*, halaman 56. Tidak disebutkan daerah mana saja yang ditetapkan sebagai *penjawatan*.

25 *Koloniaal Verslag 1909, hoofdstuk C*, halaman 61.

26 Burhan D. Magenda, *East Kalimantan: the decline of a commercial aristocracy* (Singapore, 2010, Equinox Publ.), halaman 43. Royalty minyak itu juga membuat para sultan di Kalimantan Timur menjadi kaya raya, seperti halnya para Sultan di Sumatra Timur melalui sector perkebunan. Meskipun kekuasaan mereka semakin dibatasi, kehadiran pemerintah dan modal swasta Belanda justru menambah kekayaan mereka dan otomatis gaya hidup dan gengsinya di mata masyarakat umum. Hal ini meluas pada posisi tawar elite bangsawan Kalimantan Timur dalam hal perkawinan.

Belanda (*Tweede Kamer van Staten Generaal*). Tentang kas daerah Kutai ini, dikatakan sebagai berikut

*Van de landschapskassen in dit gewest is die van Koetei wegens hare ruime inkomsten uit de door de Bataafsche Petroleummaatschappij verschuldigde royalties en uit de door den sultan geheven tjoeki, de belangrijkste. De overige landschapskassen zijn van mindere beteekenis, doch het is te verwachten dat zij door de nieuwe regelingen op belastinggebied in bloei zullen toenemen.*²⁷

Dari kas-kas daerah di wilayah ini, kas Kutai karena besarnya penghasilan dari royalti yang dibayarkan oleh Perusahaan Minyak Bumi Bataf dan dari cukai yang dipungut oleh Sultan, adalah yang terpenting. Kas-kas daerah lain tidak begitu penting, tetapi diharapkan agar melalui peraturan baru di bidang perpajakan kas itu akan tumbuh.

Dari pidato Menteri Koloni tersebut tampak bahwa cukai yang dipungut Sultan juga termasuk dalam kas daerah. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kas daerah merupakan penghasilan terpadu antara pemungutan menurut aturan adat dan penghasilan yang diperoleh lewat penerapan aturan administratif kolonial. Ini berarti bahwa Sultan Kutai sendiri tidak mempunyai kewenangan lagi secara mutlak atas penggunaan kas daerah dan penghasilannya sendiri tergantung dari pembayaran oleh kas tersebut.

Langkah lain yang diambil oleh pemerintah colonial untuk melemahkan kekuatan para penguasa swapraja ini adalah dengan memetakan kembali batas-batas wilayah mereka untuk disesuaikan dengan pembagian wilayah administrative colonial yang akan diperbaharui. Pada awal tahun 1914, untuk mewujudkan kepentingan itu pemerintah mendesak para Sultan Pasir dan Kutai agar menerima permintaan pemerintah bagi penetapan batas-batas baru wilayah kekuasaan mereka, sehingga masing-masing bisa ditetapkan menurut batas-batas pembagian distrik dalam struktur pemerintahan colonial. Setelah adanya persetujuan dari

²⁷ *Koloniaal Verslag over het jaar 1910, hoofdstuk C, halaman 45.*

kedua sultan ini, pemerintah membentuk sebuah tim yang diberi instruksi untuk itu.

Tim ini melakukan pengukuran di lapangan pada bulan Maret 1914 dan mengetahui bahwa batas-batas yang ada selama ini, dengan bertumpu pada batas kedua kerajaan sering menimbulkan masalah karena ketidakjelasan. Hal ini disebabkan oleh penarikan garis batas yang lebih banyak dilakukan dengan memanfaatkan kondisi alam seperti aliran sungai, gunung, bukit dan sebagainya yang berpotensi mengalami perubahan. Resiko yang terjadi umumnya adalah tidak adanya batas yang jelas sehingga sering menimbulkan pelanggaran batas oleh masing-masing kawula kesultanan atau bahkan terjadi sengketa perbatasan antara keduanya. Tim yang dibentuk oleh pemerintah ini kemudian melakukan pengukuran dan menentukan dengan pendekatan topografi, yaitu menggunakan titik-titik triangulasi. Hasil pengukuran kemudian dikirimkan kepada pemerintah di Batavia disertai pertimbangan yang berguna bagi perubahan batas-batas itu. Berdasarkan hasil ini, pemerintah Belanda kemudian memutuskan bahwa rancangan batas antara wilayah Kesultanan Kutai dan *Onderafdeeling* Pasir yang sudah disusun disodorkan kepada Sultan Kutai untuk disetujui. Setelah menerima persetujuan dari Sultan Kutai, pada tanggal 10 Juli 1914, batas baru itu ditetapkan dan diumumkan.²⁸

Sultan Kutai sendiri tidak bisa memberikan banyak respon karena ketergantungannya kepada pemerintah Belanda yang sangat besar. Di samping pembatasan wilayah dan sumber keuangannya, yang sekarang diatur dan dikontrol oleh kas daerah, Sultan juga merasakan pengaruh pemerintah atas kehidupan keluarganya. Putra mahkota, calon pewaris tahta, bersama empat orang saudaranya dititipkan kepada pemerintah untuk dididik di sekolah Belanda di Batavia. Hal ini membuat control Belanda terhadap kehidupan keluarga dan calon pengganti penguasa Kutai

28 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 14 Juli 1914 no. 24*, bundel *Algemeen Secretarie*.

menjadi sangat besar dan membawa dampak pada pembuatan kebijakan dalam memerintah daerahnya.²⁹

Dari perubahan di atas, Balikpapan juga mengalami dampaknya secara langsung. Pembentukan satuan administrative baru ini kemudian diikuti dengan penempatan beberapa orang pejabat baru yang menduduki posisi yang sebelumnya tidak ada. Salah satu dari perubahan ini adalah penempatan seorang pejabat di Balikpapan yang memerintah daerah tersebut sebagai pejabat sementara (*posthouder*) pada tahun 1914. Pada bulan November 1914 seorang pejabat sementara ini ditempatkan di Balikpapan, yang memiliki kewenangan untuk memerintah dan mengawasi kepentingan pemerintah di kota ini dan sekitarnya.³⁰

Instruksi yang diberikan kepada pejabat ini adalah terutama untuk menangani persoalan pendaftaran hak milik atas kapal dan perahu di kota Balikpapan dan sekitarnya (*in- en overschrijven van den eigendom van scheppen en vaartuigen*).³¹ Dari instruksi tersebut bisa diketahui bahwa prioritas tugas dari pejabat baru ini terbatas pada bidang perkapalan dan perahu. Dengan kata lain tugas utama pejabat ini adalah menggantikan fungsi wakil kepala pelabuhan (*onderhavenmeester*) yang mengawasi pergerakan perkapalan di pelabuhan Balikpapan. Terutama ini terjadi ketika di sekitar perairan Balikpapan mulai dibangun kompleks pergudangan yang menunjukkan dinamika pertumbuhan pelabuhan ini, khususnya fungsinya bagi kepentingan investasi modal baik pemerintah maupun swasta.

Dalam hal ini bisa diduga bahwa focus utama perhatian pemerintah adalah masih terbatas pada berfungsinya pelabuhan bagi kepentingan perkapalan, daripada kota Balikpapan itu sendiri yang dianggap semakin kompleks.³² Namun demikian, penempatan seorang *posthouder* ini mulai menandai awal terbentuknya struktur birokrasi colonial di kota Balikpapan.

29 *Koloniaal Verslag over het jaar 1915, hoofdstuk C*, halaman 30.

30 *ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 12 November 1914 no. 63*, bundel *Algemeen Secretarie*.

31 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1914 no. 646.

32 *Staatsblad van Nederlandsch Indië*, tahun 1910 nomor

B. Pembagian Wilayah Administratif

Apa yang erat kaitannya dengan perkembangan politik di wilayah ini adalah sejarah pembagian wilayah administrative pemerintahan. Keterkaitan yang menghubungkan keduanya adalah proses penegakkan dominasi politik dan pembentukan struktur birokrasi colonial di sebuah wilayah yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan raja-raja pribumi (*zelfbestuur*). Jadi, ketika pemerintah colonial mulai menegakkan pengaruh politiknya di Balikpapan, di tempat ini sudah terbentuk struktur yang mapan (*political established structure*) dan struktur yang dibangun oleh pemerintah bertumpu dan akhirnya menggantikan struktur lama yang dibentuk oleh kekuasaan tradisional sebelumnya.

Struktur pertama yang dibentuk oleh pemerintah colonial untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur adalah Karesidenan Borneo Selatan dan Timur (*residentie van Zuid- en Oostafdeeling Borneo*) yang berpusat di Banjarmasin.³³ Satuan administrative yang berada di bawah pimpinan residen ini dibentuk pada tahun 1877, lima belas tahun setelah perdamaian ditegakkan di Banjarmasin dan dominasi politik colonial terjamin di sana. Kondisi ini segera diikuti oleh pembentukan birokrasi colonial yang berada di bawah residen. Sementara itu secara administrative, karesidenan ini dibagi kembali menjadi sejumlah unit pemerintahan yang lebih kecil yang disebut dengan *afdeeling*. Setiap *afdeeling* ini dipimpin oleh seorang asisten residen.³⁴

Dari *afdeeling* yang ada, di antaranya adalah *afdeeling* Banjarmasin *en Ommelanden* (daerah sekitarnya), Amuntai, Martapura, Tanah Dusun dan Tanah Dayak, Sampit, Kutai dan Pantai Timur Borneo. Wilayah *Afdeeling* Kutai dan Pantai Timur Borneo mencakup hampir sebagian besar wilayah kekuasaan para sultan atau swapraja (*zelfbestuur*). Wilayah ini juga merupakan daerah

33 Sebenarnya pembentukan karesidenan ini merupakan suatu bentuk pemekaran wilayah yang telah ada sejak tahun 1849. Melalui *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1849 nomor 8 pemerintah colonial Belanda membentuk Karesidenan Borneo Barat dan Selatan-Timur (*Residentie van Wester afdeeling van Borneo en Zuid-Ooster afdeeling van Borneo*).

34 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1877 nomor 32.

paling jauh yang terletak dari ibukota karesidenan di Banjarmasin, di samping juga langsung berhadapan dengan wilayah koloni di luar Hindia Belanda. Oleh karena itu pemerintah tidak menempatkan seorang asisten residen melainkan seorang *civiel gezaghebber* di ibukotanya, Samarinda.³⁵

Mengingat kurangnya jumlah aparat yang harus ditempatkan di daerah ini oleh pemerintah colonial, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang muncul di sana, banyak orang pribumi yang direkrut atau birokrat kerajaan yang diminta kerjasamanya oleh aparat colonial setempat. Terutama mereka sangat dibutuhkan ketika ada kebutuhan pembangunan proyek seperti pengerahan tenaga kerja wajib untuk merawat atau memperbaiki jalan, jembatan, kantor bagi *gezaghebber*, pelabuhan dan sebagainya. Terutama ini terjadi di tempat kedudukan *civiel gezaghebber* di Samarinda.³⁶

Setelah berjalan hampir sepuluh tahun, bersamaan dengan semakin intensifnya perluasan kekuasaan politik dan pengaruh Belanda ke pedalaman Kalimantan yang menjadi kewenangan residen Borneo Selatan dan Timur, pemerintah pusat atas dasar pertimbangan dari penguasa setempat dan Direktur Pemerintahan melihat bahwa wilayah kekuasaan residen ini sangat luas. Bersamaan dengan bertambahnya jumlah pegawai yang siap untuk dikirim dari Jawa ke wilayah Kalimantan ini, pemerintah memandang perlu adanya reorganisasi pemerintahan di Borneo Selatan dan Timur.³⁷

Setelah mendapatkan persetujuan dari Den Haag dan mendengar pertimbangan dari Dewan Hindia Belanda, pemerintah di Batavia memutuskan untuk melakukan perubahan dalam pembagian wilayah di tingkat *afdeeling*. *Afdeeling Koetei en Oostkust Borneo* kemudian diubah menjadi *Afdeeling Oost Borneo*. Perubahan

35 *Civiel gezaghebber* adalah jabatan coordinator pemerintahan daerah yang diduduki oleh seorang perwira militer. Biasanya jabatan ini dibentuk ketika pemerintah Belanda memandang bahwa daerah tersebut masih rawan dan perlu diperintah dan dikontrol oleh militer. Dengan kata lain, perwira militer yang ditugasi untuk menjadi komandan pengamanan daerah itu merangkap sebagai penguasa sipil yang bertanggungjawab melaksanakan administrasi pemerintahan. Dasar dari penempatan para perwira ini adalah *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1870 nomor 28.

36 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal*, 2 Februari 1877 no. 5, bundel *Algemeen Secretarie*.

37 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal* 30 November 1886 no. 4, bundel *Algemeen Secretarie*.

nama ini menegaskan adanya perubahan prioritas dalam kebijakan, dengan penghilangan nama Kutai yang merupakan wilayah *zelfbestuur*. Ini berarti bahwa dominasi colonial lebih kuat daripada sebelumnya dengan menyisihkan peran swapraja. Oleh karena itu penempatan birokrasi yang lebih lengkap dari pemerintahan sipil segera dilakukan. Sebagai konsekuensinya, jabatan *civiel gezaghebber* ditarik dan digantikan oleh pejabat sipil yaitu asisten residen sebagai kepala pemerintahan.³⁸

Penegakkan jajaran birokrasi sipil colonial di wilayah Kalimantan Timur ini bukan hanya merupakan suatu perubahan orientasi, tetapi juga menandai peningkatan kepentingan intensifikasi penerapan kebijakan colonial. Setelah berjalan beberapa tahun, salah satu kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah di Batavia adalah penerapan pajak kepada pemerintah colonial di daerah yang diperintah langsung. Pajak ini diperlukan karena dalam birokrasi baru itu, pemerintah banyak memanfaatkan elite local seperti para kepala kampung untuk menjadi pelaksana tugas dari aparat colonial. Mengingat mereka tidak lagi tunduk kepada para Sultan dan elite tradisional lainnya, pemerintah wajib memikirkan kesejahteraan mereka dalam bentuk gaji.³⁹

Namun demikian di lapangan kondisinya tidak memungkinkan penerapan kebijakan pemungutan pajak oleh aparat setempat. Di samping dibutuhkan tenaga khusus untuk itu, juga cara pemungutan yang berbeda dengan model upeti kepada para sultan di masa sebelumnya memerlukan sistem khusus. Ketika dicoba untuk melakukan pemungutan, bukan hanya banyak penduduk yang tidak bersedia membayar tetapi juga aparat pribumi membangkang dengan cara menyelewengkan jumlah penyeteran pajak kepada pemerintah. Hal ini dengan mudah dilakukan karena tidak ada perhitungan standard tentang jumlah pajak dan juga tidak terdapat pengawasan yang memadai. Asisten residen Samarinda

38 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1886 nomor 227.

39 *ANRI, Missive Gouvernment Secretaris 10 Mei 1893, bundel Algemeen Secretarie.*

menyampaikan semua ini dalam laporannya kepada Residen Boers di Banjarmasin tentang kemacetan dalam pemungutan pajak.⁴⁰

Sebaliknya pemerintah pusat di Batavia justru meminta kepada aparat setempat untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan pembangkangan itu. Pada prinsipnya Gubernur Jenderal C.H.A. van der Wijck menegaskan bahwa pemungutan pajak tetap menjadi prioritas pemerintah di luar Jawa, karena menjadi sumber pendapatan utama untuk menutup pengeluaran administrasi di sana.⁴¹ Untuk mengatasi kesulitan di lapangan, Van der Wijck bahkan menjanjikan kepada Boers aparat yang lebih banyak dan untuk itu memutuskan dilakukan reorganisasi pemerintahan.

Dalam reorganisasi pemerintahan yang dilakukan pada akhir Mei 1898 ini,⁴² Karesidenan Borneo Selatan dan Timur kembali dibagi dalam sejumlah *afdeeling*. Salah satunya adalah *Afdeeling Kutei dan Pantai Timur Laut Borneo (Koetei en Noordoostkust Borneo)*, yang mencakup wilayah bekas *Afdeeling Borneo Timur*, dan termasuk juga kota Balikpapan di dalamnya. Setidaknya ada dua hal yang terkandung dalam pembentukan *afdeeling* ini. Pertama, pencantuman Kutai ke dalam namanya menyiratkan perubahan pandangan pemerintah Belanda bahwa aparat pribumi swapraja tidak bisa diabaikan dalam penerapan kebijakan mereka di wilayah ini. Kedua, seiring dengan meningkatnya ketegangan dengan pihak Inggris di perbatasan utara wilayah koloninya di Kalimantan, pemerintah Belanda memandang perlu menegaskan wilayah kekuasaannya yang terletak di bagian timur laut pulau itu meskipun masih berada di bawah pemerintahan para penguasa swapraja.⁴³

40 ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris 28 Januari 1898 no. 228*, bundel *Algemeen Secretarie*.

41 ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris 30 Mei 1898 no. 1233*, bundel *Algemeen Secretarie*.

42 ANRI, *Belsuit van Gouverneur Generaal 30 Mei 1898 no. 3*, bundel *Algemeen Secretarie*.

43 Sejak tahun 1880-an kehadiran Inggris di Borneo Utara dan tanda-tanda ekspansi mereka ke selatan telah mengkhawatirkan orang-orang Belanda, baik di Hindia maupun di Eropa. Terutama hal ini terjadi karena focus ekspansi Inggris ini adalah mengincar sumber-sumber penambangan minyak bumi yang sangat potensial bagi perkembangan industri di Barat pada akhir abad XIX. Meskipun sudah ada perjanjian antara kedua pihak pada tahun 1881, tindakan Inggris yang menyatakan bahwa daerah Borneo Utara menjadi protektoratnya pada tahun 1891 mendorong

Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, pada tanggal 13 April 1900 Gubernur Jenderal W. Rooseboom mengeluarkan keputusan untuk membagi wilayah *Afdeeling* Kutei dan Pantai Timur Laut Borneo.⁴⁴ Wilayah yang dicakup oleh *Afdeeling* ini dibagi dalam empat *onderafdeeling* yaitu:

- a. Kutai, yang mencakup daerah *zelfbestuur* Kutai dan termasuk juga Balikpapan, di bawah langsung asisten residen dengan kedudukan di Samarinda;
- b. Mahakam Hulu yang mencakup daerah aliran sungai Mahakam sampai muaranya Muyub, di bawah kontrolir yang berkedudukan di Tepuh.
- c. Berau, yang membawahi daerah *zelfbestuur* Gunung Tabur dan Sambaliung di bawah kontrolir dengan kedudukan di Tanjung Redeb;
- d. Bulungan, yang mencakup wilayah *zelfbestuur* Bulungan di bawah kontrolir dengan kedudukan Tanjung Selor.⁴⁵

Reorganisasi pemerintahan di atas bukan merupakan yang terakhir, melainkan menjadi awal dari penegakkan struktur birokrasi colonial di Kalimantan Timur. Bersama dengan berakhirnya pergolakan yang terjadi di daerah Kalimantan Tengah pada tahun 1907. Bersama dengan situasi keamanan yang kondusif, ditandai dengan meningkatnya interaksi ekonomi oleh kaum pendatang ke pedalaman Kalimantan, proses dinamika kehidupan social ikut terpengaruh. Pengaruh terbesar muncul dari sector perekonomian ketika para pedagang perantara dari kalangan etnis Tionghoa diijinkan melakukan pelayaran ke sungai-sungai besar di wilayah pedalaman Kalimantan untuk melakukan transaksi.⁴⁶

Belanda untuk segera memperhatikan daerah perbatasannya secara lebih cermat. Hal ini terjadi mengingat beberapa pelaku usaha Inggris tampaknya tidak begitu mempersoalkan Traktat Borneo tersebut tetapi berusaha menjalin hubungan individu dengan beberapa Sultan dan bangsawan yang berada di wilayah pengaruh Belanda. Anon., "De grensregeling in Noord Borneo" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië*, jilid II, tahun 1891, halaman 68.

44 ANRI, *Besluit van Gouvernør Generaal 13 April 1900, no. 2, bundel Algemeen Secretarie.*

45 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1900 nomor 130.

46 ANRI, *Brief van Directeur der Fincantieel aan Gouverneur Generaal 11 Maart 1908 no. 4321, bundel Algemeen Secretarie.*

Perkembangan di atas segera diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan baru oleh pemerintah colonial. Selain aturan yang mengatur pemukiman dan ijin bergerak bagi para pedagang Tionghoa ini, pemerintah juga menerbitkan peraturan pada tanggal 20 Juli 1907 mengenai pembayaran cukai ekspor-impor dan monopoli beberapa produk. Garam, candu dan minuman keras yang merupakan produk monopoli pemerintah termasuk dalam sasaran peraturan ini dan pembatasan bagi perdagangannya oleh para pedagang itu diberlakukan.⁴⁷

Peningkatan dinamika social ekonomi di pedalaman ini mendorong perubahan dalam bidang sistem administrasi pemerintahan, khususnya pembagian wilayah. Meningkatnya eskalasi perdagangan di sepanjang sungai Barito, yang diikuti dengan pertumbuhan kota-kota yang dilewatinya seperti Muara Teweh dan Puruk Cahu, telah memunculkan pertimbangan pada para pembuat kebijakan colonial untuk menyesuaikan pembagian baru dalam wilayah administrasi. Tumbuhnya kegiatan ekonomi yang memanfaatkan jaringan pelayaran sungai ini mendorong pemerintah untuk membuka sejumlah pos pabean baru yang disesuaikan dengan kondisi alam. Mengingat kedekatan jarak dan jangkauan antara pantai selatan ke pedalaman Kalimantan dan pantai timur, pemerintah memutuskan bahwa kantor utama cukai ekspor-impor yang menerima penyeteroran dari semua pos ini dipusatkan di Tanah Grogot (Pasir) dan Tanjung Selor (Bulungan), keduanya di Kalimantan Timur. Hal ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1908.⁴⁸

Struktur ini hanya berlangsung selama lima tahun, karena pada bulan Oktober 1914 pemerintah Batavia memandang perlu adanya perubahan baru. Dasar pertimbangannya adalah bahwa sejumlah tempat perlu diperhatikan untuk intensifikasi dan birokratisasi pemerintahan, khususnya melihat adanya potensi bagi pengembangan wilayah. Terutama hal ini berlaku untuk *Afdeeling*

47 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1907 nomor 323.

48 Harto Juwono dan Yosephine Hutagalung, *Perang Barito 1900-1907: Perlawanan Panglima Batur* (Yogyakarta, 2008, Banjar Aji Production), halaman 229.

Kutei dan Pantai Timur Laut Borneo yang dianggap mempunyai prospek masa depan yang penting dan strategis, sehingga harus benar-benar diatur secara administratif demi efektivitas pemerintahan dan ekonominya.⁴⁹

Dalam perombakan ini, *afdeeling* yang kemudian disebut sebagai *Afdeeling Samarinda* sesuai dengan pusat pemerintahannya dibagi dalam lima *onderafdeeling*, yaitu:

1. Kutai Timur, yang mencakup ibukota Samarinda, bagian timur *zelfbestuur* Kutai dan pemerintahan distrik otonom di Balikpapan, Samarinda, Bengalon dan Sangkulirang serta Onderdistrik otonom di Sanga-Sanga.
2. Kutai Barat, yang mencakup bagian barat *zelfbestuur* Kutai
3. Mahakam Hulu yang mencakup distrik Mahakam Hulu Barat dan Timur
4. Berau, yang terdiri atas daerah *zelfbestuur* Sambaliung dan Gunung Tabur
5. Bulungan, yang mencakup daerah *zelfbestuur* Bulungan.⁵⁰

Pembagian di atas mengangkat Balikpapan untuk pertama kalinya mendapatkan status sebagai unit administratif otonom yaitu sebagai daerah distrik. Langkah ini diambil oleh pemerintah sebagai suatu bentuk uji coba bagi pelaksanaan pemerintahan di kota ini. Mengingat daerah ini dianggap masih baru dan berpotensi perlu untuk mengaturnya di bawah kontrol yang ketat. Untuk itu seperti halnya daerah lain di luar Jawa, jabatan *posthouder* yang sebelumnya ditempatkan di sana dihapuskan dan digantikan oleh seorang perwira komandan setempat yang memangku jabatan sebagai *civiel gezaghebber*. Pejabat ini dikaryakan dari fungsinya sebagai seorang komandan militer dengan kedudukan dan tunjangan yang disetarakan dengan kontrolir pembantu asisten residen⁵¹, meskipun dalam prakteknya *gezaghebber* di Balikpapan

49 ANRI, *Besluit van Gouverneur generaal 15 October 1914 no. 26*, bundel *Algemeen Secretarie*.

50 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1914 no. 661.

51 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1908 nomor 72.

ini masih berstatus membantu kontrolir *Onderafdeeling* Kutai Timur di Samarinda.

Reorganisasi pemerintahan terakhir di jaman kolonial berlangsung pada akhir tahun 1921. Bagi pemerintah, seiring dengan semakin luas kontrol yang diterapkan dan semakin kompleks persoalan yang muncul di wilayah pemerintahannya, pembagian administratif yang lama tidak lagi bisa dipertahankan. Di samping itu juga semakin banyak jumlah pegawai yang bisa dikirim dan ditempatkan di daerah, memotivasi pemerintah untuk menegakkan birokrasi administratif yang lebih intensif dan memadai di daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan baru yang muncul.⁵²

Seluruh struktur Karesidenan Borneo Selatan dan Timur mengalami perombakan dalam hal pembagian wilayah administratif. Sejumlah jabatan baru disediakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul, dan bersama dengan itu juga sejumlah anggaran yang disediakan. Pada masa ini, seluruh karesidenan ini dibagi dalam enam *afdeeling* baru. Salah satu *afdeeling* ini adalah *Afdeeling* Samarinda, yang sebelum tahun 1914 disebut *Afdeeling* Kutai dan Pantai Timur Laut Borneo. Satuan administratif yang berada di bawah *Afdeeling* ini, yaitu *Onderafdeeling*, ada tujuh, yaitu

1. Kutai Timur, yang mencakup ibukota Samarinda, bagian timur *zelfbestuur* Kutai, Sebrang dan Sangkulirang serta Onderdistrik Sangga-Sangga, Bontang dan bengalon yang diperintah langsung oleh asisten residen di Samaringa;
2. Balikpapan, yang mencakup distrik Balikpapan dan Onderdistrik Samboja, diperintah oleh seorang kontrolir pemerintahan dengan kedudukan Balikpapan;
3. Kutai Barat, yang mencakup bagian lain dari wilayah *zelfbestuur* Kutai, diperintah oleh seorang kontrolir dengan kedudukan di Tenggarong.

⁵² ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 17 December 1921 no. 3*, bundel *Algemeen Secretarie*.

4. Mahakam Hulu yang mencakup distriik Mahakam di bawah kontrolir dengan kedudukan di Long Iram.
5. Berau, yang mencakup daerah ibukota Berau, daerah *zelfbestuur* Sambaliung dan Gunung Tabur, diperintah oleh kontrolir yang berkedudukan di Tanjung Redeb.
6. Bulungan, yang mencakup daerah *zelfbestuur* Bulungan dikurangi daerah Apo Kayan, di bawah kotrolir dengan kedudukan Tanjung Selor. Di bawah kontrolir terdapat dua *posthouder* yang membawahi daerah Tidung (aliran sungai Sesayap dan Sembakung) dan satu lagi membawahi Pujungan dan Lepo Maut
7. Apo Kayan, yang mencakup daerah ini di bawah seorang perwira angkatan darat (*gezaghebber*) dengan kedudukan Long Nawang.⁵³

Pembagian administratif yang baru ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam orientasi pemerintahan Batavia terhadap Balikpapan. Balikpapan bukan hanya dijadikan sebagai suatu unit administratif yang terpisah dari Samarinda, melainkan juga diperintah oleh seorang kontrolir pemerintahan (*controleur bij het Binnenlandsch bestuur*), yang benar-benar memegang kendali pemerintahan sipil. Dengan demikian sejak tahun 1921 kekuasaan oleh *gezaghebber* yang dipegang oleh komandan militer setempat berakhir.

C. Infrastruktur Pendukung

Perkembangan politik yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan, berlangsung sangat cepat dan dinamis. Semuanya tergantung pada perubahan yang dipicu oleh proses pasifikasi terhadap wilayah

53 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1921 no. 767.

pedalaman Kalimantan di sepanjang sungai Barito dan pesisir timur Kalimantan pada tahun-tahun pertama abad XX.⁵⁴

Balikpapan yang merupakan sebuah kota di muara sungai dan tepi pantai Selat Makasar secara tiba-tiba mengalami peningkatan fungsi dan nilai strategis. Penemuan minyak bumi di sekitarnya dan minat investor swasta untuk melakukan eksplorasi pertambangan serta tindak lanjutnya dengan perolehan konsesi telah mendorong kehadiran kekuatan modal ini di kota itu. Sebagai konsekuensi langsung dari semua itu adalah pembukaan sejumlah infrastruktur yang langsung berkaitan dengan aktivitas perekonomian besar seperti pabrik, kompleks pengeboran, pemukiman, hingga jalan dan pelabuhan. Meskipun beberapa infrastruktur yang langsung terkait dengan kepentingan eksplorasi disediakan dan ditanggung oleh pemilik modal sebagai investor, sejumlah fasilitas lain terutama yang bisa digunakan bagi kepentingan umum harus disediakan oleh pemerintah colonial.⁵⁵

Untuk bisa memenuhi kebutuhan dan tuntutan tersebut, pemerintah colonial harus mencurahkan perhatian, tenaga dan biaya bagi pengadaan dan perbaikan fasilitas umum. Dalam hal ini pemerintah colonial mengalami kesulitan, mengingat periode pergantian abad didominasi oleh upaya pemerintah untuk melakukan proses pasifikasi terhadap daerah-daerah yang belum dikuasainya, terutama di luar Jawa. Proses ini menuntut banyak dana, mengingat lahan yang akan diletakkan di bawah kekuasaannya masih belum banyak dikenal serta terbentang luas dengan kondisi topografi dan morfologi yang sangat berbeda dengan Jawa.⁵⁶

54 J.Th. Lindblad, "De opkomst van de Buitengewesten" dalam A.H.P. Clemens en J.Th. Lindblad, *Het belang van de buitengewesten. Economische expansie en oloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands Indië 1870-1942* (Amsterdam, 1989, NEHA), halaman 4.

55 Jerouwn Touwen, *Extremes in the archipelago: trade and economic development in the Outer Islands of Indonesia, 1900-1942* (Leiden, 2001, KITLV Press), halaman 148. Kehadiran industry pertambangan ini di mana-mana membawa dampak pengembangan lahan yang penting bagi fasilitas umum seperti pembangunan infrastruktur transportasi, perumahan, proyek pengairan dan masuknya aliran listrik. Secara tidak langsung juga berpengaruh pada peningkatan pasokan bahan pangan.

56 Setidaknya ada dua factor dominan yang mendorong Belanda melakukan proses pasifikasi ke luar Jawa dan mewujudkan idealismenya sebagai negara colonial (*colonial state*): tuntutan industrialisasi

Ketimpangan mulai tampak dalam upaya untuk mewujudkan kestabilan antara permintaan dan penawaran di atas. Pemerintah sendiri dituntut dua hal : pengadaan infrastruktur bagi pelayanan public dan penyediaan pegawai bagi kepentingan administrasinya sendiri. Jika tuntutan pertama bisa dipenuhi lewat kerjasama dengan pihak swasta atau penguasa swapraja, tuntutan kedua harus dipenuhi oleh pemerintah colonial sendiri karena menyangkut kepentingan administrative secara langsung. Sementara itu pengadaan pegawai sebagai staf birokrasi juga menghadapi sejumlah tuntutan yang sesuai dengan kinerja mereka di tempat penugasannya.⁵⁷

Selain jumlah tenaga yang harus disediakan untuk mengisi pos administrative, pemerintah juga harus membangun infrastruktur yang dimaksudkan untuk menampung mereka. Infrastruktur ini terdiri atas perumahan bagi pegawai dan perkantornya. Ketika prioritas diberikan untuk perkantoran yang akan langsung difungsikan sebagai penunjang kinerja administrasi, fasilitas perumahan sering kurang diperhitungkan. Pegawai yang ditempatkan bisa diminta tinggal di kantor yang difungsikan sebagai rumah. Ketika jumlah pegawai bertambah dan kualitas kerja juga meningkat, kondisi ini tidak lagi mungkin dipertahankan. Mereka harus ditempatkan di suatu lokasi khusus yang terpisah. Meskipun umumnya lahan untuk pembangunan rumah mereka cukup tersedia, biaya bagi pembangunannya tidak segera bisa diberikan.

khususnya kekayaan alam mineral dan hutan yang dikandung di pulau-pulau di luar Jawa dan ancaman penetrasi kekuatan asing baik politik maupun swasta. Dua tujuan ini telah membuat para politikus Belanda mempengaruhi semuanya termasuk biaya penaklukan yang tinggi seperti Perang Aceh, Perang Bone, Perang Puputan, Perang Jambi, Perang Lombok dan pasifikasi Papua. M.C. Ricklef, *A history of modern Indonesia since c. 1200* (Stanford, 2001, Stanford University Press), halaman 171.

57 J.S. Furnival, *Netherlands India: a study of plural economy* (Cambridge, 2010, Cambridge University Press), halaman 220. Sejak awal program pendidikan dibentuk, khususnya setelah dilembagakan pada tahun 1864 dalam Departemen Pendidikan, Agama dan Industri (*Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid*), tujuan penyediaan fasilitas pendidikan Barat oleh pemerintah colonial ada dua : aspek humanism dan kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi ini adalah menciptakan alumni yang terdiri atas tenaga terdidik professional siap pakai bagi lapangan kerja yang terbuka di wilayah koloni.

Hal ini juga terjadi di kota Balikpapan, ketika proses perluasan kota dan peningkatan aktivitas perekonomian berlangsung pesat di kota ini. Jumlah pegawai pemerintah yang mengurus administrasi di kota bertambah sementara pemerintah tidak mampu menyediakan perumahan untuk kepentingannya. Dana dan perhatian pemerintah telah dicurahkan pada pembangunan di kompleks pelabuhan baik bagi infrastruktur pendukung pelabuhan seperti dermaga, jembatan, jalan dan saluran air, maupun untuk pegawai dan kantor dinas cukai ekspor-impor, yang langsung memberikan pemasukkan. Untuk menutup kebutuhan itu, Gubernur Jenderal Van Heutsz sendiri memberikan persetujuan kepada Residen Swart di Banjarmasin untuk melakukan negosiasi dengan perwakilan BPM yang telah membangun infrastruktur perumahan bagi pegawainya. Dari hasil pembicaraan ini, akhirnya disepakati bahwa pemerintah akan menyewa sebuah rumah milik BPM untuk difungsikan sebagai rumah dinas pejabatnya yang akan ditempatkan di Balikpapan pada akhir tahun 1908.⁵⁸

Sementara itu kesulitan lokasi juga mempengaruhi penempatan pegawai dan otomatis juga wilayah kerja. Salah satu contoh dari hal ini adalah persoalan daerah lelang (*vendu*) yang diberlakukan untuk Balikpapan. Mengingat staf pegawai yang terbatas dan harus bertugas di ibukota *Afdeeling* Samarinda, akhirnya pemerintah menunda keputusan untuk menjadikan Balikpapan sebagai daerah lelang dan mengalihkan kewenangan itu kepada petugas juru lelang (*vendumeester*) dari Balikpapan ke Samarinda.⁵⁹

Namun demikian, seiring dengan perkembangan pesat yang dicapai oleh Balikpapan dalam aspek ekonominya, tuntutan bagi penempatan seorang juru lelang dan peningkatan statusnya sebagai daerah lelang khusus muncul. Hal ini berlaku juga bagi seluruh *afdeeling* seiring dengan rencana pemerintah untuk mengatur

58 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 11 November 1908 no. 6*, bundel *Algemeen Secretarie*.

59 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 19 September 1908 no. 8*, bundel *Algemeen Secretarie*. Kepala juru lelang yang ditempatkan di Samarinda dan membawahi seluruh *afdeeling* ini adalah pejabat klas-2. Ini membuktikan bahwa jangkauan dan peringkat usaha lelang di *afdeeling* ini tidak terlalu besar.

kembali pembagian wilayah administratif di Kalimantan Timur. Dalam keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Februari 1913, Samarinda sebagai ibukota *afdeeling* diberi status daerah lelang utama di bawah seorang kepala juru lelang klas-1, sementara Balikpapan dijadikan sebagai daerah lelang di bawah seorang kepala juru lelang klas-2.⁶⁰



Ond Balikpapan
De onder administratie van de Klandasan

Balai Pelaksana Negeri Kalimantan Barat Kantor Administrasi di Klandasan (Mei 1932) (Bataafsche Petroleum Maatschappij)

Di Balikpapan, sebagai pembantu dari kepala juru lelang klas-2, pemerintah menempatkan seorang juru tulis (*klerk*) Eropa dan seorang penulis (*schrijver*) pribumi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Balikpapan sebagai daerah lelang sangat luas dan prospektif, mengingat sebagai sebuah kota dan belum menjadi ibukota unit administratif, jumlah personalia kantor lelang di Balikpapan sama atau bahkan melebihi jumlah pegawai dari dinas yang sama di beberapa ibukota *Onderafdeeling* yang berada di *Afdeeling* Samarinda.⁶¹

60 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 1 Februari 1913 no. 11*, bundel *Algemeen Secretarie*.

61 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1913 nomor 199.

Ketika reorganisasi pemerintahan, khususnya pembagian wilayah administrative berlangsung pada tahun 1914, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kebutuhan bagi perumahan pegawai mulai tampak dan tidak bisa ditunda lagi. Bersamaan dengan pengangkatan seorang *gezaghebber* di Balikpapan, kebutuhan bagi sebuah rumah dinas pejabat yang memerintah kota ini tidak dapat dihindari. Anggaran khusus disediakan bagi pembangunan rumah itu dan setelah lahan diperoleh di lokasi yang cocok menurut rancangan morfologi kota, rumah ini segera dibangun. Material yang digunakan sejauh mungkin disediakan dari persediaan gudang material milik negara, sementara kekurangan yang ada harus dibeli dari anggaran yang sudah ditetapkan. Akan tetapi ada suatu persoalan yang muncul sehingga tidak ada laporan penggunaan dana bagi pembangunan rumah dinas tersebut. Hal ini berlangsung hingga empat tahun setelah rumah dinas siap ditempati dan akhirnya difungsikan sebagai tempat tinggal resmi *civiel gezaghebber* Balikpapan. Menjelang akhir November 1918 pemerintah kemudian meminta pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah disediakan bagi pembangunan rumah itu kepada Residen Borneo Selatan dan Timur di Banjarmasin.⁶²

Sebelum rumah dinas bagi *civiel gezaghebber* ini dibangun, pembangunan rumah dinas berlangsung bagi opas yang akan menjadi pengawal administrasi pemerintahan. Selama ini opas tersebut menempati rumah yang disewa dari perumahan yang didirikan oleh BPM. Dalam rangka persiapan bagi reorganisasi pemerintahan, anggaran disediakan untuk membangun sebuah rumah dinas bagi dua orang opas, yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan pembangunan rumah dinas bagi 12 orang petugas bea dan cukai ekspor-impor. Pada bulan Desember 1913 rumah itu mulai dibangun dan pada awal tahun 1914 sudah siap ditempati ketika para opas mulai tiba dan difungsikan pada pos masing-masing.⁶³

62 ANRI, *Renvooi 22 November 1918 no. 3318*, bundel *Algemeen Secretarie*.

63 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 10 December 1913 no. 39*, bundel *Algemeen Secretarie*.

Infrastruktur lain yang dirancang untuk menunjang pelaksanaan administrasi di Balikpapan adalah lembaga hukum. Pembangunan prasarana fisik yang terkait dengan lembaga hukum ini juga tidak bisa dilepaskan dari adanya reorganisasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan lembaga peradilan. Bersama dengan reorganisasi yang berlangsung pada tahun 1914, Balikpapan direncanakan mempunyai lembaga pengadilan sendiri (*landraad*) yang selama ini masih tergantung pada lembaga tersebut di Samarinda. Untuk mengatasi kebutuhan mendesak dari penegakkan keamanan dan ketertiban, sebelum mereka yang dinyatakan sebagai terdakwa dibawa ke depan pengadilan di Samarinda, pemerintah memandang perlu untuk membangun sebuah rumah penjara. Berdasarkan fungsi dan efektivitasnya, rumah penjara dibangun di kompleks pusat pemerintahan yang terletak dekat dengan rumah dinas atau kantor *civiel gezaghebber* sesuai dengan usul dari Direktur PU.⁶⁴

Direktur PU segera mempelajari secara teknis rencana tersebut dan akhirnya membuat rancang bangun dari sebuah rumah penjara sementara dengan material yang ada dan anggaran yang disesuaikan. Berdasarkan rancang bangun ini, dan sesuai dengan status rumah penjara tersebut, bangunan ini tidak terlalu luas dan hanya lebih berfungsi sebagai tempat penitipan tahanan sementara. Gubernur Jenderal Limburg Stirrum yang menerima pertimbangan ini dari Direktur PU kemudian memutuskan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan rancangan yang disusun, dan dana yang dianggarkan sebesar f 36.000.⁶⁵

Berkaitan erat dengan institusi hukum di atas adalah bagian keamanan. Keamanan yang dimaksudkan di sini menyangkut penegakkan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) untuk masya-

64 ANRI, *Brief van Directeur der Burgerlijke Openbare Werken 21 December 1914 no. 2*, bundel *Algemeen Secretarie*.

65 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 28 Desember 1914 no. 65*, bundel *Algemeen Secretarie*. Dilihat dari perbandingan anggaran dengan biaya untuk pembangunan infrastruktur lain, seperti rumah dan kantor pabean senilai f 11.600 atau rumah dinas opas senilai f 13.880, jelas anggaran bagi penjara ini cukup besar. Ketika dibandingkan dengan luas lahan yang tersedia, tingkat mahalannya biaya ini bisa diperkirakan terjadi karena kualitas material dan bangunan yang dirancangnya untuk menjaga segala kemungkinan.

rakat kota Balikpapan. Latar belakang dari penempatan kesatuan keamanan adalah terjadinya suatu kerusuhan di kota Balikpapan yang terjadi pada tanggal 4 April 1912, ketika terdapat pertunjukkan film terbuka di lapangan. Dalam keramaian itu, terjadi perselisihan antara seorang Cina pekerja BPM dan seorang Banjar, penduduk setempat. Sebagai akibat dari perselisihan yang berkembang menjadi kerusuhan massa ini, dua orang Cina kuli minyak BPM terbunuh dan suasana kota Balikpapan menjadi tegang. Asisten residen tiba dari Samarinda bersama suatu kesatuan polisi bersenjata dan dalam waktu sehari situasi bisa dikendalikan. Berdasarkan pengalaman ini, pemerintah memandang perlu menempatkan suatu aparat keamanan khusus di Balikpapan.⁶⁶

Suatu aparat keamanan yang terdiri atas kepolisian bersenjata (*gewapend politie*) ditempatkan di kota ini, dan untuk kepentingan itu sejak tahun 1913 sebuah tangsi polisi dibangun yang lokasinya terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan. Petugas kepolisian ini langsung berada di bawah perintah *gezaghebber* dan kemudian kontrolir sebagai kepala pemerintahan daerah (*hoofd van plaatselijk bestuur*) sejak tahun 1921. Kesatuan ini segera dilengkapi dengan berbagai kedinasannya seperti bagian reserse dan kepolisian umum.⁶⁷

Di samping aparat kepolisian, Balikpapan juga mendapatkan suatu kesatuan lain yang menjamin ketenangan penduduk kota. Terutama hal ini terjadi pada akhir tahun 1930-an, ketika ancaman perang mulai membayangi Hindia Belanda. Balikpapan sebagai suatu kota industri minyak yang bernilai strategis tidak bisa diabaikan fungsinya untuk menunjang infrastruktur pertahanan koloni Hindia Belanda, khususnya di pulau Kalimantan. Untuk itu bersama dengan sejumlah kota lain di Hindia, Balikpapan mendapatkan suatu korps perlindungan terhadap serangan udara lengkap dengan peraturan bagi kinerjanya. Kesatuan ini

66 "Het opstootje te Balikpapan" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 18 Juli 1912, lembar ke-10.

67 "Naar Balikpapan", dalam *De Indische Courant*, tanggal 19 Juni 1930, lembar ke-2. Masing-masing bagian dari kesatuan kepolisian ini dipimpin oleh seorang wakil komisaris, sementara seluruh kesatuan kepolisian di Balikpapan dipimpin oleh seorang komisaris.

ditempatkan pada bulan Juli 1939 dan diresmikan oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborgh.⁶⁸

Berkaitan dengan kondisi perang yang mendekat, Balikpapan juga tidak terlepas dari program rencana pertahanan militer colonial. Untuk memperkuat kota ini dari serangan musuh, pada bulan Agustus 1938 kesatuan militer ditempatkan di kota ini. Berbeda dengan aparat kepolisian yang ditempatkan di tengah kota bersama tangsinya, barak-barak militer dibangun di luar kota dan menempati posisi strategis untuk mengontrol kota. Lokasi ini adalah di bukit Sentosa yang mempunyai ketinggian tertentu, tempat barak itu dibangun. Sementara itu di kota Balikpapan juga disediakan sebuah rumah peristirahatan (*tehuis*) bagi para perwira militer yang untuk sementara tinggal di sana.⁶⁹

D. Simpulan

Sejarah politik yang terjadi di Balikpapan mempunyai keterkaitan erat dengan dua aspek, yaitu perkembangan administrative dan pembangunan infrastruktur pemerintahan kota. Berbeda dengan daerah lain yang pernah mengalami kerusakan atau kerugian akibat perang atau pertempuran, proses pasifikasi yang berlangsung di Kalimantan Timur oleh rezim colonial Belanda tidak melalui peperangan melainkan berlangsung secara damai. Hal ini juga berpengaruh pada perkembangan kota-kota yang ada di sana, terutama yang langsung berada di bawah sistem administrasi colonial, termasuk Balikpapan.

Bertolak dari kenyataan tersebut, Balikpapan secara politis dan administrative bisa dikatakan menunjukkan suatu proses pembentukan birokrasi dan struktur kekuasaan colonial yang normal. Ketika berada di bawah pengaruh penguasa *zelfbestuur*

68 "De regeling van luchtbescherming" dalam *De Indische Courant*, 2 Agustus 1939, lembar ke-5.

69 "Balikpapan: nieuwe militair tehuis" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 23 Agustus 1938, lembar ke-11. Kesatuan militer yang ditempatkan adalah kompi-2 dari batalyon artileri pantai dan artileri pertahanan udara. Kesatuan ini jelas merupakan pasukan tempur, dan bukan pasukan garnisun yang ditempatkan di Samarinda sebagai pusat pemerintahan.

pribumi kota ini tidak diperhitungkan dalam struktur pemerintahannya, dalam sistem pemerintahan colonial secara bertahap Balikpapan mulai memainkan peranan yang penting khususnya dalam konteks pemerintahan local. Meskipun kehadiran investor swasta khususnya di sector perminyakan tidak bisa dibantah, peran pemerintah colonial sangat dominan dalam menentukan perkembangan administrative kota ini.

Meskipun cukup dominan, sejak awal perkembangannya telah tampak bagaimana rezim colonial tergantung pada keberadaan industry perminyakan swasta dalam mengatur dan memerintah Balikpapan. Aparat pemerintah colonial yang ditempatkan di Balikpapan harus mampu menjalin sinergi dengan kalangan swasta demi keberhasilan tugas-tugas mereka, terutama ketika sumbangan dari industry ini menentukan keberadaan *landschapkas* yang berfungsi bagi pembiayaan anggaran daerah.

Pada akhirnya Balikpapan mendapatkan penampilan secara administrative sebagai suatu kota pemerintahan secara utuh. Penampilan ini bukan hanya ditunjukkan melalui keberadaan aparat pemerintah colonial yang memerintah kota ini, melainkan juga dengan fasilitas pendukungnya yang semakin lengkap bersamaan dengan semakin kompleksnya tanggungjawab kedinasan oleh birokrasi pemerintah colonial Belanda.

Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB III

MENUJU KOTA MODERN: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS TRANSPORTASI

Jika sistem administrasi memberikan penjelasan dan menunjukkan perkembangan yang menekankan pada peran dan posisi Balikpapan dalam struktur birokrasi dan administrasi pemerintahan yang mempunyai lingkup lebih luas, pembangunan infrastruktur kota memberikan petunjuk pada arah kebijakan yang akan ditempuh oleh perkembangan kota tersebut. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur kota dan fasilitas pendukungnya menentukan corak kebijakan apa yang diambil oleh penguasa kota ini bagi masa depannya. Melalui jenis infrastruktur dan lokasi pembangunannya, akan bisa diketahui bahwa kota tersebut diarahkan menuju bentuk atau tipologi kota tertentu sesuai dengan program kebijakan yang dibuat sebelumnya. Lebih jauh lagi, dari tipologi kota tersebut akan bisa diketahui potensi kemampuan yang dimiliki oleh kota tersebut dan pengembangannya lebih lanjut.

Bab ini akan membahas tentang pembangunan infrastruktur kota Balikpapan dan sarana pendukungnya. Salah satu sarana yang terpenting dalam hal ini adalah transportasi, karena melalui transportasi suatu daerah akan menjalin komunikasi dengan daerah lain dan berdampak pada dinamisasi kehidupan perkotaannya. Dalam sejarah perkembangannya, Balikpapan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan fasilitas transportasi yang menopang komunikasi kota ini dengan daerah lain. Dengan demikian, peran transportasi akan diungkapkan melalui pembangunan infrastruktur yang khusus menunjang terwujudnya transportasi sebagai agen pembawa perubahan dalam struktur kota Balikpapan.

A. Pelabuhan Balikpapan

Pelabuhan menjadi salah satu fasilitas utama yang sangat penting dan strategis bagi perkembangan sistem transportasi dan komunikasi di kota Balikpapan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Balikpapan sendiri yang terletak di tepi perairan lepas Selat Makasar, sebagai salah satu jalur pelayaran utama selama abad XIX dan XX.⁷⁰ Sementara itu ditinjau dari aspek topografi, Balikpapan sendiri meskipun menjadi muara dari aliran sungai, tetapi alirannya rendah dan tertutup dengan hutan bakau. Karena dominasi tanaman pantai ini, kedalaman perairan di sekitar muara itu mencapai antara empat dan lima mil laut atau antara 25 dan 30 *vadem*.⁷¹

Meskipun ada kerendahan kedalaman tersebut, aliran sungai yang bermuara di sana terdiri atas dua yaitu Senusi dan Riko. Keduanya bersumber dari rangkaian pegunungan yang terletak di belakang garis pantai Balikpapan ini. Perpaduan kedua aliran sungai tersebut di pedalaman mereka membentuk sebuah teluk yang terletak pada 1°16' Lintang Selatan.⁷² Teluk yang terbentuk di dalamnya dikelilingi oleh *drempeel*, atau palung laut yang dangkal dan mengumpulkan airnya di ceruk pantai. Walaupun pendangkalan terus terjadi dan pasokan air tidak terlalu banyak, pada saat air pasang permukaan *drempeel* ini naik dan menambah kedalaman pantainya. Akibatnya di beberapa lokasi sejumlah

70 Charles Zerner, *Culture and the Question of rights: coast and seas in Southeast Asia* (Durham, Duke University Press, 2003), halaman 87. Selat Makasar tumbuh menjadi jalur perkapalan dan perdagangan yang penting sejak akhir abad XVII, yaitu ketika Belanda menetapkan Makasar sebagai Bandar utama yang menopang monopoli VOC di kawasan timur Indonesia dan mengontrol pangkalan laut lainnya terutama di pulau Sulawesi. Mengingat kekuasaan VOC secara langsung ditegakkan di sepanjang pantai barat Sulawesi, Selat Makasar menjadi satu-satunya sarana komunikasi mereka meskipun harus menghadapi resiko para perompak Mandar yang beroperasi di teluk Bone dan Teluk Palu hingga di Teluk Tomini. J.G.F. Riedel, "De vestiging der Mandaren in Tomini-landen" dalam *Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap*, vol. 19, tahun 1870, halaman 558

71 "Balikpapan", dalam P.J. Veth, *Aardrijkskundige en Statistische Woordenboek van Nederlandsch Indië, eerste deel* (Amsterdam, 1861, P.N. van Kampen), halaman 61.

72 "Balikpapan", dalam D.G. Stibbe dan H.J. de Graaff, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indië, eerste deel* ('s Gravenhage, 1917, Martinus Nijhoff), halaman 128.

perahu atau bahkan kapal bisa mendekat dan merapat ke pantai pada saat air laut pasang.

Dari gambaran topografi dan geologi yang tampak di atas, bisa diketahui bahwa walaupun terletak di tepi Selat Makasar yang potensial sebagai jalur pelayaran, Balikpapan tidak mempunyai peluang untuk berkembang sebagai suatu bentuk pelabuhan laut yang besar seperti kota-kota lain di dekatnya, Banjarmasin, Makasar dan Pare-Pare. Sebelum abad XX bisa dikatakan bahwa kesempatan untuk mengarah ke sana, bahkan untuk membuka suatu pelabuhan pantai (*reede*) bagi Balikpapan tidak pernah terpikirkan, baik oleh penguasa pribumi setempat maupun oleh pemerintah colonial Belanda.⁷³

Walaupun begitu ide mengarah ke sana telah ada terutama pada pejabat colonial yang ditempatkan di wilayah itu. Diterbitkannya *Regeerings Reglement* tahun 1854⁷⁴, khususnya pada pasal 27 ayat 2, memungkinkan adanya rencana bagi pembangunan infrastruktur pelabuhan untuk Kalimantan. Dalam ketentuan yang bermaksud mendorong perekonomian penduduk Hindia terutama yang berkaitan dengan pengangkutan produk untuk tujuan ekspor lewat laut, salah satu infrastruktur yang disebutkan adalah pelabuhan pribumi atau pelabuhan tradisional (*Inlandsche haven*). Pelabuhan ini berfungsi sebagai pemasok (*feeder*) bagi pelabuhan laut utama untuk kebutuhan pengangkutan komoditi ekspor, dan sekaligus menjadi pelabuhan distribusi local dalam jaringan perkapalan dan perdagangan domestic. Karena umumnya pelabuhan ini dimiliki oleh elite penguasa pribumi, pemerintah Hindia Belanda hanya bisa mendorongnya melalui kontrak atau ikatan politik agar mereka berkenan untuk mengembangkan pelabuhan tersebut.⁷⁵

73 Orang Belanda pertama yang merenungkan tentang masa depan Balikpapan sebagai pelabuhan dan kota besar adalah Menten, yang berkunjung ke kampung nelayan Balikpapan ini pada awal tahun 1900. Dengan pemikirannya tentang pengerukan lumpur, Menten berpikir bahwa Balikpapan bisa dikembangkan karena lokasinya yang strategis. "Balikpapan", dalam *De Sumatra Post*, 26 November 1941, lembar ke-7.

74 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1855 nomor 2.

75 *Regeering Almanak, eerste deel*, tahun 1920, halaman 574.

Salah satu pelabuhan ini adalah Balikpapan, yang sampai akhir abad XIX masih berada di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan Pasir di pantai timur Kalimantan. Arti penting Balikpapan untuk dikembangkan sebagai pelabuhan yang berfungsi untuk persinggahan kapal di jalur perdagangan utama Selat Makasar ini telah diangkat oleh para teknisi dan pejabat colonial sejak akhir abad XIX. Di mata mereka, setelah memeriksa potensi local dan kondisi geografi dan topografinya, Balikpapan mempunyai potensi untuk dikembangkan dan perkembangan pelabuhan akan dihubungkan secara intensif dengan pembangunan dan perkembangan di darat. Dengan demikian ada rencana untuk membangun dan mengembangkan morfologi kota Balikpapan melalui perpaduan antara sector darat dan laut.

Langkah awal ini mulai terwujud ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan (*Ordonnantie*) tanggal 8 Januari 1901 tentang pemungutan cukai ekspor dan impor. Berdasarkan peraturan ini sejumlah pelabuhan ditunjuk untuk menjadi tempat berdirinya kantor bea serta cukai ekspor-impor. Di sepanjang pantai timur Kalimantan, beberapa pelabuhan disebutkan termasuk Balikpapan. Dengan pencantuman Balikpapan dalam daftar pembukaan kantor ini, dapat diduga bahwa titik tolak pertama menuju fungsi sebagai pelabuhan niaga dan samodera bagi Balikpapan telah tampak nyata.⁷⁶

Keberadaan kantor pabean itu menunjukkan bahwa Balikpapan dijadikan sebagai pelabuhan untuk membongkar barang-barang impor dari luar yang akan didistribusikan di kota dan daerah penopang di sekitarnya. Sementara itu dari sisi ekspor tampak bahwa kini Balikpapan menjadi sentra penyetoran komoditi dari daerah pedalaman yang akan dimaksudkan sebagai produk ekspor keluar, tanpa harus melalui pelabuhan lain. Beberapa produk impor yang sebelumnya tidak pernah muncul di kota Balikpapan, kini seiring dengan perkembangan social dalam dinamika kehidupan

76 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1901 nomor 410. Di samping Balikpapan, kota-kota pelabuhan lain yang juga tercatat di sini adalah Kota Waringin, Samarinda dan Kota Baru.

kota tampak mengalir. Salah satunya adalah impor minuman keras (*alcoholische en sterke druncken*) yang diatur berdasarkan monopoli pemerintah secara resmi (*regie*). Balikpapan ditetapkan sebagai salah satu pelabuhan importer minuman keras ini.⁷⁷

Berkenaan dengan keluarnya keputusan di atas, aktivitas di pelabuhan Balikpapan pada tahun-tahun pertama meningkat pesat. Kesibukan ini bukan hanya dituntut dari pegawai pemerintah yang ditempatkan di kota tersebut, melainkan juga dari para pejabat Belanda di tingkat pusat. Mereka harus membuat perhitungan berdasarkan pemantauan dan kebutuhan yang muncul untuk menanggulangi perubahan fungsi dan status pelabuhannya. Terutama persiapan bagi fasilitas perkantoran yang menyangkut bea serta cukai ekspor-impor di Balikpapan menjadi kebutuhan mendesak. Direktur Pekerjaan Umum H.P. Mensinga yang disertai membuat perhitungan ini segera menghubungi Residen Borneo Selatan dan Timur untuk itu. Menurut Residen sendiri, kebutuhan yang mendesak adalah pembenahan pada perumahan pegawai cukai yang masih harus ditingkatkan demi pelaksanaan tugas-tugasnya.⁷⁸

Berdasarkan keterangan residen ini, pada tanggal 20 Juli 1903 Direktur PU memerintahkan sebuah tim peneliti lapangan untuk meninjau lokasi yang akan menjadi objek dari proyek pembangunannya. Berdasarkan berita acara yang dibuat, kebutuhannya adalah memasang palang pelapis kayu memanjang yang dimulai dari rumahsakit, melewati deretan tiang penopang bagi lokasi pembongkaran barang hingga ke rumah petugas pabean, serta membuat got pembuangan saluran air di kompleks bangunan pemerintah di Balikpapan. Melalui rapat koordinasi dengan

77 Selama hampir lima belas tahun impor minuman keras berlangsung tanpa aturan yang jelas, sehingga sering menimbulkan kekacauan dalam administrasi termasuk juga keuangan, di samping juga mengandung resiko besar bagi penyalahgunaan dalam pemakaiannya oleh penduduk. Baru pada tahun 1915 aturan resmi muncul tentang impor dan penggunaan minuman beralkohol ini. Lihat *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1915 nomor 232.

78 ANRI, *Besluit van den Resident der Zuier- en Oosterafdeeling van Borneo*, 16 Juli 1903 no. 319, bundel *Algemeen Secretarie*.

Residen Borneo Selatan dan Timur, semuanya memerlukan dana sebesar f 6959.⁷⁹

Akan tetapi setelah dibawa ke pusat dan dirapatkan oleh jajaran teknis Departemen PU, dana pembiayaan yang dianggarkan di atas tidak mencukupi. Menurut standard yang digunakan oleh pemerintah di Batavia, anggaran itu meningkat sampai f 9146. Oleh karena dana sebelumnya telah dianggarkan dalam anggaran tahun 1904, terdapat selisih yang wajib ditutup. Ketika Departemen PU disertai tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan ini, Mensinga mengajukan pertimbangan bahwa kekurangan dana hanya bisa ditutup dari sisa dana sejumlah proyek lain yang sudah dikerjakan di tempat lain (*de kosten moeten worden gevonden uit overschotten van andere werken*).⁸⁰

Dalam usulnya kepada Gubernur Jenderal W. Rooseboom, Mensinga kemudian meminta perkenan penguasa tertinggi koloni itu bagi peralihan sisa anggaran dan persetujuan pembangunan infrastruktur. Setelah mempertimbangkan usul tersebut dan melihat pendapat dari Residen Borneo Selatan dan Timur,⁸¹ Rooseboom kemudian pada tanggal 29 November 1903 memutuskan untuk menyetujui pembangunan itu dan menyerahkan kepada Mensinga sebagai pelaksananya. Sementara itu jumlah biaya yang dikeluarkan akan disediakan dalam anggaran negara sebesar f 9145, tetapi dengan catatan bahwa sebagian material akan disediakan.⁸²

Pengumuman pemerintah di atas ternyata menarik minat kalangan swasta yang akan melakukan investasi terhadap potensi alam di Kalimantan Timur dan Balikpapan dianggap menjadi tempat yang strategis bagi kepentingan ini. Salah satu dari kalangan investor ini adalah perwakilan *Nederlandsch-Indische Industrie en Handel Maatschappij in Nederlandsch Indië*, yang mengajukan

79 ANRI, *Besluit van den Resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, 22 October 1903 no. 521a*, bundel *Algemeen Secretarie*.

80 ANRI, *Rapport van Departemen der Burgerlijke Openbare Werken, 21 November 1903 no. 5*, bundel *Algemeen Secretarie*.

81 ANRI, *Missive van den Resident der Zuider- en Oosterafdeeling Borneo 3 November 1903 no. 479/12*, bundel *Algemeen Secretarie*.

82 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 29 November 1903 no. 26*, bundel *Algemeen Sekretarie*.

surat kepada Residen Borneo Selatan dan Timur (*Oost en Zuid afdeeling van Borneo*) agar langkah-langkah diambil sehubungan dengan penyediaan fasilitas oleh pemerintah di sana (*het noodige te willen verrichten om de zorg voor de meermiddelen enz., aldaar van Gouvernementswege te doen geschieden*).⁸³

Setelah menerima permintaan tersebut, Residen Borneo Selatan dan Timur kemudian menyampaikan kepada Direktur Pekerjaan Umum bahwa pembenahan atas pelabuhan di Balikpapan tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah, namun merupakan kewenangan pemerintah pusat dan merupakan usaha terpadu dalam koordinasi sejumlah dinas dan instansi. Proyek ini akan melibatkan angkatan laut pemerintah, bagian pemetaan laut, penerangan laut dan juga usaha pergudangan.⁸⁴

Setelah menerima penjelasan dari Residen, Direktur PU kemudian mengadakan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait, terutama dengan pihak angkatan laut. Dari koordinasi itu bisa dipertimbangkan sejumlah aspek yang perlu ditangani dan tentu saja kebutuhan yang diperlukan dalam bentuk pengeluaran anggaran. Mengingat anggaran yang dikeluarkan sangat besar, akhirnya Direktur PU mengembalikan kepada Residen mengenai prioritas infrastruktur yang akan diperlukan oleh kalangan pengguna pelabuhan. Dari hasil peninjauan local ini, fasilitas yang paling dibutuhkan adalah dua tiang penambat tali kapal dan lima tonggak penambat perahu. Semua ini memerlukan dana f 15.772.⁸⁵

Direktur PU H.R. Mensinga tidak bisa memastikan bahwa pada tahun itu (1904) proyek tersebut bisa berlangsung, mengingat dana yang dibutuhkan harus dibicarakan secara terkoordinasi untuk dapat dibebankan pada anggaran. Di samping itu keputusan tertinggi berada pada Gubernur Jenderal. Berkaitan dengan hal

83 ANRI, *Brief van Directeur van Burgerlijke Openbare Werken, 15 Maart 1904 no. 4041/A*, bundel *Algemeen Secretarie*.

84 ANRI, *Missive van Resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo aan Directeur der Burgerlijke Openbare Werken 27 October 1903 no. 459/12*, bundel *Algemeen Secretarie*.

85 ANRI, *Missive van Resident der Zuider- en Oosterafdeeling Borneo 26 Februari 1904 no. 1177/12*, bundel *Algemeen Secretarie*.

tersebut, Mensinga kemudian melaporkan semua persoalan itu, mulai dari permohonan pihak swasta yang diwakili oleh H.L. Chittenden, hingga pertimbangan Residen Borneo Selatan dan Timur serta pendapat jajaran kedinasan yang terkait. Gubernur Jenderal Rooseboom yang menerima laporan Mensinga kemudian melakukan pembicaraan dengan sejumlah pejabat tinggi termasuk dari jajaran angkatan laut.

Setelah mendapatkan dukungan dan pertimbangan dari Laksmadana A.P. Fudema, panglima angkatan laut di Hindia Belanda,⁸⁶ Rooseboom kemudian membuat keputusan untuk melakukan pembangunan semua infrastruktur yang dibutuhkan itu pada tanggal 4 April 1904. Untuk meringankan beban biaya, Rooseboom memerintahkan agar sebagian material yang diperlukan bisa ditutup dari persediaan milik negara. Untuk melaksanakan proyek tersebut, Direktur Pekerjaan Umum Mensinga diserahi tanggung jawab sepenuhnya dan wajib melaporkannya kepada Gubernur Jenderal.⁸⁷

Setelah pembangunan di atas berlangsung dengan lancar dan dalam waktu satu tahun kompleks perkantoran bea serta cukai ekspor-impur di pelabuhan Balikpapan bisa berfungsi dengan baik, pelabuhan itu sendiri mulai menunjukkan dinamika kehidupan maritim. Sejumlah kapal mulai melakukan persinggahan, termasuk beberapa kapal milik *Koninklijk Paketvaart Maatschappij*. Naiknya tonase perkapalan ini tentu saja membawa akibat semakin ramainya aktivitas perekonomian setempat, dengan semakin terbukanya daerah itu bagi transportasi dan komunikasi. Dampak yang dirasakan bukan hanya pada institusi pelabuhan melainkan juga daerah sekitar yang menjadi pendukungnya, terutama kota Balikpapan. Hubungan antara pusat kota dan pelabuhan berlangsung kian intensif setiap hari, khususnya ketika kapal-kapal besar mulai bersandar untuk melakukan bongkar muat baik penumpang maupun barang-barang. Tentu saja hal ini

86 ANRI, *Brief van Commandant der Zeemacht en Chef van het Departement der Marine in Nederlandsch Indië*, 23 Maart 1904 no. 3616, bundel *Algemeen Secretarie*.

87 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 4 April 1904 no. 9*, bundel *Algemeen Secretarie*.

menimbulkan tuntutan baru, khususnya bagi fasilitas penghubung antara kota dan pelabuhan. Lima tahun pertama sejak penyediaan fasilitas pelabuhan Balikpapan telah membuat tuntutan bagi fasilitas jalan keluar dan masuk pelabuhan terutama yang menghubungkan dengan kota semakin jelas tidak bisa dihindari lagi.⁸⁸

Kebutuhan itu dianggap semakin penting oleh Direktur Pekerjaan Umum ketika dari kalangan perkapalan swasta muncul desakan agar perluasan pelabuhan dilakukan dan fasilitas dermaga diperbaiki agar kapal dengan tonase lebih besar bisa merapat. Untuk memenuhi keinginan itu, menurut perhitungan teknis direktur tersebut, kedalaman perairan di sekitar dermaga harus diperdalam hingga mencapai 13 kaki dari sekarang yang ada sekitar 5 kaki. Di samping itu, dengan kedalaman tersebut yang bisa memberikan kemungkinan bagi kapal bertonase besar untuk bersandar, dermaga yang ada juga harus diperluas sehingga mampu menampung sejumlah kapal, selain juga ruang bagi bongkar muat, pergudangan dan perkantoran serta ruangan transit penumpang yang memadai. Untuk mengadakan semua fasilitas dan infrastruktur ini, direktur mengusulkannya kepada Gubernur Jenderal van Heutsz yang kemudian meminta pendapat dari Direktur Keuangan.⁸⁹

Usul Direktur PU itu bukannya tanpa alasan. Sebulan sebelum pengajuan resmi usulannya kepada pemerintah di Batavia, perwakilan perkapalan yang dilakukan oleh agen KPM di Banjarmasin telah menulis surat kepada Residen Borneo Selatan dan Timur. Dalam surat itu, yang oleh residen diteruskan kepada Direktur Pemerintahan, dinyatakan bahwa KPM melihat potensi Balikpapan sebagai pelabuhan di masa depan sangat prospektif. Untuk itu jajaran direksinya tidak segan untuk melakukan perluasan dan peningkatan pelayanan baik bagi angkutan penumpang maupun barang. Agar hal itu bisa dicapai, infrastruktur

88 ANRI, *Brief van Directeur der Burgerlijke Openbare Werken aan Gouverneur Generaal* 16 Juni 1909 no. 97157, bundel *Algemeen Secretarie*.

89 ANRI, *Brief van Directeur van Finantieel aan Gouverneur Generaal* 4 Oktober 1909 nomor 2473/H, bundel *Algemeen Secretarie*.

pelabuhan Balikpapan harus ditambah dan diperluas termasuk juga kedalaman perairan bagi kebutuhan bersandarnya kapal-kapal samodera.⁹⁰

Setelah mendengar semua pertimbangan yang berasal dari sejumlah pihak, termasuk dari pemerintah daerah setempat, Gubernur Jenderal van Heutsz pada bulan November 1909 sudah memikirkan bagi pengabulan rencana itu. Namun demikian mengingat hal itu akan melibatkan juga suatu proyek di darat yang terlepas dari kewenangan para pejabat yang terkait dengan pelabuhan dan perkapalan, Van Heutsz belum bisa langsung memutuskan. Khususnya mengenai sambungan jalan dari darat menuju kompleks pelabuhan dan langsung menjangkau dermaga memerlukan perhitungan yang cermat, karena akan melibatkan banyak kepentingan. Di samping itu hal tersebut juga berkaitan dengan pembebasan lahan milik penduduk yang terkena jalur pembuatannya.⁹¹

Dari permintaan informasi di atas, Direktur PU yang bertanggungjawab bagi penyelidikan teknis kemudian melakukan penelitian di lapangan. Dari hasil penelitiannya, yang berlangsung pada bulan Agustus 1910, Direktur PU mengajukan laporan. Dalam laporannya, ia menyebutkan bahwa perairan di sekitar dermaga bukan hanya bisa diperdalam sampai 13 kaki, tetapi bahkan hingga 18 kaki bisa dilakukan. Hal itu akan lebih menguntungkan namun dengan resiko harus diimbangi dengan fasilitas dermaga yang lebih panjang, karena kapal yang merapat akan semakin besar dan banyak jumlahnya.⁹²

Mendengar laporan tersebut, tentu saja para petinggi di Batavia termasuk Gubernur Jenderal Van Heutsz merasa yakin pada potensi pelabuhan Balikpapan yang prospektif di masa mendatang. Namun demikian mereka sepakat bahwa proyek pembangunan

90 ANRI, *Brief van Directeur der Binnenlandsch Bestuur aan Gouverneur Generaal 7 Agustus 1909 nomor 2480*, bundel *Algemeen Secretarie*.

91 ANRI, *Missive Gouvernment Secretaris, 4 November 1909 no. 4869*, bundel *Algemeen Secretarie*.

92 ANRI, *Brief van Directeur der Burgerlijke Openbare Werken, 25 Agustus 1910 nomor 12370*, bundel *Algemeen Secretarie*.

seperti yang dimaksudkan oleh Direktur PU, yaitu menekankan keseimbangan efektifitas antara pembuatan jalan dari kota langsung ke dermaga dan pendalaman perairan di sekitar dermaga hingga 18 kaki, akan memerlukan dana pembiayaan yang sangat banyak dan membebani anggaran tahunan koloni Hindia Belanda. Oleh karena itu sebelum membuat keputusan persetujuan, Van Heutsz meminta pertimbangan kepada Dewan Hindia Belanda (*Raad van Indie*) tentang solusi bagi persoalan tersebut.⁹³

Atas nasehat Dewan Hindia Belanda, pemerintah hendaknya melibatkan peran dan kontribusi swasta untuk membiayai proyek tersebut. Dasar pertimbangannya adalah bahwa pihak swasta, khususnya perusahaan perdagangan dan perusahaan perkapalan, akan langsung ikut memanfaatkan tersedianya infrastruktur baru, dan akan berpengaruh pada tingkat keuntungan yang diperoleh, baik bagi mereka maupun bagi pemerintah. Gubernur Jenderal van Heutsz menyetujui pertimbangan dari Dewan Hindia Belanda dan kemudian memerintahkan Sekretaris Negara untuk menghubungi kalangan investor swasta yang bersedia memberikan kontribusi dan ikut berinvestasi dalam proyek ini.⁹⁴

Setelah mendapatkan kesediaan dan jaminan dari sejumlah investor swasta termasuk dari perusahaan pelayaran KPM, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembangunan proyek di atas, yang mencakup perluasan dan pelebaran dermaga serta pendalaman perairan. Dalam waktu dua tahun, yakni sampai 1912, proyek itu berhasil diwujudkan dan hasilnya segera bisa dinikmati oleh kalangan pengusaha perkapalan. Dampak tidak langsung dinikmati oleh kota Balikpapan, yang mengalami peningkatan sirkulasi perdagangan terkait dengan ekspor-impor. Sebagai konsekuensinya, bagian pelayanan pabean harus mampu melayani peningkatan tonase perkapalan. Ketidakseimbangan mulai terjadi dan Direktur Keuangan menyetujui peningkatan jumlah pegawai pabean dari tiga orang menjadi 12 orang. Akan

93 ANRI, *Komisarial 30 September 1910 no. XV*, bundel *Algemeen Secretarie*.

94 ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris 15 Oktober 1910 no. 2345*, bundel *Algemeen Secretarie*.

tetapi penempatan pegawai yang lebih banyak ini juga membawa persoalan baru, yaitu tidak adanya fasilitas penampungan mereka yang layak. Oleh karena itu Direktur Keuangan kemudian menulis surat kepada Direktur PU tentang kebutuhan rumah dinas ini, yang segera melaporkannya kepada Gubernur Jenderal Idenburg.⁹⁵

Selama ini rumah bagi pegawai itu yang tersedia hanya satu, yaitu rumah nomor 33 bagi mantri bea cukai ekspor-impor yang terletak di kompleks pelabuhan. Meskipun rumah tersebut bisa digunakan untuk menampung tiga orang, dengan penambahan jumlah pegawai sampai 12 orang, tidak mungkin fasilitas yang ada dimanfaatkan. Di samping itu juga telah diketahui bahwa rumah tersebut telah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan karena sudah sepuluh tahun difungsikan. Berdasarkan kondisi tersebut dan atas dasar pertimbangan dari Direktur Keuangan, Idenburg memutuskan untuk membangun tiga rumah baru bagi penambahan pegawai pabean di kompleks pelabuhan itu. Dengan adanya penampungan yang layak ini, kinerja pegawai menjadi terdorong dan manfaat positif bisa dirasakan oleh infrastruktur dan manajemen pelabuhan Balikpapan.⁹⁶

Akan tetapi secara tak terduga suatu faktor ekstern menghambat semua rencana tersebut. Perang Dunia I yang mempengaruhi fluktuasi ekonomi global termasuk juga menurunkan eskalasi ekspor Hindia Belanda telah mengakibatkan kemacetan sejumlah proyek.⁹⁷ Salah satunya adalah proyek perluasan dermaga Balikpapan, yang dirancang berhasil terwujud pada tahun 1915. Justru karena pengetatan anggaran seperti yang disampaikan oleh

95 ANRI, *Brief der Directeur Burgerlijke Openbare Werken 15 November 1913 no. 5*, bundel *Algemeen Secretarie*.

96 ANRI, *Beluit van Gouverneur Generaal 10 Desember 1913 no. 39*, bundel *Algemeen Secretarie*.

97 Selama Perang Dunia I, yang dikaitkan juga dengan pertempuran dan blokade laut di Eropa, hubungan antara Eropa dan Hindia sangat terganggu. Meskipun Belanda menyatakan dirinya netral, situasi perang tetap tidak kondusif bagi transaksi ekonomi dan sejumlah pasar menutup diri terhadap ekspor. Akibatnya Belanda harus mencari konsumen netral dan terutama melakukan pemangkasan anggaran pengeluaran. Banyak produk ekspor yang tidak terangkut dan tertimbun di sejumlah pelabuhan, sehingga banyak proyek pembenahan pelabuhan yang terbengkalai atau tertunda. Kees van Dijk, *The Netherlands Indies and the Great War 1914-1918* (Leiden, 2007, KITLV Press), halaman 409.

Direktur Keuangan sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial,⁹⁸ Idenburg kemudian meminta kepada Direktur PU untuk menunda pelaksanaan pembangunan tersebut.⁹⁹

Namun demikian tindakan penundaan ini tidak terlalu mengganggu kinerja manajemen pelabuhan dan sektor keuangan pabean, karena sebulan sebelum keputusan ini dibuat, pemerintah telah mengambil langkah penanggulangan. Atas usul dari Direktur PU saat itu, agar sektor ekonomi pribumi mendapatkan lebih banyak perhatian dan peluang untuk mengimbangi resiko berkurangnya peran sektor perkapalan samodera di pelabuhan dan kota Balikpapan, sebuah dermaga khusus bagi perahu-perahu tradisional milik orang pribumi dibangun. Pembangunan ini tentu saja bisa berlangsung lebih cepat dengan material yang sederhana dan umumnya sudah tersedia, sementara biaya yang dikeluarkan juga lebih murah.¹⁰⁰

Berdasarkan rancang bangun yang diajukan oleh Direktur PU di atas, disertai dengan pertimbangan yang memadai dan khususnya kebutuhan biaya yang tidak terlalu besar, Gubernur Jenderal Idenburg memutuskan untuk mengabulkannya. Melalui keputusan ini, dan bantuan material yang dibutuhkan, sebuah dermaga kayu khusus bagi penambatan perahu-perahu tradisional milik orang-orang pribumi atau tongkang dari kapal-kapal besar sejauh lima belas meter bisa diwujudkan.¹⁰¹ Untuk sementara pembangunan dermaga ditunda sampai setelah Perang Dunia I berakhir.

Sementara penundaan pembangunan dermaga berlangsung, bukan berarti proyek pembangunan terhenti sama sekali. Renovasi bagi perumahan pegawai yang sementara ini menggunakan bahan material sementara dituntut mengingat jumlah pegawai akan terus bertambah dan kondisi rumah mulai menunjukkan kerusakan.

98 ANRI, *Brief van Directeur der Financieel aan Gouverneur Generaal 23 Mei 1915 no. 2161*, bundel *Algemeen Secretarie*.

99 ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris, 3 Juni 1915 no. 1347*, bundel *Algemeen Secretarie*.

100 ANRI, *Brief van Directeur der Burgerlijke Openbare Werken 21 April 1915 no. 1*, bundel *Algemeen Secretarie*.

101 ANRI, *Besuit van Gouverneur Generaal 3 Mei 1915 no. 15*, bundel *Algemeen Secretarie*.

Terutama hal ini terjadi pada kantor bendahara dari bea serta cukai ekspor-impor dan juga rumah mantri pabean yang ditempatkan di sana. Sementara ini mantri tersebut masih tinggal di kantor, dan ketika kesibukan kantor tersebut mulai meningkat, hal itu tidak lagi memungkinkan dan mantri harus dipindahkan ke sebuah rumah dinas tersendiri.¹⁰²

B. Infrastruktur Transportasi Darat

Di samping transportasi laut, Balikpapan juga memiliki jaringan komunikasi di darat yang dilayani oleh sejumlah jalan penghubung. Jalan-jalan ini menyediakan fasilitas pelayanan bagi pengangkutan dengan kendaraan darat ke berbagai kota yang bisa terjangkau secara alami, atau ke dermaga dan sepanjang pantai untuk menjangkau fasilitas transportasi air baik laut maupun sungai. Akan tetapi transportasi di darat berbeda dengan di laut, baik sifat maupun jenis dan fasilitas pendukungnya. Terutama dalam hal ini berkaitan dengan infrastruktur yang memungkinkan komunikasi itu. Jika transportasi laut sangat tergantung pada pelabuhan bersama seluruh kompleks pendukungnya, dengan kata lain mengumpul di suatu titik lokasi, transportasi darat mencakup bentangan jaringan jalan yang menghubungkan kota Balikpapan dengan daerah di sekitarnya. Oleh karena itu sifat transportasi darat menjadi lebih dinamis dibandingkan laut, karena bisa berlangsung setiap saat dan tidak tergantung pada musim atau cuaca.

Perbedaan lain antara jalan darat dan jaringan transportasi laut adalah hubungan antara lokasi kehidupan manusia dan sarana komunikasinya. Jalan utama yang menghubungkan Balikpapan dan kota-kota lain di Borneo Timur lebih banyak bermanfaat sebagai sarana transportasi ekonomi. Ini juga termasuk jalan yang menghubungkan kota dan pelabuhan seperti yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi jalan darat yang ada di dalam kota tidak selalu

¹⁰² ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 28 November 1916 no. 16, bundel Algemeen Secretarie.*

didominasi oleh fungsi ekonomi. Fungsi lain yang juga penting dan strategis dimiliki oleh jalan darat ini, dan ini membedakannya dengan jalur transportasi laut. Apa yang dimaksudkan di sini adalah jalan menjadi sarana komunikasi antarpemukiman. Jalan-jalan yang ada di darat, khususnya di kota Balikpapan dibuka seiring dengan pertumbuhan pemukiman penduduk yang permanen, bersamaan dengan pertumbuhan di sektor demografi. Oleh karena itu, antara keberadaan jalan dan pemukiman terdapat hubungan mutualisme, dan sering sulit dibedakan mana yang lebih dahulu atau lebih penting. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak orang yang lebih suka bermukim di tepi jalan raya untuk memudahkan akses dan komunikasi mereka.

Di Balikpapan, kondisi tersebut tampak pada jalan-jalan darat yang terdapat di pemukiman orang-orang Melayu. Pemukiman ini muncul di sepanjang pantai dan terutama juga di sekitar pelabuhan. Karena orang-orang Melayu ini sudah lama tinggal di lokasi itu sebelum pelabuhan Balikpapan ini dibangun, dapat diduga bahwa kehidupan mereka terkait erat dengan produktivitas maritim, khususnya pasokan produk laut sebagai sumber penghidupan primer. Setelah perkembangan zaman dan daerah ini terpengaruh oleh arus komunikasi dan ekonomi domestik yang lebih luas, sektor lain seperti perdagangan dan pelayaran mulai menjangkau mereka juga. Oleh karenanya mereka mempertahankan domisilinya di sepanjang pantai, dan pada umumnya mereka masih tetap berperan sebagai nelayan atau pelaut tradisional dengan perahu-perahunya yang terintegrasi dalam perkapalan besar dan aktivitas pelabuhan Balikpapan.¹⁰³

Apa yang menarik sehubungan dengan fasilitas transportasi darat ini adalah bahwa jalan-jalan di perkampungan orang-orang ini tidak dibuka sebagai bagian dari program pemerintah melainkan atas inisiatif penduduk setempat. Mereka memiliki aturan komunal yang disebut sebagai kerja bakti untuk membangun proyek-proyek

¹⁰³ ANRI, *Troepen commandant militaire memorie over Balikpapan, 1929*, reel no. 28, MvO serie 1e, halaman 15.

yang penting bagi kebutuhan dan kemajuan bersama. Proyek yang dimaksudkan di sini adalah pembangunan sarana pengairan dan pembuangan air, kebersihan lingkungan, keamanan dan ronda malam, serta pembangunan jalan, jembatan dan parit atau tanggul.

Pada kenyataannya ikatan komunal tersebut juga berlaku bukan hanya secara insidental melainkan secara rutin, yaitu diterapkan pada perawatan rutin proyek yang sudah dibangun. Oleh karena itu jalan-jalan yang ada di perkampungan penduduk di kota Balikpapan dirawat sendiri oleh penduduk. Perawatan ini mencakup kebersihan rutin yang dilakukan oleh setiap warga yang mempunyai rumah dan tinggal di sepanjang jalan itu, dan juga perbaikan apabila jalan tersebut mengalami kerusakan sejauh material yang ada terjangkau oleh penduduk atau tersedia di lingkungan sekitarnya.

Apa yang menarik dari keberadaan jalan-jalan di kota Balikpapan ini adalah bahwa bentangan jalan ini sering lebih tinggi daripada rumah. Ketika pembangunan jalan lebih dulu berlangsung daripada rumah, bisa diduga bahwa pembangunan rumah yang lebih rendah daripada jalan ini merupakan penyimpangan dari aturan rumah adat. Mengingat rumah adat umumnya dibuat sebagai rumah di atas tonggak atau panggung, yang otomatis akan lebih tinggi daripada jalan, rumah biasa yang dibangun lebih rendah daripada jalan ini dianggap merupakan model Jawa. Salah satu resikonya adalah ketika terjadi hujan deras dan aliran sungai yang mengalir di dekatnya meluap serta menggenangi jalan, bisa diduga bahwa rumah-rumah itu akan kemasukan air atau bahkan lebih parah lagi bisa tergenang air selama beberapa saat sampai air itu kembali surut. Hal ini tidak tertutup kemungkinan mengingat kebanyakan orang membangun rumah di tepi jalan sekaligus di dekat aliran sungai untuk memudahkan pengambilan air bagi kebutuhan mereka.¹⁰⁴

104 ANRI, *Militaire memorie over Balikpapan, 1931*, reel nomor 28 MvO serie 12, halaman 21.

Suatu hal lain yang menarik sehubungan dengan jalan ini adalah adanya jalan kedua yang dibuka dengan arah membentang sejajar dengan deretan rumah. Terutama ini terjadi di dataran tempat pemukiman orang Melayu setempat yang bentuknya memanjang. Pola demikian sebenarnya bukan merupakan asli Balikpapan, melainkan juga telah ditemukan di kota-kota lain sebelum ini, seperti Samarinda Sebrang, Kota Bangun dan Muara Kaman. Di kota-kota tersebut pemukiman orang Melayu yang dominan menggunakan pola jalan-jalan lurus dengan perempatan seperti yang kemudian diadopsi di Balikpapan.

Sementara itu mengenai hubungan antarkota, pemerintah colonial Belanda juga mencurahkan perhatian bagi kota yang memiliki prospektif bagi perkembangan ekonomi regional ini. Sejak awal abad XX pemerintah sudah menyusun rencana untuk membuka jaringan jalan di wilayah pantai timur Kalimantan, dan Balikpapan ditempatkan di dalam kompleks jaringan ini. Komunikasi yang terus-menerus dan semakin intensif dengan Samarinda sebagai pusat pemerintahan setempat menuntut adanya fasilitas jalan yang baik dan memadai dari Balikpapan. Sejak tahun 1907 rencana proyek perluasan jalan yang ada antara Balikpapan dan Samarinda mulai dikerjakan dengan harapan bahwa jalan tersebut bisa dijadikan sebagai jalan transportasi utama antara dua kota. Sementara itu Residen Belanda di Banjarmasin diminta untuk mengawasi dan membantu pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh dinas Pekerjaan Umum tersebut.¹⁰⁵

Tampaknya jalan ini bukan hanya dibangun demi kepentingan komunikasi dua kota tersebut. Sebaliknya jalan ini menjadi bagian utama dari rencana mega proyek transportasi darat yang dirancang oleh pemerintah Kolonial untuk wilayah Karesidenan Borneo Selatan dan Timur. Dalam suratnya tanggal 20 Maret 1908, atas perintah Gubernur Jenderal van Heutsz, Sekretaris Negara meminta informasi kepada Residen Borneo Selatan dan Timur Mayor Swartz tentang sampai di mana pekerjaan ini. Pada saat

105 ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris 20 Maart 1908 no. 818*, bundel *Algemeen Secretarie*.

yang bersamaan Mayor Swartz juga diminta pertimbangannya tentang rancangan penyambungan jalan dari Balikpapan ke arah selatan sehingga bisa menjangkau ibukota Banjarmasin. Bila rencana ini dapat diwujudkan, Banjarmasin akan dihubungkan lewat jaringan jalan darat dengan kota-kota di sepanjang pantai timur Kalimantan melalui Balikpapan.

Tuntutan bagi pengadaan jalan ini menjadi semakin tinggi, terutama jalan darat yang menghubungkan komunikasi antarkota dari dan menuju Balikpapan, ketika seluruh daerah Kalimantan Timur terbuka bagi lahan investasi bagi eksploitasi sumber daya alam oleh sejumlah perusahaan asing. Hubungan Samarinda, Balikpapan, Kutai dan kota-kota lain dalam jarak jauh seperti Makasar dan Banjarmasin berlangsung semakin intensif dan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif. Pelayanan pelabuhan yang telah mendapatkan fasilitas baru juga menuntut pengadaan jalan darat ini karena menjadi urat nadi yang akan menghidupkan dinamika ekonominya. Beberapa pengangkutan produk dari pedalaman atau sebaliknya menuju pedalaman dari pelabuhan ini terus berlangsung seiring dengan kenaikan eskalasi pelayaran domestic di pelabuhan tersebut, terutama dengan Banjarmasin dan Makasar, dua pelabuhan domestic utama di kawasan Indonesia bagian tengah.¹⁰⁶

Setelah berakhirnya Perang Dunia I dan situasi perekonomian berangsur-angsur pulih normal kembali, disertai dengan komunikasi global yang semakin intensif, perekonomian Hindia Belanda kembali berfungsi dengan baik meskipun secara bertahap. Pemerintah kolonial mulai bisa kembali memikirkan rencana pembangunan infrastruktur fisik yang terhambat selama beberapa tahun sebagai akibat krisis anggaran yang disebabkan oleh perang itu. Salah satu perhatian pemerintah yang kembali dicurahkan

106 Setelah dibangunnya dermaga bongkar-muat di pelabuhan Balikpapan, ekspor dan impor ternak juga terjadi di pelabuhan ini dari beberapa kota pelabuhan di pantai timur Sulawesi seperti Donggala, Toli-Toli, Pare-Pare dan Makasar. Bahkan pelabuhan Balikpapan menunjukkan lebih banyak aktivitas dan pelayanan dibandingkan Samarinda, yang lebih sedikit disinggahi kapal-kapal besar, sehingga pelayanan kesehatan juga harus dilakukan dari Balikpapan untuk Samarinda. "Ups en Down" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 8 Agustus 1908, lembar ke-4.

adalah proyek pembangunan jaringan jalan di Karesidenan Borneo Selatan dan Timur.¹⁰⁷

Kini pemerintah tampil dengan suatu rencana yang lebih serius dan terpadu untuk melakukan penyelidikan lapangan bagi pembukaan jaringan jalan di pedalaman. Meskipun dalam rencana ini Banjarmasin tetap dijadikan sebagai sentra dari jaringan jalan darat yang akan dibuka ke berbagai arah menuju sejumlah kota, proyek ini diharapkan akan mampu mendorong perkembangan daerah pedalaman dan memudahkan transportasi dari daerah pedalaman ke pelabuhan-pelabuhan, yang akan berdampak pada peningkatan kemakmuran. Untuk itu pejabat dari Departemen PU Insinyur Eelda disertai kewenangan mengadakan penyelidikan tersebut.¹⁰⁸

Akan tetapi mengingat daerah yang menjadi lahan penelitiannya mencakup seluruh pedalaman Karesidenan Borneo Selatan dan Timur, termasuk beberapa bagian yang masih dalam proses pengamanan atau pasifikasi dan belum sepenuhnya diletakkan di bawah pengaruh pemerintah secara langsung, dalam hal ini pihak PU harus bekerjasama dengan dinas zeni angkatan darat, yang dalam hal ini menunjuk Kapten Habbema untuk membantunya. Dengan bantuan Habbema, pengukuran dan pemantauan lapangan bukan hanya dapat segera dilaksanakan melainkan juga memperoleh dukungan dan fasilitas sepenuhnya yang dimiliki oleh militer.¹⁰⁹

Daerah Balikpapan sendiri mengalami pembangunan proyek ini baru sepuluh tahun kemudian, dan hal ini berlangsung setelah di kota Balikpapan muncul sejumlah lokasi pengeboran tambang minyak. Dengan demikian, pembangunan jalan yang berlangsung lebih banyak dikaitkan dengan aktivitas perusahaan minyak bumi atau bahkan dibiayai oleh perusahaan tersebut. Hal ini bisa diterima mengingat anggaran pemerintah sendiri yang terbatas pada saat itu, dan juga jalur yang digunakan untuk merancang proyek

107 ANRI, *Brief van Gouvernement Secretaris*, 9 Maart 1918 no. 6, bundel *Algemeen Secretarie*.

108 ANRI, *Telegram van Gouvernement Secretaris*, 1 Juni 1918 no. 624, bundel *Algemeen Secretarie*.

109 ANRI, *Telegram van Gouvernements Secretaris*, 17 Juni 1918 no. 673a, bundel *Algemeen Secretarie*.

pembangunan jalan menggunakan kota Banjarmasin sebagai titik tolak. Antara Banjarmasin dan Balikpapan bukan hanya terbentang sangat jauh tetapi juga harus melewati hutan yang masih sulit ditembus, sehingga program tersebut berlangsung lambat.

Sementara itu dari kalangan pengusaha swasta pertambangan yang telah beroperasi di Balikpapan, kebutuhan jalan penghubung antarkota tidak lagi bisa ditunda.

Terutama yang menjadi prioritas mereka adalah jalan antara pelabuhan dan pusat kota dan pusat lokasi penambangan minyak bumi. Mengingat mereka tidak bisa menunggu proyek pembukaan jalan pemerintah, para pengusaha perminyakan ini membentuk tim atas biaya mereka sendiri mulai dari pengukuran lahan, pembebasannya hingga pengerjaan proyek jalan itu sampai pelengkapannya dengan berbagai instalasi pendukung. Mengingat rencana mereka adalah jalan yang siap dilalui oleh kendaraan bermotor yang digerakkan oleh mesin, instalasi pendukung ini mencakup pompa bensin untuk bahan bakar, bengkel perbaikan, hingga pembangkit listrik dan bengkel konstruksi perakitan. Pada awal bulan Mei 1924 jalan antara pelabuhan Balikpapan dan lokasi penambangan minyak milik *Bataafsche Petroleum Maatschappij* sudah jadi dan siap untuk dilalui.¹¹⁰

Selanjutnya sejumlah lokasi penambangan minyak lain juga membutuhkan rencana bagi pembangunan jalan. Prioritas utama mereka adalah sentra-sentra pengeboran seperti Samboja, Kuala Samboja dan Balikpapan sendiri. Jalur transportasi di kota-kota itu sudah ada tetapi kemudian pada tahun 1931 diperlebar dan diaspal, bersamaan juga dengan pengaspalan sejumlah jalan di dalam kota Balikpapan. Karena pembiayaan oleh perusahaan minyak swasta, jalan-jalan ini sering disebut sebagai jalan partikelir.¹¹¹

Jalan baru mereka buka dari Klandesan Ilir sampai Karang Anyar. Jalan terakhir ini berbeda dengan jalan-jalan lainnya, terutama bidang pembiayaan. Karena panjangnya jalan ini menembus

110 "Te Balikpapan" dalam *De Indische Courant*, 8 Mei 1924, lembar ke-1.

111 *ANRI, Memorie van Overgave Assisten Residen van Nijis 1933*, reel nomor 28, MvO serie 1e, halaman 2.

daerah *zelfbestuur* Kutai, maka sebagian jalan ini disebut sebagai jalan daerah (*landschapweg*) dan jalan BPM (*BPM weg*). Hal itu membuktikan adanya kerjasama antara dua pihak dalam hal pembiayaan dan penggarapan. Kerjasama ini juga ditunjukkan dalam pengerasan atau pengaspalan jalan dari Marconie ke Kampung Baros. Pada umumnya peran dari kalangan swasta sangat besar karena anggaran yang disediakan oleh negara untuk daerah Balikpapan dan sekitarnya sangat terbatas, sementara sebagian besar dana masih dicurahkan untuk wilayah Banjarmasin ke pedalaman.

Direktur PU van Buuren sendiri pada pertengahan tahun 1931 melakukan perjalanan dinas ke beberapa pulau di luar Jawa, termasuk ke pedalaman Kalimantan. Sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang mengakibatkan deficit anggaran pada koloni Hindia Belanda, proyek pembangunan sejumlah jalan di pedalaman Kalimantan dari Banjarmasin yang dibiayai oleh pemerintah juga merasakan dampaknya.¹¹² Mega proyek yang dirancang adalah pembukaan jalan antara Banjarmasin ke Samarinda dengan cabang menuju Balikpapan dan Tanahgrogot di daerah Kesultanan Pasir. Dalam perkembangannya setelah berlangsung beberapa tahun, proyek ini baru sampai ke Tamiang Layang di utara yang berada dalam kondisi baik, sementara jalan yang mencapai Kendongan masih sebagian siap sehingga belum layak untuk dilewati.¹¹³

Setelah mengalami beberapa penundaan, rencana yang mengarah pada sambungan antara Balikpapan dan Banjarmasin mulai diwujudkan pada pertengahan September 1937. Kini pelaksana dari proyek pembangunan ini bukan Departemen PU melainkan Departemen Perhubungan dan Pengairan (*Departement van Verkeer en Waterstaat*) yang mengambil alih peran dan tanggungjawab dari

112 "Wegaanleg", dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 21 November 1930, lembar ke-1. Pemerintah sendiri merasa bahwa dalam Sembilan bulan pertama sejak pertama kali proyek pembangunan jalan itu dicanangkan, yaitu Januari 1930, kemajuan masih sangat lambat dibandingkan target yang seharusnya dicapai.

113 "Een onderhoud met den Directeur BOW", dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 8 Juni 1931, lembar ke-1

PU sejak akhir tahun 1934.¹¹⁴ Direktur Perhubungan menunjuk seorang pejabat dari kantornya Ir. S.A. Blok yang akan bertugas menjadi pelaksana proyek itu dan berkedudukan di kantornya yang dibuka di Balikpapan. Dalam rancangannya, Blok ingin menyambungkan jalan dari Tanahgrogot ke selatan hingga bertemu dengan jalan dari Banjarmasin yang telah dibangun oleh pemerintah selama ini. Untuk itu di Tanahgrogot, ia memiliki asisten yang bernama Ir. Klenke. Semua dana dibiayai oleh pemerintah, tetapi perekrutan tenaga kerja dan pemberian makan mereka ditanggung oleh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan para penguasa pribumi setempat.¹¹⁵

Dari kalangan public, rencana ini mendapatkan sambutan besar seperti yang dimuat dalam media massa saat itu:

*Aan de voorbereidingen voor den aanleg van den nieuw weg tusschen Balikpapan en Bandjarmasin wordt hard gewerkt. Zoowel de BPM als de militaire en civiele wereld hebben groote belangen bij een spoedigen voortgang van dit omvangrijke werk. Een groote handicap is het ernstige gebrek aan gebouwen voor huisvesting van koelies en personeel der kantoren en aan een goed kantoor gebouw zelf.*¹¹⁶

Persiapan bagi pembukaan jalan baru antara Balikpapan dan Banjarmasin dikerjakan dengan giat. Baik BPM maupun kalangan militer dan sipil memiliki kepentingan besar dalam kemajuan cepat dari proyek yang besar ini. Suatu hambatan utama adalah kekurangan serius bangunan bagi perumahan kuli dan pegawai kantor dan gedung kantor yang baik sendiri.

Dari kutipan di atas bisa diketahui betapa penting jalan tersebut, sehingga berbagai pihak ikut terlibat dalam pelaksanaannya dan mempunyai kendala yang sama. Pada prinsipnya bisa diduga

114 Wewenang departemen baru ini adalah mencakup semua proyek yang terkait dengan infrastruktur perhubungan dan penggunaan tenaga air yang merupakan kekayaan alam di bawah control negara. Departemen ini sendiri dibentuk dengan dasar *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1934 nomor 549 dan kemudian disempurnakan dengan *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1937 nomor 565.

115 "De weg Bandjarmasin-Balikpapan", dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 15 September 1937, lembar ke-16.

116 Wegaanleg Balikpapan-Bandjarmasin", dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 6 November 1937, lembar ke-12.

bahwa proyek jalan Banjarmasin-Balikpapan ini merupakan suatu mega proyek yang terbesar di seluruh Kalimantan era colonial.

Setelah berlangsung kira-kira lima bulan, jalan dari Muara sampai Tanahgrogot sejauh 130 kilometer berhasil diselesaikan. Tahap kedua yang menjadi prioritas adalah sambungan jalan dari Balikpapan ke Samarinda, karena jalur ini sangat dibutuhkan. Namun demikian sesuai dengan kesepakatan awal yang melibatkan para penguasa swapraja, sambungan jalan Tanahgrogot hingga Balikpapan ini melewati daerah kekasaan Sultan Kutai sejauh 200 kilometer. Oleh karena itu, untuk mewujudkan semua rencana pembangunan jalan ini, pemerintah Belanda mendesak Sultan Kutai agar berkenan juga membantu baik dalam bentuk keuangan maupun pengerahan tenaga kerja dari penduduknya.¹¹⁷

Selama dua tahun proyek itu dikerjakan yang membentang sampai 268 kilometer. Pada kenyataannya medan yang ditempuh sangat berat sehingga penduduk setempat akhirnya tidak mau melakukan pekerjaan wajib untuk mewujudkan rancangan itu. Sementara itu di samping jalur antara Tanahgrogot sampai perbatasan Kutai, juga dari Kutai ke Balikpapan dan Samarinda yang mencapai 235 kilometer masih harus dikerjakan. Untuk mewujudkan kedua proyek ini, Sultan Kutai akhirnya membantu dengan pembiayaan, sementara pemerintah mengerahkan kuli Madura yang didatangkan sebagai tenaga kerjanya. Untuk mewujudkannya, jalur itu dibagi dalam sejumlah seksi yang masing-masing mencakup beberapa puluh kilometer sehingga akan mempercepat penyelesaiannya.¹¹⁸

Namun demikian, pembukaan jalan ini lebih banyak diprioritaskan bagi pengangkutan massal terutama untuk produk baik hasil hutan maupun tambang. Bagi pengangkutan penumpang, dengan melihat lokasi Balikpapan dan jarak yang memisahkannya dari kota-kota besar lain, fasilitas transportasi lain telah lama dipikirkan

117 "Wegen vraagstuk Buitengewesten" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 9 April 1938, lembar ke-5.

118 "Balikpapan-Bandjarmasin" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 27 Oktober 1939, lembar ke-5.

dan juga akhirnya dibangun oleh mereka yang berkepentingan, yaitu pesawat udara. Dengan dimulainya usaha penerbangan di koloni Hindia Belanda pada decade kedua abad XX, Balikpapan sebagai lokasi bagi eksploitasi pertambangan menawarkan lahan untuk itu dan pihak BPM yang berkepentingan bagi komunikasi cepat jarak jauh, mencurahkan dana bagi pembangunan lapangan udara. Proyek ini selesai pada bulan Januari 1936.¹¹⁹

Setelah lapangan udara itu siap digunakan, pesawat yang memanfaatkan adalah milik KNILM (*Koninklijk Nederlandsch Indie Luchtvaart Maatschappij*).¹²⁰ Perusahaan milik kerajaan ini memegang monopoli atas semua kegiatan penerbangan pesawat baik domestic maupun internasional. Dengan menggunakan lapangan udara di Balikpapan, pesawat-pesawat KNILM melayani hubungan antara Balikpapan dan kota-kota di Jawa, yaitu Batavia dan Surabaya. Penerbangan perdana terjadi pada tanggal 8 Pebruari 1936 dan menandai awal dari komunikasi udara di Balikpapan.¹²¹

C. Infrastruktur Komunikasi Lain

Selain jalur pelayaran melalui laut dan pelabuhannya, serta jalur pengangkutan dan komunikasi lewat darat di jalan raya dan jalan-jalan perkotaan, Balikpapan juga mempunyai sarana komunikasi dengan kota-kota lain dalam bentuk jaringan kabel dan administratif. Apa yang dimaksudkan di sini adalah jaringan komunikasi dengan menggunakan telegram dan pos.

Sesuai dengan perkembangan kondisi masa itu, pos dan telegram menjadi dua sarana komunikasi yang semakin penting, seiring dengan meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat, khususnya dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Hindia Belanda pada awal abad XX telah menunjukkan arah pada bentuk

119 "Vliegveld te Balikpapan", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 11 Oktober 1935, lembar ke-5. Pembangunan itu dimulai pada bulan Oktober 1935 di bawah pengawasan dari L. Hovestadt, pejabat di kantor penerbangan KNILM.

120 "De nieuwe KNILM-lijn: wekelijks naar Balikpapan" dalam *De Sumatra Post*, lembar ke-6.

121 "Batavia-Balikpapan: eerste vlucht", dalam *De Indische Courant*, 8 Februari 1936, lembar ke-10.

peningkatan kualitas tersebut di antara penduduknya, dan akibatnya juga kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara tertulis.¹²² Hal ini terlepas dari semakin banyaknya orang Eropa dan pendatang asing lain dari kalangan intelektual yang masuk dan tinggal di Hindia Belanda, serta menjadikan komunikasi tersebut sebagai salah satu kebutuhan utama.

Balikpapan sendiri juga tidak terlepas dari kebutuhan tersebut. Sejak akhir abad XIX, dengan kehadiran orang-orang Eropa di kota ini,¹²³ hubungan dengan kota-kota lain khususnya dalam jarak jauh yang tidak terjangkau oleh jalur komunikasi fisik dalam waktu cepat seperti Batavia, Surabaya, Makasar dan bahkan ke Singapura, fasilitas pos dan telegram menjadi kebutuhan utama. Beberapa orang telah menjadi konsumen rutin dari fasilitas pelayanan telegram tersebut. Akan tetapi dalam kenyataan yang ada, sering terjadi kendala alami yang mengakibatkan jaringan telegram dengan kota-kota lain terputus. Kondisi ini mempersulit komunikasi rutin yang lancar dan tentu saja menjadi objek keluhan masyarakat, yang kemudian disalurkan melalui media massa yang diterbitkan di koloni ini.¹²⁴

Hal tersebut bukannya tidak disadari oleh pemerintah kolonial. Bahkan pemerintah sendiri juga memerlukan fasilitas ini bagi komunikasi untuk kepentingan administrasinya. Bagi sebuah kota yang tumbuh menjadi pusat aktivitas kehidupan mo-

122 Perubahan kondisi ini dipicu oleh peningkatan pesat di sector pendidikan bagi masyarakat Hindia, khususnya orang pribumi, sejak tahun 1892 dan berlangsung semakin intensif sejak diundangkannya Politik Etis pada tahun 1900 yang memberikan fasilitas pendidikan Barat kepada penduduk. Alumnus sekolah-sekolah ini banyak direkrut sebagai pegawai pemerintah dalam jajaran birokrasi dan juga pada perusahaan-perusahaan swasta. Mereka tampil sebagai elite baru (*white collar elite*) dalam kehidupan social yang banyak memanfaatkan fasilitas komunikasi modern. H.W. van den Doel, *Het rijk van Insulinde: Opkomst en ondergang van Nederlandsche kolonie* (Amsterdam, 1996, Prometheus), halaman 167.

123 Kehadiran orang-orang Eropa ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas eksploitasi ekonomi mereka terhadap kekayaan alam Balikpapan dan sekitarnya, terutama sector pertambangan minyak dan kemudian juga hutan. Bukan hanya orang Belanda yang mengambil peran sebagai investor di sini, bahkan orang Eropa lain dan terutama Inggris juga mulai menunjukkan peningkatan peran dan pengaruh mereka di Balikpapan. Hal ini terbukti dengan semakin banyak dirasakan kehadiran orang-orang Inggris di sana, yang diduga terkait dengan eksploitasi tambang minyak mereka di Kalimantan Utara, dan kapal-kapal Inggris secara rutin menyinggahi pelabuhan Balikpapan sejak tahun-tahun pertama abad XX. "Balikpapan" dalam *Het nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië*, 20 Desember 1906, lembar ke-1.

dern, pemerintah memerlukan kedua fasilitas itu sebagai sarana komunikasi administratifnya. Untuk itu setelah mendengar pertimbangan dari pemerintah daerah, pada tanggal 17 April 1902 pemerintah memberikan kewenangan kepada Direktur Pekerjaan Umum untuk merancang sebuah kantor pos dan telegram bersama perangkatnya yang memadai dan lebih baik daripada yang ada. Tujuannya adalah agar hubungan telegram tidak lagi terganggu seperti yang selama ini terjadi.¹²⁵

Direktur PU yang menerima tanggungjawab ini segera memerintahkan jajarannya untuk mempelajari peluang pembangunan proyek tersebut. Dari tim yang menangannya, sebuah perkiraan anggaran sebesar f 26.100 diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Akan tetapi setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata kebutuhan yang muncul bukan hanya menyangkut pengadaan kantor pos dan telegram, melainkan juga rumah dinas setidaknya bagi kepala kantor pelayanan. Akibatnya dana tersebut tidak lagi mencukupi dan bertambah menjadi f 31.273.¹²⁶

Tampaknya pemerintah colonial sangat serius mempertimbangkan pengadaan fasilitas telegram ini. Di samping infrastruktur perkantoran, perhatian juga dicurahkan bagi pemasangan kabel untuk sambungan jarak jauh. Sasaran pemerintah adalah menyelesaikan pemasangan kabel telegram yang menghubungkan Balikpapan dan Banjarmasin sehingga komunikasi antara kedua kota ini bisa berlangsung lancar tanpa gangguan mengingat arti pentingnya. Namun demikian keberadaan sambungan kabel kedua kota tersebut tidak hanya difungsikan bagi komunikasi local, melainkan diletakkan dalam konteks lebih luas. Hal ini dirilis oleh berita pers colonial masa itu sebagai berikut

Waar de landlijn Bandjarmasin-Balickpapan door den aanleg van een kabel van de laatste plaats naar Manado – die waarschijnlijk in Mei voor het verkeer zal kunnen worden opengesteld – en van daar over de Paulau eilanden naar China zoowel als Amerika, een schakel wordt in het international kabel verkeer, dat gene langdurige storingen duldt, zooals ze zich op die landlijn,

125 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 17 April 1902 no. 29, bundel Algemeen Secretarie.*

126 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 26 Juli 1903 no. 3, bundel Algemeen Secretarie.*

*vooraal in het Pasirsche zullen kunnen voordoen, wordt overwogen den aanleg van een zeekabel dien de Java-Bandjermasinsche kabel in verbinding stelt met Kota Baroe en Balikpapan.*¹²⁷

Bila jalur darat Banjarmasin-Balikpapan melalui pemasangan sebuah kabel dari Balikpapan ke Manado (yang mungkin pada bulan Mei akan bisa dibuka bagi komunikasi) dan dari sana melalui kepulauan Palau baik ke Cina maupun Amerika, sebuah sambungan melalui jaringan kabel internasional yang tidak mengalami banyak gangguan, seperti pada jalur darat itu, terutama bisa diwujudkan di Pasir, akan dipertimbangkan pemasangan kabel laut yang menghubungkan jalur Banjarmasin-Jawa ini dengan Kotabaru dan Balikpapan.

Dari pemberitaan di atas tampak bahwa jaringan itu jelas bukan hanya terbatas pada konteks komunikasi domestic atau regional, melainkan internasional. Hal ini tidak mengherankan mengingat Balikpapan pada awal abad XX sudah menjadi lahan bagi investasi perusahaan internasional, dan dengan demikian akan siap menerima kehadiran banyak modal dan tenaga asing di kotanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sudah bisa diduga bahwa dinas pos dan telegram tidak mungkin dikelola secara tidak professional. Sebagai suatu bentuk institusi pelayanan pemerintah, dinas ini merupakan suatu lembaga yang terstruktur dan mempunyai jaringan kerja dengan batas-batas yang jelas. Oleh karenanya dinas ini harus dipimpin oleh seorang petugas khusus yang diangkat untuk itu. Mengingat dinas pos dan telegram sudah lama ada di dalam struktur pemerintahan colonial, pengangkatan seorang petugas yang akan memimpin kantor pos dan telegram di Balikpapan bukan merupakan persoalan yang sulit. Pemerintah telah merencanakan itu, namun demikian harus ada suatu fasilitas bagi penempatannya. Untuk itu pemerintah colonial merancang pembangunan sebuah rumah khusus bagi petugas ini yang disusun oleh Direktur PU.¹²⁸

127 "Telegraaf kabel te Bandjermasinshe" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 24 Desember 1902, lembar ke-3.

128 *ANRI, Brief van Directeur der Openbare Werken*, 11 Februari 1913 no. 1, bundel *Algemeen Secretarie*.

Dari hasil perhitungan Direktur PU ini, diperoleh pertimbangan bahwa pembangunan sebuah rumah dinas akan lebih efektif jika rumah dinas bagi kepala kantor itu disatukan dengan kantor pos dan telegram. Sementara ini kantor pos yang ada sejak tahun 1903 masih sangat sederhana dan tidak lagi dianggap layak untuk menampung kebutuhan pelayanan pos dan telegram, terutama dari kalangan investor yang semakin banyak dan meningkat eskalasinya. Berdasarkan usul dari Direktur PU tersebut, Gubernur Jenderal Idenburg kemudian memutuskan bahwa kantor pos dan telegram juga mengalami perluasan bersama dengan rumah dinas bagi kepala kantor tersebut.¹²⁹

Akan tetapi kembali pemerintah terkendala dalam pengucuran dana sebagai akibat krisis Perang Dunia I. Akibatnya rencana pembangunan ini kembali ditunda dan menunggu hingga terdapat sejumlah dana yang memadai. Penundaan ini juga berpengaruh pada pengangkatan pegawai yang telah disiapkan dalam jajaran birokrasi pemerintah, terutama yang berada di bawah residen. Dalam hal ini pejabat kepala kantor pos dan telegram yang telah disiapkan menanti keputusan penempatan di lokasi kerjanya.¹³⁰

Melihat situasi yang belum menentu demikian, pada bulan April 1917 pemerintah bermaksud meninjau kembali keputusan pembangunan rumah dinas kepala kantor pos dan telegram serta perluasan kantor yang telah diputuskan pada tanggal 24 Februari 1913 itu. Meskipun pemerintah telah menyanggupi untuk menyediakan dana, namun sampai saat itu belum terdapat jumlah dana yang memadai karena masih menanti pemulihan situasi deficit anggaran yang diakibatkan oleh kondisi perang. Jika proyek itu dipaksakan untuk dikerjakan pada saat itu, bisa diduga dana yang tersedia tidak akan mencukupi.¹³¹

129 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 24 Februarie 1913 nomor 17*, bundel *Algemeen Secretarie*. Anggaran yang dibutuhkan bagi seluruh biaya proyek pembangunan ini mencapai f 11.040 dan f 2718. Ada catatan bahwa material yang tersedia baik di gudang negara maupun dari penyerahan wajib penduduk bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban anggaran tersebut.

130 ANRI, *Brief van Directeur der Binnenlandsch Bestuur, 10 September 1916 no. 1/A*, bundel *Algemeen Secretarie*.

131 ANRI, *Renvooi 18 April 1917 no. 11127*, bundel *Algemeen Secretarie*.

Namun perubahan secara mendadak terjadi. Hal ini dipicu oleh kesanggupan dari kalangan swasta yang berkepentingan pada perluasan dinas pos dan telegram untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu persoalan dana yang menghambat proyek perluasan oleh pemerintah kemudian bisa memiliki peluang untuk dicarikan solusi. Ketika menerima tawaran ini, Gubernur Jenderal Idenburg kembali meminta Direktur PU untuk merancang anggaran bagi proyek tersebut. Dari hasil perhitungan Direktur PU, jumlah dana yang dibutuhkan untuk seluruh proyek itu mencapai f 15.740. Dengan dana tersebut, apa yang selama ini dirancang akan segera bisa terwujud dan sejak lima belas tahun terakhir, Balikpapan akan mendapatkan gedung kantor pos dan telegram baru lengkap dengan rumah dinas kepala kantornya.¹³²

Namun hal ini tidak berlangsung lama, mengingat perubahan baru kembali terjadi. Akan tetapi perubahan ini tidak disebabkan oleh kondisi local, melainkan pada factor luar yang tidak terduga. Pada tahun 1918 Balikpapan menerima fasilitas pemasangan sambungan jaringan telepon dari Banjarmasin. Kehadiran telepon sebagai sarana komunikasi modern menjadi suatu inovasi baru bagi kota itu, namun mengingat komunitas yang tinggal terdiri atas para pengusaha modern, telepon bukan lagi menjadi inovasi melainkan kebutuhan untuk berkomunikasi.

Penambahan pelayanan telepon pada dinas ini juga memerlukan penambahan jumlah pegawai yang khusus menangani telepon dan jaringannya. Pegawai ini berbeda dengan dua dinas lain karena adanya tuntutan keahlian khusus. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah pengangkatan pegawai yang otomatis dibutuhkan tempat tinggal dan ruang kantor khusus. Petugas yang khusus melayani pelayanan telepon ini disebut dengan jabatan komis, dan memiliki rumah dinas yang berbeda meskipun masih berada di lokasi kompleks kantor pos, telepon dan telegram. Oleh karenanya kembali pemerintah Batavia memerintahkan dinas PU untuk

132 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 29 Mei 1917 no. 56, bundel Algemeen Secretarie.*

merancang pembangunan bagi ruang kantor dan rumah dinas petugas telepon ini di lokasi yang sama.¹³³

D. Simpulan

Perkembangan prasarana dan infrastruktur komunikasi dan transportasi di kota Balikpapan menunjukkan suatu pola perkembangan bukan hanya bidang itu secara khusus, melainkan juga bisa memberikan deskripsi tentang perkembangan kota. Pertumbuhan di bidang transportasi laut yang dimotivasi oleh peningkatan eskalasi perkapalan, perkembangan transportasi darat yang dipengaruhi oleh tuntutan bagi adanya sarana komunikasi melalui jalan raya yang menghubungkan antarkota, dan sarana komunikasi non-fisik seperti pos, telepon dan telegram, semuanya menandai tumbuhnya kota Balikpapan sebagai suatu lokasi yang semakin dinamis dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan penghuninya.

Meskipun ada pertumbuhan suatu struktur demikian, perlu diperhatikan adanya perbedaan besar dari ketiga factor itu. Perkembangan dalam transportasi laut, yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan, didominasi oleh peran pemerintah kolonial. Dalam hal ini pemerintah bukan hanya berusaha untuk memberikan pelayanan bagi kebutuhan perkapalan besar tetapi juga memberikan ruang bagi pelayaran tradisional yang berjangkauan domestic. Meskipun demikian, mengingat tuntutan utama adalah kebutuhan modal besar, pelayanan bagi pelayaran tradisional ini juga diintegrasikan dalam struktur investasi modal yang berlangsung dan berakhir dengan keuntungan bagi pemerintah colonial sendiri.

Kondisi itu sedikit berbeda dengan pengadaan jalan raya dan kemudian juga pengangkutan udara. Pembangunan jalan raya yang meskipun pada akhirnya merupakan mega proyek colonial untuk menghubungkan pantai selatan dan pantai timur Kalimantan, tidak bisa dilepaskan dari kehadiran investasi swasta

133 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 25 November 1918 no. 74*, bundel *Algemeen Secretarie*.

di sector pertambangan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan kota Balikpapan. Oleh karena itu jika di sector pengembangan transportasi laut, pemerintah colonial bisa menanganinya dan menyisihkan peran swasta, dalam pembangunan jaringan komunikasi darat pemerintah harus melibatkan peran swasta dan kemudian juga penguasa pribumi.

Hal serupa, dalam batas yang lebih ringan, juga terjadi pada sarana komunikasi non-fisik. Pengadaan fasilitas ini yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan untuk membuka pelayanan komunikasi tidak langsung terutama bagi para pengguna swasta. Mengingat kehadiran pengusaha swasta yang melakukan investasi di Balikpapan sangat berperan dalam hal ini, sasaran pemerintah adalah menjadikan mereka sebagai konsumen dan pengguna jasa. Dengan demikian sinergi yang diwujudkan oleh pemerintah colonial dalam jenis komunikasi ini berbeda dengan transportasi di darat yang melibatkan peran langsung dari pihak swasta bagi pengadaan fasilitas.

Terlepas dari semua perbedaan di atas, ketiganya memegang peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kota Balikpapan. Melalui kehadiran ketiganya, bukan hanya hubungan terjalin antara daerah pedalaman dan kota Balikpapan serta antara kota Balikpapan dan kota-kota lain atau daerah lain, namun juga berdampak pada perubahan gaya hidup dan pemikiran penduduk kota tersebut. Hal ini akan tampak dengan munculnya kebutuhan baru yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.





**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB IV

MENUJU KEMAKMURAN KOLONI: EKSPLOITASI EKONOMI ATAS BALIKPAPAN

Eksploitasi ekonomi yang dimaksudkan untuk kepentingan memberikan kontribusi bagi struktur colonial di wilayah koloni Hindia Belanda menjadi salah satu aspek lain dari dominasi kolonialisme di samping hegemoni politik melalui struktur birokrasi pemerintahan. Hal serupa juga terjadi di kota Balikpapan, yang tumbuh dalam perkembangan ekonominya melalui wujud pertumbuhan kota. Dalam eksploitasi ini, terutama terjalin hubungan antara kebijakan sector ekonomi yang diambil oleh pemerintah colonial dan aplikasinya atas wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu dalam hal ini terdapat sejumlah aspek seperti aspek perdagangan, pertanian, dan kehutanan sebagai objek dari eksploitasi. Sementara itu sector transportasi dan pertambangan telah dibahas dalam bagian lain dari karya ini.

A. Pertanian

Pertanian menjadi suatu sector yang penting dan strategis dalam sistem ekonomi masa lalu di Balikpapan. Sector ini bukan hanya penting di bawah struktur yang dibangun oleh rezim kolonial melainkan juga berperan dalam menciptakan dinamisasi pada struktur tradisional yang didominasi oleh nilai-nilai social masyarakat pribumi. Apa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa pertanian pada prinsipnya mengalami proses kontinuitas dari struktur tradisional menuju struktur colonial, terutama pada aspek sistem perekonomiannya.¹³⁴

¹³⁴ B. Schuitemaker, "Korteschets van den landbouw in het oostmoesson rijkstgebied in de Zuider, en Oosterafdeling van Borneo", dalam *Landbouw*, tahun 1938, volume 14, halaman 741.

Karena sifat kontinuitas ini, pertanian pada dasarnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam polanya kecuali pada jenis tanaman yang ditanam dan produktivitas hasilnya yang semakin terkait dengan sector ekonomi makro melalui fluktuasi dalam ekspor produk. Jauh sebelum kehadiran rezim colonial di Kalimantan Timur dan sebelum penerapan strukturnya di Balikpapan, pertanian telah menjadi salah satu mata pencaharian penting penduduk setempat. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang tinggal di daerah pedalaman. Dalam kehidupan mereka, khususnya kekuatan kolektif yang sangat erat terkait dengan kekayaan alam, pertanian bukan hanya menjadi suatu kegiatan produksi melainkan juga sarat dengan nilai-nilai kepercayaan dan hubungan social.¹³⁵

Ketika komunitas tradisional mengalami perubahan dari pola kehidupan nomaden menuju permanen, pengaruh yang besar dialami oleh sector pertanian ini. Di daerah pedalaman Kalimantan termasuk di bagian timur, masyarakat tradisional yang menghuni daerah ini adalah suku Dayak. Suku ini dikenal memiliki keterkaitan yang erat dengan kekayaan alam, baik tanah, sungai maupun hutan. Mereka hidup praktis tergantung sepenuhnya dari apa yang dihasilkan oleh sumber daya alam itu secara langsung, seperti hasil pencarian ikan, pengambilan produk dari dalam hutan dan mengumpulkannya (meramu) serta produk tanaman yang tumbuh dari tanah.

Ketika pola nomaden ini mereka tinggalkan dan kemudian mereka mulai mengikuti kehidupan permanen, dengan membuka lahan dan menggarapnya terus-menerus secara intensif sambil usaha sampingan seperti menggembalakan hewan atau membibitkan dan memelihara ternak, sesuatu yang baru ditemukan yaitu

¹³⁵ Kekuatan kolektif ini bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ikatan kekerabatan yang berlaku dalam suku (*introvet*) melainkan juga pada lahan yang mereka huni secara kolektif, yang sering disebut sebagai *binua* atau *banua*. Di lahan ini mereka menerapkan sistem pertanian kolektif yang terpadu (*a collective, indigenous integrated farming system*). Endriatmo Sutarto, M.T. Felix Sitorus, and M. Yusup Napiri, *Decentralisation of administration: policy making and forest management in Ketapang District, West Kalimantan* (Jakarta, 2001, Center for international forestry research), halaman 36.

bentuk kepemilikan lahan dengan batas-batas yang jelas. Dalam pola hidup demikian, sistem pertanian mulai terbentuk dengan nilai-nilai yang dikaitkan pada kekuatan alam. Jika pada sistem nomaden, yang sering disebut dengan istilah berladang, praktis hampir tidak terdapat nilai sosial yang muncul, dalam sistem pertanian permanen nilai-nilai social tumbuh sangat pesat bahkan diyakini sebagai bagian dari sistem kepercayaan, termasuk pantangan.¹³⁶

Perubahan dari pola pertanian berladang yang nomaden menuju pertanian persawahan yang permanen di wilayah Kalimantan Timur berlangsung tidak serentak. Namun pada saat rezim colonial menegakkan kekuasaan di daerahnya, pola pertanian permanen telah mereka jumpai lebih dominan daripada pertanian nomaden. Salah satu yang menyebabkan perubahan ini adalah terbentuknya struktur kekuasaan dan social budaya oleh raja-raja pribumi yang menerapkan sistem pemerintahan feodalisme dengan tekanan pada hubungan patron-klien yang kuat. Di bawah pemerintahan raja-raja pribumi, yang bergantung pada upeti sebagai salah satu sumber pemasukannya, sistem pertanian permanen lebih diutamakan karena memudahkan control dan pemungutan bagian dari hasil produksi, dibandingkan sistem pertanian nomaden.¹³⁷

Suatu kebijakan yang penting dari para penguasa pribumi masa lalu dan sangat berpengaruh pada produktivitas pertanian tetapi juga pada perubahan sifat permanen ini adalah pembagian tanah-tanah yang diberikan kepada penduduk oleh para sultan

136 Bernard Sellato, *Nomads of the Borneo rainforest: the economic, politics and ideology of settling down* (Hawaii, 1994, University of Hawaii Press), halaman 118. Menurut Sellato, ada beberapa aspek dalam kehidupan nomaden suku-suku di pedalaman Kalimantan ini, yaitu ekonomi substensi untuk memenuhi kebutuhan hidup primer, konsep kewilayahan untuk menegaskan batas-batas pengaruh, organisasi social untuk memperkuat kolektivitas, dan adat termasuk juga ritual dan kepercayaan. Pantangan tersebut bisa dimasukkan dalam klasifikasi unsure adat atau kepercayaan. Sementara itu Sellato menyebutkan bahwa nomaden tumbuh dari budaya dan kebiasaan berburu di dalam hutan yang berpindah-pindah.

137 Salah satu cara mengontrol adalah dengan membangun pos dan menempatkan pegawai Kesultanan di muara sungai Mahakam, sebagai satu-satunya jalan keluar dari pedalaman bagi perahu-perahu pengangkut hasil panen atau hasil pengumpulan produk hutan. Dari situ, petugas ini akan mencegat setiap perahu atau kapal yang mengangkut hasil bumi dan memungut pajak sebagai upeti bagi Sultan Kutai. A.W. Nieuwenhuis, *In Centraal Borneo, reis van Pontianak naar Samarinda, vol. 1* (Leiden, 1900, E.J. Brill), halaman 358.

sebagai bentuk karunia (*Sultan grant*). Hal ini dijumpai di bawah Kesultanan Kutai, Pasir, Gunung Tabur dan juga Bulungan.¹³⁸

Dengan pembagian tanah ini, bukan hanya produktivitas pertanian yang menopang sistem pertanian permanen terbukti meningkat, melainkan juga pada ikatan patron-klien sebagai bentuk hubungan primordial antara penguasa dan kawula terjalin dan terjamin. Sementara di daerah pedalaman yang tidak terkontrol langsung oleh aparat kerajaan sistem pertanian nomaden masih dijalankan oleh kelompok-kelompok dengan ikatan kolektif tertentu, di daerah sekitar pusat-pusat pemerintahan yang ditandai dengan menguatnya ikatan primordial, praktis semua tanah difungsikan untuk penggarapan pertanian dengan pengolahan dan pengairannya bagi sistem produksi yang permanen.

Kecuali tanah-tanah yang disisihkan untuk kepentingan pribadi Sultan dan kebutuhan kratonnya, tanah-tanah di sekitar kota Balikpapan digarap oleh masyarakat dengan penguasaan hampir mutlak, meskipun di atas kertas tetap dinyatakan sebagai tanah milik Sultan. Upeti yang mereka setorkan kepada Sultan lewat para petugas yang dikirim dari pusat untuk menafsirkan dan memungutnya tidak memiliki jumlah standard tertentu dan hanya didasarkan pada penilaian dan kesepakatan pihak-pihak di lapangan. Begitu juga Sultan tidak terlalu memperhatikan jumlah melainkan hanya jenis upeti sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh kawula penggarap tanahnya.¹³⁹

138 Upeti ini disebut dengan istilah *basil tanah* yang jumlahnya sebenarnya ditetapkan sebanyak sepuluh persen dari hasil pertanian atau pengambilan produk dari dalam hutan. *Hasil tanah* ini sering juga disebut dengan istilah *cabutan* yang oleh Sultan Kutei diserahkan kepada pemerintah pada tanggal 6 Desember 1895 melalui Keputusan nomor 5. Sejak itu pemasukan utama dari sumber tradisional bagi Sultan adalah pajak kepala yang diterapkan atas setiap penduduk dewasa sekali setiap tahun dengan mengikuti sistem yang berlaku pada kawula pemerintah colonial, dan kerja wajib atau uang penebusannya yang bersumber dari sistem kerja tradisional. S.C. Knappert, "Beschrijving van de Onderafdeeling Koetei" dalam *BKI*, tahun 1905, halaman 587.

139 Apa yang menarik perhatian di sini adalah jenis upeti dibagi dalam jenis kelompok yang menyetorkannya, dan otomatis juga jenis tanah yang mereka kuasai. Misalnya kelompok Dayak Segai yang berjumlah sekitar dua ribuan orang wajib menyetorkan 4 pasu padi atau 12 gantang yang berjumlah 2400 pikul. Sementara ini dari kelompok Dayak Berusu setiap keluarga wajib menyetorkan 5 pasu padi (15 gantang) atau 900 pikul. Untuk penduduk yang memeluk agama Islam jumlah upeti padinya tidak ditetapkan kecuali menurut permintaan raja sendiri. J. Hageman, "Aantekeningen omtrent een gedeelte der Oostkust van Borneo" dalam *TBG*, tahun 1855, vol. 58, edisi ke-4, halaman 79.

Sementara itu penduduk pribumi, terutama suku Dayak, menunjukkan ketergantungan yang jauh lebih besar pada kondisi alam dibandingkan penduduk pendatang. Mereka tinggal di pedalaman dan khususnya di sepanjang aliran sungai Mahakam, tempat mereka menggantungkan penghasilannya dari produk alam. Mereka menangkap ikan dari sungai atau hewan dari dalam hutan, mengumpulkan hasil hutan yang mereka temukan dan selanjutnya juga pertanian pada tahap awal dalam sistem berladang seperti yang disebutkan di atas. Selain sistem ini, ada kendala lain yang mencegah orang-orang Dayak ini untuk membuka pertanian sawah secara permanen, setidaknya sampai akhir tahun 1920-an masih terjadi. Kendala ini adalah dominasinya kepercayaan yang bersifat takhayul, sesuai dengan keterikatannya dengan alam. Tanda-tanda alam tertentu mencegah mereka untuk membuka sawah permanen, menghentikan panen atau tidak meneruskan eksploitasi lahannya.¹⁴⁰

Kondisi tersebut jelas mempengaruhi tersedianya pasokan beras bagi kebutuhan pangan penduduk setempat, termasuk mereka yang tinggal di perkotaan. Kekurangan yang terjadi dari defisit panen pada akhir tahun 1920-an ini ditutup dari impor beras yang didatangkan dari Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Impor padi berjumlah sebagai berikut

1927	7.110.350 kg
1928	7.760.090 kg
1929	7.298.595 kg
1930	8.895.291 kg ¹⁴¹

Jika angka-angka tersebut dapat dipercaya, jumlah kenaikan pada tahun 1930 diduga berkaitan dari kegagalan panen karena factor cuaca atau factor alam lainnya daripada karena krisis

140 ANRI, *Troepencommando militaire memorie over Balikpapan 1929*, reel no. 28, MvO serie 1e, halaman 13.

141 ANRI, *Memorie van Overgave Onderafdeeling Balikpapan*, Kontroleur F.L. van Driest, Juli 1931, reel nomor 28, MvO serie 1e, halaman 10.

perekonomian yang tidak terlalu berkaitan dengan sector produksi pangan.

Meskipun demikian pertanian terutama padi menjadi suatu siklus penting dalam pola kehidupan social individu mereka. Masa panen padi dijadikan sebagai tonggak dari suatu perubahan dalam perhitungan waktu. Oleh karena itu sebelum dan sesudah waktu panen tiba, suatu upacara khusus diadakan. Terutama hal ini terjadi pada suku Dayak Kenyah dan Bahau, yang dikenal memiliki adat padi atau *lali*. Pada masa itu dengan pemasangan tanda adat di setiap rumah, sementara peralatan music gong dipukul. Mereka membangun gubuk di persawahan dan dihuni sepanjang malam dengan meninggalkan rumahnya, karena bagi mereka panen yang akan dipetik bisa hilang apabila ditinggalkan dalam kelalaian. Ini membuktikan bahwa padi menduduki posisi yang penting dalam kehidupan social budaya suku Dayak di pedalaman Balikpapan, dan terutama di sekitar aliran sungai Mahakam.¹⁴²

Pemerintah colonial sendiri telah mempertimbangkan situasi di atas, termasuk juga dengan kualitas penduduk pribumi, bagi upaya peningkatan produktivitas lahan untuk program swasembada pangan. Dalam rapat para pengelola dana karet pada prinsipnya menyetujui usul van Haeften dengan catatan bahwa pelaksanaan proyek itu tidak akan ditangani oleh pemerintah melainkan oleh pemborong swasta dengan harapan bisa mendapatkan penghematan dan efisiensi. Dari pembicaraan dengan van Haeften, akhirnya diputuskan untuk membangun masing-masing empat waduk penampung air dengan 13 pintu air di wilayah Kalimantan Selatan dan 3 waduk penampungan dengan 13 pintu air di wilayah Kalimantan Timur.¹⁴³

Setelah satu tahun berlangsung, dalam Konperensi Karet pertengahan Agustus 1936 di Batavia, pengurus Dana Karet ingin

142 ANRI, Militaire memorie van het troepen commando te Balikpapan, 1931, reel no. 28, MvO serie 1e, halaman 17.

143 "Besteding voor rubbergelden: en het woeste Borneo" dalam De Sumatra Post, tanggal 8 Mei 1935, lembar ke-11. Diharapkan dengan adanya pembangunan waduk tersebut, produktivitas pertanian padi di sekitar Balikpapan dan Samarinda akan meningkat dengan target produksi 40-50 pikul padi per bahu selama setahun.

melakukan evaluasi pelaksanaan hasil program kerja yang tanggung jawab pengawasannya diserahkan kepada kepala pemerintah daerah setempat. Untuk itu dalam rapat ini residen Borneo Selatan dan Timur Mann diundang untuk menjelaskan sejauh mana proyek tersebut sudah berjalan. Dalam pemaparannya, Mann mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat baik proyek pembangunan jalan maupun pembangunan waduk irigasi yang sudah direncanakan akan teralisasi dan siap mendukung produktivitas daerah serta penduduknya.¹⁴⁴ Sementara itu pada awal tahun 1937 pemetaan lahan yang dimanfaatkan bagi pegairan dari proyek ini telah siap dilakukan. Mann melaporkan bahwa hasil pemetaan menunjukkan lahan seluas 1461 kilometer persegi di sebelah utara Balikpapan dan di sebelah barat Samarinda akan teraliri oleh air irigasi dan bisa dimanfaatkan bagi sarana pertanian.¹⁴⁵

Akan tetapi di samping rancangan pembangunan proyek irigasi ini, para pengurus Dana Karet juga mengungkapkan bahwa potensi tanah yang subur dan pengadaan sarana infrastruktur pendukungnya tidak akan maksimal berproduksi jika diserahkan kepada penduduk setempat. Untuk itu rencana pengiriman kolonis petani Jawa dalam program kolonisasi kembali dimunculkan dalam laporan yang disampaikan oleh anggota Dewan Hindia Belanda C.C.J. Maasen yang kembali dari hasil kunjungannya ke Kalimantan Timur pada bulan Oktober 1937. Untuk itu Dewan Kolonisasi (*Kolonisatie Raad*) yang berwenang menangani proyek ini diberikan gambaran tentang daerah dan merasa tertarik bagi pengiriman kelompok kolonis ke wilayah tersebut. Bahkan dalam hal ini Dewan Kolonisasi mengusulkan agar sebagian tenaga kerja yang harus menyelesaikan proyek infrastruktur jalan dan irigasi yang masih tersisa bisa diambil alih oleh kaum kolonis. Di samping itu, pengiriman seorang ahli konsultan pertanian ke sana juga diperlukan untuk membimbing kaum kolonis Jawa ini

144 "De rubberconferentie: eerste dag" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 13 Agustus 1936, lembar ke-2.

145 *Indisch Verslag over het jaar 1937, eerste deel*, halaman 365.

memanfaatkan lahan dan prasarana yang ada secara maksimal termasuk jenis tanaman pangan yang akan dikembangkan dan dibudidayakan.¹⁴⁶

Rencana di atas tetap berjalan meskipun ada kritik dari seorang pejabat pertanian Dr. H. Loos yang pada bulan April 1938 telah mengunjungi daerah ini. Dari hasil kunjungannya, Loos beranggapan bahwa kolonisasi pertanian tidak akan terwujud dan begitu juga proyek irigasi karena petak-petak tanah yang saling terpisah dan menyulitkan pengairan secara terpadu. Sebaliknya Loos lebih setuju dengan pengiriman beberapa keluarga kecil saja yang akan tinggal secara terpisah untuk diserahi lahan bagi penggarapannya, yang mempunyai peluang berhasil lebih besar.¹⁴⁷

Namun setelah kunjungan Direktur Keuangan H. van Mook bersama rombongan pejabat Belanda ke karesidenan ini pada bulan Oktober 1939, pemerintah memutuskan untuk meneruskan langkah-langkah yang telah diambil. Bahkan pada awal November 1939 sebuah peraturan tanam wajib sawah (*Teeltdwangordonnantie* 1939) diberlakukan di karesidenan Borneo Selatan dan Timur.¹⁴⁸ Peraturan yang mewajibkan semua lahan kosong yang sesuai untuk itu ditanami dengan padi atau tanaman pangan lainnya ini berhasil menaikkan produktivitas pertanian. Sebagai hasilnya dalam waktu beberapa bulan kemudian, wilayah Borneo Selatan dan Timur tidak mengalami kemerosotan produktivitas seperti yang dialami oleh wilayah lain di Hindia Belanda.¹⁴⁹

146 "Kolonisatie op Selebes en Borneo" dalam *De Indische Courant*, tanggal 11 Oktober 1937, lembar ke-5.

147 "Inspectiereis van Dr. H.Loos", dalam *De Sumatra Post*, tanggal 2 Mei 1938, lembar ke-1.

148 *ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 4 November 1939 no. 30*, bundel *Algemeen Secretarie*. Peraturan ini sebelumnya telah diberlakukan di Jawa dan Madura pada tanggal 9 September 1939. Polanya mirip dengan *Kultuurstelsel* pada abad XIX, dengan perbedaan bahwa produk yang ditanam adalah tanaman pangan dan bukan tanaman dagang. Tujuannya adalah untuk mencegah kemerosotan produksi dan terjadinya bahaya kelaparan atau impor produk pangan dari luar yang berlebihan. H.V. Quispel, *Nederlandsch-Indië in den Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam, 1945, Wetherland Pub), halaman 41.

149 "Inlandsche landbouw en voedsel situatie" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 8 Januari 1940, lembar ke-9.

B. Perdagangan

Jika sector pertanian lebih mendominasi daerah pedalaman Balikpapan dan sekitarnya, sector perdagangan berpusat pada kota dan pantai serta hubungan antara keduanya. Dengan adanya pembagian sektoral ini, ada dua hal yang muncul sebagai perbedaan antara pusat dan pinggiran kota. Pertama, pertanian menghubungkan antara lahan dan aliran sungai sebagai bentuk dualitas sumber daya alam, sementara perdagangan menghubungkan aktivitas kota dan pelabuhan yang juga menunjukkan keseimbangan dualitas antara sumber daya tanah dan air. Kedua, jika pertanian memasok produknya ke kota, kota melalui perdagangan mendistribusikan komoditinya ke pedalaman. Kedua karakter ini menentukan dinamika hubungan antara pusat kota dan daerah pedalaman di Balikpapan serta kota-kota lain di Kalimantan Timur dengan pola yang sama.

Setidaknya ada tiga unsure penting dalam perdagangan di wilayah ini : sarana termasuk pasar dan pelabuhan, produk atau komoditi, dan pola yang berlangsung termasuk transaksi. Di samping pelaku, ketiganya menentukan proses perdagangan berlangsung dan dalam tingkatan apa perdagangan tersebut bisa dianggap telah terjadi. Ketiganya memang tidak bisa saling dipisahkan karena agar bisa mendorong proses perdagangan berlangsung, semua memiliki peran masing-masing dan memadukannya yang akan menciptakan dinamisasi proses transaksi dan ekonomi tersebut.¹⁵⁰

Pasar merupakan salah satu institusi ekonomi terpenting bagi perdagangan, terutama dalam batas-batas local. Pada dasarnya pasar merupakan lokasi tempat bertemunya konsumen dan produsen, namun dalam prakteknya pasar juga didefinisikan sebagai proses negosiasi antara keduanya. Bertolak dari situ,

150 Robin P. Malloy, *Law and Market Economy: reinterpreting the values of law and economics* (Cambridge, 2000, The Cambridge University Press), halaman 31. Dalam hal ini Malloy menyebutkan bahwa semakin banyak sarana pembayaran yang beredar dalam masyarakat, semakin beragam dan dinamis sistem transaksi yang berlaku dalam pasar.

pasar mempunyai konotasi sebagai tempat sekaligus penentu keberhasilan kesepakatan yang mendasari transaksi perdagangan lewat sarana pembayaran. Pada pasar tradisional, konsumen dan produsen umumnya datang dan bertemu secara langsung dengan membawa komoditi yang menjadi objek transaksi. Transaksi berlangsung di tempat itu dan umumnya diakhiri dengan peralihan objek dari produsen kepada konsumen sebagai imbalan pembayaran. Dari sini kemudian muncul suatu sistem yang sering disebut sebagai ekonomi pasar.¹⁵¹

Berdasarkan konsep tersebut, di Balikpapan proses perdagangan dalam bentuk paling sederhana telah terjadi sejak akhir abad XIX. Tanpa menyinggung lokasi atau bentuk pasar secara fisik, transaksi yang menandai terjadinya perdagangan berlangsung di tempat bertemunya produsen dan konsumen, terlepas dari siapapun yang tampil berperan sebagai keduanya, yaitu di kompleks pelabuhan. Sejak berfungsinya pelabuhan Balikpapan, dengan kehadiran perahu-perahu dagang yang merapat di dermaganya pada akhir abad XIX, proses perdagangan apakah jual beli atau barter telah berlangsung di sana.¹⁵²

Pada bulan Oktober 1930, pasar Klandasan yang baru ini telah siap difungsikan. Pada pasar ini terdapat berbagai ruang untuk berjualan beragam komoditi mulai dari makanan, sayuran, perlengkapan rumahtangga, peralatan pertanian, kain, daging dan juga hewan. Juga kompleks pasar ini dilengkapi dengan kamar mandi dan WC bagi kepentingan umum. Yang menarik perhatian dalam hal ini adalah bahwa dalam kompleks pasar tersebut, ditemukan sederet toko yang dijual atau disewakan untuk berdagang bagi para pedagang. Akibatnya pasar tersebut kemudian tumbuh menjadi

151 Andrew Cohen, *Market Structure and market definition: the case of small market banks and thriffs* (Washington, 2004, Federal Reserve Board), halaman 2.

152 Keramaian di kompleks pelabuhan di teluk Balikpapan ini dimulai ketika industri pertambangan minyak mengangkut produksi pengeboran dan eksploitasi minyak mentah dari kompleks Sanga-Sanga ke sini. Sejak itu banyak tongkang uap yang bersandar selama beberapa hari dan dari situ tumbuh transaksi pembelian kebutuhan pokok. "Gemengd Indische nieuws" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 30 Oktober 1897, lembar ke-5.

pasar besar dan paling lengkap kota Balikpapan dan paling ramai transaksinya sampai tahun 1942.

Menjelang pasar itu dirombak, hasil pasar ini berjumlah sebagai berikut:

1928	f 9700
1929	f 9100
1930	f 11.400

Hasil ini diperoleh dari cukai atas pedagang yang berjualan di sana dan juga lahan yang disewakan untuk berjualan serta tempat parkir. Dengan melihat kenaikan antara 1929 dan 1930, sementara pada saat itu krisis ekonomi masih melanda, bisa diduga bahwa perdagangan domestic tetap menunjukkan peningkatan eskalasi dan tidak terlalu terpengaruh oleh resesi ekonomi. Oleh karena itu muncul kebutuhan bagi perluasan dan renovasi atas pasar di kota Balikpapan ini.

Di samping pasar, toko juga menjadi salah satu pelaku utama dalam perdagangan domestic di kota Balikpapan. Pada umumnya toko-toko yang dibuka di Balikpapan dikelola oleh pedagang Cina, Bugis atau pendatang lainnya. Di samping toko-toko yang dibuka di pasar Klandasan di atas, di Balikpapan toko-toko juga ditempatkan di kompleks perkebunan dan di dekat pemukiman para kuli pertambangan. Sementara itu BPM sendiri juga membuka toko di kompleks perkantoran pusatnya, yang dikelola sebagai suatu bentuk koperasi dan terintegrasi dalam administrasi keuangan perusahaan itu. Namun dominasi orang Cina atas perdagangan local di kota Balikpapan tetap kuat karena mampu menguasai sector menengah yang menghubungkan antara modal besar dan konsumen individu, terutama yang terdiri atas orang pribumi. Begitu kuatnya dominasi orang Cina ini bahkan dalam menghadapi krisis ekonomi sehingga konsul jenderal Cina di Batavia mengunjungi mereka dalam lawatannya ke Kalimantan Timur pada bulan Oktober 1932.¹⁵³

153 "Chinesche handelsbelangen" dalam *De Indische Courant*, 17 Oktober 1932, lembar ke-2.

Setelah kunjungan tersebut, beberapa pedagang Cina kemudian tampil sebagai pelaku bisnis di Balikpapan dalam bentuk kongsi dagang atau badan usaha (*Concern*). Beberapa kongsi yang terkenal aktif dan berperan dalam mendorong dinamika perekonomian kota Balikpapan adalah Handel Mij. Go Djien Go en Co serta Kho Liong Kiat en Co. Keduanya sangat berpengaruh dan memiliki posisi penting sehingga pemerintah daerah juga memperhitungkan peran mereka dalam perekonomian domestic selama tahun 1930-an.¹⁵⁴

Di samping orang Cina, orang Jepang juga menjadi pelaku utama dalam perdagangan di kota Balikpapan. Jika orang Cina bergerak di sector kelas menengah, orang Jepang banyak bergerak di sector ekspor-impor. Dengan memanfaatkan modal dan status politiknya dalam sistem hukum colonial Hindia Belanda, para pedagang Jepang tiba di Kalimantan Timur dan mereka menguasai impor barang asing khususnya produk negerinya di kota-kota besar termasuk Balikpapan. Melalui pelabuhan Surabaya dan Makasar, agen-agen dagang Jepang memasukkan barang produk negerinya ke Balikpapan dan menjualnya dengan harga murah. Mereka bukan hanya mendapatkan modal dari perusahaan induknya yang berpusat di negeri Jepang namun juga dukungan penuh dari pemerintahnya.¹⁵⁵ Akibatnya barang-barang ini mampu menyaingi dan bahkan mendesak barang-barang impor hasil buatan Eropa atau Amerika Serikat yang dijual oleh agen-agen dagang Eropa atau oleh BPM di toko-toko kota Balikpapan. Bahkan di masa resesi tahun 1930-an barang-barang Jepang bisa mendominasi pasaran,

154 "Balikpapan: uitreiking van onderscheidingen ter eere van den verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina", dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 1 Oktober 1937, lembar ke-12.

155 Sejak tahun 1920-an minat pemerintah Jepang atau para pengusaha Jepang terhadap kepentingan ekonomi di Kalimantan menunjukkan peningkatan. Misalnya pada tanggal 16 Juli 1923 suatu rombongan pejabat tinggi Jepang dan pengusaha Jepang yang dipimpin oleh Burgraaf Katagiri datang berkunjung ke Balikpapan dalam lawatan mereka ke sejumlah kota besar di Hindia Timur. Dengan didampingi oleh Penasehat Urusan Jepang dari Batavia, kunjungan ke Balikpapan jelas menunjukkan arti penting kota ini di kalangan pengusaha Jepang. "De special Japansche missie" dalam *Bataviaasch nieuwsblad*, tanggal 14 Juli 1923, lembar ke-10.

ketika produk Eropa mengalami pengurangan akibat menurunnya impor.¹⁵⁶

Meskipun ada ancaman persaingan dari orang-orang Asia asing ini, posisi pengusaha Eropa dalam perdagangan di kota Balikpapan tetap kuat. Mereka telah menguasai sector perekonomian daerah ini berkat kekuatan modal dan dukungan politik dari pemerintah. Pedagang Eropa terutama juga menguasai sector makro dalam bidang ekspor-impor. Di samping mengekspor produk local terutama hasil bumi, hutan dan tambang, mereka juga mengimpor berbagai komoditi yang dibutuhkan penduduk kota. Terutama pelayanan atas penduduk Eropa atau kulit putih masih dikuasai oleh mereka, termasuk sector konsumsinya, sebagai produk yang tidak tergoyahkan oleh resesi ekonomi di tahun 1930-an awal.¹⁵⁷

Di samping orang Belanda sebagai pelaku utama dalam perdagangan di Kalimantan Timur, bangsa Eropa lain juga memberikan perhatian pada potensi wilayah ini. Jika orang Inggris termasuk perintis dalam investasi di wilayah ini, peran mereka hanya terbatas pada sector pertambangan minyak bumi. Sebaliknya di bidang perdagangan kalangan pengusaha Perancis mulai mencurahkan perhatiannya. Pada tahun 1927 atase perdagangan Perancis di Den Haag mengusulkan lewat Alliance Française untuk menjajagi peluang pembukaan jaringan perdagangan dan perkapalan antara sejumlah kota di Hindia Belanda termasuk Balikpapan dengan Manila, Haipong dan Saigon, kota-kota penting bagi dunia usaha Perancis di Asia Tenggara. Hal itu membuktikan bahwa kepentingan Perancis terhadap kawasan Kalimantan Timur

156 "Japansche activiteit in Nederlandsch Indië" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 2 Desember 1933, lembar ke-10.

157 "Afzet van producten" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 8 Oktober 1932, lembar ke-14. Misalnya NV. Catz Java Trading Company mempunyai agen di Balikpapan yang khusus mengimpor sayuran sebagai kebutuhan konsumsi penduduk Eropa di kota itu. Mereka menyalurkannya lewat toko koperasi yang dimiliki oleh BPM di kompleks Klandasan yang menjualnya kepada konsumen rumah tangga Eropa di pemukiman itu. Omsetnya yang mencapai 500 kati tiap minggu menunjukkan tingginya tingkat kebutuhan sayur penduduk dan terutama nilai komoditi tersebut dalam omset perdagangan kota Balikpapan.

dan pengakuannya atas Balikpapan sebagai kota yang memiliki nilai strategis ekonomis cukup tinggi.¹⁵⁸

Peluang dan potensi perdagangan di kota Balikpapan yang menunjukkan peningkatan terus ini telah diketahui oleh kalangan perbankan sejak awal abad XX. Prospek kemajuan ekonomi yang dipicu oleh aktivitas pertambangan minyak, perdagangan dan kehutanan menjadikan kota ini sebagai tawaran yang menarik bagi investasi di sector perbankan. Oleh karenanya pada awal Januari 1907, Javasche Bank sebagai bank sirkulasi dalam sistem keuangan Hindia Belanda mengiriman dua orang agennya untuk menyelidiki prospek pembukaan perwakilan di kota ini dengan tujuan melayani kebutuhan kredit dan transaksi perbankan bagi sector perdagangan dan dunia usaha.¹⁵⁹

Kantor cabang NV. Borsumij bukan hanya melayani kepentingan beberapa kota lain di sekitar Samarinda, namun juga mewakili beberapa perusahaan dagang dan perbankan di Kalimantan Timur. Nederland Handelsmaatschappij dan Javasche Bank, dua perusahaan besar di Hindia Belanda saat itu, juga diwakili kepentingan mereka oleh NV. Borsumij.¹⁶⁰ Bahkan lebih jauh lagi, NV. Borsumij juga tampil sebagai badan usaha yang ikut berperan dalam mendorong arus perdagangan di Balikpapan, karena perusahaan ini mengirimkan kapal-kapalnya untuk menyusuri sungai Mahakam dan akhirnya berlabuh di pelabuhan Balikpapan untuk kepentingan niaganya.¹⁶¹

Di samping kalangan swasta, pemerintah juga ikut terlibat dalam perdagangan meskipun hanya terbatas dalam beberapa aspek. Berdasarkan sejumlah peraturan yang diberlakukan untuk

158 "Franchise economische belangen in Indië" dalam *Bataviaasch Handelsblad*, 8 Mei 1927, lembar ke-1.

159 "De Javasche Bank te Balikpapan" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 7 Januari 1907, lembar ke-6. Dua pegawai bank ini ditugasi untuk mengumpulkan informasi selengkap mungkin tentang potensi perkebunan, perdagangan dan kondisi local yang berkaitan dengan kinerja bank tersebut.

160 "Borneo: de vooruitgang van een verren buitenpost" dalam *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, tanggal 17 Desember 1926, lembar ke-13.

161 "Borneo Zuid en Oost: een geweest dat weinig vraag", dalam *Nieuw Rotterdamsche Courant*, tanggal 20 Juli 1927, lembar ke-13.

seluruh koloni, beberapa komoditi diperdagangkan sebagai monopoli pemerintah dan dalam hal ini pemerintah tampil sebagai penjual. Di antara komoditi ini adalah candu (*opium*), garam (*zout*) dan minuman keras yang dimonopoli secara resmi oleh pemerintah (*regie*). Dasar pertimbangannya adalah bahwa ketiga objek tersebut mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi bagi penggunaan atau penjualannya, karena menyangkut kondisi hidup individu secara langsung.

Di Kalimantan Timur, penerapan dinas monopoli garam bisa diberlakukan berdasarkan kontrak pelengkap yang dibuat oleh Residen C.A. Kroesen dengan Sultan Kutai Muhamad Alimudin Aladil Chalifatul Mukminin di Samarinda pada tanggal 23 Juni 1900. Dalam pasal 1 ayat 3, ditetapkan bahwa Sultan menyerahkan hak pembuatan garam atau impor dan penjualan garam di seluruh wilayahnya kepada pemerintah (*het recht tot aanmaak of invoer en tot verkoop van zout*).¹⁶² Sebagai konsekuensi dari ketentuan ini, pemerintah mewajibkan Sultan untuk mengawasi pelanggaran terhadap penjualan garam oleh orang-orang yang berada di luar dinas pemerintah di semua wilayahnya termasuk di kota Balikpapan.¹⁶³

Objek lain yang menjadi monopoli pemerintah adalah candu. Berbeda dengan garam yang dianggap sebagai bahan kebutuhan pokok individu, candu dimonopoli oleh pemerintah dengan pertimbangan untuk mengontrol penggunaannya yang berpotensi pada penyalahgunaan, di samping juga aspek ekonomi karena membawa keuntungan yang tinggi.¹⁶⁴ Sampai akhir abad XIX, factor keuntungan ini menjadi dasar pertimbangan utama pemerintah dalam perdagangan candu, sehingga candu diborongkan melalui lelang kepada penawar tertinggi yang akan

162 "Overeenkomsten met Inlandsche vorsten op Borneo" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 21 Mei 1902, lembar ke-2.

163 Sultan sendiri disertai oleh pemerintah bertanggungjawab untuk mengawasi penjualan garam dan mencegah penyelundupan garam seperti yang dilakukan dari dan menuju Serawak. "Sociale toestanden op Borneo" dalam *Batavia Nieuwsblad*, tanggal 19 Februari 1903, lembar ke-8.

164 J. Groneman, "De opium kwestie" dalam *Indische Gids*, tahun 1887, vol. 1, halaman 386.

memonopoli penjualannya di daerah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.¹⁶⁵

Di Balikpapan, aturan bagi penerapan monopoli penjualan candu ditetapkan pada tanggal 8 Januari 1901,¹⁶⁶ ketika pemerintah colonial mengatur penjualan candu bersama dengan monopoli penjualan garam eceran. Kedua komoditi ini dianggap sebagai produk impor karena tidak dibuat di kota tersebut, dan dikenai peraturan cukai ekspor dan impor yang dipungut di kantor pabean pelabuhan Balikpapan. Dengan adanya ketentuan ini, berarti perdagangan candu dan garam eceran, yang dibuka di kompleks pemerintahan di Klandasan, berada di bawah control langsung petugas yang untuk sementara masih ditangani oleh aparat pabean.¹⁶⁷

Dibandingkan dua produk lain di atas, minuman keras bersifat lebih khusus. Karena harga yang tinggi dan penggunaan yang tidak lazim sebagai sarana konsumsi, minuman keras tidak terlalu banyak berhubungan dengan kehidupan umum terutama di kalangan masyarakat pribumi yang agamis. Akan tetapi penggunaan yang berlebihan atau penyalahgunaan juga menimbulkan resiko yang sama seperti candu, terutama di kalangan masyarakat pribumi Dayak yang tidak memeluk agama Islam di pedalaman Kalimantan Timur. Begitu juga dengan perdagangannya yang kebanyakan berasal dari produk impor, pemerintah dengan mudah menerapkan pengawasan lewat prosedur ekspor-impor di pelabuhan.

C. Kehutanan

Dibandingkan dengan sector pertanian dan perdagangan, kehutanan merupakan bidang yang berbeda sifat dan bentuknya namun memiliki kesamaan, yaitu menjadi contributor bagi pemasukan negara atau penguasa melalui produktivitasnya. Karena

165 C.M. Piepers, "Opiumpacht" dalam *Indische Gids*, tahun 1884, vol. II, halaman 658.

166 *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1901 nomor 20.

167 "In- en uitvoerrechten Z.- en O. afd. Borneo" dalam *De Locomotief*, tanggal 29 November 1901, lembar ke-3.

perbedaan demikian, sector kehutanan menuntut peraturan dan penanganan khusus oleh pemerintah, terutama ketika pemerintah melihat potensi dan prospek ekonomi dari produk yang terdapat di dalamnya. Terutama sejak akhir abad XIX hutan bukan lagi dianggap sebagai sumber pasokan produk alam bagi kepentingan pemerintah melainkan menjadi objek investasi yang menguntungkan dan jangka panjang, baik bagi pemerintah colonial maupun investasi usaha oleh pihak swasta.¹⁶⁸

Daerah pedalaman Balikpapan, terutama di sepanjang aliran sungai Mahakam, didominasi oleh lahan hutan. Di samping sebagai habitat penduduk asli suku Dayak, hutan yang terdapat di daerah ini dikenal sebagai pemasok produk utama yang bisa digunakan sebagai komoditi perdagangan ekspor yang penting. Selain kayu dari sejumlah jenis pohon terkenal, produk hutan lain seperti dammar, rotan, beberapa macam getah, lilin, madu, dan juga fauna yang tinggal di dalamnya menjadi dasar pertimbangan utama bagi upaya pemberdayaan dan pelestariannya oleh pemerintah colonial.¹⁶⁹ Tujuannya adalah agar tercapai keseimbangan alam dalam lingkungan biotic dan abiotik serta mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan erosi.¹⁷⁰

Bagi penduduk setempat, terutama suku Dayak yang tinggal di dalamnya, hutan merupakan dunia tersendiri. Mereka memandang hutan bukan hanya sebagai suatu habitat dan sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan primernya, melainkan juga sebagai suatu bentuk alam kosmos yang memiliki struktur kehidupan dengan diri mereka menjadi bagiannya. Sifat kosmis

168 Peter Boomgaard, "Colonial forest policy in Java in transition 1865-1916" dalam Robert Cribb, *The late colonial state in Indonesia: political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942* (Leiden, 1994, KITLV Press), halaman 124. Titik tolaknya adalah peraturan tentang kehutanan (*Boschordonnantie*) tahun 1865 yang mengklasifikasikan hutan dalam tiga jenis sebagai langkah awal untuk membuka jalan bagi investasi modal oleh pihak swasta. Terbitnya peraturan ini menandai perubahan paradigma di kalangan para pembuat kebijakan colonial khususnya di bidang kehutanan.

169 Yang dimaksudkan dengan fauna dalam hal ini juga termasuk sarang hewan dan telornya, serta bagian dari tubuh hewan seperti tanduk, cula, taring dan sebagainya. "Uit donker Borneo", dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 24 April 1937, lembar ke-13.

170 Anon, "Houtboschen in Nederlandsch Indië: Particuliere industrie tegenover staats-exploitatie", dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië*, 1867, I, halaman 235.

ini tidak hanya terbatas pada penampilan fisik, melainkan juga melibatkan unsure-unsur batin yaitu kepercayaan.

Struktur lama ini menghadapi tantangan dan ancaman perubahan ketika pada akhir abad XIX pemerintah colonial mengambil langkah-langkah yang mengarah pada penguasaan terhadap hutan di pedalaman. Pada tahun 1896 langkah ini diwujudkan dengan pengangkatan seorang petugas kehutanan (*houtveester*) yang bertugas mengawasi pengambilan produk hutan yang dibutuhkan oleh pemerintah seperti kayu, terutama yang langsung berfungsi bagi pendukung pembangunan infrastruktur. Di pedalaman Kalimantan ini, proses pengambilan produk tersebut dilakukan lewat perantara para penguasa pribumi local.¹⁷¹

Akan tetapi suatu perubahan baru terjadi dari luar struktur yang dibangun pemerintah colonial lewat kebijakannya terhadap hutan. Hal ini dipicu dari lonjakan harga produk hutan non-kayu di pangsa pasar internasional. Rotan terutama mendapatkan nilai tinggi karena bisa dimanfaatkan sebagai pengganti kayu.¹⁷² Lonjakan harga ini membawa keuntungan yang besar bagi pengusaha swasta, yang di pedalaman Kalimantan telah mendapatkan fasilitas dari pemerintah bagi pembebasan dari pembayaran pajak atas produk hutan non-kayu yang mereka eksploitasi dan angkut ke pelabuhan.¹⁷³ Hal ini mengakibatkan para pedagang dan pemborong produk hutan non-kayu tersebut tampil sebagai orang kaya yang dalam eksploitasinya hanya membayar sewa tempat untuk penimbunan di pelabuhan. Dengan kekayaan ini, pada awal abad XX mereka siap untuk bernegosiasi kembali dengan pemerintah colonial bagi pemborongan yang lebih luas.¹⁷⁴

171 *Koloniaal Verslag over het jaar 1896-1897*, halaman 103. Di samping para kepala pribumi, sistem kerja yang berlaku seperti di Jawa juga diterapkan, yaitu sistem kerja wajib. Penduduk setempat, khususnya kawula para sultan di Kalimantan Timur dikerahkan untuk melakukan kerja wajib selama beberapa hari di dalam hutan dengan maksud menebang dan menyeret kayu ke tempat penimbunan yang ditunjuk oleh *houtveester*.

172 W.G. Leembruggen, "De cultuur van rottan", dalam *TNLNI*, tahun 1904, vol. LIX, halaman 262.

173 *ANRI*, Nota Jansen terlampir pada surat Direktur Keuangan kepada Gubernur Jenderal tanggal 23 Februari 1899 nomor 3136, bundel *Algemeen Secretarie*.

174 *Koloniaal Verslag over het jaar 1899-1900*, halaman 35.

Bagi pemerintah colonial, potensi hutan di sekitar Balikpapan dan Samarinda menawarkan prospek komersial yang tinggi. Salah satu produk hutan yang prospektif selain kayu adalah karet. Sebagai suatu komoditi yang memiliki daya tawar di pasar internasional sejak awal abad XX, sebagai permintaan utama dari kalangan industry, karet menjadi objek pemberdayaan dan eksploitasi bagi rezim colonial. Namun demikian di wilayah ini hutan yang mencakup pohon karet masih menjadi wewenang Sultan Kutai. Kesempatan untuk ini muncul ketika pergantian tahta terjadi di kesultanan ini pada bulan April 1913. Melalui kontrak politik yang dibuat, pemerintah Belanda mengambil alih hak pengelolaan atas hutan ini dengan ganti rugi dalam bentuk tunjangan tahunan yang setara dengan hasil upeti dari produk hutan kepada Sultan. Sejak itu pemerintah kemudian menyerahkan tanggungjawab eksploitasi hutan dan tanaman karet kepada asisten residen di Samarinda dan jajaran stafnya.¹⁷⁵

Bersamaan dengan hal itu, pemerintah kemudian juga membuka peluang bagi pemberian konsesi hutan kepada penawar yang akan mengeksploitasinya untuk hutan di wilayah Kesultanan Kutai. Salah satu investor yang berminat mengajukan permohonan konsesi ini adalah *Nederlandsch Indische Houtaankap Mij.*, yang kemudian memperoleh konsesi bagi penebangan kayu dan ekspornya ke Eropa. Namun perusahaan ini tidak lama melakukan aktivitasnya karena Perang Dunia I segera menghambat ekspornya dan akibatnya mencatat deficit. Untuk mengatasi solusi kesulitan keuangannya, pada bulan September 1916 direksinya membuat kesepakatan dengan *Seliman Land-, Hout en Boschexploitatie Mij* yang juga memiliki konsesi di hutan Sambaliung dan mempunyai penggergajian kayu di Teluk Seliman, untuk melakukan *merger* konsesi.¹⁷⁶

175 "Uit Samarinda" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 10 April 1913, lembar ke-2.

176 "Nederlandsch Indische Houtaankap Mij", dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 12 Juli 1917, lembar ke-3.

Selain dua perusahaan besar milik Belanda ini, hutan di wilayah ini juga menjadi perhatian dari perusahaan milik Jepang. Setelah tahun-tahun krisis ekonomi, sebuah perusahaan Jepang yang bergerak di bidang produksi karet, Ide concern, telah membuka sebuah perkebunan di wilayah Sultan Kutai sejak tahun 1932. Setahun kemudian, perusahaan ini mengajukan permohonan konsesi kepada pemerintah dan melakukan negosiasi dengan Sultan Kutai. Dalam permohonannya, perusahaan ini bahkan berencana akan membuka sebuah pelabuhan khusus bagi pengangkutan produk hutan di tepi aliran sungai Kutai yang memenuhi syarat untuk itu. Permohonan konsesi ini dijadikan agenda rapat oleh Gubernur Jenderal De Jonge pada tanggal 10 April 1933 yang dihadiri juga oleh Residen B.C.C.M.M. van Suchtelen. Dari hasil rapat diputuskan bahwa konsesi tersebut ditolak dengan alasan pertimbangan hidrologi, militer dan fiscal.¹⁷⁷

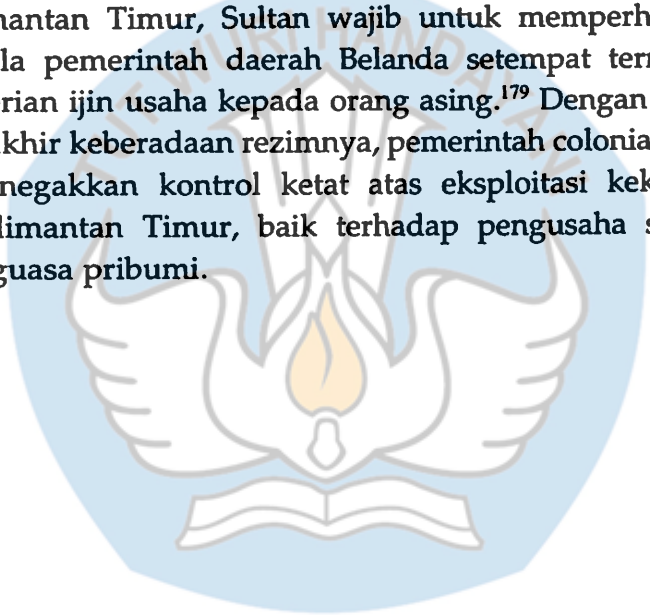
Namun demikian pada tahun itu mereka mengajukan kembali permohonan konsesi bagi penebangan kayu di hutan yang berbeda, yaitu di Sangkulirang. Atas permohonan ini, dengan pertimbangan resiko yang lebih ringan daripada sebelumnya, pemerintah colonial mengabulkannya. Daerah konsesi ini ditetapkan di hutan sepanjang aliran sungai Sangkulirang, yang dikerjakan oleh dua ribu orang kuli hasil rekrutan setempat. Sementara itu di seluruh kompleks tersebut, perusahaan Jepang Ide menampung lima ribu orang pegawai termasuk beberapa orang Eropa.¹⁷⁸

Langkah lain yang ditempuh oleh pemerintah colonial untuk membatasi peran orang Jepang dalam sector eksploitasinya adalah dengan melakukan pendekatan politik terhadap penguasa pribumi. Sultan Kutai sebagai penguasa utama di daerah konsesi itu diberi peringatan agar tidak melakukan hubungan erat dengan orang-orang Jepang dan untuk itu pemerintah Batavia memandang perlu membuat kesepakatan baru yang mempunyai kekuatan hukum

177 "Hout aankap in Oost Borneo: een Japansche concessive aanvrag" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 7 April 1933, lembar ke-1.

178 "Nieuws uit Samarinda: Japansche houtaankap" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 24 September 1934, lembar ke-18.

mengikatnya. Kesempatan ini muncul pada tanggal 12 Agustus 1938 ketika sebuah kontrak politik baru disodorkan kepada Sultan. Dalam kontrak ini disebutkan bahwa mengingat Sultan Kutai mendapatkan anggaran terbesar di antara para penguasa swapraja lain di Kalimantan Timur, Sultan wajib untuk memperhatikan nasehat kepala pemerintah daerah Belanda setempat termasuk dalam pemberian ijin usaha kepada orang asing.¹⁷⁹ Dengan demikian sampai akhir keberadaan rezimnya, pemerintah colonial tetap berusaha menegakkan kontrol ketat atas eksploitasi kekayaan hutan di Kalimantan Timur, baik terhadap pengusaha swasta maupun penguasa pribumi.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

¹⁷⁹ "Nieuwe Politiek Contract voor Sultanaat Koctai" dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 10 Agustus 1938, lembar ke-10.



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB V

WAJAH LAIN DARI KOLONIALISME: PERKEMBANGAN INSTITUSI SOSIAL

Jika di satu sisi kolonialisme Barat menunjukkan sikap dan tujuannya yang bersifat eksploitatif dengan dominasi politik dan penetrasi kekuatan modalnya yang menguasai kehidupan social dan ekonomi masyarakat koloni, di sisi lain ada nuansa humanism yang melekat pada kebijakan kolonisator Barat terhadap tanah koloninya. Meskipun kebijakan ini ditujukan bagi kepentingan penguasa khususnya dan kelompok masyarakat yang identik dengan kekuasaan umumnya, tidak bisa dibantah bahwa dampak yang muncul dari kebijakan mereka di bidang social membawa perubahan yang besar bagi seluruh penduduk di tanah koloni. Terlepas dari sikap diskriminatif yang ditunjukkan pada beberapa sector seperti di bidang pendidikan, kehadiran lembaga-lembaga social Barat mendorong masyarakat pribumi terintegrasi dengan kehidupan modern di tanah koloninya. Mereka kemudian mengenal hasil kemajuan industry dan teknologi Barat yang juga mempunyai pengaruh positif terhadap kehidupannya, seperti di bidang kesehatan dan pencerdasan cara berpikir.

Di daerah Balikpapan, pengaruh dari penetrasi social Barat dalam kehidupan masyarakat diwujudkan dalam tiga hal : pendidikan, kesehatan dan pelayanan rohani. Meskipun ketiganya mempunyai saling keterkaitan yang erat, terutama di kalangan missi Katolik dan zending Protestan yang memadukan ketiganya menjadi suatu kesatuan program bagi kepentingan penyiaran agama, pada prinsipnya ketiganya menuntut penanganan yang berbeda-beda dan bergerak dalam sector yang berlainan pula. Di samping itu, juga peran pemerintah menunjukkan perbedaan

eskalasi di antara ketiganya. Pada bidang pertama dan kedua, peran dan kontribusi pemerintah mungkin cukup besar dengan cara terlibat langsung dalam pelaksanaan kinerja mereka, pada bidang ketiga peran pemerintah sangat terbatas dan lebih banyak sebagai fasilitator.

Bab ini akan membahas masing-masing sebagai bagian dari kajian mengenai perkembangan social dalam kehidupan masyarakat di kota Balikpapan dan sekitarnya. Melalui ketiga bidang ini, perubahan social dalam perilaku kehidupan masyarakat penghuni kota paling jelas tampak, meskipun juga dalam ukuran yang berbeda-beda menurut stratifikasi sosialnya.

A. Pendidikan

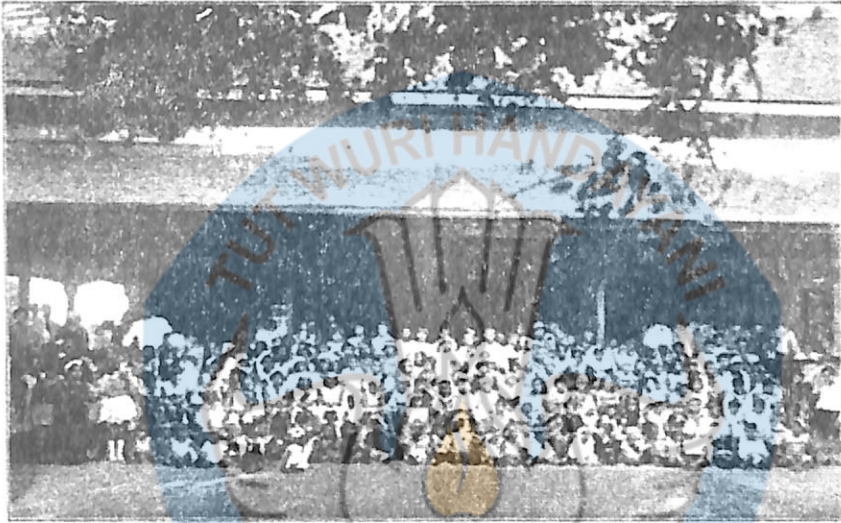
Pendidikan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pendidikan modern yang disediakan oleh lembaga pendidikan Barat dan diberikan menurut metode pengajaran Barat. Dalam hal ini Balikpapan mengalami pengaruh dari pemberian pendidikan pada saat yang bersamaan dengan perubahan yang terjadi di tingkat makro. Pada awal abad XX, ketika sekolah pertama yang bertumpu atas dasar kurikulum dan metode pengajaran Barat didirikan di kota ini, program pendidikan

Barat sedang digencarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan kebijakan Etis yang terkenal pada tahun 1901.¹⁸⁰

Melalui kebijakan ini, pendidikan modern menjadi salah satu dari agenda yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah untuk diterapkan di tanah koloni kepada penduduk kawulanya. Meskipun sejak pertengahan abad XIX pemerintah colonial telah

180 Elizabeth Quirine Hesselink, *Genezers op de koloniale markt: inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost Indië 1850-1915* (Amsterdam, 2009, Amsterdam University Press), halaman 258. Tiga program utama menjadi target dan agenda utama dari politik Etis, yaitu pendidikan, irigasi dan transmigrasi. Tujuan utama dari politik ini adalah untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat koloni Hindia Belanda dan melakukannya dengan cara menerapkan ide-ide pemikiran modern Barat terhadap kehidupan mereka, khususnya dalam bidang social ekonomi. Istilah Etis yang digunakan ini diilhami oleh pidato tahunan Ratu Wilhelmina di depan Parlemen Belanda yang menyebutkan bahwa Belanda memiliki tanggungjawab moral sebagai bangsa Kristen untuk membawa penduduk tanah koloni menuju bentuk kehidupan yang lebih beradab menurut standard kehidupan modern.

Kinderfeest op 31 Augustus te Balikpapan.



Pesta anak2 31 Agustus di Balikpapan (sep 1931)
(*Nederlandsch Indie Oud & Nieuw Jrg*)

memikirkan pendirian Barat bagi penduduk pribumi,¹⁸¹ dan setelah itu sejumlah langkah diambil oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas pendidikan dasar bagi anak-anak kawulanya di tanah koloni Hindia Belanda,¹⁸² baru memasuki abad XX pemerintah colonial mencantumkan pendidikan dalam program nasional koloninya yang mendapatkan dukungan penuh dari

Kalimantan Barat

181 Sekolah dengan kurikulum Barat pertama bagi orang pribumi dibuka pada tanggal 2 Januari 1849 di Batavia yang khusus memberikan pendidikan bagi mantri cacar. Setelah meluluskan alumnusnya pertama pada tahun 1851, sekolah ini diubah namanya menjadi Sekolah Dokter Jawa yang kelak akan berkembang menjadi STOVIA (*School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen*) pada tahun 1908. Deepak Kumar, "Health and Medicine in British India and Dutch Indies: a comparative study" dalam Joseph S. Alter, *Asian Medicine and Globalization* (Philadelphia, 2005, University of Pennsylvania Press), halaman 81.

182 Pada awal tahun 1890an pemerintah colonial mulai merasakan kebutuhan untuk mendidik orang pribumi dengan bentuk institusi pendidikan yang lebih teratur dan memberikan fondasi bagi pengetahuan modern. Langkah ini diambil melalui pembukaan sekolah pribumi (*inlandsche school*) pada tahun 1892 dengan bahasa pengantar pribumi, tetapi memberikan pelajaran bahasa Belanda dengan tujuan agar anak-anak pribumi mulai mempelajari bahasa Belanda. Jenis sekolah yang pertama dibuka adalah sekolah dasar pribumi klas-1 dan sekolah dasar pribumi klas-2, masing-masing dengan masa belajar lima tahun dan tiga tahun dengan bahasa pribumi sebagai pengantarnya. Di sini dasar-dasar pertama untuk mengenal pendidikan Barat diberikan seperti membaca dan menulis dengan huruf Latin, berhitung, menggambar, bernyanyi dan olahraga. Pieter A. van der Lith, *Nederlandsch Oost Indië, tweede deel* (Leiden, 1894, E.J. Brill), halaman 264.

negara induk. Bertolak dari sini, pemerintah colonial kemudian melakukan reorganisasi sistem pendidikan yang ada sebagai suatu bentuk pendidikan modern yang didominasi oleh pemerintah dan diarahkan untuk menciptakan kelompok intelektual koloni yang siap memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan modern dalam lapangan kerja yang tersedia, khususnya birokrasi colonial.¹⁸³

Kebutuhan di atas bukan hanya berlaku bagi perekrutan tenaga pribumi melainkan juga bagi anak-anak Eropa atau keurunannya yang tinggal di sini. Bagi kelompok anak-anak ini, yang diklasifikasikan sebagai kelompok yang berbeda dari penduduk pribumi menurut *Regeering Reglement* tahun 1854,¹⁸⁴ fasilitas pendidikan telah disediakan lebih awal daripada anak-anak pribumi. Di samping dipersiapkan untuk menggantikan posisi atau jabatan orang tuanya dan ditempatkan dalam jajaran birokrasi, anak-anak keturunan Eropa ini juga disiapkan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga sampai ke perguruan tinggi yang berada di Negeri Belanda.¹⁸⁵

Pandangan tersebut mempengaruhi juga orang-orang Eropa non-pemerintah yang tinggal di Balikpapan, terutama mereka yang bekerja di kompleks konsesi BPM. Mengingat perusahaan ini memiliki banyak pegawai orang Eropa sebagai staf tehnik dan administrasinya, yang tinggal di sejumlah lokasi pemukiman

183 Tujuan utama dari pemberian pendidikan Barat kepada penduduk pribumi oleh pemerintah colonial sebenarnya adalah untuk mendapatkan tenaga intelektual pribumi siap pakai yang sesuai dengan tuntutan sistem pemerintahan modern yang bersifat legal rasional. Karena mendatangkan tenaga aparat yang memadai dari Eropa memerlukan biaya transportasi dan pengajian yang tinggi, perekrutan tenaga penduduk pribumi yang lebih murah menjadi alternative untuk meringankan anggaran belanja koloni. Namun demikian tenaga ini harus dididik terlebih dahulu agar mampu memenuhi tuntutan yang diajukan oleh struktur pemerintahan colonial. K.F. Creutzberg, *Het onderwijs in Nederlandsch Indië* ('s Gravenhage, 1916, Korthuis), halaman 57.

184 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1855 nomor 2. Dalam pasal mengenai penduduk di tanah koloni, pemerintah colonial mengelompokkan orang Eropa dan yang dipersamakan (*Europeesch en gelijksgesteld*) berbeda dengan orang pribumi (*inlanders*).

185 Kebijakan ini diambil ketika pemerintah Belanda pada akhir abad XIX memutuskan untuk menerapkan azas konkordan dalam bidang pendidikan, yaitu lembaga dan tingkat pendidikan yang ada di tanah koloni khususnya bagi anak-anak Eropa dipersamakan peringkatnya dengan lembaga serupa di Negeri Belanda. Dengan adanya keputusan ini, diharapkan anak-anak Eropa dan keturunannya yang dilahirkan di Hindia Belanda tidak perlu lagi bersusah payah untuk kembali ke negara asalnya dengan maksud menerima pendidikan dasar dan lanjutan. Herman Burgers, *De Garoeda en de Ooeivar: Indonesie van kolonie tot nationale staat* (Leiden, 2010, KITLV Press), halaman 143.

yang dibangunnya, kebutuhan bagi sarana pendidikan tersebut segera terasa pada tahun-tahun awal keberadaannya. Meskipun di Samarinda sebuah sekolah dasar Eropa (*Europeesch Lagere School*) telah dibuka oleh pemerintah pada tahun 1903 atas desakan perusahaan minyak lainnya,¹⁸⁶ keberadaan sekolah tersebut tidak membantu mengatasi kebutuhan di Balikpapan karena jarak yang menghubungkan keduanya tidak memungkinkan anak-anak pegawai Eropa BPM di Balikpapan untuk berangkat ke sana. Oleh karena itu bertolak dari pertimbangan di atas, jajaran direksi BPM pada tahun 1909 memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah dasar serupa di kompleks pusat pemukimannya di Klandasan.¹⁸⁷

Pada awalnya sekolah ini mendapatkan tanggapan positif dari para orangtua siswa Eropa yang tinggal di kota Balikpapan. Mereka bukan hanya terbatas pada orang-orang yang menjadi pegawai BPM melainkan juga penduduk Eropa lain yang bertugas atau tinggal di Balikpapan, seperti juga para aparat pemerintah sipil dan militer. Bahkan beberapa orang non-Eropa termasuk orang pribumi mengirimkan anaknya ke sekolah ini sejauh mereka bisa diterima. Dalam hal pembiayaan, BPM menanggung sepenuhnya dan pemerintah hanya menyediakan tenaga guru yang sesuai dengan standard. Oleh karena itu keberadaan sekolah ini setiap tahun menjadi beban dari anggaran pengeluaran tahunan BPM.

Setidaknya selama hampir dua puluh tahun sekolah ini mampu melaksanakan fungsinya dengan meluluskan anak-anak

186 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 9 Juli 1903 nomor 2*, bundel *Algemeen Secretarie*. Karena pemerintah pada saat itu masih menghadapi kesulitan dana untuk membiayai seluruh pembukaan sekolah ini termasuk juga pengangkatan guru-gurunya, sekolah ini tidak didirikan dari awal melainkan menempati sebuah bangunan milik swasta yang disewa oleh pemerintah untuk difungsikan sebagai sebuah *ELS* negeri yang mampu memberikan pelayanan bagi kebutuhan pendidikan. Pemerintah berharap agar dengan berakhirnya proyek pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan, sekolah ini juga mampu memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak Eropa yang tinggal di Balikpapan.

187 Pada awal pendirian sekolah ini, jumlah pegawai Eropa yang tercatat dalam dinas BPM adalah 100 orang. Pada tahun 1923 jumlah ini naik menjadi 500 orang sementara yang tinggal di luar kompleks pengeboran adalah 250 orang kepala keluarga. Di Sanga-Sanga, BPM memiliki pegawai Eropa yang mencapai jumlah 57 orang, sementara di Sungei Mariam mencapai 26 orang. Jumlah ini terus meningkat bersamaan dengan semakin intensifnya industry pertambangan BPM. "Bronnen van rijkdom op Borneo: de oliestad te Balikpapan" dalam *Het vaderland*, tanggal 29 Oktober 1927, lembar ke-13.

yang menjadi siswanya. Akan tetapi menjelang akhir tahun 1920-an, ketika resesi ekonomi global mulai melanda kehidupan dunia usaha di Hindia Belanda dan BPM ikut merasakan dampaknya, kesulitan keuangan yang melanda manajemen perusahaan ini memaksa jajaran direksi mengubah kebijakannya. Mereka menerapkan pengetatan anggaran dan penghematan sehingga beberapa pos yang dianggap tidak memiliki relevansi langsung dengan kinerja perusahaan dikurangi atau dihilangkan. Salah satu pos ini adalah anggaran sekolah ELS yang selama ini ditanggung perusahaan. Sejak tahun 1930 anggaran itu tidak ada lagi dan akibatnya sekolah itu harus ditutup. Bekas kompleks bangunan ini kemudian dialih fungsikan bagi penggunaan lain, yaitu menjadi pasar.¹⁸⁸

Namun demikian sekolah bagi anak-anak Eropa tetap ada sebagai pengganti sekolah yang dibongkar ini. Di lokasi yang berbeda, BPM kembali membuka sebuah sekolah ELS atas tanggungan dan biaya sendiri, meskipun kemudian pemerintah memberikan subsidi untuk membayar sewa bangunan gedung yang difungsikan sebagai ruang kelas. Di samping itu antara BPM dan pemerintah dicapai kesepakatan bahwa jika sekolah ini sudah berjalan dengan baik dan pemerintah sudah siap, sekolah ini akan dialihkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Jadi, pada saat itu bisa diketahui bahwa pemerintah daerah belum siap untuk membuka sekolah dasar bagi anak-anak Eropa, khususnya dengan melihat kondisi krisis ekonomi yang melanda.¹⁸⁹

Memasuki tahun 1930 pemerintah daerah kemudian menunjukkan kesiapan untuk mengambil alihnya namun hal itu dibatalkan mengingat pemerintah pusat kemudian berpikiran lain. Dari Batavia kemudian pada tahun itu diberikan instruksi bagi pembukaan sebuah sekolah ELS sendiri yang berstatus sebagai sekolah negeri. Sekolah ini dibuka di kompleks pemerintahan di SEmboja dan kemudian juga diikuti dengan sebuah *Hollandsch*

188 ANRI, *Memorie van Overgave Onderafdeeling Balikpapan door van Driest, Juli 1931*, reel nomor 28, MvO serie 1e.

189 *Ibid.*, halaman 9.

Inlandsche School (HIS) negeri. Sementara itu sekolah rakyat yang telah ada ditingkatkan statusnya menjadi sekolah dasar pribumi pemerintah klas-2 (*tweede Inlandsche school*).

Selain sekolah bagi anak-anak Eropa dan pribumi pemerintah, khususnya anak-anak pribumi dari keturunan elite dan orang kaya, kalangan komunitas Cina juga memiliki sekolah sendiri. Sejak terjadinya pemukiman orang Cina di kota Balikpapan, kebutuhan bagi pendidikan anak-anak mereka terus terasa. Seperti halnya di tempat lain, di kalangan komunitas Cina kemudian muncul organisasi social yang disebut *Tiong Hoa Hwe Koan* (CHHK) yang merupakan suatu organisasi kerjasama warga Cina untuk memenuhi kebutuhan social mereka termasuk pendidikan. Ketika organisasi ini terbentuk di Balikpapan, mereka kemudian berpikir mencari dana dan mendirikan sebuah sekolah bagi anak-anak Cina di kota itu. Usaha mereka berhasil sehingga pada akhir tahun 1920-an sebuah sekolah dasar untuk anak-anak Cina didirikan di Klandasan. Sekolah ini, bersama dengan sekolah Cina lain yang lebih khusus sifatnya hanya untuk kelompok orang Hailan dan sebuah sekolah Cina lain di Pandansari, segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena afiliasinya dengan kelompok terlarang sehingga pada bulan Oktober 1930 Penasehat Urusan Cina mengunjunginya dan memberikan peringatan kepada guru di sana.¹⁹⁰

Sementara itu bagi anak-anak pribumi, termasuk juga anak-anak dari orang pribumi pendidikan, fasilitas pendidikan yang disediakan masih harus menunggu sepuluh tahun sejak ELS pertama didirikan di Balikpapan oleh BPM. Karena persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi pendidikan di ELS standard, banyak anak pribumi yang tidak mampu memasuki sekolah ini, di samping juga biaya tinggi yang harus dibayarkan.

¹⁹⁰ Tampaknya kunjungan Penasehat Urusan Cina ini berkaitan erat dengan peristiwa kerusuhan yang terjadi di kompleks milik Oost Borneo Mij pada bulan April 1930 yang dicetuskan oleh sekelompok kuli Cina di sana. Dari hasil penyelidikan ternyata para pelakunya adalah bekas pelaku kerusuhan tahun 1912 di lokasi yang sama, namun dengan ide-ide komunis yang telah mulai menyebar. "De dubbele moord" dalam *De Indische Courant*, tanggal 5 April 1930, lembar ke-6.

Akibatnya anak-anak pribumi tidak mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan yang mencerdaskan kehidupan mereka, kecuali beberapa anak orang kaya atau bangsawan yang mampu bersekolah di kota lain yang mempunyai fasilitas pendidikan bagi mereka atau memasuki ELS yang tersedia.

Melihat hal tersebut, dan juga ketidakmampuan pihak BPM atau swasta untuk membuka pendidikan bagi anak-anak pribumi dalam waktu dekat, pemerintah kemudian memutuskan untuk menyediakan fasilitas ini. Akan tetapi pengadaan sekolah tersebut juga membutuhkan modal yang harus disediakan oleh pemerintah sendiri, karena pihak swasta tidak bersedia untuk memberikan kontribusi. Dengan memikirkan pertimbangan tersebut, Gubernur Jenderal van Limburg Stirrum pada akhir Februari 1919 memerintahkan Direktur Pekerjaan Umum untuk melakukan penelitian dan merancang jumlah biaya yang dibutuhkan bagi pembangunannya. Direktur PU menyelesaikan tugasnya pada awal Maret 1919 dan mengajukan laporannya kepada Gubernur Jenderal bersama dengan jumlah dana yang diperlukan bagi biaya pembangunan infrastruktur fisik sekolah itu.¹⁹¹

Namun demikian prasarana fisik saja tidak cukup sebagai dasar pertimbangan bagi sebuah sekolah. Kini persoalannya berkisar pada jenis sekolah apa yang akan dibuka oleh pemerintah bagi kepentingan anak-anak pribumi.¹⁹² Untuk memutuskan jenis ini, Gubernur Jenderal meminta keterangan dari Residen Borneo Selatan dan Timur di Banjarmasin dan Asisten Residen di Samarinda. Bertumpu pada keterangan para pejabat daerah ini, Gubernur Jenderal kemudian memutuskan bahwa sekolah dasar

191 *ANRI*, Surat dari Direktur PU kepada Gubernur Jenderal tanggal 10 Maret 1919 nomor 2/A, bundel *Algemeen Secretarie*.

192 Sejak tahun 1893 ketika sekolah dasar bagi anak-anak pribumi disediakan oleh pemerintah dalam sistem pendidikan kolonial, ada sejumlah jenis sekolah yang dibuka berdasarkan sifat dan fasilitasnya. Jika pada awalnya hanya ada sekolah dasar pribumi klas-1 dan klas-2, memasuki abad XX jenis sekolah ini tumbuh menjadi sekolah desa (*dessaschool*), sekolah penghubung (*schakelschool*), sekolah standar (*standaardschool*), dan kemudian yang tertinggi adalah *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Seperti halnya dengan ELS bagi anak-anak pribumi, klasifikasi sekolah ini juga memiliki kriteria bagi calon siswa dan orangtuanya, termasuk kemampuan ekonomi dan status orangtua siswa. Kees Groeneboer, *Jalan ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-1950* (Jakarta, 1995, Erasmus), halaman 285.

bagi anak-anak pribumi yang paling cocok untuk kota Balikpapan adalah sekolah dasar klas-2 (*tweede Inlandsche School*), yang diputuskan untuk dibangun pada akhir Maret 1919 dan menjadi sekolah dasar bagi anak-anak pribumi pertama di Balikpapan.¹⁹³

Selain bentuk sekolah di atas, sarana pendidikan bagi masyarakat pribumi yang ditemukan di wilayah Balikpapan dan sekitarnya adalah sekolah desa (*dorpschool*). Sekolah ini tidak dibuka oleh pemerintah melainkan oleh usaha swasembada masyarakat, dan juga oleh penguasa pribumi. Di wilayah kekuasaan Sultan Kutei sejumlah sekolah desa ini dibuka dengan guru-guru yang dibayar oleh kas daerah, dan direkrut dari para guru lulusan sekolah guru standard dari Banjarmasin atau tempat lain. Umumnya sekolah ini tidak memungut biaya dan pendanaan yang digunakan untuk menutup pengeluarannya dibayar oleh kas daerah (*landschapkas*) atau oleh keuangan Sultan pribadi, seperti yang terdapat di desa Melak. Sekolah ini umumnya terbuat dari material yang sederhana sehingga rentan terkena dampak cuaca, dan hanya terdiri atas satu kelas yang menampung beberapa orang siswa. Umumnya bahasa Melayu digunakan sebagai pengantar dan pengetahuan yang diajarkan terbatas pada pengetahuan umum, membaca dan menulis dalam huruf Arab.¹⁹⁴

Pada akhir tahun 1920-an bentuk sekolah desa ini semakin banyak dibuka, dan pemerintah daerah juga berperan mendorongnya ketika pihak BPM sudah memberikan perhatian ke arah itu. BPM membuka sekolah untuk anak-anak pribumi ini di empat tempat di kota Balikpapan yaitu di Kampung Baru, Jenebura, Seemboja Kuala dan Sungei Geluang, yang pada tahun 1930 mendapatkan gedung baru. Di luar kota dan khususnya di pedalaman, anak-anak juga mendapatkan fasilitas pendidikan dari

193 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 26 Maart 1919 no. 39*, bundel *Algemeen Secretarie*. Pertimbangan utama pemerintah dalam membuka jenis sekolah ini terletak pada kenyataan bahwa kondisi dan kualitas anak-anak pribumi di Balikpapan, khususnya penduduk asli, masih memerlukan bimbingan dan pengenalan yang paling dasar terhadap pendidikan Barat, karena mereka dianggap belum banyak berinteraksi dengan kehidupan di luar lingkup sehari-harinya, khususnya mengenai peradaban Barat.

194 "Dorpschool en Stamhuis vernield" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 4 Oktober 1934, lembar ke-1.

pemerintah setempat. Mereka yang ditampung untuk dididik di sekolah ini adalah anak-anak pribumi setempat, khususnya Dayak. Di daerah Mahakam Hulu dan di Kuta sekolah desa dibuka, mengingat di kedua tempat ini terjadi pemusatan pemukiman suku Dayak. Karena mereka tidak memahami bahasa lain selain bahasa induknya, pelajaran diberikan dalam bahasa Melayu oleh guru-guru yang didatangkan oleh pemerintah daerah dan dibiayai dari dana kas daerah.¹⁹⁵

Di pusat pemerintahan kota Balikpapan, terutama di kompleks lama Semboja, seiring dengan pembukaan pemukiman pada akhir tahun 1910-an, pemerintah membuka sebuah sekolah rakyat (*volkschool*) dengan masa belajar tiga tahun dan bahasa pengantar bahasa Melayu. Target pembukaan sekolah ini adalah memberikan pendidikan dasar bagi penduduk kota, yang terutama di kompleks itu terdiri atas anak-anak para kuli dan bekas kuli. Meskipun sekolah ini pada mulanya mendapatkan sambutan positif dari masyarakat setempat dengan mengirimkan anak-anak mereka ke sana, pada tahun 1931 sekolah ini harus ditutup seiring dengan perpindahan pemukiman ke tempat lain karena perluasan lahan pemerintahan.¹⁹⁶

Bagi para perantau terutama dari pulau-pulau lain, sector pendidikan juga mendapatkan perhatian. Orang-orang Minahasa yang mulai banyak masuk ke kota Balikpapan, umumnya bekerja sebagai staf perusahaan atau anggota militer pemerintah colonial dan tinggal di kompleks pemerintahan, memikirkan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka.¹⁹⁷ Karena keterbatasan keuangan untuk memasuki sekolah yang ada, mereka berinisiatif dengan membentuk organisasi yang disebut Yayasan Persatuan

195 ANRI, *Militaire memorie van het troepencommando te Balikpapan, 1931*, reel no. 28, MvO serie 1e, halaman 24.

196 ANRI, *Memorie van Overgave Controleur F.L. van Driest, Onderafdeeling Balikpapan, Juli 1931*, reel nomor 28, MvO serie 1e, halaman 4.

197 Orang-orang Minahasa atau Menado ini ditempatkan sebagai garnisun di Balikpapan sejak tahun 1925, ketika mereka menjadi bagian dari brigade ke-6 Resimen Infanteri ke-1 yang bermarkas di Meester Cornelis. Bersama kesatuan yang terdiri atas orang-orang Ambon, mereka menempati tangsi yang dibangun oleh pemerintah. "Het nieuwe garnizoen te Balikpapan" dalam *Het nieuwus van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 20 Januari 1925, lembar ke-9.

Minahasa.¹⁹⁸ Yayasan ini di antaranya memiliki program membuka sebuah sekolah dasar setingkat HIS. Karena banyak dari orangtua siswanya yang bekerja sebagai staf BPM, pengurus yayasan kemudian menghadap kepada direksi perusahaan untuk meminta bantuan. Permintaan ini dikabulkan, sehingga pada tahun 1931 sekolah HIS tersebut dibuka bagi umum.

B. Pelayanan Kesehatan

Di samping pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan memegang peranan yang penting dalam hal perubahan social. Jika pendidikan memberikan kecerdasan dan membuka wawasan bagi penduduk pribumi di pedalaman Kalimantan tentang dunia modern yang harus mereka hadapi, fasilitas dan pelayanan kesehatan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara hidup yang lebih baik dan bahkan bisa menyelamatkan mereka dari ancaman penyakit serta resiko kematian. Namun demikian tantangan yang dihadapi oleh petugas kesehatan dalam mengubah gaya hidup masyarakat primitive dan memasukkan cara-cara pengobatan dan penyembuhan Barat jauh lebih berat dibandingkan para guru yang aktif dalam bidang pengajaran kepada anak-anak pribumi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pengobatan dan perawatan bersentuhan langsung dengan fisik pasien yang akan mempengaruhi bukan hanya kondisi tubuh melainkan juga kejiwaan.

Pendekatan khusus harus dilakukan oleh pemerintah colonial, yang dalam hal ini menjadi pelaku utama dalam penerapan cara pengobatan dan penyembuhan Barat terhadap penduduk pribumi. Dalam hal ini fungsi dari elite penguasa pribumi dianggap sangat strategis oleh pemerintah untuk memberikan kesadaran kepada kawulanya mengenai arti penting sistem medis Barat bagi kesehatan

¹⁹⁸ Induk dari organisasi ini adalah Persatuan Minahasa yang dibentuk oleh anggota Volksraad, G.J.S. Ratulangie di Batavia pada tahun 1927. Meskipun tujuan utama pendiriannya adalah politik, yaitu memperjuangkan struktur federal atas dasar satuan kelompok etnis yang berbeda-beda, tujuan lainnya adalah memajukan kehidupan social orang Minahasa di mana-mana. G.A. van Klinkend, *Minorities, modernity and the emerging nation: Christian in Indonesia* (Leiden, 2003, KITLV Press), halaman 102.

mereka. sejumlah penyakit yang melanda, termasuk wabah beriberi pada tahun 1918 telah membawa korban bagi penduduk, dan kepercayaan mereka baik kepada kekuatan supranatural yang menguasai alam maupun kepada para tabib tradisional dan cara pengobatannya ternyata tidak mampu membawa kesembuhan dan keselamatan.

Bertolak dari kondisi tersebut, para penguasa pribumi kemudian bersedia menerima nasehat dari para pejabat colonial tentang kemampuan metode penyembuhan modern yang dilakukan oleh para dokter Belanda dan dinas kesehatan pemerintah colonial (*gezondheid dienst*). Bahkan Sultan Kutai sendiri kemudian mengakui keunggulan budaya Barat dalam hal peningkatan kualitas kehidupan social orang pribumi. Di samping mengirimkan dua orang putranya untuk belajar di sekolah Belanda di Jawa, ia juga berkenan untuk mengizinkan program kesehatan pemerintah seperti vaksinasi dan pengobatan terhadap penyakit diterapkan di kalanganarganya.

Melalui hubungan dekatnya, asisten residen Samarinda mampu meyakinkan Sultan Kutai tentang arti penting penerapan metode Barat dalam mengatasi persoalan social di wilayah kekuasaannya. Ia bukan hanya memberikan wawasan kepada Sultan, namun bahkan mendorong Sultan untuk ikut berperan aktif dalam program-program pemerintah ini untuk memajukan kualitas hidup rakyat dan daerahnya. Hal ini mencapai puncaknya pada akhir tahun 1920-an ketika pemerintah pusat di Batavia memutuskan untuk membangun sebuah rumahsakit di Balikpapan dengan tujuan menyediakan fasilitas pelayanan umum bagi public. Keberadaan institusi ini menjadi penting sebagai pembantu sekaligus pengganti institusi serupa di Tenggarong, yang selama ini menjadi satu-satunya rumahsakit bagi public di *Afdeeling* Kutai.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Rumahsakit ini pada tahun 1924 dilaporkan berada dalam kondisi yang sangat tidak layak dan tidak menguntungkan untuk diteruskan pengelolaannya. Kesulitan utama terletak pada letak rumahsakit yang berada di lokasi rawan, karena selama musim hujan selalu tergenang air. Lantai rumahsakit ini dan sejumlah bingkai kayu juga sudah rusak akibat genangan air rutin setiap tahun. Karena dianggap tidak lagi efektif untuk melakukan renovasi, pemerintah daerah mengusulkan kepada pemerintah untuk menutupnya dan membuka rumahsakit di tempat yang berbeda. "Borneo:

Dari pihak pemerintah sampai pertengahan tahun 1920-an masalah kesehatan masih ditangani oleh dinas kesehatan militer (*militaire gezondheidsdienst*) yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan bidang kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Di Balikpapan, dalam dinas ini terdapat korps sukarelawan (*vrijwilligers korps*). Kesatuan ini dipimpin seorang perwira berpangkat letnan-1 dari dinas kesehatan militer (*militaire geneeskundige dienst*). Dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, ia didampingi oleh seorang apoteker yang juga berasal dari dinas yang sama, dengan pangkat seorang perwira letnan-2.²⁰⁰

Perwira kesehatan militer ini mengelola sebuah rumah sakit darurat yang dibuka di kompleks barak militer. Beberapa ruang difungsikan sebagai bangsal perawatan untuk pasien yang sakit. Pada mulanya anggota militer dirawat di situ, tetapi kemudian juga orang umum yang membutuhkan perawatan bisa diterima sebagai pasien. Akan tetapi karena fasilitas ini terbatas, sering orang umum ditolak untuk dirawat, khususnya para pegawai BPM termasuk para kuli yang sering rentan terhadap penyakit. Untuk itu pada tahun 1927 BPM memutuskan mendirikan sendiri sebuah poliklinik di kompleks pusat perkantornya.

Poliklinik ini dipimpin oleh seorang dokter Eropa yang didatangkan dari Jawa. Dokter Eropa yang bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga ini adalah seorang ahli bedah, dan dalam manajemen serta perawatan pasien sehari-hari, ia dibantu oleh seorang dokter sipil Eropa kelas-2, seorang dokter lulusan sekolah kedokteran di Hindia Belanda, dua orang perawat Eropa, seorang perawat pribumi dan seorang apoteker Eropa. Di samping itu juga BPM mendatangkan sejumlah juru rawat yang kebanyakan terdiri atas orang Minahasa dari Sulawesi Utara.

Melihat potensi poliklinik ini yang menunjukkan harapan luas dan juga respon dari masyarakat yang positif, jumlah pasien dari para pekerja BPM meningkat pesat. Sebagai akibatnya di samping

een goedgevoelde landschapkas" dalam *Nieuwe Rotterdamse Courant*, tanggal 22 Agustus 1924, lembar ke-6.

200 "Militair departement" dalam *De Telegraaf*, tanggal 17 Juni 1924, lembar ke-2.

poliklinik ini sering ditemkan penuh sesak dengan pasien, juga letaknya di Klandasan cukup jauh dari kompleks pemukiman kuli di pusat pengeboran. Akibatnya sering kuli yang menderita sakit tidak mudah untuk dibawa ke tempat ini. Dari situ direksi BPM kemudian memutuskan pada tahun 1931 untuk membuka sebuah rumahsakit lain di Semboja, agar terjangkau oleh para pasien.

Rumahsakit di Semboja ini pada mulanya dipimpin oleh seorang dokter pribumi yang lulus dari sekolah kedokteran di Surabaya. Namun kemudian melihat peningkatan kualitas dan kuantitas dari pasiennya, seorang dokter Eropa dibutuhkan untuk mengelolanya. Dokter pribumi itu kemudian dijadikan sebagai pendamping. Di samping itu oleh direksi BPM juga didatangkan sejumlah perawat dan juru rawat pribumi. Mereka semua digaji oleh perusahaan dan bukan hanya melayani kesehatan kuli atau pegawai BPM tetapi juga bagi publik.

Di samping institusi rumahsakit dan poliklinik di atas, suatu aktivitas di bidang kesehatan yang menyita perhatian pemerintah adalah pemberantasan wabah cacar dan kudis. Untuk menangani kedua jenis penyakit ini tidak selalu diperlukan rumahsakit terutama bagi pencegahannya. Suatu metode yang telah umum berlaku menurut sistem pengobatan Eropa adalah vaksinasi, yang dilakukan oleh seorang petugas vaksin secara khusus. Petugas vaksin ini datang berkunjung secara rutin ke lokasi-lokasi yang sudah dijadualkan untuk dikunjungi dan melakukan penyuntikan vaksin kepada penduduk secara gratis atas biaya pemerintah. Di Balikpapan, petugas vaksin ini datang berkunjung dari tempat kedudukannya di Samarinda. Dengan rutinitas kedatangan petugas vaksin tersebut, wabah cacar dan kudis pada tahun 1930-an tidak lagi terjadi.

Meskipun demikian, wilayah Kalimantan Timur tetap dianggap sebagai rawan bagi ancaman penyakit. Di samping kondisi alam yang masih belum sepenuhnya terbuka, sifat penduduk yang masih peka terhadap perubahan baru juga mempengaruhi intensitas pengobatan. Untuk mendukung program ini, Sultan Kutai memberikan bantuan sepenuhnya setelah menerima penjelasan

dari Asisten Residen P. Baretta tentang arti penting keberadaan institusi tersebut. Di lokasi yang dipilih, Sultan kemudian menyetujui pendirian rumahsakit tersebut yang mulai dibangun sejak pertengahan tahun 1932. Pada awal Agustus 1933, setelah melewati proses pembangunan, rumahsakit itu akhirnya terwujud. Sebagai penghormatan, pemerintah Belanda meminta Sultan Kutai untuk meresmikan penggunaannya untuk pertama kali. Upacara peresmian ini berlangsung pada tanggal 2 Agustus 1933 oleh Sultan Kutai, yang dihadiri oleh Asisten Residen P. Baretta, para pejabat colonial, para pengusaha swasta dan para bangsawan pribumi. Nama yang diberikan pada rumahsakit itu adalah Emma, dengan daya tampung 50 orang pasien.²⁰¹

Pada umumnya lembaga kesehatan dan para dokter yang ditempatkan di Balikpapan harus menangani sejumlah penyakit. Penyakit yang paling banyak melanda daerah ini dan terutama orang pribumi adalah disentri, tipus dan influenza. Ketiga jenis penyakit ini sering ditemukan di daerah lain dan kadang-kadang bersifat wabah atau epidemic. Akan tetapi ada suatu jenis penyakit yang sering muncul di Balikpapan, tetapi hampir tidak pernah dijumpai di tempat lain. Penyakit ini sering menunjukkan gejala seperti influenza dengan panas tinggi selama empat hari. Apabila pasien berhasil sembuh, penyakit ini akan pergi. Namun apabila pasien tidak bertahan maka ia akan meninggal. Oleh karena hanya ditemukan di tempat ini, jenis penyakit ini sering disebut sebagai "demam Balikpapan".²⁰²

Cacar yang saat itu merupakan jenis penyakit rakyat yang bersifat umum dan sporadic di Hindia Belanda, juga menyerang Borneo. Beberapa kali wabah cacar dijumpai di pulau ini. Pada tahun 1904, penyakit ini menyebar dari koloni Inggris di Labuhan

201 "Het nieuw hospitalen op Borneo" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 3 Agustus 1933, lembar ke-1. Dengan melihat daya tampungnya yang mencapai 50 pasien, ukuran rumahsakit ini sebenarnya tidak banyak dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Setidaknya bila rumahsakit ini hanya disediakan untuk melayani pasien orang Eropa, tidak sampai 10% jumlah warga yang bisa dirawat di sini.

202 ANRI, *Memorie van Overgave Onderafdeeling Balikpapan door Controleur van Driest, Juli 1931*, reel nomor 28, bundel MvO serie 1e, halaman 21.

dan dengan cepat meluas ke arah selatan.²⁰³ Sepuluh tahun kemudian kembali petugas kesehatan di lapangan melaporkan terjadinya wabah cacar di pulau ini, yang saat ini dimulai dari arah barat khususnya di kota Pontianak.²⁰⁴ Wabah terbesar terjadi pada tahun 1930, ketika di Kalimantan Barat cacar melanda dan dengan cepat meluas ke daerah pedalaman. Bahkan petugas kesehatan sendiri juga terjangkit penyakit ini sehingga pemerintah colonial mencurahkan perhatian khusus untuk mengatasinya.²⁰⁵ Korban dari penyakit ini bukan hanya mengakibatkan cacat fisik tetapi juga bisa mengakibatkan kematian.²⁰⁶

Langkah-langkah penanggulangan terhadap merebaknya epidemic ini sejak awal telah diambil oleh pemerintah. Daerah Kalimantan Timur, khususnya *afdeeling* Kutai dianggap merupakan daerah yang rentan terhadap penyebaran penyakit ini. Pemerintah colonial yang menyadari hal ini segera mencegahnya dengan mengirimkan petugas vaksin, sebagai langkah untuk menghentikan penyebaran penyakit itu. Hal ini terjadi pada awal bulan April 1907, dengan pengiriman seorang juru vaksin pembantu (*hulpvaccinateur*) ke Pasisir untuk melakukan tugas vaksinasi terhadap penduduk di sana.²⁰⁷

Efektivitas penempatan petugas ini segera terbukti hasilnya. Oleh karena itu mengingat luasnya wilayah dan tuntutan penanggulangan yang semakin mendesak, di samping juga peluang bagi pemerintah colonial untuk melakukan intervensi yang lebih luas terhadap wilayah ini, pada tahun 1909 jabatan juru vaksin pembantu segera digantikan dengan juru vaksin utama (*vaccinateur*), yang dibantu oleh juru vaksin pembantu. Dengan adanya petugas demikian, yang diberi tanggungjawab dan kewenangan lebih besar,

203 "Besmet verklaard" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 13 Juni 1904, lembar ke-2.

204 "Pokken op Borneo" dalam *Nieuwsblad van Noorden*, tanggal 28 Maret 1914, lembar ke-2.

205 "Pokken op Borneo. Ook de dokter aangetast", dalam *De Volk: adgblad voor arbeiderspartij*, tanggal 3 Maret 1930, lembar ke-1

206 Seorang pastur yang ditempatkan dalam karya misi di Pelanju meninggal setelah mempersembahkan misa karena terserang cacar. "Kerknieuws" dalam *De Tijd*, tanggal 14 September 1918, lembar ke-9.

207 "Tegen de pokken" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 4 April 1907, lembar ke-6.

pemerintah berharap agar setidaknya potensi resiko penyebaran cacar bisa ditekan.²⁰⁸

Kemampuan para petugas ini pertama kali teruji ketika wabah cacar merebak di seluruh pedalaman Kalimantan pada bulan November 1913 dari daerah Pleihari, yang segera menyebar ke pantai timur pada tahun 1914. Pada mulanya para petugas vaksin ini menerapkan vaksinasi terhadap mereka yang belum terkena cacar, sementara mereka yang sudah terjangkit segera ditangani oleh tenaga dokter Jawa yang ditempatkan di sana. Akan tetapi pada kenyataannya mereka yang telah menerima vaksinasi masih tetap terkena penularan penyakit ini. Dari evaluasi yang dilakukan di kalangan para petugas medis di Kalimantan, keputusan dibuat bahwa proses vaksinasi ulang (*revaccinatie*) akan dilakukan untuk memperkuat kekebalan tubuh pasien. Namun demikian di kalangan masyarakat sendiri perasaan takut telah muncul, sehingga diperlukan bantuan dari aparat pemerintah daerah untuk membujuk dan juga memaksa penduduk agar bersedia menerima vaksinasi kembali.²⁰⁹

Ketika metode ini dianggap berhasil mencegah penyebaran influenza, pemerintah kemudian memutuskan untuk meneruskan dan memperluasnya. Untuk itu sejak tahun 1920-an sejumlah petugas vaksin dan pembantu juru vaksin ditambah dan ditempatkan di beberapa lokasi penugasan. Di Balikpapan, petugas vaksin ditempatkan dan dalam pekerjaannya ia harus melakukan koordinasi dengan aparat kesehatan setempat dan institusi rumahsakit yang sudah ada. Jika pada awalnya para petugas vaksin dan pembantunya umumnya terdiri atas orang Eropa, memasuki tahun 1930an dengan semakin banyaknya orang pribumi yang dididik dalam sekolah juru vaksin, mereka terdiri atas orang pribumi yang ditempatkan di Balikpapan. Dengan demikian sampai akhir pemerintahan colonial, Balikpapan mempunyai juru vaksin

208 "Vaccinateurs" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 26 Januari 1909, lembar ke-2.

209 "Vaccinatie op Borneo" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 4 Februari 1914, lembar ke-3.

tetap yang bertugas melayani pemberian vaksin cacar kepada penduduk.²¹⁰

Seperti halnya cacar, demam merupakan jenis penyakit rakyat yang sering melanda daerah ini. Dominasi rawa yang terbentang di hampir sepanjang pantai timur Kalimantan menjadi penyebab utama dari penyakit tersebut, karena uap yang ditimbulkan akibat terpaan sinar matahari membuat mereka yang menghirupnya segera menderita penyakit ini. Pada tahun 1903, ketika birokrasi colonial belum sepenuhnya dibentuk di wilayah ini, Kalimantan Timur dilaporkan mengalami wabah demam yang dimulai dari daerah Pasir. Dari sini penyakit itu segera menyebar ke Kutai dan Samarinda, dan meminta banyak korban sehingga banyak orang meninggalkan kampungnya untuk menghindari penularan penyakit tersebut. Kepercayaan kepada takhayul tentang penyebab penyakit dan upaya penyembuhannya lewat jalur mistis memperparah situasi yang ada pada pasien dan meningkatkan jumlah korban.²¹¹

Jenis penyakit lain yang gejalanya mirip influenza dan juga berpotensi membahayakan kehidupan penduduk pribumi adalah malaria. Penyakit ini diketahui sejak tahun-tahun pertama abad XX telah menyerang penduduk pribumi di pedalaman Kalimantan. Bahkan di beberapa suku bersifat endemis, sementara di suku lain bersifat sporadic.²¹² Memasuki decade kedua abad XX, malaria dengan cepat menjadi penyakit endemis di sepanjang pantai Kalimantan Timur, termasuk Balikpapan dan Samarinda. Bahkan garnisun militer yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan memadai juga terkena serangan malaria ini. Begitu juga dengan anak-anak yang sering menjadi sasaran penyakit itu. Untuk menanggulangnya, vaksinasi juga diberikan di sekolah bagi anak-anak yang sedang duduk di bangku pelajaran. Mereka dikunjungi

210 "Volksgezondheid" dalam *De Indische Courant*, tanggal 5 Maret 1940, lembar ke-11.

211 "Uit korte verslagen" dalam *Bataviaasch nieuwsblad*, tanggal 23 November 1906, lembar ke-4.

212 Dua suku yang dimaksudkan di sini adalah suku Dayak Bahau di Mahakam Hulu dan suku Dayak Kenya di Kayan Hulu. "Centraal Borneo" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 31 Maret 1903, lembar ke-5.

oleh petugas vaksin dan kemudian divaksin di sekolahnya. Pola ini dimulai di Samarinda pada tahun 1914 dan seterusnya diberlakukan untuk kota Balikpapan dan yang lain.²¹³

Akan tetapi toh laporan mengenai wabah malaria kembali terjadi di sejumlah tempat di pedalaman Kalimantan, terutama di aliran sungai Mahakam. Bahkan sejumlah kota mulai diserang oleh wabah penyakit ini. Melihat hal itu pemerintah mengirimkan seorang dokter ahli H.F. Tillema dari Bloemendaal yang dipanggil untuk berangkat ke Kalimantan Timur pada bulan Februari 1928 dengan instruksi melakukan penyelidikan khusus tentang wabah malaria.²¹⁴

Di samping petugas vaksin dan pembantunya, sosok yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah dokter Jawa. Sejak diluluskan pertama pada tahun 1854²¹⁵, tenaga ini diandalkan oleh pemerintah sebagai tenaga medis pembantu dokter Eropa baik sipil maupun militer bagi pengobatan dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pribumi. Di samping efektivitas dari segi ekonomi dan geografi, dokter Jawa yang terdiri atas orang pribumi diduga mempunyai kemampuan pendekatan dan berinteraksi dengan masyarakat yang masih awam terhadap pengobatan Barat. Di wilayah Kalimantan Timur, kunjungan dokter Jawa pertama kali terjadi pada tanggal 13 Agustus 1903 ketika Kontrolir Berau melakukan penelitian ke pedalaman Kutai untuk memeriksa kehidupan social warganya.²¹⁶

213 "Korte Verslag, dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 1 Agustus 1914, lembar ke-10.

214 "Naar de Dayak van Apo Kayans" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 7 November 1931, lembar ke-14.

215 Sekolah Dokter Djawa di Batavia dibuka secara resmi pada tahun 1851, setelah sebelumnya merupakan kursus bagi para pegawai vaksinasi kesehatan. Melihat keberhasilan alumninya, pemerintah kemudian memutuskannya untuk mengubah sekolah ini menjadi sekolah dokter Djawa karena para muridnya adalah orang pribumi di Jawa. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kesehatan lewat tenaga medis yang terdiri atas orang pribumi, dengan harapan lebih murah dan mudah mobilitasnya. Elisabeth Quirine Hesselink, *Genezers op de koloniale markt: inheemsche dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost Indië 1850-1915* (Amsterdam, 2009, University of Amsterdam Press), halaman 96.

216 "Naar binnenland van Borneo" dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 28 November 1903, lembar ke-6.

C. Bidang Kerohanian

Bidang kerohanian yang dimaksudkan di sini adalah masalah aktivitas lembaga keagamaan, yang menciptakan perubahan social dalam kehidupan masyarakat di kota Balikpapan dan daerah sekitarnya. Ditinjau dari aspek keagamaan, masyarakat pribumi Balikpapan terbagi menjadi dua yaitu komunitas pendatang yang beragama Islam seperti suku Melayu dan Bugis, dan komunitas asli yang masih menganut kepercayaan animism, terutama mereka terdiri atas suku Dayak yang tinggal di pinggiran kota dan daerah pedalaman.

Di samping dua kelompok ini, muncul kekuatan agama lain yang menyebar bersama dengan perubahan social di bidang politik dan ekonomi, serta berlangsung pada saat yang bersamaan dengan penegakkan kekuasaan dan investasi modal Barat. Kekuatan ini adalah agama Kristen, yang mencakup juga institusi keagamaannya sebagai agen-agen pembawa perubahan pada komunitas yang tersentuh oleh pengaruhnya atau melakukan integrasi dalam aktivitasnya. Melalui corak dan bentuknya yang berbeda dengan nilai-nilai tradisional local, agama Kristen mampu mengindektikkan diri dengan citra dunia modern yang dibentuk oleh peradaban Barat di Timur.²¹⁷

Sebagai akibat dari perubahan orientasi politik di kalangan para pembuat kebijakan colonial di Belanda terutama terhadap keberadaan dan kegiatan misionaris Kristen pada akhir abad XIX, koloni HIIndia Belanda terbuka bagi aktivitas penyebaran agama Kristen dan Katolik yang dilaksanakan oleh gereja dan lembaga-lembaga penginjilan. Keputusan Menteri Koloni Abraham Kuyper dari partai kanan untuk mengubah sikap netral agama pemerintah terhadap penyebaran zending telah memberi peluang bagi gereja dan lembaga agama ini untuk melakukan karyanya. Misi mereka

²¹⁷ Lyle Vander Werff, "Christian witness to Muslims: an introduction to issues" dalam James I. Coke, *The Chursch Speaks* (Mich, 2002, W. B. Eerdmans Pub. Co.), halaman 248. Posisi gereja Kristen dalam konteks ini membuatnya berhadapan dengan agama lain terutama yang dianut oleh masyarakat pribumi sebagai lawannya dalam polarisasi yang terbentuk lewat struktur colonial.

diperkuat secara legal oleh ucapan Ratu Wilhelmina dalam pidato awal abad di depan Parlemen Belanda tentang misi suci dari bangsa Belanda untuk mengadabkan penduduk pribumi²¹⁸, di samping juga upaya politik asosiasi oleh pemerintah colonial lewat nilai-nilai budaya Barat untuk menekan radikalisme gerakan keagamaan penduduk pribumi.²¹⁹

Daerah Kalimantan Timur juga tidak luput dari aktivitas penyebaran agama Kristen. Lembaga Kristen yang mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan karya Kristenisasi di antara suku-suku Dayak di daerah ini berasal dari Jerman, yaitu Rijnsche Zendingsgenootschap (Yayasan Zending Rijn). Dengan kepercayaan diri berkat keberhasilannya mengislamkan daerah Tapanuli,²²⁰ RZG bertekad untuk memperluas lahan karyanya ke daerah lain dan Kalimantan Timur menjadi pilihannya setelah mempelajari sosiologis dan geografis daerah ini. Berdasarkan hal itu perwakilan mereka, Pendeta H. Lampmann dari Barmen mengajukan permohonan ijin kepada pemerintah dan dikabulkan pada awal Agustus 1910.²²¹

218 Pidato ini diduga mengutip apa yang ditulis oleh C. Th. Van Deventer dalam majalah *De Gids* tahun 1898 dengan judul artikelnya "Een eereschuld" atau hutang budi oleh bangsa Belanda kepada bangsa pribumi. Tekanan dalam pidato ini yaitu "Belanda sebagai negara Kristen mempunyai kewajiban moral untuk membawa penduduk koloninya menuju suatu dunia baru yang lebih beradab" menyiratkan aspek agama yang kuat sehingga mendasari kebijakan Menteri Kuyper untuk membuka koloni bagi pekabaran Injil. M. Kuitenbrouwer, "Nederland en mensenrechten, 1795-1995" dalam M. Kuitenbrouwer en M. Leenders, *Geschiedenis van mensenrechten: bouwstenen voor een inderdisciplinaire benadering* (Hilversum, 2000. Uitgeverij Verloren), halaman 168.

219 Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Jakarta, 1985, LP3ES), halaman 39. Menurut konsep Profesor Snouck Hurgronje, penduduk pribumi hendaknya mengenal nilai-nilai budaya Barat termasuk juga nilai-nilai ajaran Kristen agar memahami tentang keterbelakangan budaya mereka dan sisi buruk dari Islam yang tidak mampu membawa mereka pada kehidupan modern. Kebijakan mengenal budaya Barat ini disebut sebagai politik asosiasi yang bisa dicapai lewat pemberian pendidikan Barat.

220 Keberhasilan yayasan ini di tanah Batak disebabkan oleh kenyataan bahwa sejak tahun 1863 tokoh RZG Pendeta Nommensen berhasil melakukan pendekatan kepada para kepala adat Batak di lembah Silindung. Keberhasilan membaptis mereka telah mempercepat penyebaran siar agama Kristen Protestan di kalangan penduduk ini hingga ke wilayah danau Toba pada akhir abad XIX. Sejak awal abad XX, lembaga ini mulai memperluas karyanya ke daerah Simalungun dan Tanah Karo, yang berhasil membaptis banyak umat di sana. Karya mereka menjadikan seluruh tanah Batak menjadi daerah kantong Kristen di antara penduduk Islam di sekitarnya. Jan S. Aritonang, *Mission Schools in Batakland 1861-1940* (Leiden, 1994, E.J. Brill), halaman 111-112.

221 "Zending", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 4 Agustus 1910, lembar ke-2.

Karya zending RZG ini terbatas di wilayah *Onderafdeeling* Kutei dan berada dalam hubungan koordinasi yang cermat dengan pejabat pemerintah Belanda setempat untuk mencegah terjadinya gejolak local. Dalam waktu lima belas tahun berkarya, tampaknya meskipun tidak menyolok terdapat kemajuan dalam hal penyiaran agama Kristen. Dengan bertambahnya umat yang berhasil dibaptis oleh para pendeta zending ini, tenaga tambahan diperlukan untuk pelayanan rohani umat yang sudah ada maupun bagi penyiaran agama lebih lanjut. Oleh karenanya pada bulan Juli 1926 pihak yayasan menerima perkenan dari pemerintah Belanda untuk mendatangkan pendeta pembantu, J. Klaiber ke Samarinda.²²²

Karya zending ini tidak hanya terbatas pada penduduk pribumi Dayak yang tinggal di pedalaman, namun mereka juga memperluas aktivitasnya ke perkotaan. Terutama orang Cina yang tinggal di kota menjadi sasaran karya penyiaran Injil mereka. orang-orang Cina ini, terutama sejak memasuki tahun 1930-an ketika infiltrasi komunis di antara mereka terhenti setelah pemberontakan yang gagal, menanggapi karya zending ini dengan baik dan banyak dari mereka yang kemudian dibaptis dan menjadi jemaat. Lonjakan jumlah umat ini mengakibatkan tuntutan tenaga baru dari kalangan zending, terutama mereka yang memahami interaksi dengan penduduk Cina. Untuk itu pada bulan Mei 1929, pendeta Jason Linn dan Paul R. Lenn dari The Christian and Missionary Alliance tiba di Samarinda untuk melakukan pelayanan kepada mereka.²²³

Mereka tetap menjalankan pelayanan social dan rohani kepada umat yang umumnya terdiri atas masyarakat pribumi. Hubungan mereka dengan umat bisa dikatakan baik dan terus berlangsung bahkan setelah rezim colonial Belanda berakhir dan digantikan

²²² "Zending, dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 12 Juli 1926, lembar ke-2.

²²³ "Zending" dalam *De Indische Courant*, tanggal 23 Mei 1929, lembar ke-6. Yayasan dari gereja Metodis Amerika ini telah menunjukkan keberhasilannya dalam berkarya di kalangan orang-orang Dayak di Kalimantan. Dua tahun setelah penerimaan ijinnya, mereka menurut laporannya berhasil membaptis 734 orang Dayak. Jumlah ini jauh lebih tinggi daripada orang Bali yang berhasil mereka bapdi dalam kurun waktu yang sama, yaitu 205 orang. "Amerikansche zending in Indië" dalam *De Indische Courant*, tanggal 2 Agustus 1933, lembar ke-9.

oleh rezim militer Jepang. Di bawah kekuasaan angkatan laut (*kaigun*), para pendeta Belanda ini tidak ditahan meskipun dianggap sebagai warga negara musuh. Hal ini terbukti bahwa pada awal Oktober 1942 mereka mengajukan surat permohonan kepada penguasa militer di Banjarmasin agar masih tetap diperkenankan meneruskan karya pelayanan rohaninya kepada umatnya.²²⁴

Missi Katolik juga berkarya di daerah ini sejak tahun 1909, yang ditandai dengan pembentukan Kongregasi Hati Kudus dari Grave.²²⁵ Mereka berkarya di daerah Mahakam Hulu dengan pusat misionarisnya berada di Long Iram Hulu, terutama di kampung Laham.²²⁶ Di sana mereka menempatkan sejumlah pastur dan kemudian melakukan interaksi dengan penduduk Dayak setempat. Dari interaksi ini secara perlahan mereka mulai menyiarkan agama Katolik dan melakukan pembaptisan. Proses ini direncanakan akan semakin cepat berlangsung dengan adanya pembukaan sekolah-sekolah yang dikelola oleh pastur dan dibantu oleh sejumlah guru.²²⁷

Akan tetapi perkembangan tersebut tampaknya tidak begitu lancar. Selama sekitar dua puluh tahun, missi Katolik hanya berhasil membaptis sekitar 300-an orang Dayak, meskipun sekolah-sekolah missi ini berhasil menampung sejumlah anak untuk dididik dasar pengetahuan barat dan iman Kristen. Kegagalan ini terutama diduga disebabkan oleh sikap orang Dayak sendiri yang pada prinsipnya tidak melihat adanya keuntungan materi untuk dibaptis dan menjadi umat Katolik. Sejumlah larangan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik terhadap kebiasaan adat orang

224 "Zending in Ned. Oost Indie" dalam *Het vaderland*, tanggal 6 Oktober 1942, lembar ke-5.

225 "Zending" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 7 Juli 1909, lembar ke-3.

Ada laporan lain yang menyebutkan bahwa kota puser dari ordo tersebut adalah Handel. Pastur pertama yang menerima ijin untuk berkarya ini adalah J.J. Cluts.

226 "Zending" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 5 Januari 1911, lembar ke-4. Sebagai penerima ijin ini adalah perwakilan dari ordo tersebut, yaitu Pastur A.C.M. Hoogerhoud.

227 "Zending" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 27 Desember 1912, lembar ke-2. Dalam waktu dua tahun sejak ijin pertama diberikan, setidaknya ada tiga pastur yang ditempatkan di daerah karya missi.

Dayak juga menjadi kendala bagi keberhasilan misi ini, seperti tradisi mereka melakukan pemuncungan kepala.²²⁸

Penilaian oleh pejabat pemerintah setempat di atas akan berbeda ketika komparasi dibuat dengan laporan yang disampaikan oleh para anggota misi Katolik sendiri. Setahun setelah laporan tersebut disampaikan, dari pihak gereja Katolik di Balikpapan disampaikan sebuah laporan yang menarik yaitu bahwa Balikpapan menduduki posisi nomor dua dalam jumlah umat Katolik terbesar di seluruh Kalimantan, setelah Banjarmasin. Dalam hal ini misi mengajukan angka 1.076 umat termasuk 754 orang Eropa.²²⁹

Pertumbuhan jumlah umat ini menarik perhatian dari Vikariat Apostolik di Batavia, dan pada bulan Agustus 1933 mereka mengirimkan empat orang pastur ke Balikpapan untuk meninjau kondisi yang ada di sana. Di bawah bimbingan Partur J. Groen yang telah berada di daerah tersebut, pada awal Agustus 1933 rombongan ini tiba di Banjarmasin dan meneruskan perjalanan mereka ke Balikpapan. Dalam kunjungan ini, mereka melaporkan bahwa ternyata perluasan karya misi telah berhasil sehingga di samping Laham, sebuah stasi sudah dibuka di Tering yang berada di bawah pimpinan seorang pastur. Hal ini menandai bahwa jumlah umat dan wilayah karya misi Katolik di Kalimantan Timur terus mengalami perluasan.²³⁰

Karena letaknya yang strategis dan bersamaan dengan penyelesaian proyek pembangunan jalan penghubung ke pedalaman oleh pemerintah, Balikpapan dipilih menjadi pos misi utama Katolik untuk daerah sekitarnya. Sebagai symbol untuk itu adalah keberadaan gereja induk yang kelak menjadi paroki. Gereja ini mulai dirancang sejak tahun 1931 dan setelah berbagai usaha mengumpulkan material dan dana, bisa terwujud pada akhir

228 ANRI, *Militaire Memorie van troepen commando te Balikpapan, 1931*, reel nomor 28, bundel MvO serie 1e, halaman 14.

229 Karel Steenbrink, *Catholics in Indonesia, 1808-1942, vol. 2* (Leiden, 2007, KITLV Press), halaman 291. Namun demikian harus dicermati dalam hal ini bahwa jumlah orang non-Eropa yang dimaksudkan di atas juga tidak selalu terdiri atas orang Dayak pribumi yang dibaptis. Ada dugaan bahwa jumlah ini mencakup juga orang-orang Cina yang tinggal di kota Balikpapan dan sekitarnya, serta telah melewati proses katekisasi dan akhirnya dibaptis sebagai umat Katolik.

230 "De R.K. Missie", dalam *De Indische Courant*, tanggal 2 September 1933, lembar ke-9.

tahun. Sebagai peresmian, pada tanggal 3 Januari 1932 gereja ini diberkati oleh pastor J. Groen sebagai pimpinan misi di daerah Balikpapan. Sejak itu gereja Katolik di Balikpapan menjadi sentra kegiatan misionaris di wilayah sekitarnya.²³¹

Pemberkatan gereja ini menjadi titik awal bagi pengembangan daerah pelayanan karya misi menjadi sebuah paroki. Dengan pembentukan sebuah paroki, misi Katolik di Balikpapan menjadi semakin otonom dan bisa membuat keputusan sendiri bagi persoalan yang muncul di bawah kewenangannya, kecuali bila menyangkut sesuatu di luar daerah kerja maka ia harus menyerahkannya kepada Vikariat Apostolik.²³² Upaya dari para pengelola misi di Balikpapan untuk menjadi sebuah paroki akhirnya berhasil, dengan melihat kemajuan umat dan karya yang telah dicapai. Pada tanggal 18 September 1935 Balikpapan secara resmi dibentuk sebagai paroki dan bahkan pemerintah colonial juga mengakui keabsahan institusinya.²³³

Dengan disahkannya sebagai paroki, bersama dengan paroki Banjarmasin dan Laham, paroki Balikpapan membawahi Sembilan pos misi yang kelak akan menjadi lingkungan atau kring dalam pelayanan umat. Pertumbuhan menjadi suatu paroki ini menandai perubahan besar dalam sejarah perkembangan misi Katolik di Kalimantan, karena dengan status paroki pembagian administrative baru dalam wilayah karya gereja akan segera dilakukan dengan pengaturan penggunaan pendapatan dan keuangan secara internal.²³⁴

Seperti halnya zending Protestan, misi Katolik di Balikpapan juga memperluas karyanya di kalangan komunitas Cina yang tinggal di sana. Jumlah orang Cina yang menerima ajaran Katolik dan akhirnya dibaptis mengalami peningkatan pesat pada decade 1930-an. Meskipun jumlah pastur dan tenaga pelayan

231 Kerkinzegening" dalam *De Indische Courant*, tanggal 4 Januari 1932, lembar ke-13.

232 "De missie op Borneo" dalam *De Tijd*, tanggal 4 Desember 1934, lembar ke-11.

233 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 18 September 1935 no 26*, bundel *Algemeen Secretarie..*

234 "Standplaatsen R.K. geestelijken" dalam *De Indische Courant*, tanggal 30 September 1935, lembar ke-9.

rohani mencukupi untuk menampung kenaikan jumlah umat ini, tuntutan muncul dari kalangan mereka bagi sekolah anak-anak umat terutama yang tidak tertampung di lembaga pendidikan Barat yang ada. Agar tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan fasilitas belajar, sejak tahun 1937 mereka meminta kepada misionaris bagi pengadaan sekolah khusus untuk mereka. Setelah melewati pertimbangan cermat dan persiapan yang matang, misi Katolik di Balikpapan mendirikan sebuah *Hollandsch-Chineesche School* pada tanggal 9 April 1937. Dengan bantuan subsidi pemerintah, sekolah ini dibuka secara resmi oleh Kontrolir H. d'Ancona.²³⁵ Sekolah ini bukan hanya menerima anak-anak umat Katolik dari kalangan orang Cina, namun juga menerima siswa dan siswi dari anak-anak orang Cina yang beragama lain.

Sekolah di atas menjadi salah satu bukti keberhasilan misi Katolik di Balikpapan khususnya dan daerah Kalimantan Timur pada umumnya. Keberhasilan ini selalu dipantau oleh lembaga gereja Katolik tertinggi di Hindia Belanda, yaitu Vicariat Apostolik di Batavia. Dari hasil pantauan ini, para pejabat gereja Katolik tersebut kemudian mempertimbangkan bahwa sudah saatnya wilayah tersebut dikelola secara terpisah di luar control mereka. Setelah mengirimkan usulnya kepada Uskup Agung di Belanda sebagai pimpinan gereja Katolik tertinggi yang membawahi koloni, keputusan persetujuan diberikan pada awal Juli 1938. Sebagai tindak lanjut dari keputusan ini, pada akhir Juli 1938 Vikariat Apostolik Borneo dibentuk dengan kedudukan pastur pimpinannya di Banjarmasin. Kewenangan control pastur ini mencakup empat pos misi atau paroki, yaitu Banjarmasin, Balikpapan, Tarakan dan Samarinda.²³⁶

235 "Nieuwe Missie School" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 13 April 1937, lembar ke-23.

236 "Missiewerk op Borneo: niwuew apostolische perfectuur" dalam *De Telegraaf*, tanggal 26 Juli 1938, lembar ke-5. Dengan melihat kedekatan tiga pos terakhir, yaitu Balikpapan, Samarinda dan Tarakan, ini terbukti bahwa jumlah umat di ketiga tempat ini sangat tinggi dibandingkan daerah misi lain seperti di pedalaman Kalimantan Tengah.

D. Simpulan

Tiga topik di atas, yaitu perkembangan bidang pendidikan, prasarana kesehatan dan pelayanan rohani oleh rezim colonial, menunjukkan adanya sisi yang berbeda dari paradigm yang berlaku mengenai kolonialisme. Terutama hal ini akan menjadi sangat menarik ketika dikaji dari aspek politik atau ekonomi. Di satu sisi kolonialisme selalu diidentikkan dengan dominasi politik dan eksploitasi ekonomi yang mengakibatkan penderitaan dan kemelaratan pada penduduk pribumi, justru dalam pelayanan dan fungsi sosialnya di sisi yang berbeda kolonialisme menunjukkan wajah humanis.

Terlepas dari tujuan makro untuk mempertahankan dominasi dan melakukan penetrasi kebudayaan terhadap tanah koloninya, perkembangan dalam tiga bidang yang terjadi di atas dengan masyarakat pribumi sebagai obyek menunjukkan bahwa pada dasarnya rezim colonial Belanda tetap memperhatikan masa depan bangsanya yang di bawah kekuasaannya. Kendati unsure diskriminatif tetap ada dalam penerapan kebijakan itu, khususnya yang paling jelas tampak adalah di bidang pendidikan, pada bidang lain tidak ada pembedaan yang menyolok. Semua orang pribumi mempunyai hak mendapatkan pelayanan gratis termasuk dirawat di rumahsakit, dan juga memiliki kesempatan untuk menerima pelayanan rohani dari lembaga gereja.

Kondisi tersebut membuktikan bahwa rezim colonial Belanda telah memiliki rencana jangka panjang untuk melanggengkan dominasinya dengan menciptakan citra positif dalam hubungan colonial antara penguasa dan mereka yang dikuasainya. Hubungan patron-klien dalam bidang kekuasaan, mulai dari birokrasi hingga ikatan kerohanian dalam struktur masyarakat colonial menjadi karakter tersendiri dari sistem pemerintahan oleh rezim colonial Eropa dan khususnya Belanda atas tanah koloninya. Dibandingkan dengan rezim colonial lain seperti Portugis dan Spanyol, kebijakan

dalam pelayanan social Belanda lebih menunjukkan aspek humanis dan perwalian tanpa ada tekanan yang berarti.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

BAB VI

INVESTOR DAN MOTIVATOR: PERAN BPM DALAM PERKEMBANGAN KOTA

Salah satu faktor penting yang ikut menentukan sejarah pertumbuhan dan perkembangan kota Balikpapan, di luar pemerintah, penguasa pribumi dan masyarakat, adalah perusahaan minyak *Bataafsche Petroleum Maatschappij*. Seperti halnya *Deli Maatschappij* di Pantai Timur Sumatra yang telah mendahuluinya di sektor perkebunan, BPM tampil sebagai investor yang menanamkan modalnya untuk mengeksploitasi kekayaan alam di daerah Balikpapan, yaitu kandungan minyak bumi dan mineral lainnya. Keberadaannya bukan hanya sebagai eksploitor melainkan juga membawa peranan penting dan strategis bagi kehidupan sosial di kota Balikpapan. Akibatnya sejarah perkembangan kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dari sejarah BPM di Kalimantan Timur.

A. BPM dan Konsesi bagi Eksploitasi Minyak

Bataafsche Petroleum Maatschappij merupakan sebuah kongsi dagang dari para pengusaha yang menyatukan modal mereka dalam bentuk saham sebesar f 300 juta dan berpusat di kota Den Haag. Perusahaan ini dibentuk pertama kali secara resmi pada tanggal 23 Juli 1907 oleh sekelompok pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan, dan khususnya adalah minyak bumi. Dalam anggaran dasarnya, tujuan BPM diuraikan sebagai berikut

Het opsporen en exploiteeren van petroleumbronnen en delfstoffen in Nederlandsch Indië of elders. De vennootschap is bevoegd tot bereiking van dat doel, mede te werken tot de oprichting van en deel te nemen in naamlooze of andere vennootschappen of ondernemingen, die een soortgelijk doel hebben. Zij is voorts bevoegd tot den handel zoo voor eigen rekening

*als voor gezamenlijke rekening met anderen in petroleum en delfstoffen, alsmede tot den commissiehande daarin, en in het algemeen tot alles wat tot bereiking van haar eigenlijk doel nuttig of noodig is, of daarmede in den ruimsten zin des woords in verband staat.*²³⁷

Mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber minyak bumi dan sumber tambang di Hindia Belanda atau tempat lain. Badan usaha ini berwenang untuk mencapai tujuan itu, bekerjasama untuk mendirikan dan ikut terlibat dalam PT atau badan usaha lain atau perusahaan lain yang mempunyai tujuan serupa. Selanjutnya mereka berwenang untuk berdagang sejauh atas tanggungan sendiri seperti juga atas tanggungan bersama dengan perusahaan lain dalam minyak bumi dan bahan tambang, seperti juga bagi perdagangan komisi, dan pada umumnya dengan semua yang bermanfaat atau diperlukan untuk mencapai tujuan itu, atau dalam arti luas berkaitan dengan hal itu.

Dari bagian anggaran di atas, bisa diketahui bahwa BPM tidak selalu menangani sendiri semua lahan yang telah menjadi eksploitasinya, tetapi juga berpeluang untuk menjalin kongsi atau usaha bersama untuk menggarap objek yang sama sejauh merupakan produk mineral.

Akan tetapi BPM sebenarnya bukan perusahaan pertama yang mencoba untuk melakukan investasi dalam bidang eksplorasi pertambangan di Hindia Belanda. Pendiriannya didasarkan pada kesepakatan para pemegang saham untuk mengambil alih eksploitasi sejumlah konsesi yang telah dimulai oleh beberapa perusahaan di wilayah koloni Belanda ini. Dua perusahaan besar yang bergerak di bidang eksploitasi pertambangan minyak bumi, yaitu *Dordtsche Petroleum Maatschappij* dan *Nederlandsch Indische Industrie en Handelmaatschappij*, diambil alih oleh mereka dan kemudian disatukan dalam bentuk BPM.²³⁸

237 *Staatscourant* 23 Juli 1907. Masa berlakunya anggaran dasar ini sampai tanggal 31 Desember 1997. Selain modal f 300 juta, pada awal pendiriannya BPM juga mendapatkan pinjaman obligasi internasional senilai \$ 25 juta dengan bunga ½ persen dan f 72 juta dengan bunga 4 ½%.

238 Sebenarnya pengambil alihan ini merupakan suatu kesepakatan antara kedua pihak untuk melakukan barter. BPM melepaskan ribuan lembar saham yang dimilikinya dari *Royal Dutch* dan *Shell* kepada *Dordtsche Petroleum Mij.*, yang disetujui dalam rapat luas biasa direksi dan komisaris *Dordtsche Petroleum Mij* pada tanggal 24 Juni 1911. Frederick Carel Gerretson, *History of the Royal Dutch*, vol. 4 ('s Gravenhage, 1958, The Royal Dutch Petroleum Company), halaman 84.



Instalasi Kilang Minyak di Balikpapan (12 mrt 1928)
(Bataatsche Petroleum Maatschappij)

Salah satu lahan eksploitasi minyak bumi yang dimiliki oleh salah satu dari kedua perusahaan tersebut di atas terletak di Kalimantan Timur. Dordtsche Petroleum Maatschappij sejak awal tahun 1890an telah melakukan pemantauan dan eksplorasi lahan dengan maksud untuk menemukan kandungan minyak bumi yang memadai. Tim pemantauan dilakukan oleh Ir. Menten yang selama sepuluh tahun berada di Kutai untuk melakukan penelitian geologi.²³⁹ Hasil pemantauan ini menunjukkan bahwa lokasi yang mengandung mineral minyak bumi dalam jumlah besar terdapat di wilayah Kalimantan Timur, terutama yang menjadi wilayah

²³⁹ "Petroleum in Borneo" dalam *De Java Bode*, tanggal 18 Juni 1897, halaman 1.

kekuasaan Sultan Kutai.²⁴⁰ Berdasarkan kesepakatan antara direktur Dordtsche Petroleum Maatschappij dan Sultan Kutai saat itu, Mohamad Adil Chalifatoil Mu'minin, dan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah, perusahaan ini mendapatkan hak konsesi bagi penambangan minyak bumi dan batubara di dua lokasi, yang disebut kompleks Louise untuk minyak bumi seluas 28.900 bahu dan kompleks Mathilde untuk batubara dengan luas 22.899 bahu.²⁴¹ Keduanya terletak di sepanjang aliran sungai Mahakam dan anak-anak sungainya hingga ke muara.²⁴²

Konsesi yang berlaku selama tujuh puluh lima tahun ini dimaksudkan untuk melakukan eksploitasi minyak bumi, termasuk juga nafta, kerak bumi, aspal, damar, kapur batu, gas alam dan batubara. Mengingat lahan yang dijadikan sebagai objek eksploitasi merupakan kewenangan Sultan Kutai, perusahaan pemegang konsesi wajib membayar ganti rugi (*schadeloosteling*) kepada Sultan. Jumlah ganti rugi ini ditetapkan sebesar f 0,50 per ton batubara dan f 0,50 per meter kubik produk lain sampai batas minimal f 2500.²⁴³

Akan tetapi ternyata kesulitan dialami oleh jajaran direksi perusahaan. Menurut perhitungannya, tidak mungkin melakukan pembagian seperti yang dimaksudkan di atas karena kandungan mineral minyak bumi dan batubara sangat berdekatan. Sebagai akibatnya sampai tahun 1895, eksploitasi kedua tambang itu belum dimulai sementara ketentuan berlaku bahwa sampai 1 Desember 1897 masa perijinan dianggap kadaluwarsa.²⁴⁴ Oleh karena itu pada bulan April 1897 direksi perusahaan ini mengusulkan kepada pemerintah colonial agar memberikan ijin konsesi bagi perluasan

240 Setidaknya ada tiga perusahaan besar yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan batubara melakukan investasi di wilayah Kesultanan Kutai pada akhir abad XIX. Mereka adalah Firma Sam Samuel & Co dari London, De Koetei Exploratie Mij, dan Dordtsche Mij. Ir. Menten juga dikontrak oleh Firma Sam Samuel yang mempunyai kantor perwakilan Muara Jawa, salah satu delta sungai Mahakam. Dari situ firma ini kemudian membangun penyulingan di Sanga-Sanga yang mengalirkan hasil penyulingannya ke pelabuhan Balikpapan untuk diekspor. "Petroleum industrie in Borneo", dalam *De Locomotief*, tanggal 30 Maret 1899, lembar ke-6.

241 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 30 Juni 1891 no. 4*, bundel *Algemeen Secretarie*.

242 "Koetei" dalam *De Locomotief*, 4 October 1898, lembar ke-2.

243 *Java Courant* 20 November 1891 no. 93.

244 "Petroleum in het Koloniaal Verslag" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 5 Mei 1897, lembar ke-2.

eksploitasi. Hal ini bisa dilakukan melalui kontrak pelengkap sehingga kompleks Louise bisa mengeksplorasi batubara dan kompleks Mathilde bisa mengeksplorasi minyak bumi. Dari pertimbangan teknis yang ada, pemerintah kemudian memberikan persetujuan pada bulan Mei 1897.²⁴⁵

Kemajuan itu tampaknya membawa prospek yang positif bagi perusahaan ini sehingga perwakilan perusahaan Mr. A.C. Sandkuyl yang berada di Weltevreden mengusulkan kepada direksi di Den Haag untuk memperluas lahan eksploitasinya dengan pengajuan permohonan konsesi baru. Jajaran direksi menyetujui hal itu dan kemudian berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebuah permohonan bagi konsesi baru untuk lokasi lain di daerah Kutai diajukan. Setelah mendapat perkenan dari Sultan Kutai, pemerintah kolonial bersedia memberikan konsesi untuk jangka waktu 75 tahun bagi lokasi ketiga yang disebut Nonny.²⁴⁶

Dengan objek yang sama, lahan Nonny mencakup luas yang melebihi kedua lokasi konsesi tambang sebelumnya, yaitu 135.250 hektar tanah. Nilai konsesi yang wajib disetorkan sebagai pengakuan dari perusahaan ini atas hak Sultan ditetapkan sebesar f 0,50 bagi setiap ton batubara, minyak mentah dan unsur-unsur tambang panas lainnya sampai minimal f 18.935.²⁴⁷ Diduga bahwa harga ini diterima oleh para pengusaha investor karena tekanan pemerintah kolonial di Batavia yang khawatir bahwa lahan eksplorasinya akan jatuh ke tangan perusahaan asing, khususnya Inggris, yang telah mendominasi lahan pertambangan minyak di sebelah utara Kutai.²⁴⁸

245 "Uit Koloniaal Verslag", dalam *Algemeen Handelsblad*, 3 April 1898, lembar ke-1. Pada kesempatan yang sama ada dua perusahaan lain yang meminta persetujuan kepada pemerintah bagi hak konsesi eksplorasi tambang minyak di daerah Kutai. Meskipun Sultan Kutai sudah menyediakan lahannya, pemerintah menolaknya.

246 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 13 Mei 1901 no. 26*, bundel *Algemeen Secretarie*

247 *Java Courant* 15 November 1901 nomor 91.

248 Di samping North Borneo Company, perusahaan Inggris lain yang bergerak di sector pertambangan minyak masa ini adalah Standard Oil Company. Dari hasil pemantauan pers Belanda, Standard Oil telah mencoba melakukan penjajagan untuk mendapatkan ijin eksplorasi pertambangan minyak di Kutai. "Uit Koetei" dalam *De Locomotief*, 15 Maret 1898, lembar ke-2.

Namun keberhasilan Dordtsche Petroleum Mij ini tidak membawa hasil bagi perusahaan tersebut. Kesulitan keuangan akibat pinjaman modal dengan bunga yang membebaninya membuat perusahaan ini harus melepaskan asetnya dan melakukan *merger* dengan Nederlandsch Indische Handel en Industrie Mij, yang telah membangun sejumlah infrastruktur di Samarinda,²⁴⁹ ke dalam kongsi baru, yaitu BPM pada tahun 1907. Sementara itu perwakilan Dordtsche Petroleum Mij di Weltevreden, A.C. Sandkuyl yang telah mengundurkan diri sejak tahun 1902 dan bergabung dalam perusahaan baru, yaitu Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch Indie, telah meminta konsesi di lokasi dekat ketiga lahan milik Dordtsche Petroleum Maatschappij. Konsesi yang sama dikabulkan oleh pemerintah pada tanggal 5 November 1903 di tempat yang disebut Muara dengan lahan seluas 18.050 hektar.²⁵⁰

Berdasarkan konsesi yang diperoleh ini, tiga lahan yaitu Sanga-Sanga, Sanga-Sanga Tapiang dan Anggana menjadi lokasi bagi eksploitasi minyak bumi oleh perusahaan tersebut. Sementara itu di daerah lain, perusahaan ini juga mencoba untuk menjajagi kemungkinan bagi pembukaan tempat pengeboran baru atau memperluas lahan yang sudah ada. Perusahaan ini berhasil mengambil 30.176 ton minyak mentah dari tanah Kutai selama empat bulan pertama keberadaannya, dan mengeksportnya untuk diolah menjadi produk minyak bumi di lokasi penyulingan di Rotterdam dan Dusseldorf. Dengan begitu mereka mengalirkan produknya ini ke pelabuhan Balikpapan atau Samarinda untuk dimuat dengan kapal-kapal samodera.²⁵¹

Hasil eksplorasi yang terus dilakukan bersama dengan proses produksi menunjukkan beberapa tempat potensial bagi pengeboran

249 "Twee ongelukken", dalam *Het nieuws van den dag voor Ned. Indië*, 5 Februari 1904, lembar ke-6. Pada awal Februari 1904 dua tanki yang berisi minyak sulingan milik perusahaan ini di Samarinda meledak dan mengakibatkan kebakaran besar yang berlangsung selama beberapa hari. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki prasarana infrastruktur yang memadai di daerah eksplorasinya.

250 ANRI, *Besluit van Gouverneur generaal 5 November 1903 no. 42*, bundel *Algemeen Secretarie*.

251 "Kon. Ned. Mij. tot exploitatie van Petroleumbronnen in Nederl. Indië" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 9 Juli 1904, lembar ke-6.

baru. Akan tetapi hal itu juga menimbulkan masalah terutama di bidang pengangkutan. Ketika lahan pengeboran semakin jauh dari pantai, sementara pipa penyaluran belum dipasang, pengangkutan tergantung pada kapal-kapal tanki. Persoalannya adalah tidak mudah menemukan tanki bertonase ringan yang bisa menyusuri sungai Mahakam. Sementara itu kandungan paraffin yang tinggi pada minyak mentah yang dihasilkan menuntut penyulingan khusus di infrastruktur perusahaan ini yang dibangun di Pangkalan Brandan. Namun sebaliknya, dengan keberhasilan upaya pengeboran di Tarakan, produksi minyak mentah di sana berkualitas lebih baik dibandingkan di Muara Jawa. Dengan demikian jajaran direksi memutuskan untuk meneruskan pengeboran di Tarakan.²⁵²

Keberhasilan eksploitasi ini kemudian mendorong jajaran direksi Koninklijke Nederlandsche Maatschappij untuk memperluas wilayah penambangan minyak dan mineralnya di Kesultanan Kutai. Dari hasil eksplorasi selama beberapa bulan, mereka kemudian mengarahkan perhatiannya ke daerah Pelarang. Setelah memastikan lokasi yang akan dijadikan objek pengeboran, direksi mengajukan permohonan kepada Sultan Kutai yang segera menyetujuinya. Pada tanggal 14 Desember 1905 pemerintah Batavia mengabulkan konsesi kepada perusahaan ini atas lahan milik Sultan Kutai seluas 4725 hektar yang berlaku selama 75 tahun.²⁵³

Sepuluh hari kemudian, kembali perusahaan ini mengajukan permohonan konsesi bagi penambangan minyak bumi. Saat ini lokasinya terletak di pulau Tarakan yang merupakan wilayah langsung pemerintah colonial. Oleh karenanya perusahaan tidak perlu menghubungi penguasa swapraja, dan pada tanggal 24 Desember 1905 pemerintah mengabulkan permohonan konsesi

252 "Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum bronnen in Nederlandsch Indië" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 11 Juli 1905, lembar ke-5.

253 "Concessie verleend" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 20 Desember 1905, lembar ke-3. Lihat juga ANRI, *Besluit van Gouverneur generaal 17 Desember 1905 no. 17*, bundel *Algemeen Secretarie*.

bagi penambangan minyak bumi di dua lahan sekaligus.²⁵⁴ Luas lahan tersebut masing-masing adalah 4951 hektar dan 4930 hektar, yang berlangsung selama 75 tahun. Keduanya dikelola dan dieksploitasi dalam dua proyek pertambangan terpisah, yaitu Tarakan I dan Tarakan II.²⁵⁵

Dengan terbentuknya kongsi Bataafsche Petroleum Maatschappij, perusahaan ini segera mengambil alih manajemen dan aset-aset Nederlandsch Indische Industrie en Handelmaatschappij di sekitar Kutai. Lokasi penambangan Louise, Mathilde dan Nonny langsung diambil alih, sementara untuk Muara dan Pelarang yang merupakan milik Koninklijk Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum bronnen in Nederlandsch Indië melakukan kerjasama dalam penyeteroran minyak kepada BPM bagi ekspor dan pemasarannya.

Dengan kekuatan modal yang dimilikinya, dan juga dari hasil pemantauan lahan yang ada di lokasi sekitar daerah itu, BPM kemudian mengajukan rencana untuk kembali meminta konsesi bagi eksploitasi sumber minyak bumi. Permohonan yang diajukan pada bulan April 1915 ini kemudian disetujui oleh pemerintah pada tanggal 18 Juni 1915 yang mencakup lahan di Ulu Karang Mumus, seluas 4.036 hektar.²⁵⁶ Wilayah ini masih berada di daerah yang berada di bawah kekuasaan Sultan Kutai, sehingga pihak perusahaan harus memberikan royalti minyak kepada Sultan.²⁵⁷

Setelah mendapatkan konsesi di atas, enam tahun kemudian perusahaan ini mencoba memperluas kembali lokasi eksploitasinya.

254 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 24 December 1905 no. 16 en 17*, bundel *Algemeen Secretarie*. Pemberian konsesi ini dimungkinkan atas dasar pertimbangan bahwa pemerintah Batavia khawatir pada perluasan pengaruh dan aktivitas perusahaan pertambangan minyak bumi di wilayah koloninya. Terutama ketika ada tanda-tanda bahwa orang Inggris berusaha masuk melalui pembelian saham perusahaan Belanda, langkah taktis itu segera diambil. Ini terbukti dari lahan eksplorasi milik De Oost Borneo Mij yang membentang 50 mil di sebelah kanan dan kiri aliran Mahakam, sudah dibeli oleh Firma Samuel and Co. "De Oost Borneo Mij in het Engelsche handen" dalam *Sumatra Post*, 17 April 1900, lembar ke-9.

255 "Concessie verleend" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 28 Desember 1905, lembar ke-2.

256 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 18 Juni 1915 no. 47*, bundel *Algemeen Sekretarie*.

257 Ada sesuatu yang menarik untuk dicermati di sini bahwa konsesi Ulu Karang Mumus tidak tercatat dalam daftar konsesi pertambangan di *Regeerings Almanak*. Justru konsesi BPM Sungu Raya yang berada di Pantai Timur Aceh dengan nomor *beluit* 48 bertanggal sama tercatat dalam daftar tersebut.

Pada pertengahan tahun 1921 direksi menemukan lokal di daerah Samarinda, yang merupakan wilayah pemerintah yaitu Semberah. Ketika diketahui bahwa lahan ini memiliki kandungan minyak bumi dan gas yang memadai, mereka mengajukan permohonan konsesi kepada pemerintah. Permohonan ini dikabulkan pada tanggal 10 Oktober 1921 dan mencakup lahan seluas 3.885 hektar.²⁵⁸

Dari tujuh lokasi di atas, termasuk dua milik Koninklijk Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum bronnen in Nederlandsch Indië, BPM kemudian membentuk suatu kompleks administrasi yang disebut daerah administrasi Balikpapan, karena kantor pusat dari perwakilan BPM untuk wilayah Kalimantan Timur berada di kota Balikpapan. Kantor ini bukan hanya menjadi pusat administrasi bagi kegiatan BPM dan personalianya, melainkan juga menjadi wakil perusahaan tersebut dalam rangka melakukan transaksi dan negosiasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, penguasa pribumi dan perusahaan lain yang berkaitan dengan kepentingan bisnisnya.

Di samping tujuh lokasi konsesi di atas, wilayah kantor administrasi Balikpapan ini juga mencakup lahan kontrakan yang dibentuk menjadi blok eksploitasi. Mengingat pembentukan blok ini memiliki nilai strategis dan mencakup lahan yang sangat luas sehingga berpotensi bisa mempengaruhi kestabilan politik daerah, pemerintah di Den Haag memandang perlu agar pembentukannya di dasarkan pada hukum yang sah dan mempunyai kekuatan atau ikatan kontrak yang memadai. Dasar yang digunakan untuk ini adalah pasal 5 dari UU Pertambangan Hindia (*Indisch Mijnwet*) yang mengatur tentang eksplorasi dan pembukaan lahan pertambangan minyak bumi dan segala jenis mineral yang terkait (*voor de opsporing en ontginning van aardolie en alle andere soorten van bitumineuse zelfstandigheden*).²⁵⁹

258 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 10 October 1921 no. 8, bundel Algemeen Secretarie*. Lama konsesi di lahan ini adalah 75 tahun dan kemudian diperpanjang pada tanggal 10 Oktober 1930 sebagai batas akhir dari pembangunan infrastruktur dan awal eksploitasinya.

259 *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1899 nomor 214.

Setelah mendapatkan kewenangan dari Ratu, pemerintah di Batavia menindaklanjuti instruksi yang sebelumnya telah diterbitkan di Belanda pada tanggal 21 Juli 1928, dengan membuat kesepakatan bersama perwakilan BPM di Hindia Belanda, khususnya untuk lokasi lahan operasional perusahaan ini di wilayah Kalimantan Timur. Dalam pembicaraan dan kesepakatan yang dituangkan melalui kontrak tanggal 25 Oktober 1928, baik pemerintah maupun BPM menyetujui langkah-langkah berikut ini. Dalam pasal 1 kontrak tersebut, pemerintah berkenan memberi hak kepada BPM untuk melakukan eksploitasi tambang minyak bumi dan yang lain di lahan wilayah yang disebut sebagai blok Mahakam seluas 46.200 hektar, dengan batas batas yang tercantum dalam ketentuan ini.²⁶⁰

Terlepas dari kewajiban BPM untuk membayar pajak tetap dan cukai ekspor minyak kepada pemerintah, BPM memiliki hak yang akan mempengaruhi keberadaan dan kinerjanya di wilayah operasional blok Mahakam ini. Hal itu dimuat dalam pasal 8 ayat 1 kesepakatan di atas yang tercatat sebagai berikut

De Maatschappij is bevoegd gedeelten van het in de eerste alinea van artikel 1 bedoelde terrein voor den afloop van den aldaar bepaalden termijn, wederom ter beschikking van het Gouvernement te stellen, mits afstand doende van alle rechten, terzake van die gedeelten voor haar in deze overeenkomst voortloeiend.

Perusahaan berwenang untuk kembali menyerahkan sebagian dari lahan yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal 1 selama jangka waktu yang ditetapkan di sana kepada pemerintah, asalkan pelepasan ini mejangkut semua hak terkait dengan bagian yang muncul baginya dari kesepakatan itu.

Dari ketentuan tersebut, jelas bisa diketahui bahwa lahan yang digunakan untuk membentuk blok Mahakam ini adalah lahan milik pemerintah (*gouvernement grond*), atau setidaknya menjadi tanggungjawab pemerintah, apabila lahan itu merupakan wilayah penguasa Kesultanan Kutai dan elite tradisional pribumi lainnya.

²⁶⁰ *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1928 nomor 456.

Melalui penerbitan ketentuan kontrak di atas, Mahakam blok digunakan sebagai model bagi eksploitasi lahan oleh BPM dan kemudian juga oleh perusahaan-perusahaan minyak lainnya di Hindia. Bagi BPM sendiri, pembentukan blok Mahakam jelas memperkuat posisi dominasinya dalam sektor pertambangan minyak bumi di Kalimantan Timur. Hal ini memotivasi jajaran direksi untuk membentuk blok-blok lain yang terkait dengan usaha eksplorasinya. Dua tahun kemudian, pada pertengahan 1931, melalui perwakilannya A.C. Sandkuyl yang sudah berpengalaman di bidang perminyakan, BPM menghadap kepada pemerintah di batavia untuk mencapai kesepakatan bagi pembentukan tiga blok yang lain. Dari pembicaraan itu pada tanggal 30 Mei 1931, pemerintah mengesahkan pembentukan blok Sambutan seluas 295 hektar, blok Wailawi seluas 840 hektar dan blok Lebeh Batu seluas 2.680 hektar.²⁶¹

Namun demikian, pada kenyataannya pihak BPM menyampaikan keluhan kepada pemerintah karena lahan yang dinyatakan sebagai blok tidak mempunyai kandungan minyak bumi yang memadai. Produksi standard untuk memenuhi kebutuhan ekspor perusahaan tidak lagi bisa diharapkan dari tujuh lokasi konsesi lama, karena produksi mereka semakin berkurang sehingga tidak sepadan dengan kinerja sejumlah infrastruktur perminyakan modern yang telah didatangkan dan dipasang di sekitar kompleks Balikpapan. Harapan untuk menutup penurunan hasil ini dengan potensi produktivitas blok-blok tersebut tampaknya tidak mudah untuk terwujud.²⁶²

Ketika setelah berlangsung selama setengah tahun terbukti bahwa blok Mahakam sendiri tidak memberikan banyak jaminan bagi prospek peningkatan produksi, jajaran direksi kembali mengajukan permohonan kepada pemerintah pada tanggal 10 Desember 1931. Dalam suratnya di antaranya disampaikan sebagai berikut

²⁶¹ *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1931 nomor 329

²⁶² ANRI, *Brief van hoofdvertegenwoordiger der NV. De Bataafsche Petroleum Mij aan Gouverneur Generaal, 6 Juli 1931, bundel Groote Bundel Besluit 1891-1942 no. 2944.*

Zij zich intusschen veroorloft ten aanzien van deze terreinen nadrukkelijk te stipuleeren, dat het geenszins in hare bedoeling ligt, deze gebieden te blijven occupeeren, maar dat zij door middel van regelmatig en stelselmatig voortgezette exploratie zoo spoedig mogelijk eene selectie tracht te bereiken, welke haar in staat zal stellen een zeer aansienlijk gedeelte van het oorspronkelijk gebied wererom terug te geven.²⁶³

Sementara itu sehubungan dengan lahan ini, mereka bersedia menegaskan bahwa tujuannya sama sekali bukan untuk tetap menguasai lahan-lahan tersebut melainkan melalui eksplorasi yang rutin dan terus-menerus secepat mungkin mencoba untuk mencapai suatu seleksi, yang akan membuatnya mampu untuk mengembalikan sebagian besar lahan sebelumnya.

Dari kalimat di atas tampak bahwa pihak BPM sangat mendesak dan memerlukan persetujuan pemerintah bagi perluasan lahan blok Mahakam, dari 42 ribu hektar menjadi 175 ribu hektar, untuk kepentingan secepatnya menyediakan sumber produksi minyak bumi bagi kelanjutan kinerja perusahaannya.

Ketika pemerintah tidak memberikan tanggapan yang tegas terhadap permintaan ini, mengingat kondisi ekonomi yang terpuruk sebagai akibat resesi ekonomi duni di awal tahun 1930-an, kembali perwakilan utama BPM di Batavia mengajukan permohonan. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal De Jonge pada akhir Pebruari 1934, di antaranya ia mengutip pernyataan Menteri Koloni yang telah disampaikan kepada jajaran direksi BPM di Den Haag berikut ini

In bedoelde verklaring, zegt de Minister van Kolonien voorts, dat de Regeering er bij de keuze van de in de toekomst uit te geven terreinen voor wenscht te waken, dat de uitgifte ook op den duur niet in den weg staat aan eene rationale uitbreiding van die bedrijven, welke reeds hebben bewezen, dat hunne instandhouding in 's Lands belang is uit hoofde van de rechtstreeksche baten, welke het Gouvernement uit de ontginning toeloeien en wegens de indirect economische voordeelen, welke die ontginning opleveren.²⁶⁴

263 ANRI, *Brief van hoofdvertegenwoordiger der NV. De Bataafsche Petroleum Mij aan Gouverneur Generaal, 10 December 1931*, bundel Grootte Bundel Besluit 1891-1942 no. 2944

264 ANRI, *Brief van hoofdvertegenwoordiger der BPM aan Gouverneur Generaal 21 Februarie 1934*, bundel Grootte Bundel Besluit 1891-1942 no.2944.

Dalam pernyataan dimaksud, Menteri Koloni selanjutnya berkata, bahwa pemerintah ingin mengawasi dalam memilih lahan yang diberikan di masa mendatang, bahwa pelepasan itu lama-lama juga tidak boleh menghambat perluasan usaha, yang telah menunjukkan bahwa keberadaannya demi kepentingan negara terutama memberikan keuntungan langsung, yang bisa mengalir kepada pemerintah dari pembukaan lahan dan arena keuntungan ekonomi tidak langsung yang dihasilkan oleh pembukaan lahan ini.

Dengan kutipan tersebut, pihak BPM secara tidak langsung mengingatkan pemerintah Hindia Belanda di Batavia, bahwa sebenarnya pemerintah pusat di Den Haag telah menyetujui permintaan BPM dan bahwa eksploitasi oleh BPM akan juga menguntungkan bagi pemerintah colonial.

Setelah membaca secara cermat surat permohonan tersebut dan mempertimbangkan semua konsekuensi yang akan terjadi, akhirnya De Jonge mengabulkan permintaan BPM namun tidak sesuai dengan lahan yang dimaksudkan di wilayah Kalimantan bagian timur. De Jonge menunjuk pada lahan di bentangan sepanjang aliran Barito, di wilayah Kalimantan Tengah yang masih terbuka luas dan diperkirakan terdapat kandungan minyak bumi yang memadai. Lima hari setelah permohonan diajukan, jawaban De Jonge diberikan kepada wakil BPM di Batavia.²⁶⁵

Karena penunjukan konsesi ini berada di Barito, pihak BPM perlu mempertimbangkan pengangkutan produk minyak mentah sebagai hasil eksploitasinya ke pelabuhan Balikpapan untuk diekspor. Hal ini menjadi suatu kendala khusus bagi perusahaan tersebut mengingat di samping jarak yang cukup jauh, lokasi yang dilewati sebagian besar masih terdiri atas hutan dan pegunungan. Sementara itu transportasi sungai yang selama ini menjadi andalan utama bagi pengangkutan di daerah pedalaman Barito seperti juga untuk produk batubara, tidak mungkin dikembangkan ke Balikpapan karena aliran sungai yang lebih banyak bermuara ke selatan. Sebagai solusinya, pihak direksi

265 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 26 Februarie 1934 no. 13, bundel Grootte Bundel 1891-1942*, nomor 2944.

kemudian mempertimbangkan untuk memasang pipa sambungan dalam jarak ratusan kilometer dari lokasi produksi menuju pelabuhan eksportir.²⁶⁶

B. Pengadaan Instalasi Perminyakan

Sesuai dengan sifat badan usahanya, sejumlah perusahaan minyak dan terutama Bataafsche Petroleum Maatschappij membangun instalasi yang difungsikan untuk mendukung kinerja dan manajemen operasionalnya secara langsung. Sebagai jenis perusahaan pertambangan yang mendapatkan produk utamanya dari dalam perut bumi, perusahaan minyak ini menunjukkan penampilan sebagai suatu mega proyek yang sangat besar dibandingkan bentuk usaha lain. Di samping lahan eksploitasinya yang bisa mencapai ribuan hektar, dengan sejumlah titik sumur pengeboran, juga berbagai bentuk instalasi yang digunakan menunjukkan tingkat perkembangan teknologi modern yang jauh melebihi infrastruktur jenis usaha lainnya, seperti perkebunan, kehutanan, perumahan dan bahkan pelabuhan. Dalam kompleks usaha eksplorasi pertambangan ini, terutama yang ditetapkan sebagai suatu blok atau lahan eksploitasi, hampir semua aspek dari bentuk usaha modern tercakup di dalamnya mulai dari objek kerja, perkantoran, perumahan, fasilitas pendukung kehidupan hingga prasarana transportasi dalam berbagai bentuknya.

Apa yang disebut sebagai instalasi pengolahan (*verwerkings-intallatie*) di Balikpapan memiliki kapasitas yang cukup besar, yaitu sekitar 4500 KG ton, karena lahan eksplorasi yang luas dan pasokan produk mentah yang sangat besar. Dalam perangkat instalasi ini, minyak mentah diolah untuk bisa dijadikan sebagai berbagai produk minyak bumi yang siap digunakan. Tentu saja produksi yang dilakukan di sini harus disesuaikan dengan tuntutan yang diajukan oleh pangsa pasar minyak dunia bagi produknya. Tuntutan ini bukan hanya bertumpu pada jumlah melainkan

²⁶⁶ "Petroleum reserves bij Balikpapan raken op", dalam *De Telegraaf*, 14 Agustus 1934, lembar ke-1.

juga pada kualitas yang dikandungnya. Dari semua hasil yang diproduksi dari minyak mentah di kompleks instalasi Balikpapan, kerosene ternyata merupakan produk yang paling diminati dan mencapai harga tertinggi di pasaran dunia.²⁶⁷



Rafinaderie Balikpapan

Opname Dr. G. Krause

Balai Petrolia (1920) Budaya

Industri Minyak Balikpapan (1920)
(Bataatsche Petroleum Maatschappij)

Instalasi pertama yang dibangun oleh setiap perusahaan minyak adalah fasilitas dan perangkat yang mendukung langsung eksplorasi dengan maksud untuk mengetahui di mana kandungan minyak paling banyak ditemukan. Di samping itu juga peralatan ini bisa digunakan dan disesuaikan dengan jumlah kandungan yang diperkirakan terdapat di dalam lapisan tanah itu hingga ratusan atau ribuan meter kedalamannya. Setelah kandungan mineral ditemukan, lokasi yang paling cocok bagi pengeboran dicari. Berdasarkan penemuan lokasi yang paling cocok untuk pengeboran ini, tempat itu ditandai sebagai titik yang akan dibor

²⁶⁷ ANRI, *De Balikpapan administratie*, dalam *Groote Bundel 1891-1942*, bundel nomor 2944.

dan selanjutnya dikembangkan menjadi sumur-sumur minyak. Di setiap lahan konsesi di sekitar Balikpapan, sejumlah sumur minyak dibangun yang merupakan lokasi pengeboran. Sebagian besar letak sumur minyak ini terdapat tidak jauh dari aliran sungai Mahakam.²⁶⁸

Setelah penemuan dan pembuatan sumur-sumur minyak ini, peralatan yang ditempatkan dan difungsikan di tempat ini adalah mesin-mesin yang langsung berkaitan dengan aktivitas pengeboran. Mengingat bentuk kerja ini memiliki tingkat kontinuitas yang tinggi, yaitu kerja terus-menerus baik siang maupun malam, peralatan yang ditempatkan pada umumnya adalah mesin-mesin berat dengan kekuatan tenaga yang tinggi.

Selain pusat pengeboran di sumur-sumur minyak ini, infrastruktur lain yang dibangun oleh perusahaan minyak adalah pipa-pipa sambungan. Pipa ini dipasang dari lokasi sumur-sumur itu dan masing-masing disatukan dalam satu pipa induk yang dipasang sejauh beberapa kilometer. Pipa ini menyalurkan minyak mentah yang akan dibawa ke tempat pengolahan dan penyulingan (*distillinstallatie*) yang dibangun di lokasi berbeda. Pipa ini dipasang di bawah tanah yang telah ditetapkan jalurnya melalui pemantauan lahan sebelumnya. Pemasangan pipa dilakukan oleh para petugas perusahaan yang terdiri atas tenaga kasar dan sering dibantu juga oleh penduduk local yang direkrut sementara untuk pekerjaan itu.

Lokasi penyulingan dan pengolahan minyak mentah di Balikpapan dibangun di kompleks perkantoran pusat BPM. Letaknya di kota Balikpapan dan berada di kaki bukit Teknis (*Techniek Heuvel*). Di lokasi itu terdapat kompleks perkantoran milik BPM yang mencakup instalasi penyulingan, pengolahan dan pengemasan minyak dalam tangki-tangki, kemudian juga perkantoran untuk kegiatan administrasi termasuk tempat kedudukan perwakilan BPM untuk wilayah Kalimantan, pusat transportasi serta sentra

268 J. Jongejans, *Uit Dayjakland: kijkjes in het leven van den koppensneller en zijn omgeving* (1922, J.M. Meulenhoff), halaman 89.

pipa penyalur yang menghubungkan kompleks ini dengan sumur-sumur pengeboran, perumahan pegawai dan khususnya para pegawai tinggi perusahaan, serta dermaga karena letaknya tidak jauh dari pelabuhan.²⁶⁹

Karena lokasinya yang strategis, dengan dermaga yang telah siap digunakan untuk ekspor minyak pada pertengahan decade 1910-an, Balikpapan menjadi sentra penyambungan pipa dari sejumlah lahan konsesi di luar milik BPM. Setelah Perang Dunia I menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, pada pertengahan Juni 1917 sebuah pipa sambungan dari lokasi pengolahan minyak di Semboja dipasang ke pelabuhan Balikpapan. Ini merupakan sambungan ketiga, setelah dua sambungan sebelumnya yang dipasang pada awal decade itu. Sambungan pipa kedua yang dipasang sejauh 54 kilometer pada tahun 1915 menyambung antara lokasi sumur pengeboran di kompleks konsesi Louise hingga ke lokasi pengeboran Semboja. Ukuran pipanya adalah 5", agar bisa menampung produk minyak mentah dari kedua lokasi tersebut.²⁷⁰

Pemasangan sambungan pipa ketiga yang sebenarnya dirancang pada tahun 1915 akhir tetapi tertunda akibat turunnya permintaan minyak sebagai konsekuensi Perang Dunia I, juga memunculkan tuntutan baru terutama di kompleks pelabuhan. Adanya pipa ketiga yang berdiameter 5" sepanjang 48 kilometer ini akan diperkirakan menambah pasokan minyak siap ekspor. Dari hasil perhitungan, diusulkan bahwa di lokasi dermaga pemuatan harus disediakan lahan seluas 30 ribu meter persegi.²⁷¹

Daerah Semboja seperti yang disebutkan di atas memang telah dirancang sejak awal sebagai pusat pabrik. Kampong ini sebelumnya merupakan pusat pemerintahan sampai pada tahun 1914 terjadi reorganisasi pemerintahan dan penjabat *civil*

269 ANRI, *Memorie van Overgave Onderafdeeling Balikpapan door FL. van Driest, Juli 1931*, reel no. 28, MvO serie 1e, halaman 5. Karena Kontrolir van Driest mengutip dari laporan Kontrolir van Romondt yang disampaikan pada bulan Maret 1922, bisa diduga bahwa infrastruktur ini baru dibangun di masa pemerintahan Romondt antara tahun 1920 dan 1922.

270 "Koninklijke Nederlandsche Mij., tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië" dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 21 Juni 1916, lembar ke-9.

271 "Koninklijke Nederlandsche Mij., tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië" dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 26 Juni 1917, lembar ke-7.

gezaghebber pindah ke tempat lain yaitu di Sungei Seluang, yang dianggap lokasinya lebih strategis untuk mengontrol seluruh kota Balikpapan. Setelah perpindahan ini beberapa bangunan yang difungsikan sebagai pabrik penyulingan dipertahankan.²⁷²

Selain pemasangan pipa penyalur ini, sejumlah kalangan pengusaha minyak baik BPM maupun yang lain mulai mempertimbangkan efektivitas penggunaan pipa bagi pengiriman minyak hasil sulingan ini. Dari pertimbangan dan pemikiran dengan melihat perbandingan di Jawa atau di luar negeri, pilihan mereka jatuh pada pemasangan rel yang digunakan untuk transportasi kereta api khusus pengangkut tanki-tanki minyak ke pelabuhan. Setelah menghitung jumlah modal yang dibutuhkan, pada tahun 1916 pemetaan lahan pertama dilakukan bagi pemasangan rel penghubung antara Semboja dan pelabuhan Balikpapan.

Selain Semboja dan Bukit Teknis, lokasi kompleks pabrik BPM lainnya bisa ditemukan di Bukit Pancur. Di tempat ini terdapat sejumlah pabrik yang meskipun tidak langsung mengolah minyak mentah, memproduksi sejumlah unsure yang berkaitan dengan minyak seperti paraffin, drim, asam belerang, batu mulia dan juga pabrik seng atau kaleng. Lokasi ini terletak strategis karena dilewati oleh jalan raya yang menghubungkan antarbagian dari kota Balikpapan, di samping juga terdapat kompleks pemukiman orang Eropa di dekatnya.

Setelah mendapatkan konsesi untuk Sembarah pada tahun 1921, jajaran direksi BPM menyadari bahwa produksi pasti akan meningkat. Hal ini juga dikaitkan dengan kestabilan pasar yang mulai pulih setelah Perang Dunia I berakhir, yang akan diduga terjadi kenaikan permintaan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, instalasi yang ada khususnya instalasi penyulingan tidak lagi memadai. Instalasi ini harus ditambah dan disesuaikan dengan bentuk permintaan pasar yang muncul saat itu. Minyak lampu terutama menjadi salah satu produk yang dianggap memiliki

²⁷² ANRI, *Memorie van Overgave Onderafdeeling Balikpapan door F.L. van Driest, Juli 1931*, reel no. 28, MvO serie 1e, halaman 3.

prospek besar karena lonjakan permintaan. Oleh karenanya direksi kemudian memutuskan untuk memperluas infrastruktur pabrik penyulingan minyak yang ada dengan suatu instalasi khusus untuk memproduksi minyak lampu, bersamaan dengan perbaikan atas kerusakan di sejumlah lahan pengeboran untuk produksi minyak bensin.²⁷³

Di samping instalasi teknis yang langsung berkaitan dengan proses produksi, kompleks perkantoran dan pabrik ini juga melakukan pemasangan dan pengadaan instalasi administrative. Instalasi administrative ini terdiri atas dua bagian, yaitu yang langsung terlibat dalam kinerja manajemen perusahaan dan yang tidak langsung terlibat. Instalasi yang langsung terlibat dalam perusahaan adalah prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi perusahaan, seperti sarana transportasi personil, alat komunikasi, fasilitas perkantoran dan sarana penerangan.

Pelabuhan menjadi salah satu infrastruktur penting yang menunjang kinerja BPM baik dari aspek teknis maupun administrative. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa fungsi pelabuhan bukan hanya ditopang oleh statusnya sebagai sarana pengiriman produk keluar atau ekspor, melainkan juga menjadi jalur pengangkutan penumpang, termasuk tenaga pegawai dan kuli yang didatangkan untuk menunjang proses produksi di instalasi pengeboran dan pengolahan minyak BPM. Namun demikian, dalam pengadaan infrastruktur pelabuhan, BPM tergantung pada pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk menyediakan lahan dan penunjukkan fungsi. Oleh karena itu di Balikpapan, perwakilan BPM harus berunding dengan aparat daerah bagi penggunaan dermaga dan fasilitas pelabuhan lain yang diperlukan olehnya.²⁷⁴

273 "De Koninklijke in 1922" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 20 Juli 1922, lembar ke-10.

274 "Vooruit in Borneo", dalam *Flet nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 19 Februari 1910, lembar ke-3. Pelabuhan Balikpapan dalam hal ini menduduki posisi nomor tiga sebagai pelabuhan teramai di Kalimantan, setelah Banjarmasin dan Samarinda. Kedua pelabuhan tersebut lebih unggul karena lebih dahulu dibangun dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap.

Sementara itu BPM memiliki tanggungjawab dan kewenangan untuk pengadaan sarana transportasinya. Dalam hal ini BPM mendatangkan kapal-kapal yang berfungsi sebagai pengangkut minyak (tanker) hasil olahan di pabrik penyulingannya yang langsung ditujukan bagi kepentingan ekspor. Sarana kapal yang digunakan di sini disesuaikan bagi efektivitasnya, yaitu mampu mengangkut secara maksimal tetapi juga bisa bergerak dengan cepat sehingga mendapatkan penghematan waktu. Untuk mendapatkan prasarana demikian, direksi BPM sengaja memesan sejumlah kapal yang berkekuatan dengan motor diesel dari Belanda dan dikirim ke Balikpapan untuk difungsikan sebagai pengangkut produk dari tanki-tanki penampungan yang dibangun di sekitar dermaga.²⁷⁵

Berbeda dengan pelabuhan dan segala fasilitasnya, yang membuat BPM juga harus mempertimbangkan kepentingan pemerintah, lapangan udara lebih banyak menjadi tanggungjawab dan kewenangan BPM. Memasuki decade 1930-an, kebutuhan bagi transportasi cepat semakin dirasakan terutama di kalangan dunia usaha. Dengan dibukanya penerbangan udara pada tahun 1920-an yang menghubungkan langsung antara koloni Hindia dan Eropa, jenis transportasi ini mulai menjadi perhatian dari para pemilik modal. Meskipun ada kendala bahwa pengadaan pesawat bukan hanya memerlukan modal besar untuk infrastrukturnya namun juga menuntut penyediaan lahan dan instalasinya bagi pendaratannya, kebutuhan yang tinggi mampu mengatasi semua kendala itu. Pada akhir decade 1920-an di sejumlah tempat di Hindia Belanda, lapangan udara dan peralatan yang mendukung operasionalnya mulai dibangun dan difungsikan.

Salah satu lapangan udara ini terletak di dalam jarak dua puluh lima kilometer dari kota Balikpapan yang dibangun oleh W. Hofmann dan E.J. Brunnier.²⁷⁶ Proses pembangunan dimulai pada bulan Desember 1935 setelah BPM mendapatkan lahan dari pemerintah dan memperoleh ijin untuk mengelolanya. Sebagai

275 "Eerste reis der Kota Agoeng" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 13 Maret 1931, lembar ke-14.

276 "Met een KNIL vogel naar Borneo", dalam *De Indische Courant*, 11 Februari 1936, lembar ke-9.

syarat bagi pengabulan ijin ini, pemerintah memberitahu direksi BPM bahwa institusi transportasi yang dikelola pemerintah bisa memanfaatkannya agar dapat melayani komunikasi cepat lewat udara antara Balikpapan dan kota-kota besar lain termasuk ke Batavia. Atas kesepakatan ini, sejak Januari 1936 perusahaan penerbangan *Koninklijk Nederlandsch Indische Luchtvaart Maatschappij* (KNILM) setiap minggu sekali akan melayani penerbangan antara Balikpapan dan kota-kota lain.²⁷⁷

Setelah keberhasilan dalam percobaan penerbangan pertama antara Batavia dan Balikpapan sekaligus penggunaan perdana dari lapangan terbang (*vliegveld*) yang dibuka di Balikpapan ini, yang berlangsung pada tanggal 8 Februari 1936,²⁷⁸ pada tahun itu rencana disusun untuk memperluas jaringan penerbangan ini dengan Balikpapan sebagai tempat transit utama. Tujuan yang akan dikunjungi adalah Tarakan, yang telah menyiapkan fasilitas lapangan udara sendiri. Dengan memanfaatkan Balikpapan sebagai tempat transit, Tarakan bisa juga dihubungkan langsung dengan kota-kota besar di Hindia seperti Batavia, Surabaya dan Banjarmasin. Hal ini terwujud pada akhir tahun 1936, ketika penerbangan pertama sebagai uji coba bagi pelayanan lapangan udara Tarakan berlangsung.²⁷⁹

Keberadaan lapangan udara yang dibangun atas biaya BPM ini jelas memiliki peran yang penting bagi perkembangan kota Balikpapan. Peran ini bukan hanya terkait dengan industry minyak bumi tetapi juga membuka hubungan bagi kota itu dan kota-kota besar lainnya di Hindia, bahkan ada kemungkinan untuk membuka jalur penerbangan internasional. Hal ini terungkap dalam kunjungan tamu kehormatan bersama rombongan direktur KNILM

277 "De nieuwe KNILM-lijn" dalam *De Sumatra Post*, 2 Desember 1935, lembar ke-6.

278 "De eerste vlucht Batavia-Balikpapan v.v" dalam *De Indische Courant*, 8 Februari 1936, lembar ke-10. Dalam penerbangan yang dimulai dari Batavia dan singgah di lapangan udara Darmo, Surabaya, ini, ikut anggota *Volksraad* perwakilan Kalimantan Goesti Moh. Noor, perwakilan BPM dan Borsumij. Penerbangan ini berlangsung selama sehari yaitu pagi dari Batavia dan sore harinya dari Balikpapan pesawat itu kembali ke Batavia.

279 "Naar Tarakan: vliegtuig aangekomen en vertrokken" dalam *De Indische Courant*, 10 Desember 1936, lembar ke-10. Jelas hubungan Balikpapan dan Tarakan didominasi oleh kepentingan industry minyak bumi yang beroperasi di sana.

pada tanggal 10 Oktober 1936 dalam penerbangannya dari Batavia ke Zamboanga dan singgah di Balikpapan. Ketika singgah di kota ini, meskipun hanya terbatas di lapangan udara, para pengunjung tersebut melihat potensi pengembangan lapangan udara tersebut sebagai sarana transit bagi penerbangan internasional, khususnya ke Filipina.²⁸⁰

Terkait dengan aktivitas penerbangan, dan sekaligus menjadi produk lain dari hasil kinerja BPM yang bermanfaat bagi sarana komunikasi umum, adalah pemasangan pemancar radio sebagai alat komunikasi udara. Pembangunan pemancar radio komunikasi ini terjadi pada akhir tahun 1933, ketika pada bulan Oktober 1933 BPM tidak lagi menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah di Tarakan. Meskipun semula fasilitas ini digunakan bagi kepentingan penerbangan udara, namun mengingat peralatan itu dianggap tidak lagi bisa digunakan setelah adanya kesepakatan Washington yang mulai berlaku pada tahun 1934, jajaran direksi BPM mengumumkan akan membangun sendiri dan bisa digunakan bagi kepentingan umum. Dengan adanya fasilitas ini, yang dipusatkan di Balikpapan, harapan direksi adalah agar sentra-sentra industry minyak di Kalimantan Timur bisa langsung berhubungan lewat jaringan komunikasi udara tanpa kawat ke kota-kota penting di Hindia yang mempunyai fasilitas serupa.²⁸¹

Perangkat yang dibangun dan difungsikan oleh BPM ternyata memiliki kualitas yang sangat baik dan terjangkau secara internasional. Selama beberapa tahun pertama difungsikannya peralatan ini, sejumlah jaringan internasional telah memanfaatkannya dan terbantu oleh peralatan radio tersebut. Hal ini mendorong Direktur Jenderal Informasi dan Kepala Departemen Informasi Amerika Serikat berkunjung ke Balikpapan untuk meninjau langsung perangkat PTT dan pemancar radio yang disediakan oleh BPM pada tanggal 11 Mei 1938. Dengan didampingi oleh kepala PTT pemerintah setempat, H. Coorengel, para tamu negara

280 "Ekins in Balikpapan", dalam *De Tijds*, tanggal 10 Oktober 1936, lembar ke-4.

281 "Radio stations van de BPM", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 14 September 1933, lembar ke-2.

ini kemudian diajak keliling dan mereka membahas kemungkinan kerjasama dengan pihak BPM dan pemerintah colonial Belanda. Hal ini membuktikan adanya pengakuan internasional terhadap pelayanan BPM bagi kepentingan publik.²⁸²

Di samping sarana teknis dan transportasi yang digunakan untuk mendukung kinerja perusahaan secara langsung ini, BPM juga memperhatikan fasilitas bagi pegawai mereka sendiri, terutama bagi perumahan atau pemukiman. Perumahan yang disediakan bukan hanya dimaksudkan bagi kepentingan jajaran staf administrative atau kalangan pegawai kantor, tetapi juga mencakup pemukiman bagi para kuli dan buruh yang bekerja di lapangan. Dalam pelaksanaan operasional sehari-harinya, jumlah kuli dan buruh yang direkrut baik secara domestic maupun dari luar negeri ini jauh melebihi jumlah pegawai staf. Oleh karena itu kalangan direksi BPM sejak awal telah mempertimbangkan tersedianya pemukiman yang berbeda di antara keduanya.

Pemukiman yang dibangun oleh BPM untuk staf administrasi sejak awal telah dirancang, yaitu ketika BPM dibentuk dan mengambil alih proyek dan asset milik *Nederlandsch Indische Industrie Mij* di Kalimantan Timur. Perumahan ini dibangun di kompleks perkantoran pusat BPM pertama pada pertengahan tahun 1908. Dalam hal ini BPM bahkan mendahului pemerintah colonial yang belum mempertimbangkan pengadaan rumah dinas bagi aparatnya, sehingga kemudian pada bulan November 1908 pemerintah membuat kesepakatan dengan direksi BPM bagi sewamenyewa rumah yang dibangun oleh BPM untuk kepentingan rumah dinas sementara.²⁸³

Sebagai lokasi bagi pemukiman para pejabat dan pegawai staf teknis dan administrative, BPM memilih Klandasan yang memiliki posisi strategis di dalam kota Balikpapan. Di Klandasan, pemukiman bagi para pejabat dan staf BPM ini bukan hanya terdiri atas perumahan dinas melainkan juga dilengkapi dengan berbagai

282 "Amerikaansch bezoek aan Balikpapan", dalam *De Indische Courant*, 25 Mei 1938, lembar ke-6.

283 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 11 November 1908 no. 6*, bundel *Algemeen Secretarie*.

fasilitas seperti lapangan tennis, rumah ibadah, *societeit* atau tempat hiburan malam yang dilengkapi dengan panggung sandiwara, lapangan sepakbola dan sekolah bagi anak-anak Eropa, rumahsakit, toko koperasi dan jug ataman. Pada prinsipnya kompleks BPM bisa disebut sebagai suatu bentuk daerah pemukiman tersendiri dalam kompleks kota Balikpapan.²⁸⁴

Meskipun menjadi suatu kompleks lahan khusus dalam lingkup kota, di dalam lahan milik BPM sendiri juga terdapat daerah kantong yaitu kampung Pulu Tukung. Daerah kantong ini didominasi oleh perkantoran pemerintah, perkantoran perusahaan swasta seperti KPM, dan juga villa-villa bagi orang kaya dan pejabat pemerintah. Kompleks ini tidak menjadi kewenangan dari BPM melainkan didominasi oleh pemerintah setempat.

Bagi pekerja yang melakukan aktivitas demi kepentingan BPM tetapi bukan pegawai tetap, umumnya mereka tinggal di kampung Samboja Kuala. Perumahan mereka tidak dibangun atau disediakan oleh BPM, tetapi kehidupan mereka terikat pada kinerja BPM. Aktivitas mereka di antaranya adalah mengumpulkan batu karang bagi kepentingan pembakaran, penyediaan tongkang untuk membantu pengangkutan barang dalam ukuran kecil, pelayanan transportasi dengan pedati, tenaga yang direkrut sementara untuk membantu pemasangan atau pemindahan rel, dan juga nelayan.

Sebaliknya bagi tenaga kasar yang digunakan sebagai kuli tetap oleh BPM, perusahaan ini menyediakan pemukiman dalam bentuk rumah sederhana atau barak-barak. Karena begitu banyak jumlah tenaga kuli dan kerani yang termasuk dalam struktur eksploitasi BPM, pemukiman mereka tidak bisa ditampung di satu lokasi. Tiga kampung yang letaknya terpisah disediakan bagi penampungan mereka, yaitu Parapatan, Karanganyar dan Pandansari. Di Pandansari, pola pemukimannya berbeda dengan di dua daerah lain, yaitu dengan bentuk barak-barak atau bangsal.

284 ANRI, *Memorie van Overgave Kontroleur van Driest, Juli 1931*, reel nomor 28, bundel MvO serie 1e, halaman 4.

Dengan melihat situasi perkembangan infrastruktur dan instalasi yang dibangun oleh BPM di atas, sampai akhir decade 1930-an Balikpapan telah tumbuh menjadi sebuah kota dengan karakter sebagai kota perminyakan (*oliestad*). BPM telah mengubah wajah kota itu sebagai investor sekaligus memberikan identifikasi dengan dominasinya. Dengan dilindungi oleh kesatuan garnisun yang ditempatkan di Kelandasan Ilir, dekat pusat perkantoran dan kompleks kegiatannya, BPM mampu menjadikan Balikpapan ini sebagai lahan objek rancangan pembangunannya. Hampir semua kebutuhan bagi pembangunan infrastruktur dipasok sendiri, seperti kayu yang diambil dari hutan sekitarnya dan dioleh di pusat penggergajian yang dibangun oleh BPM. Di samping itu juga terdapat beberapa objek yang digunakan sebagai pembuatan batubata dan pengecoran besi. Semua ini sangat mendukung bagi pembangunan infrastrukturnya.²⁸⁵

Keberhasilan BPM membangun Balikpapan ini bukan hanya diakui di Hindia Belanda melainkan juga di Belanda. Pers Belanda bahkan memuji Balikpapan sebagai sebuah kota yang tumbuh di tengah hutan rimba (*oliestad in oerwoud*). Di antaranya dimuat tulisan berikut ini

*Balikpapan is ontwoekerd aan het oerwoud. Honderden kilometers strekken zich langs Borneo's Oostkust ondoordringbare wouden uit, slechts op enkele plaatsen onderbroken door nederzettingen. Als een lichte vlek ligt de moderne oliestad in de wildernis. Het centrum wordt gevormd door enorme fabriekscomplexen in een warnet van buizen. De woonwijk der Europeanen bestaat uit palen gebouwde huizen tegen de hellingen der heuvels, die tot de zee reiken. Aan de andere zijde der stad liggen de kampongs der inlanders. Maar Europeanen of inlanders, administrateur of koeli, alleen staan zij in dienst van de olie, die Balikpapan van een onaanzienlijk dorp tot een oliehaven van wereldbeteekenis gemaakt heeft.*²⁸⁶

Balikpapan berada di hutan rimba. Ratusan kilometer terbentang hutan yang tidak bisa ditembus di sepanjang pantai timur Borneo, hanya di beberapa tempat diselingi oleh pemukiman. Sebagai titik terang, terletak kota minyak modern di dunia liar. Pusatnya dibentuk

285 "De oliestadt Balikpapan te Borneo oostkust", dalam *De Telegraaf*, 7 Maret 1933, lembar ke-5.

286 "Balikpapan, oliestad in het oerwoud", dalam *Nieuwe Venlosche courant*, tanggal 27 Januari 1942, halaman 4.

oleh kompleks pabrik dalam jaringan pipa. Pemukiman Eropa terdiri atas rumah-rumah yang dibangun di atas tonggak di lereng bukit, yang mencapai laut. Di sisi lain kota itu terletak perkampungan orang pribumi. Tetapi orang Eropa atau pribumi, administrator atau kuli, semuanya bekerja pada usaha minyak, yang menjadikan Balikpapan dari sebuah desa kecil menjadi sebuah pelabuhan minyak terkenal di dunia.

Tulisan di atas setidaknya mengandung dua hal. Pertama, adanya pengakuan bahwa peran industri minyak dan dalam hal ini BPM sangat besar untuk membentuk kota Balikpapan, dan kedua, opini public diarahkan untuk tidak membuat klasifikasi yang berbeda antara orang Eropa dan pribumi, tetapi semuanya disatukan dalam wadah Balikpapan. Dengan demikian pada prinsipnya, opini public di Eropa menganggap bahwa Balikpapan menjadi contoh keberhasilan bukan hanya badan usaha Eropa melainkan program perencanaan Barat untuk membangun sebuah kota Timur dalam nuansa modern menurut konsep mereka. Namun demikian, pujian di atas ternyata berubah hanya dalam waktu tiga bulan. Perang Pasifik yang telah dimulai pada bulan Desember 1941 di Hawaii, segera meluas ke Asia Tenggara dan Balikpapan termasuk salah satu korbannya. Ketika tentara Jepang melakukan invasinya ke Hindia Belanda awal Januari 1942, salah satu sasaran mereka adalah daerah minyak di Kalimantan Timur. Orang-orang Belanda di Balikpapan telah menyadari maksud Jepang ini sebelumnya.²⁸⁷

Dugaan itu berubah menjadi kenyataan pada tanggal 24 Januari 1942 ketika tentara Jepang mendarat di teluk Balikpapan dan langsung bergerak memasuki kota. Pasukan pertahanan Belanda tidak mengambil posisi untuk menahan serangan Jepang ini melainkan sibuk menghancurkan instalasi minyak yang ada di sekitar kota Balikpapan sehingga menimbulkan kebakaran hebat

287 "Balikpapan's vernieling : een ruikende puinhoop", dalam *De Sumatra Post*, 2 Pebruari 1942, lembar-7. Kondisi darurat telah diumumkan oleh penguasa Belanda setempat bagi penduduk kota Balikpapan dalam bentuk tindakan untuk menghadapi bahaya udara. Meskipun ada suasana tenang di kalangan penduduk khususnya orang Eropa, bisa diduga bahwa pemasangan alarm serangan udara di kota ini menandai adanya kecemasan yang terselubung.

dan menghancurkan banyak infrastruktur termasuk persediaan minyak baik minyak mentah maupun hasil olahan. Karena tidak adanya perlawanan yang berarti, kota Balikpapan jatuh pada hari itu juga. Tentara Jepang yang mengetahui kehancuran instalasi minyak segera melakukan pembalasan dengan membantai tawanan perang orang Belanda yang berhasil mereka tangkap, sampai berhenti ketika pihak Belanda menghentikan taktik bumi hangusnya.²⁸⁸

C. Pelayanan Publik

Selain pembangunan infrastruktur yang difungsikan untuk mendukung secara langsung kinerja usahanya dalam eksploitasi dan manajemen perminyakan, BPM juga membangun sejumlah fasilitas yang baik langsung maupun tidak langsung bermanfaat bagi kepentingan umum. Fasilitas yang dibangun ini umumnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu bidang teknis dan bidang social. Bidang teknis merupakan infrastruktur teknik yang dibangun untuk kepentingan umum secara langsung dan membantu aspek ekonomi public. Sementara itu infrastruktur bidang social lebih menekankan pada aspek kehidupan social masyarakat.

Infrastruktur tehnik yang dibangun oleh BPM dalam hal ini terutama adalah jalan. Jalan pertama yang perlu disebutkan dibuka oleh BPM adalah jalan dari Semboja ke Kuala Semboja sejauh 13 kilometer. Jelas bahwa pembukaan jalan ini dilakukan bagi kepentingan industry minyaknya, karena kedua tempat ini menjadi sentra pengeboran minyak. Namun demikian semua biaya perawatan dan perbaikan ketika terjadi kerusakan juga ditanggung oleh BPM.

Sedikit berbeda dengan jalan di atas adalah jalan antara Semboja dan Balikpapan. Meskipun juga dibangun dan diperlebar oleh BPM untuk menunjang kepentingan industry minyaknya,

²⁸⁸ "Balikpapan's vernieling: een oliestad in vlammen", dalam *Amigoe di Curacao*, tanggal 10 Juni 1942, lembar ke-4.

dari pusat pengeboran ke pusat ekspor dan perkantorannya, jalan sejauh 50 kilometer ini sangat bermanfaat bagi kepentingan public yang memanfaatkannya untuk sarana transportasi. Meskipun BPM menetapkan ongkos sebesar f 2,50 per rit pengangkutan mobil berat yang melewati jalan ini, biaya yang terkumpul digunakan bagi kepentingan perawatan dan pelebarannya ketika dibutuhkan. Oleh karena itu tanpa menggunakan dana pemerintah, jalan-jalan tersebut sering disebut sebagai jalan BPM.

Di samping membuka dan memperlebar atau memperbaiki jalan-jalan dengan anggaran sendiri, BPM juga bekerjasama dengan pemerintah untuk membuka jalan lain. Salah satunya adalah jalan dari Karanganyar menuju Klandasan Ilir, yang keduanya menjadi lokasi pemukiman kuli BPM. Pada jalan yang berjarak tujuh kilometer ini, pemerintah daerah menanggung 4 ½ kilometer dari kas daerah (*landschapkas*) sementara BPM menanggung jarak 2½ kilometer. Di samping itu, BPM juga mengeluarkan dana bagi pengaspalan beberapa jalan sehingga bisa dilewati oleh mobil atau angkutan berat.

Selain pembangunan jalan yang merupakan bidang tehnik, BPM juga berkarya di bidang social. Sebuah sekolah dasar untuk anak-anak Eropa (*Europeesch Lagere School*) dibuka di Klandasan, tempat pemukiman para pegawai staf dan tekniknya yang mayoritas merupakan orang Eropa. Meskipun sekolah ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak pegawainya, pada kenyataannya siswa yang bisa masuk dan belajar di sekolah ini tidak terbatas pada keturunan pegawai BPM, dan juga tidak selalu terbatas pada orang Eropa. Sekolah ini juga menerima siswa dari kalangan orang Timur Asing dan orang pribumi meskipun dalam jumlah terbatas.

Bidang kesehatan lebih mendesak bagi pelayanan oleh BPM. Salah satu faktornya adalah kepentingan BPM untuk menjaga agar pegawainya tetap sehat sehingga memiliki tingkat kinerja yang tinggi dengan ditunjang oleh kekuatan fisiknya. Bagi BPM, suatu wabah penyakit yang melanda penduduk dan otomatis juga pegawai mereka akan mengakibatkan kerugian yang besar

karena akan terjadi kemacetan kinerja selama beberapa saat. Hal ini telah terbukti dari terjadinya wabah beri-beri yang melanda daerah pengeboran BPM pada tahun 1918.²⁸⁹ Dalam wabah ini, sejumlah pekerja lapangan terkena beri-beri dan terpaksa tidak bisa meneruskan pekerjaan pengeboran minyak mereka. Sebagai akibat dari situasi ini, pihak BPM mengalami kemacetan produksi dan menderita kerugian besar.

Untuk mengatasi hal itu dan mencegah terjadinya kegagalan dalam pelayanan kesehatan bagi pegawai mereka, jajaran direksi BPM kemudian memutuskan untuk mendirikan sendiri sebuah rumahsakit di kompleks pusat perkantoran dan pemukiman staf mereka. Rumahsakit yang didirikan pada tahun 1920 ini kemudian selama satu decade berkembang menjadi sebuah institusi kesehatan yang modern dan lengkap dengan semua peralatan medis. Lembaga ini juga dilengkapi dengan tenaga ahli dan dipimpin oleh seorang tenaga dokter Eropa yang sekaligus menjadi ahli bedah. Dalam pekerjaannya, ia dibantu oleh oleh seorang dokter Eropa klas-2, seorang dokter Hindia, dua orang perawat Eropa, seorang perawat pribumi dan seorang asisten apoteker Eropa serta banyak juru rawat pribumi yang terutama didatangkan dari Menado.²⁹⁰

Satu dasawarsa kemudian, kebutuhan bagi lembaga kesehatan serupa semakin terasa dan rumahsakit yang telah berkembang menjadi sebuah institusi modern dan besar ini tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan. Factor penghambatnya adalah letaknya yang berada di pusat kota Balikpapan dan jarak yang harus ditempuh bagi pasien di daerah, terutama di pusat-pusat pengeboran minyak yang terletak jauh. Kompleks pengeboran Samboja terutama sangat membutuhkan lembaga demikian karena para pekerja staf dan kuli yang menderita sakit sering terlalu jauh bila harus dirawat di rumahsakit Balikpapan, di samping juga tidak selalu tersedia sarana transportasi yang memadai. Oleh karena itu pada tahun

²⁸⁹ *Koloniaal Verslag over het jaar 1918*, halaman 29.

²⁹⁰ ANRI, *Memorie van Overgave Kontroleur van Driest, Juli 1931*, reel no. 28, bundel MvO serie 1e, halaman 21.

1930, BPM membangun sebuah rumahsakit pembantu (*ziekenhuis*) di Samboja.

Rumahsakit ini direncanakan akan dipimpin oleh seorang dokter Eropa, tetapi pada saat didirikan tenaga dokter Eropa tetap belum ada sehingga untuk sementara dipegang oleh seorang dokter pribumi. Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya, seorang dokter Eropa dari Balikpapan sekali-sekali berkunjung, sementara dokter pribumi yang ditempatkan di situ juga dibantu oleh seorang perawat Eropa dan beberapa orang jururawat pribumi. Prioritas pelayanan di rumahsakit Samboja ini adalah untuk merawat dan mengobati para kuli pribumi dan Timur Asing yang sakit, sementara bagi staf administrasi Eropa rujukan diberikan untuk dirawat di rumahsakit pusat di Balikpapan.²⁹¹

D. Simpulan

Melihat perkembangan yang dialami oleh BPM di daerah konsesinya di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan, bisa diketahui bahwa perkembangan perusahaan ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kota Balikpapan sendiri dan sebaliknya juga demikian. Peran BPM dalam membangun dan mengembangkan kota Balikpapan tentu saja sangat besar, dan bisa diduga lebih besar daripada pemerintah Belanda. BPM menjadi investor sekaligus menjadi perintis atau peletak fondasi bagi perkembangan morfologi kota Balikpapan yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah colonial Hindia Belanda (peran motivator).

Akan tetapi dalam kenyataannya sampai akhir kekuasaan rezim colonial, peran yang dipegang oleh BPM tetap tidak bisa diimbangi. Pemerintah cenderung mengikuti atau bahkan ikut memanfaatkan sejumlah fasilitas BPM yang mendorong pertum-

291 "Olie en Bestuur: nieuwe exploitatie van bronnen" dalam *Bataviaach nieuwsblad*, 8 Agustus 1928, lembar ke-1. Di Samboja penyakit yang paling banyak muncul adalah malaria, karena sifat alamnya yang masih banyak hutan dan rawa-rawa.

buhan kota. Dana yang disediakan oleh pemerintah pusat praktis sangat kecil, sementara potensi yang digali dari daerah melalui kas daerah atau *landschap kas* tentu saja tidak mampu menutup biaya pembangunan infrastruktur yang sangat tinggi. Oleh karena itu kontribusi dari BPM yang menangani berbagai proyek bagi fasilitas umum dapat diduga menjadi mega proyek yang memerlukan pendanaan sangat besar.

Namun demikian baik BPM maupun pemerintah colonial bisa disimpulkan tidak mempunyai rencana yang pasti tentang pengembangan kota Balikpapan di masa mendatang, di luar lingkup kepentingan mereka. BPM yang lebih mengutamakan pembangunan instalasi dan infrastruktur khusus bagi kepentingan usahanya tidak pernah mempunyai cetak biru (*blueprint*) bagi morfologi kota Balikpapan, termasuk perkembangan dan pemekaran lahannya. Begitu juga pemerintah colonial tidak memiliki rancangan serupa karena lebih mengikuti langkah yang diambil oleh BPM.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB VII

MENUJU KOTA MULTI ETNIS: PERKEMBANGAN PENDUDUK DAN PEMUKIMAN

Dibandingkan kota-kota lain di Kalimantan Timur, bahkan di seluruh pulau Kalimantan, Balikpapan bisa dikatakan sebagai sebuah kota yang unik. Salah satu keunikannya, di samping dianggap sebagai "kota minyak" (*oliestad*) karena dominannya pada karakter kota, juga terdapat pada aspek demografi. Penduduk kota ini menunjukkan keragaman dari aspek etnis dan rasial, sehingga tumbuh menjadi sebuah kota multietnis, jika tidak disebut sebagai kota internasional. Komposisi ini tidak terbentuk begitu saja atau dalam waktu singkat, tetapi seperti halnya proses pertumbuhan kota itu sendiri, juga melewati suatu perkembangan selama hampir satu abad. Meskipun tidak bisa dibantah bahwa terbentuknya struktur demografi ini mengarah pada stratifikasi rasial yang menunjukkan masyarakat plural (*plural society*),²⁹² kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari proses perubahan yang terjadi di kota ini khususnya dalam kehidupan social ekonominya. Kehadiran perusahaan minyak dan dominasi politik pemerintah colonial yang secara perlahan telah memberikan karakter khusus pada kota Balikpapan menjadi penentu utama dari terbentuknya struktur tersebut.

A. Orang Belanda

Orang Eropa sudah ada di Balikpapan sebelum kota ini mengawali proses perkembangannya menuju sebuah bentuk

292 J.S. Furnivall, *Netherland India, a study of plural society* (Cambridge, 1943, University of Cambridge press),

pemukiman modern di awal abad XX. Meskipun dalam jumlah kecil dan diduga juga tidak permanen, kehadiran orang Eropa di Balikpapan masih terbatas pada fungsinya sebagai aparat pemerintah dan terkait dengan perluasan kekuasaan Belanda di Kalimantan Timur. Jumlah dan waktu pertama kali mereka tiba tidak bisa diketahui secara pasti, namun diduga bahwa menjelang akhir abad XIX kehadiran mereka semakin intensif dirasakan bersama dengan peningkatan eskalasi dalam interaksi antara pemerintah colonial dan para penguasa pribumi.²⁹³

Pembuatan Traktat Borneo tahun 1891, dan terutama kontrak-kontrak politik dengan penguasa pribumi di sepanjang pantai timur Kalimantan setelah itu, memberikan kesempatan besar bagi Belanda untuk menegaskan lebih banyak dominasi dan kehadiran mereka di kawasan ini. Dalam hal ini mereka bukan hanya menunjukkan keberadaan dan perannya, namun kedatangan mereka juga telah dibekali dengan rencana yang akan diterapkan bagi masa depan daerah-daerah tersebut, termasuk hubungan daerah itu dengan pemerintah pusat di Batavia.²⁹⁴

Seiring dengan penegasan kehadiran kekuatan politik kolonial Belanda ini, kehadiran orang-orang Eropa di wilayah pantai timur Kalimantan juga diwakili dengan adanya investasi modal swasta di sana. Beberapa sector kekayaan alam menjadi objek dari eksploitasi oleh modal swasta, seperti kehutanan dan pertambangan. Keduanya dimiliki dalam jumlah luas oleh para penguasa pribumi di wilayah Kalimantan Timur, dan sejak akhir abad XIX telah menarik perhatian dari para investor swasta Eropa. Orientasi mereka adalah untuk memenuhi tuntutan pasar yang akan menawarkan keuntungan dari transaksi di bursa internasional dalam jumlah yang tak terbatas. Perolehan produk alami ini akan

293 Setelah pembuatan Traktat Borneo dengan Inggris, secara berturut-turut Belanda menyodorkan kontrak politik kepada para penguasa di Kalimantan Timur. Bulungan, Kutai, Pagatan, dan Sambaliung pada tahun 1893, 1895, 1896 dan 1898 menandatangani kontrak politik yang memuat tentang pengakuan mereka terhadap hak pemerintah Belanda untuk mengambil sejumlah asset termasuk ijin untuk memberikan konsesi bagi pertambangan kekayaan mineral di wilayah raja-raja pribumi ini. Semua dimuat dalam *Bijlagen Handelingen der Staten Generaal 1898/1899 no. 151*.

294 Anon., "De toekomst van de residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo. Volgens den resident C.A. Kroesen", dalam *Indische Mercur*, tahun 1901, nomor 37.

menjadikan mereka sebagai kekuatan modal yang dominan di dunia internasional, seperti halnya penguasaan rempah-rempah pada abad XVII. Untuk itu tuntutan mereka bagi proses pasifikasi atas wilayah yang belum ditaklukkan terhadap pemerintah Hindia Belanda meningkat pesat sejak pertengahan kedua abad XIX.²⁹⁵

Akan tetapi mengingat proses pasifikasi politik pemerintah kolonial atas Kalimantan Timur bersamaan dengan proses penetrasi ekonomi Barat, terutama sektor pertambangan yang bertumpu atas dasar konsesi, kedatangan orang Eropa baik aparat pemerintah maupun pengusaha swasta dan staf mereka berlangsung pada waktu yang hampir sama.²⁹⁶ Staf pemerintahan yang ditempatkan di wilayah *Afdeeling Oost Borneo* tiba bersamaan dengan staf administrasi dari perusahaan minyak *Nederlandsch Indische Industrie Mij* dan *Dordtsche Petroleum Mij*, ketika kedua perusahaan ini mendapatkan konsesi penambangan minyak di wilayah Kesultanan Kutai dari pemerintah kolonial. Pada saat eksplorasi pertambangan ini dimulai oleh dua perusahaan itu, kontrak politik baru saja dibuat oleh Sultan Kutai dengan pemerintah kolonial.²⁹⁷

Penerimaan positif oleh Sultan Kutai, dan juga oleh para penguasa pribumi lainnya di Kalimantan Timur, dan sikap masyarakat Melayu Kalimantan yang tidak konfrontatif terhadap kehadiran orang-orang Eropa ini memotivasi mereka untuk mengunjungi daerah ini dan kemudian melakukan investasi usaha di sana. Sepanjang sejarah yang ada, tidak ada konflik besar yang terjadi

295 Ge Prince, "Dutch economic policy in Indonesia 1870-1942" dalam Angus Maddison and Ge Prince, *Economic Growth in Indonesia, 18209-1940* (Dordrecht, 1989, Foris Publ), halaman 207.

296 Keterlibatan kalangan investor modal swasta dalam pembuatan kebijakan di tingkat parlemen Belanda pada akhir abad XIX dan kepentingan mereka dalam proses pasifikasi bagi eksplorasi kekayaan alam Hindia Belanda telah mengakibatkan sejak awal terdapat kesamaan visi dan tujuan antara birokrasi kolonial dan investasi modal swasta. Anon, *Geologie en Mijnbouw, vol. 8* ('s Gravenhage, 1966, Martinus Nijhoff), halaman 13.

297 Bersama dengan dua perusahaan tersebut, di Kutai sudah terdapat dua perusahaan Barat lain yang juga bergerak dalam bidang eksploitasi minyak bumi, yaitu Koetei Exploratie Maatschappij dan Firma Sam Saueel and Co, milik modal Inggris yang berpusat di London sebagai perluasan usahanya di Borneo Utara. Perusahaan ini, yang bekerja dengan modal yang dipinjam dari beberapa bank Belanda juga, menarik perusahaan Inggris lainnya yaitu Shell Line Company untuk masuk dalam investasi pertambangan minyak di Kalimantan Timur. "Petroleum Industrie op Borneo", dalam *De Locomotief*, 30 Maret 1899, lembar ke-6..

antara kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur terhadap pemerintah kolonial. Begitu juga tidak terdapat gerakan anti-orang Barat yang berlebihan seperti di tempat lain pada masa peralihan abad, baik berlatar belakang keagamaan maupun nasionalisme dan gerakan sosial tradisional, kecuali satu peristiwa di Sanga-Sanga.²⁹⁸

Setelah Balikpapan ditetapkan sebagai kantor pusat BPM untuk wilayah kerja Kalimantan Timur, jumlah orang Eropa yang datang dan tinggal di kota ini segera bertambah dengan cepat.²⁹⁹ Di samping BPM sendiri yang mendatangkan sejumlah besar pegawai teknis dan administrative untuk perkantornya, juga aparat pemerintah dan beberapa orang Eropa lain yang merupakan pekerja atau pengusaha swasta mulai tiba. Mereka segera berkumpul menjadi satu dan memanfaatkan pemukiman yang dibuka oleh BPM di Klandasan. Motivasi yang mendorong mereka untuk bermukim di Klandasan adalah bahwa BPM telah membangun suatu kompleks perumahan yang lengkap dengan fasilitas pendukung kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin. Di samping itu orang-orang ini tidak selalu bekerja di Balikpapan tetapi di kota lain yang berdekatan seperti di Tanah Grogot atau Pasir.³⁰⁰

Balai Pelestarian Nilai Budaya

298 Apa yang disebut sebagai kasus Sanga-Sanga (Sanga-Sanga zaak) adalah pergolakan yang dikobarkan oleh para kuli Cina di sana terhadap pihak perusahaan BPM. Ketidakpuasan dipicu oleh upah perusahaan dan berkembang menjadi suatu konflik yang mengakibatkan jatuh korban beberapa orang Eropa staf BPM. Kondisi ini terjadi pada bulan Juli 1927 dan pemerintah segera memberikan perhatian dengan mengutus Penasehat Urusan Cina de Wilde untuk menyelidiki langsung kejadian itu di kompleks pengeboran minyak BPM di Sanga-Sanga. Hasil penyelidikan ini menunjukkan bahwa selain sejumlah pelaku lapangan, juga dua orang pemimpin Kuo Min Tang cabang setempat dianggap sebagai provokator. "De Chineezen van Sanga Sanga" dalam *de Telegraaf*, tanggal 7 Juli 1928, lembar ke-9. Begitu juga kepala pengeboran BPM di Sanga Sanga Sibenga Mulder yang dianggap menjadi sasaran kemarahan para kuli diminta ikut bertanggung jawab. Mulder kemudian dihadapkan ke pengadilan setelah melalui proses penelitian yang berlangsung hampir tiga tahun. "De Ramp te Sanga-Sanga" dalam *De Telegraaf*, 16 Desember 1931, lembar ke-13. Pengadilan (*raad van justitie*) di Banjarmasin menjatuhkan hukuman mati kepada Mulder, namun kemudian direvisi dan Mulder dinyatakan tidak bersalah, untuk kemudian dibebaskan dari hukuman. "Vrijgesproken van dood door schuld", dalam *De Tijd*, tanggal 7 Maret 1932, lembar ke-6.

299 Terutama ini didorong oleh semakin lancarnya transportasi laut oleh KPM yang menyinggahi Balikpapan, Samarinda, Tanah Grogot, Tanjung Redeb, Muara Jawa dan Tanjung Selor pada jalur pelajaran di Kalimantan Timur. "Postsluizing", dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 31 Desember 1908, lembar ke-5.

300 "Een Dorado", *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 2 Juli 1908, lembar ke- 8.

Namun demikian terdapat suatu perbedaan dalam kompleks pemukiman ini antara perumahan yang dihuni oleh staf BPM dan yang bukan dihuni oleh staf BPM meskipun mereka adalah juga orang-orang Eropa. Perkampungan orang Eropa, dan beberapa orang Cina kaya juga ditemukan di antara mereka, yang bekerja di luar keterkaitannya dengan BPM terletak di Klandasan Ulu. Sementara itu pemukiman yang dibangun oleh BPM berada di Klandasan Ilir. Hal ini terjadi setelah tahun 1910 karena sebelum tahun itu sejumlah aparat pemerintah Eropa masih menyewa rumah BPM yang berada di Klandasan Ilir.

Dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh BPM, dan kemudian juga beberapa infrastruktur pendukung pelayanan social oleh pemerintah seperti kantor pos, telepon dan telegram, penduduk Eropa semakin banyak yang bermukim di Balikpapan. Mereka umumnya mengambil lokasi yang mendekati dengan pusat-pusat pelayanan ini, seperti di alun-alun kota terutama bagi orang-orang Eropa swasta atau pejabat pemerintah yang tidak bekerja pada BPM. Kondisi ini di kalangan mereka begitu menyenangkan sehingga sering Balikpapan dipuji sebagai tempat penugasan yang menyenangkan bagi para pejabat Eropa atau orang-orang Eropa yang bekerja pada badan usaha.³⁰¹

Pembangunan kota Balikpapan setelah tahun 1910 ternyata dirancang oleh seorang petugas administrative pemerintah yang ingin menjadikan Balikpapan sebagai sebuah kota pemukiman yang layak bagi orang Eropa. Cirri khas kota di Belanda diterapkan di kota Balikpapan ini, terutama bagi pemukiman orang Eropa. Sesuai dengan posisinya yang dominan sebagai elite penguasa, kompleks yang dihuni oleh orang Eropa pada decade kedua abad XX mulai dirancang sebagai pusat kota sekaligus pusat kekuasaan, terlepas dari kompleks perkantoran dan pemukiman orang Eropa yang dibangun oleh BPM. Di kompleks Klandasan ini, jalan-jalan dibangun seperti di Eropa yaitu diteduhi dengan pohon di

301 "Een prestige standplaats", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 3 Juli 1908, lembar ke-2.

sepanjang kedua sisinya. Sementara itu di belakang pohon ini berderet rumah-rumah besar yang dihuni oleh orang-orang Eropa, termasuk juga rumahsakit yang dibangun oleh pemerintah di sana.³⁰²

Kondisi keamanan dijamin secara ketat baik oleh pemerintah maupun oleh BPM. Sarana untuk menjaga keamanan ini bukan hanya ditunjukkan dengan kehadiran petugas kepolisian, melainkan juga dengan aturan yang didukung oleh sanksi hukum yang berat. Dalam struktur BPM sendiri, orang-orang Eropa yang bekerja dan ditempatkan di Balikpapan umumnya adalah tenaga tehnik dan administrative. Mereka terdiri atas orang-orang dari latar belakang intelektual dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki ijazah. Meskipun mereka memperoleh fasilitas hidup yang baik dan gaji yang layak, kebebasan mereka tidak bersifat mutlak. Salah satu batasan diterapkan pada kehidupan orang Eropa di Balikpapan dalam hal berorganisasi, termasuk juga membentuk atau terlibat dalam gerakan serikat buruh. Ketika larangan ini dilanggar, bagi pegawai Eropa BPM ada resiko dipindahkan ke tempat yang jauh dan terpencil atau kehilangan semua fasilitas yang disediakannya.³⁰³

Penegakkan control di atas bukannya tanpa alasan mengingat memasuki dekade kedua abad XX, muncul suara-suara yang negative terhadap kinerja jajaran manajemen BPM khususnya dalam memberlakukan pegawai mereka, termasuk juga pada pegawai orang Eropa. Sering tenaga yang direkrut di Eropa dengan janji akan

302 "Van Balikpapan en de petroleum" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 8 Agustus 1912, lembar ke-1. Di rumah-rumah ini tinggal sejumlah pejabat pemerintah local seperti kepala pelabuhan, kepala kantor penjualan candu, kepala kantor penjualan garam, perwakilan KPM, kepala kantor pajak, dan beberapa aparat pemerintah lainnya. Dengan demikian sebagian rumah yang dimaksudkan adalah rumah dinas milik pemerintah.

303 "De Bataafsche als werkgeefster" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 2 Juni 1919, lembar ke-1. Tampaknya pada masa setelah Perang Dunia I, ketika kehidupan berorganisasi marak berkembang dalam pergaulan social di koloni Hindia Belanda, terutama organisasi yang berlandaskan ideology internasional sangat menarik bagi orang-orang yang hidup di wilayah koloni, baik Eropa maupun pribumi. Gerakan komunis pertama yang terwujud dalam organisasi ISDV dipelopori oleh orang-orang Eropa dengan latar belakang intelektual. Gerakan ini sangat meresahkan pemerintah, seiring dengan munculnya pandangan komunistopobia di dunia Barat dengan kemenangan revolusi komunis di Rusia pada tahun 1917. Di Hindia, gerakan radikal elite intelektual yang non-agama dikaitkan dengan ide-ide yang disebar oleh ISDV.

ditempatkan di kompleks perkantoran atau pengeboran minyak di Hindia oleh BPM dengan segala fasilitas dan jaminannya tidak sesuai. Suatu kutipan dalam pers Hindia menyebutkan berikut ini

*Over de wijze waarop de BPM hare employes behandelt, is reeds herhardelijk geklaagd. Ik wensch hier echter nogmals de jongenlui, die er over denken in dienst te gaan bij bovengenoemden maatschappij, op het hart te drukken, dat zij bij het aangaan eener verbintenis de grootst mogelijke voorzichtigheid hebben te betrachten. Zij laten zich misschien gemakkelijk door mooie aanbiedingen en beloften bepraten, maar zij kunnen er verzekeerd van zijn, daarop een desillusie te ondervinden, die zelfs het enthousiasme van een jong leven niet gemakkelijk meer te boven komt.*³⁰⁴

Tentang cara bagaimana BPM memperlakukan pegawainya, berulang kali keluhan muncul. Tetapi saya di sini masih ingin mengetuk hati pemuda yang berpikir akan melamar kerja pada dinas perusahaan tersebut, bahwa mereka harus berhati-hati benar dalam membuat suatu ikatan. Mungkin dengan mudah mereka akan terbuai oleh tawaran dan janji-janji indah yang diucapkan, tetapi mereka pasti yakin saat itu akan mengalami kekecewaan, yang akan tidak mudah mengalahkan semangat hidup seorang pemuda.

Meskipun ada harapan yang terkandung dalam kutipan di atas, gambaran tersebut menunjukkan bagaimana taktik BPM untuk melakukan perekrutan yang masih menggunakan janji-janji dan harapan semu, seperti yang juga terjadi pada perekrutan kuli kontrak di perusahaan perkebunan. Ini berarti perusahaan sebesar dan sekualitas BPM masih menggunakan cara-cara perekrutan tenaga kerja yang tidak sepatasnya dilakukan.

Namun demikian, meskipun ada pencitraan yang kurang baik terhadap BPM, perusahaan ini tetap menjadi *icon* bagi kota Balikpapan dan keberhasilannya dalam memberikan kontribusi untuk pengembangan dan pembangunan kota tidak bisa diabaikan. Bahkan Gubernur Jenderal Dirk Fock sendiri, ketika mengunjungi Balikpapan pada tanggal 19 April 1924 memberikan tanggapan terhadap peran BPM sebagai berikut:

304 "Uit Balikpapan", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 23 Mei 1913, lembar ke-1.

Het is mij een groote voldoening U zoowel als Uwten medehelper mijn dank te kunnen uitspreken voor de wijze, waarop gij mij in staat hebt gesteld in zoo kort tijd een indruk te krijgen van de waarlijk grootsche onderneming die de Bataafsche in Borneo heeft, maar de allergrootste voldoening gevoel ik omdat Uw onderneming het werk der Nederlanders is, wier stoere energie jaar en jaar uit blijk zulk een groot werk te kunnen opbouwen, waarvan een kort bezoek mij een overweldigenden indruk meegaaf. Ik wensch U en Uwe maatschappij veel voorspoed met hun energiek streven.³⁰⁵

Sungguh kepuasan bagi saya bisa mengucapkan terimakasih kepada Anda serta mitra Anda bagi cara bagaimana Anda telah memungkinkannya saya dalam waktu begitu singkat mendapatkan kesan tentang usaha terbesar yang dimiliki BPM di Borneo, tetapi kepuasan terbesar saya rasakan karena usaha Anda merupakan karya orang Belanda, yang dari tahun ke tahun telah membuktikan kekuatan tersembunyi untuk bisa membangun suatu karya yang telah memberi saya kesan mentakjubkan dalam kunjungan singkat ini. Saya ingin Anda dan perusahaan Anda berkembang pesat dengan kekuatannya.

Ungkapan di atas, yang disampaikan saat berkunjung ke rumah administrator BPM, merupakan suatu pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda kepada peran yang selama ini dipegang oleh BPM dan posisi BPM dalam kebijakan pemerintah untuk Kalimantan. Akan tetapi tampaknya ungkapan Gubernur Jenderal Fock di atas tidak selalu menunjukkan kestabilan dalam kinerja BPM di Balikpapan. Ketika krisis ekonomi melanda dunia dan terutama menghantam fondasi perekonomian koloni Hindia Belanda termasuk para pelaku usahanya, pada awalnya BPM menunjukkan kemampuannya untuk tetap bertahan. Namun demikian pada tahun-tahun resesi ini, BPM digoncang oleh krisis yang melanda jajaran staf pegawai, khususnya staf Eropa. Peristiwa kebakaran besar akibat konsleting listrik terjadi di lokasi pengeboran minyak konsesinya di Louise pada tanggal 26 September 1931 pukul 12 siang, saat pegawai akan beristirahat makan siang. Akibat peristiwa ini empat pegawai Eropa meninggal, sementara dua orang pegawai Eropa lainnya terluka parah.³⁰⁶

305 "De landvoogd te Balikpapan", dalam *De Indische Courant*, tanggal 22 April 1924, lembar ke-2
306 "Bij een brand op Borneo", dalam *De Telegraaf*, tanggal 27 September 1931, lembar ke-5.

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa kemampuan dan kualitas teknis Eropa pada kenyataannya tidak sepenuhnya mampu mengatasi persoalan di lapangan, sehingga peristiwa kecelakaan itu terjadi. Hal ini tentu saja menggoncang kredibilitas BPM karena selama beberapa hari berita ini menjadi agenda pers dan media massa. Hal itu segera diikuti oleh krisis lain yang menghantam BPM karena kondisi ekonomi akibat malaise yang tidak menunjukkan arah perbaikan melainkan kemunduran, terutama di Hindia Belanda. Sisi likuiditas perusahaan termasuk BPM terpukul oleh krisis ini ketika neraca pembayarannya tidak mampu menutup pengeluaran dan pembayaran hutang. Sebagai akibatnya beberapa bulan setelah kecelakaan di atas, BPM harus memutus hubungan kerja atau memberhentikan sejumlah pegawai, terutama pegawai Eropa yang bekerja padanya. Di Balikpapan, sejumlah pegawai Eropa diberhentikan dari jabatannya terutama pada staf administrasi.³⁰⁷

Mereka yang diberhentikan ini kemudian tidak lagi bisa mendapatkan fasilitas perusahaan. Di antaranya mereka harus meninggalkan rumah dinas yang disediakan oleh BPM di Klandasan. Akan tetapi bagi mereka, hal ini tidak menjadi persoalan yang berkepanjangan karena perusahaan tersebut kemudian memutuskan bahwa orang-orang Eropa yang diberhentikan dari pekerjaannya akan dipulangkan ke Belanda atas biaya perusahaan. Oleh karenanya, mereka tidak lagi menimbulkan masalah di Balikpapan.³⁰⁸

Suatu peristiwa yang mengakhiri keberadaan penduduk Eropa di Balikpapan adalah pendaratan tentara Jepang pada tanggal 24 Januari 1942 di teluk Balikpapan. Kesatuan militer Jepang yang ditugasi untuk menguasai semua tambang minyak di Kalimantan Timur, yaitu Brigade Sakaguchi yang telah menduduki Tarakan, segera menduduki kota ini dan mereka kemudian menangkap

307 "De ontslagen bij de BPM" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 15 Februari 1932, lembar ke-5. Jumlah seluruh pegawai Eropa yang diberhentikan oleh BPM untuk wilayah kerjanya di Hindia Belanda adalah 833 orang.

308 "De ontslagen bij de BPM in 1931", dalam *De Gooi en Eemlander: nieuws en advertentieblad*, tanggal 31 Maret 1932, lembar ke-2. Setidaknya bulan April 1932 mereka telah tiba kembali ke Belanda.

semua orang Eropa yang tinggal di kota Balikpapan. Balikpapan dijadikan sebagai pusat penahanan orang-orang Eropa di seluruh Kalimantan Timur, termasuk staf BPM dari kota-kota sekitarnya.³⁰⁹

Walaupun pada awalnya pimpinan militer Jepang memutuskan untuk membiarkan Balikpapan tetap utuh dan menahan semua orang Eropa tetap hidup, namun keputusan itu berubah ketika mengetahui bahwa di luar kota tentara Belanda yang menarik diri telah melakukan pembakaran terhadap sumur-sumur minyak sehingga menimbulkan kerusakan besar. Sakaguchi kemudian memutuskan untuk membunuh semua tawanan orang Eropa di Balikpapan, yang juga diikuti di sejumlah tempat lain sampai tanggal 10 Februari 1942. Pada saat itu Sakaguchi memegang pemerintahan sipil dari birokrasi colonial yang kosong dan baru menyerahkannya kepada K. Omori sebagai *Minseibu* yang diangkat pada bulan April 1942 untuk memerintah Balikpapan dan sekitarnya. Dalam menjalankan fungsinya, *Minseibu* Omori tunduk pada pimpinan pemerintahan sipil dan militer angkatan laut Jepang (*kaigun*) di eks-Karesidenan Borneo Selatan dan Timur yang berkedudukan di Banjarmasin, yaitu Kapten W. Okamoto.³¹⁰ Sementara itu rumah-rumah yang dihuni oleh orang Eropa baik pegawai pemerintah maupun orang sipil dikuasai oleh pemerintah militer, dan infrastruktur colonial termasuk milik BPM digunakan untuk fungsi lain yang menunjang pemerintahan militer.³¹¹

B. Orang Asing

Selain orang Belanda, Balikpapan juga menyaksikan kehadiran orang-orang asing baik dari Barat maupun dari Timur. Orang

309 D. van Velden, *De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog* (Franeker, 1977, T. Wever Uitgeverij), halaman 88.

310 "Selamat Datang" dalam *Kalimantan Raya*, tanggal 13 Juli 1942, lembar ke-1.

311 "Balikpapan dibikin makmoer", dalam *Inicork Express*, tanggal 28 April 1942, lembar ke-3. Di antaranya adalah tangsi-tangsi Belanda yang diubah fungsinya untuk digunakan sebagai pemukiman petani yang diperintahkan menggarap tanah bagi produksi pangan untuk logistic militer. Sementara itu gudang peralatan milik BPM dialihfungsikan menjadi lumbung padi.

Eropa lain selain Belanda yang kehadirannya juga dirasakan di Balikpapan adalah orang Inggris. Seperti sebagian orang Belanda yang berada di Balikpapan atau Kalimantan Timur pada umumnya, kehadiran orang Inggris ini hampir semuanya tidak bisa dipisahkan dari perluasan industri minyak mereka ke Kalimantan Timur.

Seperti yang telah disebutkan, sebuah perusahaan Inggris yang berpusat di London yaitu Firma Samuel and Co. telah mendapatkan hak konsesi penambangan berdasarkan kontrak yang dibuat oleh mereka dengan Sultan Kutai. Dalam hal ini aktivitas Samuen and Co di wilayah koloni Hindia Belanda dijamin oleh Traktat Borneo dan sejumlah perjanjian lain yang merujuk ke sana antara pemerintah Inggris dan Belanda di London pada tahun 1891. Sejak itu, modal Inggris mengalir masuk ke Hindia Belanda dalam berbagai sector seperti perkebunan, pertambangan dan kehutanan serta perkapalan.³¹²

Pada tahun-tahun pertama abad XX, kehadiran orang Inggris di Balikpapan berlangsung semakin intensif. Dari hasil pemantauan oleh intelijen Belanda, orang-orang Inggris ini hadir pada mulanya memang sebagai investor. Namun kemudian sejumlah gejala lain menunjukkan bahwa kehadiran mereka bisa bermotif politik. Hal ini dibuktikan dengan dua hal yaitu aktivitas agen-agen polisi rahasia Inggris di daerah Kutai dan kemudian juga keberadaan sebuah kapal perang Inggris yang singgah di Balikpapan pada bulan Desember 1906. Meskipun kecurigaan pihak Belanda mungkin juga berlebihan, kebenaran berita tersebut membuktikan bahwa orang Inggris merupakan orang Eropa lain yang bisa memiliki posisi dominan di samping Belanda di wilayah ini.³¹³

312 J.A.M. Caldwell, "Indonesian Export and Production from the Decline of the Culture System to the First World War" dalam C.D. Cowan, *The economic development of South East Asia: studies in economic history and political economy* (New York, 2012, Routledge Publ.), halaman 88-89. Ada dua macam bentuk investasi oleh modal Inggris, yaitu investasi langsung yang dilakukan oleh perusahaan Inggris atau melalui kongsi yang dibuat dengan modal Belanda. Beberapa perusahaan besar di Hindia Belanda saat itu juga melibatkan modal Inggris.

313 "Balikpapan", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 20 Desember 1906, lembar ke-6. Kekhawatiran Belanda yang berlebihan ini diungkapkan dalam rapat Parlemen Belanda di Den Haag ketika Mr. Van Deventer mengungkapkan perlunya perhatian pemerintah yang lebih besar terhadap Balikpapan, karena potensi pembentukan koloni Inggris di sana. Dari laporan nahkoda kapal *Astraea* yang baru saja mengunjungi Balikpapan, diperoleh kesan bahwa

Meskipun tidak pernah dijumpai tentang kehadiran koloni Inggris atau pemukiman khusus orang Inggris yang diminta kepada penguasa pribumi setempat, seperti yang dilakukan oleh Belanda, kehadiran dan peran Inggris yang semakin jelas terjadi tidak lama kemudian. Pada bulan Juli 1908 perusahaan Inggris Shell, Transport and Trading Company berhasil membuat kontrak dengan Sultan Kutai bagi investasi dan eksplorasi pertambangan sekaligus pengangkutan di Kalimantan Timur. Perusahaan ini sebelumnya, pada tahun 1903, dengan diwakili oleh Samuel and Co yang kemudian menjadi inti Shell telah mencoba melakukan upaya untuk membuka kompleks perkantoran milik Inggris melalui kerjasama dengan Koninklijk Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen. Namun mengingat pihak Samuel tidak mau menerima keterlibatan orang Belanda dalam jumlah yang sama dengan orang Inggris, kerjasama ini tidak berhasil diteruskan.³¹⁴

Meskipun rencana tersebut gagal, beberapa rumah telah berhasil dibangun dari material sementara oleh Samuel and Co yang dipersiapkan untuk penampungan para pegawai dan staf mereka di Balikpapan. Dengan kegagalan kerjasama di atas, dan konsentrasi dari eksplorasi tambang oleh Sell Company di daerah utara, rumah-rumah itu kemudian ditinggalkan dan dibongkar oleh BPM untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan permukiman. Hal ini menandai berakhirnya keberadaan orang Inggris di Balikpapan sebagai suatu komunitas, setidaknya untuk jangka waktu sepuluh tahun.³¹⁵

Baru memasuki decade tahun 1930-an perhatian Inggris terhadap pulau Kalimantan dan khususnya bagian timur pulau ini kembali muncul. Akan tetapi saat ini perhatian mereka berbeda dengan awal abad XX. Sesuai dengan meningkatnya kepentingan Inggris di Asia Tenggara dan munculnya struktur baru dalam

sifat Inggris (*Britsche karakter*) telah mewarnai citra kota Balikpapan. Jelas bahwa kedua alasan ini tampaknya berlebihan karena tidak ada bukti dan tidak ada kejelasan maksudnya.

314 "De petroleumindustrie in Koetei" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 15 Desember 1903, lembar ke-6.

315 "Met de Koninklijk Paketvaart naar Australië", dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 14 Oktober 1908, lembar ke-5.

hubungan politik internasional setelah krisis ekonomi dunia awal 1930-an, Hindia Belanda menjadi bernilai strategis bagi politik global Inggris di Timur. Arti strategis ini bukan hanya dari kandungan kekayaan alam melainkan juga posisi dan jaringan yang terbentuk dan mempengaruhi geopolitik mereka.³¹⁶

Dalam strategi geopolitik Inggris yang baru khususnya yang diterapkan di Asia Tenggara, mereka tidak lagi melihat Belanda sebagai pesaing dengan penuh kecemburuan dan kecurigaan seperti pada pergantian abad, namun kini lebih sebagai mitra baik dalam politik maupun ekonomi. Tampilnya kekuatan baru di Timur, yaitu Jepang pada pertengahan tahun 1930-an, telah mengkhawatirkan negara-negara colonial Eropa dan terutama Inggris pada gangguan keseimbangan kekuatan (*balance of Power*) yang akan mengancam struktur kekuatannya. Oleh karena itu Inggris memandang perlu untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara colonial Barat untuk membendung pengaruh Jepang di Asia Tenggara.³¹⁷

Sementara itu kerjasama antara Inggris dan Belanda untuk mengembangkan Balikpapan dan sekitarnya bagi kepentingan pertahanan bersama sudah mulai tampak sejak pertengahan tahun 1930-an. Kunjungan kapal perang Inggris *Grimsky* di pelabuhan Samarinda, yang diterima oleh Asisten Residen E.J. Burger di sana pada pertengahan Februari 1936 menandai awal dari kerjasama ini.³¹⁸ Bagi pihak Belanda di Balikpapan, kunjungan ini merupakan kesempatan untuk mempererat kerjasama dan terutama mendapatkan perlindungan. Hal ini disebabkan dua bulan sebelumnya, mereka menerima tekanan dari utusan ekonomi Jepang dan perwakilan perusahaan minyak Jepang di Kalimantan

316 "De strategische positieve van Nederland en Nederlandsch Indië" dalam *Bataviaasch nieuwsblad*, tanggal 8 Desember 1932, lembar ke-10.

317 Jan Pluvier, *South-East Asia from Colonialism to Independence* (Kuala Lumpur, 1974, Oxford University Press), halaman 100. Belanda merupakan pihak yang paling mudah untuk diajak bekerjasama oleh Inggris karena adanya kebutuhan yang ditimbulkan oleh depresi perdagangan. Untuk itu melalui Konferensi Ottawa pada tahun 1932, secara ekonomi Belanda sudah terikat oleh Inggris khususnya dalam perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk membuat aturan bersama yang mencegah ekspansi ekonomi Jepang ke selatan.

318 "Samarinda bezoek Grimsby", dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 19 Februari 1919, lembar ke-17.

yang menuntut perluasan konsesi dengan mendesak konsesi milik Koninklijke Petroleum Maatschappij.³¹⁹

Puncak dari kerjasama bersama ini adalah ketika Perang Pasifik telah terjadi pada bulan Desember 1941 dan Inggris serta Belanda memaklumkan perang terhadap Kekaisaran Jepang. Dalam Front ABDA, suatu aliansi militer negara-negara Sekutu Barat di Asia Tenggara yang bermaksud membendung serangan Jepang dari utara, justru pertahanan atas Balikpapan diserahkan kepada tanggungjawab Amerika Serikat di Filipina daripada Inggris di Kalimantan Utara dan Singapura. Amerika Serikat awalnya menempatkan divisi ke-57 angkatan daratnya untuk mempertahankan daerah minyak Kalimantan Timur, dengan markas besarnya di Balikpapan. Akan tetapi bersama dengan kejatuhan Malaya pada pertengahan Januari 1942, divisi ini ditarik atas perintah panglima ABDA Jenderal Wavell, seorang Inggris, untuk membantu pertahanan Singapura. Akibatnya pertahanan di Kalimantan Timur menjadi sangat lemah karena Belanda tidak melakukan koordinasi pertahanan yang mencukupi. Hal ini menjadi penyebab utama pendudukan Balikpapan dengan mudah oleh tentara Jepang pada tanggal 24 Januari 1942.³²⁰

Dibandingkan dengan orang Inggris, orang Jepang memang lebih belakangan muncul di wilayah Kalimantan Timur, terutama di Balikpapan. Meskipun sejak tahun 1898 sudah membuka perwakilan di Batavia dan pada awal abad XX mendapatkan pengakuan hak yang sama seperti bangsa Eropa dalam tata hukum colonial Hindia Belanda, penyebaran orang Jepang baru terjadi pada akhir tahun 1920-an menjelang resesi ekonomi dunia, ke seluruh pelosok Hindia Belanda. Mereka terlibat dalam berbagai sector kehidupan ekonomi koloni itu, seperti bidang kehutanan, perikanan, perdagangan, industry dan bahkan hingga dunia pros-

319 "Japansche-Nederlandsche Belangentegenstellingen" dalam *De Sumatra Post*, 16 November 1935, lembar ke-5. Pihak Jepang, yang mengetahui bahwa Koninklijke Petroleum Mij berada di bawah pengaruh Inggris sejak Perjanjian Ottawa, menuduh bahwa Inggris dan Belanda membangun konspirasi untuk membatasi perluasan bisnis Jepang di Kalimantan Timur ini.

320 Waldo Heinrichs, *Threshold of war: Franklin D. Roosevelt and American entry into World War II* (New York, 1989, Oxford University Press).

titusi. Dengan kedudukan dan statusnya yang dipersamakan bangsa Eropa, orang-orang Jepang mempunyai kesempatan dan peluang untuk bergerak ke seluruh wilayah yang diperintah oleh pemerintah colonial tanpa adanya hambatan formalitas yang berarti dibandingkan bangsa Asia asing lainnya. Bahkan kadang-kadang seorang Jepang bisa mengajukan tuntutan hukum ketika merasa diperlakukan seperti bangsa Asia, dan bukan seperti orang Eropa di wilayah koloni Hindia Belanda.³²¹

Di luar Jawa, kehadiran modal Jepang dan aktivitas individu Jepang telah dimulai pada saat dan setelah resesi ekonomi tahun 1930. Memasuki decade 1930-an kehadiran actor dan modal Jepang terutama di luar Jawa menunjukkan kenaikan pesat baik dalam kualitas maupun kuantitas. Mereka menjalin hubungan baik secara individu maupun badan usaha dengan penduduk dan penguasa pribumi local, dengan tujuan untuk melakukan pemborongan atas sector kekayaan alam, seperti pemborongan dalam hal penangkapan ikan, produksi komoditi maritime, dan pengolahan produk hutan. Sector pertambangan juga menjadi salah satu sasaran utama modal Jepang, meskipun dalam hal ini kehadirannya lebih banyak diwakili oleh badan usaha.³²²

Di Kalimantan Timur kehadiran modal Jepang mulai terasa setelah resesi ekonomi tahun 1930-an. Seperti halnya modal Barat, minyak bumi menjadi daya tarik bagi orang-orang Jepang untuk melakukan investasi di sector ini. Akan tetapi kedatangannya yang agak terlambat mengakibatkan perolehan lahan bagi eksplorasi minyak tidak lagi memberikan prospektif keuntungan, karena

321 "Ongewensch" dalam *Bataviaasch nieuwsblad*, tanggal 17 Februari 1934, lembar ke-3. Sebuah kasus terjadi di Balikpapan ketika seorang Jepang yang merupakan penumpang sebuah kapal Swiss dianggap membuat keonaran di pelabuhan dan harus berurusan dengan polisi. Berbeda dengan para terdakwa lain yang langsung ditangkap dan dimasukkan penjara, polisi tidak berani menangkapnya dan hanya mengirimkannya pulang ke negerinya dan melarangnya masuk kembali sebagai *persona non grata*.

322 ANRI, *Politiek Verslag van Residentie Manado over het eerste half jaar 1928*, reel nomor 3, bundel MvO serie 4e. Sejumlah individu sering tinggal di kota-kota pedalaman untuk membuat kontrak dengan penguasa local atau individu pribumi bagi pemborongan usaha terbatas seperti penebangan dan pengggergajian kayu. Sementara itu kehadiran badan usaha Jepang juga tampak dari usaha kontrak borong penangkapan ikan atau pengolahan kerang mutiara dengan beberapa penguasa pribumi.

dominasi modal Eropa yang sudah lebih dahulu menguasai dan mendapatkan keunggulan lewat hubungan politik antara pemerintah mereka dan para penguasa local.³²³

Minat Jepang terhadap kandungan minyak di Borneo telah diketahui sejak koloni Hindia Belanda masih dilanda krisis ekonomi dunia dan dampaknya. Pada bulan Maret 1933, pers Belanda telah memuat berita tentang hal ini, yang tampak dari kutipan berikut

*Van nog meer belang echter dan Nieuw Guinea, is voor Japan Borneo met zijn olie, zonder ongestoorden toevoer van welk product, het Japansche eilandenrijk spoedig op den knieën zou liggen voor een blokkade, met bases ergens in de Nanyo (zuidzee) eilanden.*³²⁴

Tetapi yang masih lebih penting daripada New Guinea bagi Jepang adalah Borneo dengan minyaknya. Tanpa pengangkutan yang terganggu dari produk itu, kepulauan Jepang akan segera runtuh akibat blockade, dengan pangkalan-pangkalan yang terletak di kepulauan laut selatan.

Dari pernyataan di atas tampak jelas bahwa minyak bukan hanya merupakan produk yang bernilai ekonomis, melainkan juga bernilai strategis bagi Jepang. Dalam hal ini Jepang telah menghubungkan potensi minyak dengan posisi politis dan hegemoninya di Asia yang akan beresiko pada suatu keruntuhan struktur pemerintahannya.

Langkah modal Jepang untuk mendapatkan minyak dari Kalimantan Timur ini telah dimulai sejak tahun 1920 ketika Japan Petroleum Company yang berpusat di Tokyo menjalin kerjasama dengan Koloniale Petroleum Mij di Surabaya dalam hal pembelian lahan minyak milik perusahaan ini. Dari hasil kesepakatan itu, perusahaan Belanda ini menjual kepada Japan Petroleum Co., bukan hanya tambang minyaknya melainkan juga bangunan infrastruktur yang berfungsi untuk mendukung kinerjanya yang

323 Peter Post, "Indonesianisasi and Japanization: the Japanese and the shifting fortunes of pribumi entrepreneurship", dalam J. Th. Lindblad, *Indonesian economic decolonization in regional and international perspective* (Leiden, 2009, KITLV Press), halaman 69.

324 Nieuw Guinea en Borneo" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 14 Maret 1933, lembar ke-5.

terletak di sekitar sungai Kutai. Sejak itu kehadiran badan usaha milik Jepang di Kalimantan Timur mulai tampak.³²⁵

Hubungan antara modal Jepang dan Koloniale Petroleum Mij tetap berlangsung di Kalimantan Timur. Ketika perusahaan Belanda ini bermaksud untuk membentuk sebuah anak perusahaan yang bertujuan bagi transportasi minyak yang dihasilkan oleh daerah konsesinya di Samarinda dan Tanjung Redeb, orang-orang Jepang segera menangkap peluang ini dan memberikan modalnya untuk ditanamkan. Dalam hal ini Mitsui Bushen Kaisha, perusahaan perkapalan Jepang, tampil dan pada bulan November 1929 menyediakan sebagian modal untuk membentuk Borneo Oil Company sebagai bentuk kongsi usaha dengan Koloniale Petroleum Mij. Perusahaan Mitsui akan menangani pengangkutan minyak dari pelabuhan Sangkulirang melalui kerjasama dengan Java China Japan Lijn yang melayani Sangkulirang-Samarinda.³²⁶

Memalui perpaduan usaha eksploitasi pertambangan dan pengangkutannya, pihak Jepang bisa mendatangkan fasilitas transportasi laut yang besar bagi kepentingan ini. Setelah perbaikan fasilitas pelabuhan Balikpapan, perusahaan Jepang itu mulai mendatangkan kapal-kapal tanki ukuran samodera ke pelabuhan tersebut. Hal ini terjadi pada pertengahan tahun 1938, dengan maksud untuk memudahkan pengangkutan minyak dari Kalimantan Timur ke negerinya. Melalui kehadiran kapal-kapal tanki ini, Jepang bukan hanya mengangkut produk minyak milik perusahaan atau kongsinya tetapi juga menawarkan jasa pengangkutan kepada BPM jika dibutuhkan. Ini menandai posisi Jepang yang semakin dominan di sektor produksi minyak Kalimantan Timur.³²⁷

Dengan adanya konsesi pertambangan dan pengangkutan, posisi Jepang di kehidupan niaga Kalimantan Timur menjadi

325 "Japan verkrijgt petroleum belangen op Borneo" dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 14 November 1920, lembar ke-10.

326 "Borneo Oil Company: Japansche belangstelling" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 16 November 1929, lembar ke-6.

327 "Japansche marinetankboot in de haven van Balikpapan" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 1 Juli 1938, lembar ke-16.

kuat. Melalui keuntungan yang diperoleh, di samping subsidi dari negerinya, orang Jepang siap memperluas jaringan bisnisnya di wilayah ini. Hal ini tidak lama berlangsung, ketika lima tahun setelah mendapatkan konsesi pengangkutan di atas, mereka mulai mencurahkan perhatian pada sector kehutanan. Produk kayu menjadi sasaran utama terutama yang berada di daerah Sempayau. Meskipun pada awalnya produk ini diperlukan oleh perusahaan minyak Jepang untuk pengadaan perumahan bagi empat ribu orang kuli tambang minyak, sejak akhir Mei 1935 mereka mulai mencari konsesi bagi eksploitasi produk hutan ini.³²⁸

Kehadiran orang Jepang yang semakin dominan ini bukannya tanpa kecurigaan dan pengawasan oleh pemerintah colonial Belanda. Bahkan dalam hal ini penguasa colonial Barat lain di Asia Tenggara juga mengawasi peningkatan peran Jepang di Kalimantan Timur, dan khususnya di Balikpapan. Mereka menduga bahwa suatu saat Jepang akan menguasai seluruh tambang minyak di Kalimantan Timur. Hal ini menjadi agenda pembicaraan dalam konperensi pertahanan bersama Inggris-Perancis di Singapura pada bulan Juli 1939.³²⁹

Pemerintah Hindia Belanda tampaknya juga mulai mengantisipasi kekhawatiran itu dengan mengambil tindakan drastic. Meskipun orang Jepang diakui sebagai warga yang disetarakan dengan orang Eropa dalam sistem hukum colonial, sejak pertengahan tahun 1930-an pemerintah Batavia mulai menunjukkan sikap yang lebih keras terhadap orang Jepang di koloninya. Ini terbukti ketika seorang Jepang sebagai pengelola restoran di Balikpapan dituduh melakukan pembunuhan terhadap dua orang Jepang lainnya yang tinggal di kota itu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Oktober 1934 ketika di Balikpapan diadakan pasar malam dan dihadiri oleh orang-orang Jepang ini. Meskipun perkara itu merupakan masalah internal, seperti yang dijelaskan oleh asisten residen Samarinda kepada wakil Kamar Dagang Jepang Omura, hukuman dijatuhkan

328 De Japansche penetratie: olie- en houtbelangen in Oost-Borneo" dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 28 Mei 1935, lembar ke-6.

329 "Japan en Borneo" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 12 Juli 1939, lembar ke-1.

menurut hukum Belanda yang berlaku. Pelaku pembunuhan dituntut hukuman mati.³³⁰

Meskipun mempunyai posisi ekonomi yang sangat kuat di Kalimantan Timur pada periode 1930-1940, kehadiran orang Jepang sendiri tidak banyak terwakili. Jumlah orang Jepang yang tinggal di kota Balikpapan, yaitu di kompleks pemukiman orang Eropa, tidak banyak dijumpai. Dibandingkan mereka, pendatang dari daratan Asia yaitu orang Cina jauh lebih banyak. Namun demikian tidak seperti orang Jepang yang jelas mulai hadir ketika ada aturan resmi bagi mereka dan kepentingan investasi modal, kehadiran orang Cina tidak bisa dipastikan waktunya dan tidak terkait dengan kekuatan modal yang dibawanya. Mereka datang secara individu atau kelompok ketika bukan atas inisiatif sendiri melainkan sebagian besar karena didatangkan sebagai tenaga kontrak yang dibutuhkan, khususnya dalam industry minyak. Kedatangan dan penempatan mereka juga diatur dan berada di bawah pengawasan ketat dari pemerintah colonial.³³¹

Perusahaan minyak Belanda yang mendapatkan konsesi dari Sultan Kutai pada akhir abad XIX mendatangkan para kuli Cina ini sebagai pekerja kasar di pertambangan. Mereka ditempatkan di kompleks Batu Panggal yang berada di lokasi pengeboran minyak. Dalam kehidupannya mereka berinteraksi dengan penduduk pribumi setempat dan pekerja pendatang lainnya, sesuatu yang membedakan mereka dari kelompok orang asing lain di Kalimantan Timur.³³²

330 Drama in Balikpapan: Japanner doodt 2 landgenooten" dalam *De Indische Courant*, 15 Juli 1935, lembar ke-2. Peristiwa ini segera menjadi sorotan pers di Hindia Belanda. Sampai satu tahun beberapa berita terkait masih dimuat di sejumlah surat kabar.

331 *ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 21 Mei 1896 no. 43*, lembar *Algemeen Secretarie*. Dalam peraturan ini ditetapkan ketentuan bahwa para kepala pemerintah daerah berwenang untuk menunjukkan lingkungan kerja para kuli Cina ini dan juga melakukan pengawasan hukum terhadap keberadaan mereka di daerahnya.

332 "Een werkstaking van Chineesche koelis", dalam *De Sumatra Post*, tanggal 10 Februari 1903, lembar ke-5. Interaksi ini tumbuh menjadi toleransi antarkelompok masyarakat. Ini terbukti ketika pada awal Februari 1903 penduduk pribumi merayakan Lebaran, sejumlah kuli Cina ikut bergabung untuk merayakannya. Larangan terhadap keterlibatan ini mengakibatkan terjadinya pemogokan kerja di industry minyak.

Ketika BPM mulai mengoperasikan kinerja pertambangannya, perusahaan ini menggunakan sebagian besar kuli Cina sebagai tenaga kerjanya. Bersama dengan penempatan kantor pusatnya di kota Balikpapan, BPM juga membangun kompleks pemukiman bagi para kuli Cina. Mereka tinggal terpisah dari kompleks perkantoran dan pemukiman staf administrasi, dan menempati lahan yang tersebar di beberapa tempat. Mereka tinggal di kampung Pandansari, Karanganyar dan Parapatan.

Selain kelompok kuli ini, di Balikpapan juga tinggal orang Cina bebas sebagai pengusaha dan professional. Umumnya mereka datang atas biaya sendiri atau terkait dengan kepentingan bisnisnya dari kota lain. Tetapi ada juga di antara mereka yang bekas dari kuli di tambang BPM yang tidak lagi meneruskan ikatan kontraknya. Tempat pemukiman orang Cina ini berada di kampung Kelandasan Ulu, di samping pemukiman orang Eropa. Dilihat dari lokasinya, mereka yang tinggal di kampung ini jelas merupakan kelas menengah ke atas. Bersama dengan para kuli Cina yang lain, jumlah mereka bisa dilihat dari tabel berikut ini

Tahun	Orang Eropa	Orang Cina	Timur asing	Pribumi
Akhir 1919	659	5072	586	15.532
Akhir 1927	1068	4597	768	30.735
Sensus 1930	1304	5163	1187	39.065

Sumber : ANRI, *Memorie van Overgave van Driest*, Juli 1930, halaman 6.

Meskipun ada penurunan sekitar 10% dan kemudian kenaikan kembali, jumlah orang Cina masih menunjukkan angka yang stabil dan statis. Ditinjau dari komposisi tersebut, orang Cina menduduki porsi yang dominan dibandingkan pendatang lainnya. Angka tahun 1927 dan 1930 jelas dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang mendorong BPM untuk menghentikan kontrak kerja dan memulangkan sebagian kuli kontrak itu ke negerinya.

Seperti halnya di tempat lain di kompleks kuli kontrak, ikatan yang ada di antara anggota mereka tidak terlepas dari pengaruh ideology politik terutama yang berkembang di Negeri Cina. Melalui

kerabatnya dan terutama lewat para juru propaganda politik, pada tahun 1920-an ide-ide politik secara intensif disebarkan di antara para kuli Cina di Balikpapan ini. Setidaknya ide ini terbagi dua menurut polarisasi yang berlaku di negeri mereka : komunis dan nasionalis. Keduanya masing-masing mencoba membujuk para kuli Cina agar mendukungnya dan bergabung dalam organisasinya. Ketika gerakan komunis dilarang oleh pemerintah Belanda pada tahun 1927 akibat pemberontakan yang gagal, organisasi nasionalis Cina Kuo Min Tang menjadi organisasi yang dominan. Namun demikian keberadaannya di Kalimantan Timur juga tidak lama ketika oleh aparat keamanan dideteksi keterlibatannya dalam peristiwa berdarah di Sanga-Sanga.³³³

Peristiwa itu hanya mempengaruhi keberadaan organisasi politik tetapi bukan keberadaan komunitas Cina. Mereka tetap tinggal terpisah sesuai dengan fluktuasi ekonomi yang berlaku. Dengan demikian hingga akhir kekuasaan colonial Belanda, ada dua kelompok Cina yang dibentuk berdasarkan klasifikasi pekerjaan dan pola pemukimannya, yaitu Cina kuli dan Cina bebas.

C. Penduduk Pribumi

Apa yang dimaksudkan sebagai penduduk pribumi dalam tulisan ini adalah orang-orang yang lahir dan diklasifikasikan sebagai etnis pribumi di Hindia Belanda. Berdasarkan konsepsi demikian, bukan hanya penduduk asli Balikpapan dan sekitarnya melainkan juga konsep ini mencakup pengertian kelompok etnis Hindia yang datang dari luar Balikpapan dan bahkan dari luar Kalimantan.

Orang Melayu tentu saja menjadi penduduk yang dominan di Balikpapan, karena mereka dianggap sebagai penduduk asli.

³³³ Di Balikpapan organisasi ini sebenarnya telah dirintis sejak bulan Agustus 1915 ketika di antara sejumlah intelektual dan pengusaha Cina membentuk Balikpapan Commucatie Instituut der Chineesche revolutionaire partij, yang pada tanggal 3 Juli 1921 menyatakan diri bergabung dengan Kuo Min Tang dan menjadi KMT cabang Balikpapan. "De Kuo Min Tang in Oost Borneo" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad* tanggal 6 Oktober 1927, lembar ke-1.

Namun demikian Melayu dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan Melayu yang berasal dari Semenanjung Malaya melainkan lebih mirip dari mereka yang berada di Kalimantan Utara. Meskipun ada percampuran darah dalam leluhur mereka, seperti hasil perkawinan dengan orang Bugis, Makasar atau bahkan dari orang asing seperti Arab, identitas Melayu tetap dominan di wilayah ini mengingat symbol politik mereka masih menegakkan hegemoni, yaitu Kesultanan Kutai di Kalimantan Timur dan beberapa institusi politik tradisional lainnya.³³⁴



Type van een employe'swoning te Balik Papan. Foto Bat. Petroleum Maatschappij

³³⁴ Asisten Residen Kutai S.W. Tromp pada tahun 1889 pernah menyebutkan bahwa sebenarnya orang Melayu sendiri adalah pendatang yang tiba dan bermukim di sepanjang aliran sungai Mahakam, sementara penduduk asli daerah ini adalah suku Dayak. Namun mengingat Melayu mampu membangun suatu kekuatan politik yang dominan, berkat bantuan dari kelompok etnis lain melalui ikatan agama dan ekonomi, identitas Melayu sebagai penduduk asli menjadi kuat. "Dr. A.W. Niewenhuijs, : over de sociale toestand op Borneo" dalam *De Locomotief*, tanggal 20 Februari 1903, lembar ke-2.

Selain kalangan dan kerabat bangsawan, komunitas Melayu tidak banyak yang ditemukan di lingkungan kota Balikpapan. Sebagai kelompok pendatang minoritas, yang diduga berasal dari Kalimantan Barat terutama dari daerah Sambas dan Sukadana, orang-orang Melayu ini kebanyakan sibuk dalam dunia perdagangan. Mereka menjadi pedagang perantara dalam sirkulasi perdagangan domestic. Mereka juga sibuk bekerja sebagai tenaga profesional dan beberapa dari mereka bekerja dalam dinas pemerintah daerah colonial (*Inlandsch bestuur*). Identitas mereka adalah orang-orang yang memeluk agama Islam dan merupakan penduduk asli pulau Kalimantan.³³⁵

Selain Melayu, komunitas yang sering dianggap sebagai penduduk asli di Balikpapan adalah etnis Dayak. Ditinjau dari aspek etnografis hal ini lebih bisa diterima dibandingkan dengan etnis Melayu. Orang Dayak meskipun tidak bermukim di pusat perkotaan, sejak sebelum kota Balikpapan dibangun dan dikembangkan, telah menghuni lingkungan sekitarnya. Mereka tinggal di sepanjang aliran sungai Mahakam dan di dalam hutan, mengingat ada keterikatan dan ketergantungan besar antara kehidupan mereka dan fasilitas yang disediakan oleh alam³³⁶. Dengan pola hidup yang telah terbentuk sebagai komunitas pengembara, sumber penghidupan mereka lebih banyak disediakan oleh alam. Dari produk alam tersebut, orang Dayak bisa menggunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya tetapi juga bisa menukarnya (*barter*) dengan benda lain yang mereka peroleh dari kelompok etnis lain.

Selain di sungai Mahakam, orang-orang Dayak juga tinggal di sepanjang sungai lain yang alirannya bisa dilayari dengan perahu-perahu. Di sepanjang aliran sungai ini mereka membangun rumah

335 Identitas agama ini merupakan definisi oleh ilmuwan Belanda yang pada akhir abad XIX telah melakukan penelitian di sepanjang pantai timur Kalimantan. Menurut pengamatan dan informasi yang diperolehnya, ia mengklasifikasikan etnis Melayu tersebut juga mencakup orang Dayak yang masuk Islam dan telah memutuskan diri dari ikatan dan kepercayaan adatnya. "Over Borneo" dalam *De Locomotief*, tanggal 5 Juli 1901, lembar ke-5.

336 "Engelsch Jacht op bezoek" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 29 Januari 1935, lembar ke-15. Menurut kesaksian seorang nahkota kapal Inggris *Rosaurie* yang menyusuri sungai dari pelabuhan Balikpapan, dia melihat bagaimana pola pemukiman suku Dayak yang tinggal di sepanjang tepi aliran sungai itu.

dan menanam lahan di sekitarnya dengan bercocok tanam. Rumah mereka dibangun saling berdekatan sehingga menciptakan suatu kompleks perkampungan. Kampung ini dihuni oleh kelompok orang yang masih dihubungkan dengan ikatan kekerabatan, yang ditandai dengan aturan-aturan sosial kolektif sebagai bentuk kekuatan komunal setempat. Di sungai Kelai, terdapat pemukiman suku Dayak Kelai yang disebut menurut nama aliran sungai yang berada di dekatnya. Begitu juga dengan sungai Beras dan sungai Segah. Ketiganya bermuara di pantai timur Borneo.³³⁷

Ketika industri minyak bumi mulai memasuki daerah mereka, orang-orang Dayak yang tinggal di daerah pengeboran minyak harus menyingkir. Akan tetapi pihak perusahaan telah menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi dalam interaksi dengan suku ini. Melalui pendekatan yang dilakukan secara individu, terutama lewat penguasa setempat, secara perlahan orang-orang Dayak ini bisa disingkirkan dan dipindahkan ke daerah lain tanpa terjadi insiden yang merugikan kedua pihak.³³⁸

Sementara itu sebagai kelompok pribumi pendatang dalam klasifikasi ini, orang Bugis adalah kelompok yang paling dominan baik secara politik maupun ekonomi. Sebagai pelaut yang telah dikenal dalam pengalaman dan keterampilannya menyeberangi lautan lepas, orang-orang Bugis meninggalkan daerah asalnya dan kemudian mengunjungi tempat-tempat lain untuk membangun kehidupan baru. Di lokasi yang dikunjunginya ini, orang Bugis bukan hanya mendirikan pemukiman yang dihuni oleh kerabat dan teman-temannya tetapi juga membawa aturan yang berlaku di tempat asalnya untuk diterapkan di daerah itu. Dengan demikian

337 "Mijn reis door Borneo", dalam *De Telegraaf*, tanggal 1 Februari 1930, lembar ke-9.

338 Dalam kesaksian seorang misionaris yang mengadakan perjalanan ke pemukiman orang Dayak di kompleks perusahaan pertambangan minyak, tampak bahwa orang-orang Dayak ini merasa heran dengan begitu banyak peralatan berat yang didatangkan dan tanah yang dilobangi. Oleh karena itu setiap ada kegiatan pengeboran orang-orang Dayak termasuk wanita dan anak-anak berkerumun. Ketika melihat hal itu pengusaha melalui mandornya menyuruh mereka bubar kecuali kaum pria yang kemudian dipekerjakan untuk membantu dengan upah pemberian makanan. "Wat een Dayak al niet meemaakt", dalam *De Sumatra Post*, tanggal 23 Maret 1929, lembar ke-2

mereka menciptakan struktur lama di tempat yang baru, yang dikenal sebagai diaspora Bugis.³³⁹

Salah satu lokasi yang dikunjungi oleh para pelaut Bugis ini, karena factor geografi, adalah pesisir timur Kalimantan. Sejak abad XVIII orang-orang Bugis telah tiba di tempat yang menarik perhatian mereka karena telah terjadi dinamika perkembangan ekonomi di sana.³⁴⁰ Pusat-pusat kerajaan di Kalimantan Timur seperti Kutai dan Pasir serta Bulungan menjadi sasaran kunjungan mereka. Kedatangan mereka pada mulanya dimaksudkan untuk melakukan perdagangan. Karena kesamaan agama dan juga saling membutuhkan, interaksi segera terjalin antara kelompok pendatang Bugis dan elite penguasa setempat. Dari interaksi ini, orang-orang Bugis mendapatkan fasilitas dan ijin untuk tinggal di sana sebagai pemukim. Salah satu pemukiman pertama mereka sebagai hasil dari interaksi dengan penguasa local ini adalah Kutai Lama, dekat Gunung Jaitan Lajer yang merupakan tempat tinggal para raja Kutai.³⁴¹

Di tempat yang baru ini, mereka kemudian berhasil melakukan konsolidasi yang memperkuat posisinya dan memperluas pengaruhnya. Pada akhir abad XVIII kehadiran mereka yang dibutuhkan oleh elite penguasa dalam konstelasi politik local memberi kesempatan pembenturan struktur Bugis di kota-kota pantai itu. Di Pegatan, pemukiman BUGIS yang dibangun tumbuh menjadi suatu bentuk struktur pemerintahan dengan seorang penguasa bergelar *Arung*, yang dipilih dan diangkat di kalangan orang Bugis sendiri. Keberadaan *arung* dan struktur Bugis local ini membuktikan posisi dan pengaruh mereka yang sangat kuat terhadap elite dan penduduk local, serta terhadap kelompok pendatang lainnya.³⁴²

339 Leonard Y. Andaya, *Leaves of the same tree: trade and ethnicity in the Straits of Malacca* (Hawaii, 2008, The University of Hawaii Press), halaman 13.

340 Gerrit Knaap and Heather Sutherland, *Monsoon Traders: ships, skippers and commodities in eighteenth century Makassar* (Leiden, 2004, KITLV), page 14. Para pelaut dan pedagang Bugis telah banyak mengunjungi kedua kerajaan ini sejak abad XVI.

341 S.W. Tromp, "Eenige mededelingen omtrent Boegineezen van Koetei" dalam *BKI*, tahun 1897, vol.36, halaman 168

342 J.G.A. Galois, "Korte aantekeningen gehouden gedurende eene reis lands de Oostkust van Borneo in den jare 1850" dalam *BKI*, tahun 1864, halaman 223.

Berbeda dengan kelompok pendatang lain, orang-orang Bugis di Kalimantan Timur ini masih tetap mempertahankan ikatan mereka dengan kampung halamannya.³⁴³ Beberapa pemukim bahkan melayani transportasi rutin antara kota-kota di sepanjang pantai timur Kalimantan dan pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan. Beberapa orang Bugis masih mengelola perdagangan dan transaksi lain termasuk hutang-piutang dan perbudakan antara kedua pesisir di Selat Makasar itu sampai awal abad XX.³⁴⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Bugis ini mampu memperoleh posisi yang dominan di sector pelayaran pantai, perdagangan pesisir, pertanian dan juga pembuatan perahu atau kapal. Sementara itu kaum wanita mereka sibuk menenun jenis kain yang merupakan identitas daerahnya dan lebih banyak digunakan bagi kepentingan busana sendiri.³⁴⁵ Dengan penguasaan atas sector ekonomi local ini, dan mobilitasnya yang tinggi di bidang pelayaran pantai, orang-orang Bugis ini bukan hanya menempati sejumlah posisi di pantai timur Kalimantan yang berada di bawah kewenangan Belanda melainkan juga menembus ke daerah yang berada di bawah control Inggris. Mereka juga membuka pemukiman di sana dan menjalin interaksi dengan orang-orang Bugis yang berada di wilayah Hindia Belanda sebagai bentuk jaringan regional.³⁴⁶

Selain orang Bugis, kelompok pendatang lain yang sering disebut sebagai pemukim Balikpapan adalah orang Jawa. Orang-orang ini mempunyai latar belakang, karakter dan tentu saja perkembangan yang berbeda dalam interaksi mereka dengan

343 V. Korn, "Problemen der Makassars-Boeginese samenleving" in *BKI*, 1952, vol. 108, no. 1, halaman 25-26.

344 "Slavernij op Celebes" dalam *Batavia Nieuwsblad*, tanggal 30 Juli 1902, lembar ke-5. Kutai dan Samarinda merupakan tempat pengapalan budak yang akan dibawa ke Sulawesi Selatan, menuju pelabuhan transit Pare-Pare sebelum ke Makasar atau di teluk Palopo sebelum ke daerah Mandhar.

345 H. Blink, *Nederlandsch Oost en West Indie*, vol. I (Leiden, 1907, E.J. Brill), halaman 323.

346 Misalnya di Tawao yang termasuk wilayah Inggris, terdapat pemukiman nelayan Bugis. Tempat ini sering menampung pelarian pelaut dan orang-orang Bugis yang dicari oleh pemerintah Belanda. Karena kejadian ini, asisten residen Samarinda dan kontrolir Pasir sering harus menghubungi pejabat Inggris di sana untuk meminta pengembalian para pelarian tersebut. "Korte verslagen Zuid en Ooster afdeeling van Borneo" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 19 Maret 1909, lembar ke-7.

daerah Kalimantan Timur dibandingkan orang Bugis. Di samping jarak yang lebih jauh daripada pulau Sulawesi, orang Jawa tidak dikenal sebagai pelaut atau perantau seperti halnya orang-orang Bugis dan Makasar dari Sulawesi Selatan. Mereka lebih cenderung berorientasi ke pedalaman dan hidup dalam hubungannya dengan sector agraris daripada maritime, meskipun pada masa lalu orang Jawa dikenal sebagai pedagang interinsuler di Nusantara pada abad XIV-XVI.³⁴⁷

Meskipun dalam catatan sejarah Jawa terutama era Majapahit disebutkan bahwa wilayah Kalimantan Timur pernah berada di bawah kekuasaan Jawa, pada abad XIV-XV,³⁴⁸ keberadaan orang Jawa di Balikpapan dan sekitarnya tidak terkait dengan latar belakang sejarah ini. Sebaliknya orang Jawa datang di Kalimantan Timur bukan atas inisiatif sendiri melainkan karena dipengaruhi oleh factor lain, atau dengan kata lain dimotivasi dan bahkan dipaksa untuk meninggalkan kampung halaman dan melakukan migrasi ke daerah ini. Terutama kedatangan mereka ke Kalimantan Timur tidak bisa dilepaskan dari keberadaan industry minyak pada awal abad XX.

Seperti halnya di dunia perkebunan Deli di Sumatra Utara, orang Jawa dianggap sebagai pilihan alternative untuk dipekerjakan selaku kuli setelah orang-orang Cina. Dibandingkan dengan orang Cina, buruh Jawa memiliki harga yang lebih murah dan lebih efektif karena jarak mereka dekat sehingga tidak memerlukan banyak biaya bagi pengangkutannya. Setelah peristiwa kerusuhan di tambang batubara Batu Panggal yang dikobarkan oleh para kuli Cina pada akhir tahun 1902, orang Jawa mulai banyak didatangkan

347 B.J.O. Schrieke, *Indonesian Sociological Study, vol. I* (Bandung, 1956, Penerbit Sumur), halaman 18-19. Pada masa ini orang Jawa dikenal sebagai pedagang transito karena menguasai produk yang sangat diperlukan di seluruh Nusantara yaitu beras. Melalui semangat petualangannya, bahkan para pedagang Jawa mampu menguasai beberapa jalur perkapalan dan pelayaran. Kondisi ini terhenti pada abad XVII dengan penghancuran kota-kota pelabuhan di pesisir utara oleh Mataram dan perubahan orientasi dari maritime ke budaya agraris.

348 Graham Saunders, *A history of Brunei* (Kuala Lumpur, 1994, Oxford University Press), halaman 44. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa kekuasaan Majapahit mencapai Brunei sekarang di Kalimantan Barat Laut. Hal itu berarti bahwa ketika ditemukan juga catatan tentang pengaruh Majapahit di Filipina Selatan, Kalimantan Timur yang terletak di antara keduanya juga bisa diduga berada di bawah control dan pengaruh Majapahit.

untuk menggantikan mereka oleh perusahaan pertambangan kolonial.³⁴⁹

Sejak itu orang-orang Jawa yang direkrut oleh agen-agen pencarian tenaga kuli milik perusahaan minyak ini tiba melalui pelabuhan Balikpapan dan Samarinda. Setelah turun, mereka ditampung di bangsal-bangsang yang terletak di dekat dermaga pelabuhan. Dalam penampungan itu, mereka sering bercampur dengan para kuli lain seperti Cina dan Lascar (kerani). Bangsal-bangsang dan perabotannya terbuat dari kayu yang ditebang dari hutan di dekatnya dan dikerjakan oleh para tukang kayu local, yang umumnya terdiri atas orang Cina.³⁵⁰

Selain difungsikan sebagai kuli, pemerintah colonial Belanda juga memiliki kebijakan lain terhadap orang Jawa terutama di wilayah Kalimantan Timur. Dengan sifatnya yang didominasi oleh karakter agraris, orang Jawa dianggap cocok untuk menggarap lahan yang masih kosong dan liar untuk dibuka menjadi lahan pertanian yang produktif. Akan tetapi memanfaatkan tenaga kuli Jawa yang telah bekerja baik di sector perkebunan maupun pertambangan tidak mungkin mencapai tujuan ini.³⁵¹ Satu-satunya cara adalah dengan mendatangkan para petani Jawa khusus bagi tujuan itu, dan membentuk suatu kolonisasi Jawa di Balikpapan.³⁵²

Pemanfaatan lain dari tenaga orang Jawa ini adalah sector kehutanan. Mereka yang didatangkan atau tidak lagi terikat oleh kontrak sebagai pekerja tambang, bisa dimanfaatkan untuk mem-

349 "De koelieopstootjes bij de Oost Borneo Maatschappij" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 21 Februari 1903, lembar ke-4.

350 "Van Balikpapan en de petroleum" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 13 Agustus 1912, lembar ke-1.

351 Sebelumnya telah dicoba dengan menggunakan para bekas kuli kontrak Jawa di pertambangan yang berada di Pulau Laut untuk menanam sayur. Meskipun berhasil, jumlah mereka terlalu sedikit sehingga hasilnya hanya berguna untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja. Setelah proyek ini selesai, sebagian banyak yang ingin kembali ke Jawa, tetapi sebagian lagi dipindahkan ke Seblimbing untuk menggarap lahan pertanian. "Kolonisatie" dalam *De Indische Courant*, tanggal 6 Maret 1933, lembar ke-1.

352 "De Javanen kolonisatie" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 28 Desember 1937, lembar ke-2. Ide kolonisasi ini bertumpu pada keberhasilan dari proyek serupa yang telah dijalankan oleh pemerintah colonial di daerah Lampung pada tahun 1905. Keberhasilan kolonisasi Jawa di sana mendorong pemerintah untuk melakukan proyek serupa di sejumlah pulau lain. Akan tetapi Perang Dunia I dan resesi ekonomi tahun 1930 memaksa penundaan bagi pelaksanaannya.

buka hutan. Akan tetapi perusahaan milik orang Jepang yang bergerak di bidang konsesi hutan, Nanyo Rongyo Kabushiki Kaisha, ini sengaja mendatangkan ribuan tenaga orang Jawa dari Jawa untuk khusus menebang kayu di lahan konsesinya di sekitar Sangkulirang. Menurut kenyataannya jumlah tenaga kontrak Jawa ini dianggap memadai dan berlebihan, sehingga mereka bahkan bisa menggantikan tenaga etnis lain sebagai pekerja kuli yang dipekerjakan oleh perusahaan pertambangan Eropa di sekitar Balikpapan dan Samarinda.³⁵³

D. Simpulan

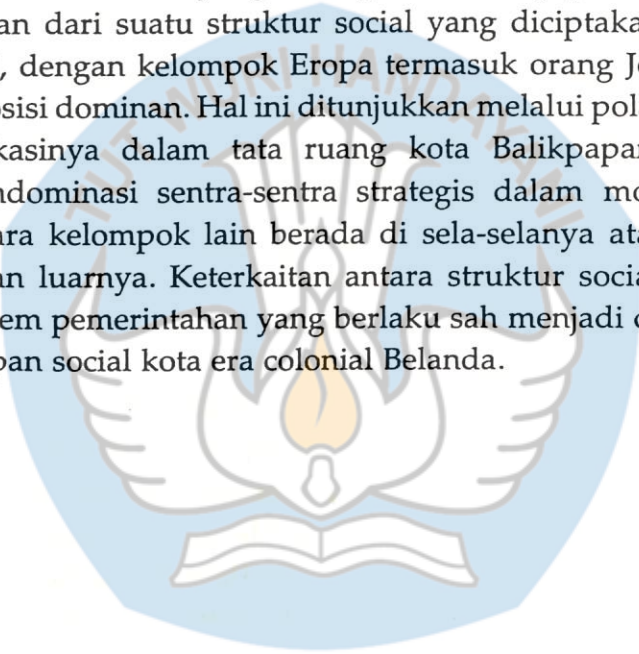
Aspek demografi dan stratifikasi social merupakan unsure yang penting bagi sejarah social suatu kota. Kedua aspek ini tidak terbatas pada pertumbuhan jumlah penduduk, namun yang lebih penting lagi adalah sejarah perkembangan mereka dan peran mereka dalam pertumbuhan dan dinamika kehidupan kota. Keduanya akan memberikan nafas kehidupan bagi aktivitas perkotaan dibandingkan dengan paparan angka yang menunjukkan jumlah mati dan memerlukan interpretasi analisis lebih lanjut yang memberikan peluang bagi subyektivitas.

Bertolak dari pandangan tersebut, Balikpapan ternyata telah dihuni oleh sejumlah besar bangsa sejak awal pertumbuhannya. Meskipun pada umumnya mereka lebih banyak terikat pada keberadaan investasi modal daripada pesona kota itu sendiri, kenyataan menunjukkan bahwa kehadiran mereka telah menjadikan Batavia sebagai sebuah kota multietnis, yang menjadi fondasi utama untuk mengarah pada suatu bentuk kehidupan metropolis. Eksistensi berbagai kelompok etnis yang mewarnai struktur social dalam kehidupan kota Balikpapan menunjukkan karakteristik kota yang lebih multikultur daripada monokultur, seperti yang

³⁵³ Orang-orang Jawa ini terutama didatangkan dari daerah hutan di Jawa seperti Madiun, Ngawi, Caruban dan Bojonegoro. Asumsinya adalah mereka pernah bekerja sebagai penebang kayu wajib (*blandong*) di hutan-hutan jati di Jawa. "Houtaankap in Oost Borneo" dalam *De Indische Courant*, tanggal 27 Juli 1935, lembar ke-5.

dialami oleh kota-kota di dekatnya terutama yang menjadi pusat kekuasaan dan pemerintahan.

Stratifikasi social yang dibangun di Balikpapan menunjukkan gambaran dari suatu struktur social yang diciptakan oleh rezim colonial, dengan kelompok Eropa termasuk orang Jepang berada pada posisi dominan. Hal ini ditunjukkan melalui pola pemukiman dan lokasinya dalam tata ruang kota Balikpapan. Kelompok ini mendominasi sentra-sentra strategis dalam morfologi kota, sementara kelompok lain berada di sela-selanya atau bahkan di lingkaran luarnya. Keterkaitan antara struktur social, tata ruang dan sistem pemerintahan yang berlaku sah menjadi cirri khas dari kehidupan social kota era colonial Belanda.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

BAB VIII

PENUTUP

Perkembangan kota Balikpapan menunjukkan suatu pola yang khusus bagi suatu pertumbuhan morfologi kota, terutama di era colonial. Kekhususan ini terletak pada peran berbagai pihak yang memberikan kontribusi bagi perluasan dan penataan ruang kota, sekaligus memberikan sifat bagi kota tersebut yang berfungsi sebagai fondasi bagi perluasan dan pemekaran lebih lanjut.

Seperti yang disampaikan oleh Gill mengenai perkembangan morfologi kota colonial di Jawa dan Madura, tiga factor menentukan sifat kota colonial : pusat pemerintahan, sarana komunikasi dan pusat-pusat ekonomi. Masing-masing saling terkait meskipun mempunyai otonomi dan urutan dalam tahap-tahap pembangunannya. Meskipun berlaku bagi Jawa dan Madura, tiga tahap pembangunan dan pengembangan kota menurut konsep morfologi colonial ini juga berlaku bagi Balikpapan. Pada awalnya rezim colonial Belanda memantapkan posisi politik dan dominasinya untuk mengontrol daerah sekitarnya sebelum merancang infrastruktur yang akan dibangun. Penegakkan kekuasaan yang dilakukan lewat pendekatan politik diikuti dengan pembangunan infrastruktur komunikasi yang akan memudahkan hubungan serta sekaligus control terhadap daerah penopang kota, yaitu pedalaman yang dalam hal ini ditentukan dengan aliran sejumlah sungai.

Sementara itu dengan mengikuti konsep P.J. Nas mengenai hubungan pusat perkotaan dan daerah pedalaman, suatu interaksi timbal balik akan terwujud dalam poros keseimbangan hubungan pusat dan penopangnya. Akan tetapi dominasi kota yang lebih besar daripada daerah penopang mengakibatkan terciptanya poros pusat dan pinggiran (*central and pheriphery*). Hubungan ini menjadi semakin penting ketika diletakkan dalam konteks administrasi pemerintahan, yaitu pusat kota memegang

kendali pemerintahan yang mengatur daerah sekitarnya dan otomatis daerah penopangnya, sebagai akibat penetapan batas-batas administrative. Menurut Nas, struktur yang dibentuk akibat hubungan (atau lebih tepatnya control) pusat dan daerah mendorong terjadinya proses urbanisasi.

Bertolak dari pandangan Na situ, bagi Balikpapan hal ini tampaknya tidak selalu terjadi. Harus diakui bahwa beberapa factor bisa dijadikan sebagai penarik bagi terjadinya proses migrasi dari penduduk daerah pedalaman ke pusat perkotaan, seperti keberadaan industry pertambangan yang memerlukan banyak tenaga kerja khususnya tenaga lapangan bagi kepentingan eksploitasinya, atau juga fasilitas kehidupan social di perkotaan seperti prasarana pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat pedalaman untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Akan tetapi dalam kasus Balikpapan, setidaknya selama hampir empat decade terakhir pemerintahan rezim kolonial, pola seperti yang disebutkan di atas tidak selalu terwujud. BPM, sebagai badan usaha perminyakan yang dominan dan investor utama dari industry padat modal dan padat kerja di Balikpapan, lebih banyak merekrut pegawai termasuk tenaga kasarnya (kuli) bukan dari penduduk setempat melainkan dari tenaga luar atas dasar hubungan kerja kontrak. Pertimbangan yang mendasari keputusan BPM untuk menggunakan kuli kontrak tambang itu adalah profesionalitas dan efisiensi harga tenaga kasar. Bagi BPM penduduk local tidak memiliki kesiapan untuk bekerja sebagai kuli atau tenaga administrasi di kompleks eksploitasinya.

Pelayanan social yang disediakan oleh pemerintah dan swasta tidak berhasil sepenuhnya memberikan pelayanan kepada penduduk pribumi seperti yang terjadi di Jawa atau Sumatra. Di Balikpapan, para pengguna kedua fasilitas pelayanan social ini lebih banyak penduduk pendatang, yang memiliki kesiapan bagi kehadiran bentuk-bentuk infrastruktur tersebut. Harus diakui bahwa letak dari perbedaan ini bukan pada factor ekonomi seperti yang terjadi pada kasus lapangan kerja di pertambangan, melainkan pada perbedaan latar belakang psiko-sosial dan budaya.

Masyarakat pribumi di Kalimantan Timur, yang terdiri atas suku Dayak, tidak memiliki gambaran yang sama tentang kehidupan social dibandingkan penguasa Barat atau setidaknya komunitas pendatang. Mereka tidak memahami arti penting pendidikan dan mempunyai keyakinan yang berbeda tentang kesehatan.

Dominasi kepercayaan tradisional yang terwujud dalam ide-ide dan sistem nilai yang mereka anut tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan sikap dan perilaku kehidupan orang pribumi. Mereka merasakan bahwa dunia mereka berbeda dibandingkan dengan struktur yang dibangun oleh rezim colonial dan investor swasta di tanah mereka. Bahkan hal serupa juga berlaku bagi pandangan mengenai kepemilikan tanah sebagai sumber kehidupan. Selama industry pertambangan tidak mengusik habitat mereka, tidak akan ada perlawanan yang muncul dari masyarakat pribumi, seperti yang terjadi di Jawa atau Indonesia bagian barat lainnya.

Hal tersebut juga bisa menjelaskan hubungan atau reaksi dari penduduk pribumi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota Balikpapan yang dirancang dan dilaksanakan oleh kekuatan asing. Umumnya penduduk pribumi tidak memberikan respon yang berarti dan mereka melihat bahwa perkembangan itu berada di luar batas habitat mereka. Selama mereka masih merasa keberadaannya baik sebagai individu maupun sebagai komunitas social, tidak ada reaksi atau bentuk resistensi yang muncul. Kasus kerusuhan yang terjadi di Balikpapan pada tahun 1912 dipicu oleh konflik antara pendatang dan pendatang, yaitu kuli kontrak Cina dan kelompok pendatang lain. Dalam hal ini tidak ada keterlibatan dari penduduk pribumi, dan peristiwa itu juga tidak meluas pada reaksi penduduk pribumi.

Mengenai ikatan dalam kehidupan kota seperti yang digambarkan di atas, Frans Tonkin menyebutkan adanya dua ikatan yang menyatukan individu dalam sebuah kehidupan social di suatu kota, yaitu ikatan social dan ikatan ekonomi. Ikatan ekonomi terbentuk ketika individu merasa bahwa kehidupannya terpenuhi oleh fasilitas yang ada di kota tersebut. Sementara itu ikatan social

dibentuk dari nilai-nilai social kota yang dianutnya sebagai suatu pedoman dalam kehidupan sosialnya ketika berinteraksi dengan individu lain.

Dengan mengaplikasikan konsep Tonkin di atas, keduanya lebih banyak berlaku bagi penghuni kota Balikpapan yang terutama terdiri atas para pendatang. Mereka datang dan bermukim untuk mencari penghidupan dengan bekerja atau mengolah sumber daya alam, sementara itu mereka juga membangun nilai-nilai idealism yang merupakan criteria social untuk mengatur perilaku mereka dan interaksi antar kelompok yang menjadi bagian dari struktur social perkotaan. Keduanya akan menentukan pola tata ruang dalam kota dan perluasan morfologi perkotaannya.

Bagi penduduk pribumi khususnya yang tinggal di pinggiran kota atau daerah pedalaman, kedua prinsip tersebut tidak menunjukkan peran yang jelas. Masyarakat Dayak tidak memiliki kepentingan dengan industry pertambangan, dan mereka juga tidak menetap di kompleks pemukiman yang dibangun atau disediakan oleh perusahaan pertambangan. Mereka tetap mempertahankan kehidupannya di dunia mereka dengan nilai-nilai mereka sendiri. Meskipun mereka terlibat dalam transaksi perdagangan, proses itu berlangsung di luar lingkup dunia mereka dan tidak memberi mereka akses langsung bagi kontribusi pembangunan dan pengembangan kota. Nilai-nilai social yang mendasari ikatan sosial di kota Balikpapan tidak mempengaruhi keberadaan mereka di sana.

Melihat deskripsi di atas, bisa disimpulkan bahwa Balikpapan merupakan sebuah kota yang dirancang, dibangun, ditata dan dikembangkan oleh rezim colonial menurut konsep dan wawasan kepentingan mereka di masa depan. Rezim colonial bukan hanya membangun dan menata kota ini secara fisik namun juga secara social, yaitu menciptakan struktur social yang didominasi oleh kepentingan rezim colonial, termasuk kepentingan modal Barat. Sebagai akibatnya, dalam waktu empat decade, Balikpapan telah berhasil disiapkan menjadi sebuah kota yang bercorak industri-kapitalis dengan ruang-ruang strategis yang didominasi oleh kepentingan modern.

BIBLIOGRAFI

A. Arsip

- Besluit van den Resident der Zuier- en Oosterafdeeling van Borneo,
16 Juli 1903 no. 319
- Besluit van den Residen der Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo, 22 October 1903 no. 521a
- Besluit van Gouverneur Generaal, 2 Februarie 1877 no. 5
- Besluit van Gouverneur Generaal 30 November 1886 no. 4
- Besluit van Gouverneur Generaal 23 Februarie 1891 no. 4
- Besluit van Gouverneur Generaal 30 Juni 1891 no. 4
- Besluit van Gouverneur Generaal 21 Mei 1896 no. 43
- Besluit van Gouverneur Generaal 30 Mei 1898 no. 3
- Besluit van Gouverneur Generaal 13 April 1900 no. 2
- Besluit van Gouverneur Generaal 3 Augustus 1900 no. 1
- Besluit van Gouverneur Generaal 13 Mei 1901 no. 26
-
- Besluit van Gouverneur Generaal 17 April 1902 no. 29
- Besluit van Gouverneur Generaal 9 Juli 1903 nomor 2
- Besluit van Gouverneur Generaal 26 Juli 1903 no. 3
- Besluit van Gouverneur generaal 5 November 1903 no. 42
- Besluit van Gouverneur Generaal 29 November 1903 no. 26
- Besluit van Gouverneur Generaal 4 April 1904 no. 9
- Besluit van Gouverneur Generaal 27 October 1904 no. 2
- Besluit van Gouverneur Generaal 9 Februarie 1905 no. 22
- Besluit van Gouverneur Generaal 10 Juni 1905 no. 37
- Besluit van Gouverneur Generaal 24 December 1905 no. 16 en 17
- Besluit van Gouverneur Generaal 28 Augustus 1906 no. 32
- Besluit van Gouverneur Generaal 19 September 1908 no. 8

- Besluit van Gouverneur Generaal 11 November 1908 no. 6
- Besluit van Gouverneur Generaal 1 Februari 1913 no. 11
- Besluit van Gouverneur Generaal 24 Februarie 1913 nomor 17
- Besluit van Gouverneur Generaal 10 December 1913 no. 39
- Besluit van Gouverneur Generaal 14 Juli 1914 no. 24
- Besluit van Gouverneur generaal 15 October 1914 no. 26
- Besluit van Gouverneur Generaal 12 November 1914 no. 63
- Besluit van Gouverneur Generaal 28 Desember 1914 no. 65
- Besluit van Gouverneur Generaal 3 Mei 1915 no. 15
- Besluit van Gouverneur Generaal 18 Juni 1915 no. 47
- Besluit van Gouverneur Generaal 28 November 1916 no. 16
- Besluit van Gouverneur Generaal 29 Mei 1917 no. 56
- Besluit van Gouverneur Generaal 25 November 1918 no. 74
- Besluit van Gouverneur Generaal 26 Maart 1919 no. 39
- Besluit van Gouverneur Generaal 10 October 1921 no. 8
- Besluit van Gouverneur Generaal 17 December 1921 no. 3
- Besluit van Gouverneur Generaal 26 Februarie 1934 no. 13
-
- Besluit van Gouverneur Generaal 18 September 1935 no 26
- Besluit van Gouverneur Generaal 4 November 1939 no. 30
- Bijlagen Handelingen der Staten Generaal 1898/1899 no. 151
- Brief van Directeur der Binnenlandsch Bestuur, 10 September 1916
no. 1/A
- Brief der Directeur der Burgerlijke Openbare Werken 15 November
1913 no. 5
- Brief van Directeur der Burgerlijke Openbare Werken 21 April
1915 no. 1
- Brief van Directeur der Financieel aan Gouverneur Generaal 23
Mei 1915 no. 2161

Brief van Commandant der Zeemacht en Chef van het Departement der Marine in Nederlandsch Indië, 23 Maart 1904 no. 3616

Brief van Directeur der Burgerlijke Openbare Werken aan Gouverneur Generaal 16 Juni 1909 no. 97157

Brief van Directeur der Binnenlandsch Bestuur aan Gouverneur Generaal 7 Augustus 1909 nomor 2480

Brief van Directeur van Burgerlijke Openbare Werken, 15 Maart 1904 no. 4041/A

Brief van Directeur der Burgerlijke Openbare Werken, 25 Augustus 1910 nomor 12370

Brief van Directeur der Burgerlijke Openbare Werken 21 December 1914 no. 2

Brief van Directeur der Finantieel aan Gouverneur Generaal 11 Maart 1908 no. 4321

Brief van Directeur van Finantieel aan Gouverneur Generaal 4 Oktober 1909 nomor 2473/H

Brief van Directeur der Openbare Werken, 11 Februari 1913 no. 1

Brief van Gouvernement Secretaris, 9 Maart 1918 no. 6

Brief van hoofdvertegenwoordiger der NV. De Bataafsche Petroleum Mij aan Gouverneur Generaal, 6 Juli 1931

Brief van hoofdvertegenwoordiger der NV. De Bataafsche Petroleum Mij aan Gouverneur Generaal, 10 December 1931

Brief van hoofdvertegenwoordiger der BPM aan Gouverneur Generaal 21 Februarie 1934

De Balikpapan administratie

Indisch Verslag over het jaar 1937, eerste deel

Indische Verslag over het jaar 1940, eerste deel

Koloniaal Verslag over het jaar 1896-1897

Koloniaal Verslag over het jaar 1901

- Koloniaal Verslag over het jaar 1901-1902*
Koloniaal Verslag over het jaar 1902
Koloniaal Verslag over het jaar 1905
Koloniaal Verslag over het jaar 1906
Koloniaal Verslag over het jaar 1907
Koloniaal Verslag over het jaar 1909
Koloniaal Verslag over het jaar 1910
Koloniaal Verslag over het jaar 1915
Koloniaal Verslag over het jaar 1918
Kommissarial 30 September 1910 no. XV
Memorie van Overgave Assisten Residen van Nijs 1933, reel nomor 28, MvO serie 1e
Militaire memorie over Balikpapan, 1931, reel nomor 28 MvO serie 1e
Missive Gouvernement Secretaris 10 Mei 1893
Missive Gouvernement Secretaris 28 Januari 1898 no. 228
Missive Gouvernement Secretaris 30 Mei 1898 no. 1233

Missive Gouvernement Secretaris 20 Maart 1908 no. 818
Missive Gouvernement Secretaris, 4 November 1909 no. 4869
Missive Gouvernement Secretaris 15 Oktober 1910 no. 2345
Missive Gouvernement Secretaris, 3 Juni 1915 no. 1347
Missive van den Resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo aan Directeur der Burgerlijke Openbare Werken 27 October 1903 no. 459/12
Missive van den Resident der Zuider-en Oosterafdeeling Borneo 26 Februari 1904 no. 1177/12,
Missive van den Resident der Zuider- en Oosterafdeeling Borneo 3 November 1903 no. 479/12
Politiek Verslag van Residentie Manado over het eerste half jaar 1928

*Rapport van Departemen der Burgerlijke Openbare Werken, 21 November
1903 no. 5*

Regering Almanak, eerste deel, tahun 1920

Renvooi 18 April 1917 no. 11127

Renvooi 22 November 1918 no. 3318

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1849

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1855

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1870

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1877

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1886

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1899

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1900

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1901

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1907

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1908

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1910

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1913

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1914

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1915

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1921

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1928

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1931

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1934

Staatsblad van Nederlandsch Indië tahun 1937

*Surat Menteri Koloni J.T. Cremer kepada Gubernur Jenderal
Rooseboom tanggal 13 September 1900 Lett A.2*

*Surat Residen Kroesen kepada Gubernur Jenderal Rooseboom
tanggal 18 April 1901 nomor 3169/2.*

Surat dari Direktorat PU kepada Gubernur Jenderal tanggal 10 Maret 1919 nomor 2/A

Telegram van Gouvernement Secretaris, 1 Juni 1918 no. 624

Telegram van Gouvernements Secretaris, 17 Juni 1918 no. 673a

Troepen commandant militaire memorie over Balikpapan, 1929, reel no. 28, MvO serie 1e

B. Artikel Koran

"Afzet van producten" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 8 Oktober 1932

"Amerikaansch bezoek aan Balikpapan", dalam *De Indische Courant*, 25 Mei 1938

"Amerikansche zending in Indië" dalam *De Indische Courant*, tanggal 2 Agustus 1933

"Balikpapan" dalam *Het nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië*, 20 Desember 1906

"Balikpapan-Bandjarmasin" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 27 Oktober 1939

"Balikpapan dibikin makmoer", dalam *Inicork Express*, tanggal 28 April 1942

"Balikpapan: nieuwe militair tehuis" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 23 Agustus 1938

"Balikpapan", dalam *De Sumatra Post*, 26 November 1941

"Balikpapan, oliestad in het oerwoud", dalam *Nieuwe Venlosche courant*, tanggal 27 Januari 1942,

"Balikpapan: uitreiking van onderscheidingen ter eere van den verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina", dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 1 Oktober 1937

"Balikpapan's vernieling : een ruikende puinhoop", dalam *De Sumatra Post*, 2 Pebruari 1942

- "Balikpapan's vernieling: een oliestad in vlammen", dalam *Amigoe di Curacao*, tanggal 10 Juni 1942
- "Batavia-Balikpapan: eerste vlucht", dalam *De Indische Courant*, 8 Februari 1936
- "Besmet verklaard" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 13 Juni 1904
- "Besteding voor rubbergelden: en het woeste Borneo" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 8 Mei 1935
- "Bij een brand op Borneo", dalam *De Telegraaf*, tanggal 27 September 1931
- "Borneo: de vooruitgang van een verren buitenpost" dalam *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, tanggal 17 Desember 1926
- "Borneo: een goedgevoelde landschapkas" dalam *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, tanggal 22 Agustus 1924
- "Borneo Oil Company: Japansche belangstelling" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 16 November 1929
- "Borneo Zuid en Oost: een geweest dat weinig vraag", dalam *Nieuw Rotterdamsche Courant*, tanggal 20 Juli 1927.
- "Bronnen van rijkdom op Borneo: de oliestad te Balikpapan" dalam *Het vaderland*, tanggal 29 Oktober 1927
- "Centraal Borneo" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 31 Maret 1903
- "Chineesche handelsbelangen" dalam *De Indische Courant*, 17 Oktober 1932
- "Concessie verleend" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 20 Desember 1905
- "Concessie verleend" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 28 Desember 1905
- "De Bataafsche als werkgeefster" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 2 Juni 1919

- "De Borneo Sumatra Handel Maatschappij" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 16 Februari 1920
- "De Chineezzen van Sanga Sanga" dalam *de Telegraaf*, tanggal 7 Juli 1928
- "De dubbele moord" dalam *De Indische Courant*, tanggal 5 April 1930,
- "De eerste vlucht Batavia-Balikpapan v.v" dalam *De Indische Courant*, 8 Februari 1936
- ."Houtaankap in Oost Borneo" dalam *De Indische Courant*, tanggal 27 Juli 1935
- "De Japanners in Sangkoelirang: hout en olie belangen" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 27 Mei 1935
- "De Japansche penetratie: olie- en houtbelangen in Oost-Borneo" dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 28 Mei 1935
- "De Javanen kolonisatie" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 28 Desember 1937
- "De Javasche Bank te Balikpapan" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 7 Januari 1907
- "De JCJL vrachtdienst op Japan" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 28 Agustus 1929
- "De koelieopstootjes bij de Oost Borneo Maatschappij" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 21 Februari 1903
- "De Koninklijke in 1922" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 20 Juli 1922
- "De Kuo Min Tang in Oost Borneo" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad* tanggal 6 Oktober 1927
- "De landvoogd te Balikpapan", dalam *De Indische Courant*, tanggal 22 April 1924
- "De missie op Borneo" dalam *De Tijd*, tanggal 4 Desember 1934

- "De nieuwe KNILM-lijn" dalam *De Sumatra Post*, 2 Desember 1935
- "De nieuwe KNILM-lijn: wekelijks naar Balikpapan" dalam *De Sumatra Post*, 11 Februari 1936
- "De oliestadt Balikpapan te Borneo oostkust", dalam *De Telegraaf*, 7 Maret 1933
- "De ontslagen bij de BPM" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 15 Februari 1932
- "De ontslagen bij de BPM in 1931", dalam *De Gooi en Eemlander: nieuws en advertentieblad*, tanggal 31 Maret 1932
- "De Oost Borneo Mij in het Engelsche handen" dalam *Sumatra Post*, 17 April 1900
- "De openlegging van Borneo: door Dr. B.J. Haga" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 10 Juni 1939
- "De openlegging van Borneo: irrigatie- en wegenplannen uit rubbergeld" dalam *Bataviaasch nieuwsblad*, tanggal 18 April 1935
- "De ontwikkeling van Zuid-Oost Borneo", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 9 Maret 1907
- "De petroleumindustrie in Koetei" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 15 Desember 1903
- "De R.K. Missie", dalam *De Indische Courant*, tanggal 2 September 1933
- "De Ramp te Sanga-Sanga" dalam *De Telegraaf*, 16 Desember 1931.
- "De regeling van luchtbescherming" dalam *De Indische Courant*, 2 Agustus 1939
- "De rubberconferentie: eerste dag" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 13 Agustus 1936
- "De special Japansche missie" dalam *Bataviaasch nieuwsblad*, tanggal 14 Juli 1923

- "De strategische positie van Nederland en Nederlandsch Indië" dalam *Bataviaasch nieuwsblad*, tanggal 8 Desember 1932
- "De veeteelhoeven op Madoera" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 15 Juni 1935
- "De weg Bandjarmasin-Balikpapan", dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 15 September 1937
- "De Zuid en Oosterafdeeling van Borneo" dalam *De Indische Courant* tanggal 11 Agustus 1931
- "Dorpsschool en Stamhuis vernield" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 4 Oktober 1934
- "Dr. A.W. Niewenhuijs, : over de sociale toestand op Borneo" dalam *De Locomotief*, tanggal 20 Februari 1903
- "Drama in Balikpapan: Japanner doodt 2 landgenooten" dalam *De Indische Courant*, 15 Juli 1935.
- "Een Dorado", *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 2 Juli 1908
- "Een onderhoud met den Directeur BOW", dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 8 Juni 1931
- "Een prestige standplaats", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 3 Juli 1908
- "Een werkstaking van Chineesche koelis", dalam *De Sumatra Post*, tanggal 10 Februari 1903
- "Eerste reis der Kota Agoeng" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 13 Maret 1931
- "Ekins in Balikpapan", dalam *De Tijds*, tanggal 10 Oktober 1936
- "Engelsch Jacht op bezoek" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 29 Januari 1935
- "Franchise economische belangen in Indië" dalam *Bataviaasch Handelsblad*, 8 Mei 1927
- "Gemengd Indische nieuws" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 30 Oktober 1897

- “Het nieuwe garnizoen te Balikpapan” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 20 Januari 1925
- “Het nieuw hospitalen op Borneo” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 3 Agustus 1933
- “Het opstootje te Balikpapan” dalam *De Sumatra Post*, tanggal 18 Juli 1912
- “Hout aankap in Oost Borneo: een Japansche concessive aanvrag” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 7 April 1933
- “Inlandsche landbouw en voedsel situatie” dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 8 Januari 1940
- “Inspectiereis van Dr. H.Loos”, dalam *De Sumatra Post*, tanggal 2 Mei 1938
- “In- en uitvoerrechten Z.- en O. afd. Borneo” dalam *De Locomotief*, tanggal 29 November 1901.
- “Japan en Borneo” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 12 Juli 1939
- “Japan verkrijgt petroleum belangen op Borneo” dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 14 November 1920
- “Japansche activiteit in Nederlandsch Indië” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 2 Desember 1933
- “Japansche marinetankboot in de haven van Balikpapan” dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 1 Juli 1938
- “Japansche-Nederlandsche Belangentegenstellingen” dalam *De Sumatra Post*, 16 November 1935,
- Java Courant* 20 November 1891 no. 93
- Java Courant* 15 November 1901 nomor 91
- “Kerkinzegening” dalam *De Indische Courant*, tanggal 4 Januari 1932
- “Kerknieuws” dalam *De Tijd*, tanggal 14 September 1918
- “Koetei” dalam *De Locomotief*, 4 October 1898.

"Kolonisatie" dalam *De Indische Courant*, tanggal 6 Maret 1933

"Kolonisatie op Selebes en Borneo" dalam *De Indische Courant*,
tanggal 11 Oktober 1937

"Kon. Ned. Mij. tot exploitatie van Petroleumbronnen in Nederl.
Indië" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 9 Juli 1904

"Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van
Petroleum bronnen in Nederlandsch Indië" dalam *Het
nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 11 Juli 1905

"Koninklijke Nederlandsche Mij., tot Exploitatie van Petroleum-
bronnen in Nederlandsch Indië" dalam *Algemeen
Handelsblad*, tanggal 21 Juni 1916

"Koninklijke Nederlandsche Mij. tot Exploitatie van Petroleum-
bronnen in Nederlandsch Indië" dalam *Algemeen
Handelsblad*, tanggal 26 Juni 1917

"Korte Verslag, dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 1 Agustus
1914

"Korte verslagen Zuid en Ooster afdeeling van Borneo" dalam
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië, tanggal 19
Maret 1909

"Met de Koninklijk Paketvaart naar Australie", dalam *Soerabajasch
Handelsblad*, tanggal 14 Oktober 1908

"Met een KNIL vogel naar Borneo", dalam *De Indische Courant*, 11
Februari 1936

"Mijn reis door Borneo", dalam *De Telegraaf*, tanggal 1 Februari
1930

"Militair departement" dalam *De Telegraaf*, tanggal 17 Juni 1924

"Missiewerk op Borneo: niwuew apostolische perfectuur" dalam
De Telegraaf, tanggal 26 Juli 1938,

"Naar Balikpapan", dalam *De Indische Courant*, tanggal 19 Juni
1930

"Naar binnenland van Borneo" dalam *Algemeen Handelsblad*,
tanggal 28 November 1903

- "Naar de Dayak van Apo Kayans" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 7 November 1931
- "Naar Tarakan: vliegtuig aangekomen en vertrokken" dalam *De Indische Courant*, 10 Desember 1936
- "Nederlandsch Indische Houtaankap Mij", dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 12 Juli 1917
- "Nieuw Guinea en Borneo" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 14 Maret 1933
- "Nieuwe Missie School" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 13 April 1937
- "Nieuwe Politiek Contract voor Sultanaat Koetai" dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 10 Agustus 1938
- "Nieuws uit Samarinda: Japansche houtaankap" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 24 September 1934
- "Olie en Bestuur: nieuwe exploitatie van bronnen" dalam *Bataviaach nieuwslad*, 8 Agustus 1928.
- "Ongewensch" dalam *Bataviaasch nieuwsblad*, tanggal 17 Februari 1934
-
- "Over Borneo" dalam *De Locomotief*, tanggal 5 Juli 1901
- "Overeenkomsten met Inlandsche vorsten op Borneo" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 21 Mei 1902
- "Petroleum in Borneo" dalam *De Java Bode*, tanggal 18 Juni 1897
- "Petroleum industrie in Borneo", dalam *De Locomotief*, tanggal 30 Maret 1899
- "Petroleum in het Koloniaal Verslag" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 5 Mei 1897
- "Petroleum reserves bij Balikpapan raken op", dalam *De Telegraaf*, 14 Agustus 1934
- "Pokken op Borneo" dalam *Nieuwsblad van Noorden*, tanggal 28 Maret 1914

- "Pokken op Borneo. Ook de dokter aangetast", dalam *De Volk: adgblad voor arbeiderspartij*, tanggal 3 Maret 1930
- "Politie naar Sangkoelirang voor het Japansche houtaankap-bedrijf" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 7 Agustus 1935
- "Postsluiting", dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 31 Desember 1908
- "Radio stations van de BPM", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 14 September 1933
- "Samarinda bezoek Grimsby", dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 19 Februari 1919
- "Selamat Datang" dalam *Kalimantan Raya*, tanggal 13 Juli 1942
- "Slavernij op Celebes" dalam *Batavia Nieuwsblad*, tanggal 30 Juli 1902
- "Sociale toestanden op Borneo" dalam *Batavia Nieuwsblad*, tanggal 19 Februari 1903.
- Staatscourant 23 Juli 1907
- "Standplaatsen R.K. geestelijken" dalam *De Indische Courant*, tanggal 30 September 1935
- "Te Balikpapan" dalam *De Indische Courant*, 8 Mei 1924
- "Tegen de pokken" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 4 April 1907,
- "Telegraaf kabel te Bandjermasinse" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 24 Desember 1902
- "Twee ongelukken", dalam *Het nieuws van den dag voor Ned. Indië*, 5 Februari 1904
- "Uit Balikpapan", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 23 Mei 1913
- "Uit donker Borneo", dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 24 April 1937
- "Uit Koetei" dalam *De Locomotief*, 15 Maret 1898

- "Uit Koloniaal Verslag", dalam *Algemeen Handelsblad*, 3 April 1898
- "Uit korte verslagen" dalam *Bataviaasch nieuwsblad*, tanggal 23 November 1906
- "Uit Samarinda" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 10 April 1913
- "Ups en Down" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 8 Agustus 1908
- "Vaccinateurs" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 26 Januari 1909
- "Vaccinatie op Borneo" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 4 Februari 1914
- "Van Balikpapan en de petroleum" dalam *De Sumatra Post*, tanggal 8 Agustus 1912
- "Vliegveld te Balikpapan", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 11 Oktober 1935
- "Volksgezondheid" dalam *De Indische Courant*, tanggal 5 Maret 1940
- "Vooruit in Borneo", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 19 Februari 1910
- "Voor Z.O. Borneo" dalam *De Indische Courant*, tanggal 2 April 1935
- "Vrijgesproken van dood door schuld", dalam *De Tijd*, tanggal 7 Maret 1932
- "Wat een Dayak al niet meemaakt", dalam *De Sumatra Post*, tanggal 23 Maret 1929
- "Wegaanleg", dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 21 November 1930
- "Wegaanleg Balikpapan-Bandjarmasin", dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 6 November 1937
- "Wegen vraagstuk Buitengewesten" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, 9 April 1938.
- "Zending" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 7 Juli 1909

"Zending", dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 4 Agustus 1910

"Zending" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 5 Januari 1911

"Zending" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië*, tanggal 27 Desember 1912

"Zending, dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 12 Juli 1926

"Zending" dalam *De Indische Courant*, tanggal 23 Mei 1929

"Zending in Ned. Oost Indie" dalam *Het vaderland*, tanggal 6 Oktober 1942

"Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, tanggal 8 Maret 1929.

C. Buku dan Majalah

Aa, A.J. van der, 1862, *Biographisch woordenboek der Nederlanden*, Haarlem, J.J. van Brederode.

Alter, Joseph S., 2005, *Asian Medicine and Globalization*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Andaya, Leonard Y., 2008, *Leaves of the same tree: trade and ethnicity in the Straits of Mallaca*, Hawaii, The University of Hawai Press

Anon., "Houtboschen in Nederlandsch Indië: Particuliere industrie tegenover staats-exploitatie", dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië*, 1867, vol. I.

Anon., "De opium smokkelhandel ter zee" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië*, tahun 1884, vol. 1

Anon., "De grensregeling in Noord Borneo" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, jilid II, tahun 1891.

Anon., "De toekomst van de residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo. Volgens den resident C.A. Kroesen", dalam *Indische Mercur*, tahun 1901

- Anon., "De proef met de opiumregie" dalam *Indische Gids*, tahun 1895, vol. I
- Anon, 1966, *Geologie en Mijnbouw, vol., 8*, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff
- Anon., "Opiumpacht en regie in 1898 en 1899" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië*, tahun 1901
- Aritonang, Jan S., 1994, *Mission Schools in Batakland 1861-1940*, Leiden, E.J. Brill.
- Berkhout, A.H., "Lezing over de Oost Indische houtsoorten. Voornamelijk djattihout, hare exploitatie en de handel daarin op de Europeesche markt. Gehouden te Haarlem, 4 Juni 1894" dalam *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indië*, tahun 1895, vol. XLIX.
- Blink, H., 1907, *Nederlandsch Oost en West Indie, vol. I*, Leiden, E.J. Brill
- Bock, Carl Alfred, 1887, *Reis in Oost- en Zuid Borneo van Koetei naar Banjarmassin ondernomen op last van Indische Regeering in 1879 en 1880*, 's Gravenhage, M. Nijhoff
- Burgers, Herman, 2010, *De Garoeda en de Ooeivar: Indonesie van kolonie tot nationale staat*, Leiden, KITLV Press
- Clemens, A.H.P., en J.Th. Lindblad, 1989, *Het belang van de buitengewesten. Economische expansie en oloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands Indië 1870-1942*, Amsterdam, NEHA.
- Cohen, Andrew, 2004, *Market Structure and market definition: the case of small market banks and thriffs*, Washington, Federal Reserve Board.
- Coke, James I., 2002, *The Church Speaks*, Mich, W. B. Eerdmans Pub. Co
- Cowan, C.D., 2012, *The economic development of South East Asia: studies in economic history and political economy*, New York, Routledge Publ.

- Creutzberg, K.F., 1916, *Het onderwijs in Nederlandsh Indië*, 's Gravenhage, Korthuis.
- Cribb, Robert, 1994, *The late colonial state in Indonesia: political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*, Leiden, KITLV Press.
- Dick, Howard, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad dan Thee Kian Wie, 2002, *The emergence of a national economy*, Australia, Allan and Unwin Pub.
- Dijk, Kees van, 2007, *The Netherlands Indies and the Great War 1914-1918*, Leiden, KITLV Press.
- Doel, H.W. van den, 1996, *Het rijk van Insulinde: Opkomst en ondergang van Nederlandsche kolonie*, Amsterdam, Promotheus.
- Furnival, J.S., 2010, *Netherlands India: a study of plural economy*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Galois, J.G.A., "Korte aantekeningen gehouden gedurende eene reis lands de Oostkust van Borneo in den jare 1850" dalam *BKI*, tahun 1864
- Gerretson, Frederick Carel, 1958, *History of the Royal Dutch*, vol. 4, 's Gravenhage, The Royal Dutch Petroleum Company
- Groeneboer, Kees. 1995, *Jalan ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-1950*, Jakarta, Erasmus
- Groneman, J., "De opium kwestie" dalam *Indische Gids*, tahun 1887, vol. 1
- Hageman, J., "Aantekeningen omtrent een gedeelte der Oostkust van Borneo" dalam *TBG*, tahun 1855, vol. 58.
- Hamid, "Djeletungzaken op Borneo: het goed recht van concessies", dalam *De Indische Gids*, tahun 1913, vol. 1
- Heinrichs, Waldo, 1989, *Threshold of war: Franklin D. Roosevelt and American entry into World War II*, New York, Oxford University Press.

- Hesselink, Elizabeth Quirine, 2009, *Genezers op de koloniale markt: inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost Indië 1850-1915*, Amsterdam, Amsterdam University Press
- Jongejans, J., 1922, *Uit Dayjakland: kijkjes in het leven van den koppensneller en zijn omgeving*, J.M. Meulenhoff
- Juwono, Harto, dan Yosephine Hutagalung, 2008, *Perang Barito 1900-1907: Perlawanan Panglima Batur*, Yogyakarta, Banjar Aji Production.
- Kielstra, E.B., 1920, *De vestiging van het Nederlandsche gezag in den Indischen Archipel* Haarlem, De erven F. Bohn.
- Klinkend, G.A. van, 2003, *Minorities, modernity and the emerging nation: Christian in Indonesia*, Leiden, , KITLV Press.
- Knaap, Gerrit, and Heather Sutherland, 2004, *Monsoon Traders: ships, skippers and commodities in eithteenth century Makassar*, Leiden, KITLV
- Knappert, S.C., "Beschrijving van de Onderafdeeling Koetei" dalam *BKI*, tahun 1905.
- Korn, V., "Problemen der Makassars-Boeginese samenleving" in *BKI*, 1952, vol. 108, no. 1
- Kuitenbrouwer, M., en M. Leenders, 2000. *Geschiedenis van mensenrechten : bouwstenen voor een inerdisciplinaire benadering*, Hilversum, Uitgevrij Verloren.
- Laan, E. . van der, "De bosschen in Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo" dalam *Tectona*, tahun 1925, vol. 18.
- Lindblad, J. Th., "Westers en niet-Westers economisch gedrag in Zuid Oost Kalimantan, c 1900-1940", dalam *BKI*, vol. 142, tahun 1986.
- Lindblad, J. Th., 2009, *Indonesian economic decolonization in regional and international perspective*, Leiden, KITLV Press

- Lith, Pieter A. van der, 1894, *Nederlandsch Oost Indië, tweede deel*, Leiden, E.J. Brill.
- Magenda, Burhan D., 2010, *East Kalimantan: the decline of a commercial aristocracy*, Singapore, Equinox Publ.
- Maddison, Angus, and Ge Prince, 1989, *Economic Growth in Indonesia, 18209-1940*, Dordrecht, Foris Publ
- Malloy, Robin P., 2000, *Law and Market Economy: reinterpreting the values of law and economics*, Cambridge, The Cambridge University Press.
- Nieuwenhuis, A.W., 1900, In *Centraal Borneo, reis van Pontianak naar Samarinda*, vol. 1 Leiden, E.J. Brill.
- Piepers, C.M., "Opiumpacht" dalam *Indische Gids*, tahun 1884, vol. II
- Pluvier, Jan, 1974, *South-East Asia from Colonialism to Independence*, Kuala Lumpur, Oxford University Press.
- Ricklef, M.C. , 2001, *A history of modern Indonesia since c. 1200*, Stanford, Stanford University Press.
- Sandick, R.A. van, "Overzicht: het zoutmonopolie in Nederlandsch Indië" dalam *Indische Gids*, tahun 1889, jilid I.
- Saunders, Graham, 1994, *A history of Brunei*, Kuala Lumpur, Oxford University Press
- Schrieke, B.J.O., 1956, *Indonesian Sociological Study, vol. I*, Bandung, Penerbit Sumur.
- Schuitemaker, B., "Korteschets van den landbouw in het oostmoesson rijkgebied in de Zuider, en Oosterafdeling van Borneo", dalam *Landbouw*, tahun 1938, volume 14.
- Sellato, Bernard, 1994, *Nomads of the Borneo rainforest: the economic, politics and ideology of settling down*, Hawaii, University of Hawaii Press.
- Steenbrink, Karel, 2007, *Catholics in Indonesia, 1808-1942, vol. 2*, Leiden, KITLV Press.

Stibbe, D.G., en H.J. de Graaff, 1917, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indië, eerste deel*, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff.

Suminto, Aqib, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*, Jakarta, LP3ES

Sutarto, Endriatmo, M.T. Felix Sitorus, and M. Yusup Napiri, 2001, *Decentralisation of administration: policy making and forest management in Ketapang District, West Kalimantan*, Jakarta, Center for international forestry research.

Touwen, Jerouwn, 2001, *Extremes in the archipelago: trade and economic development in the Outer Islands of Indonesia, 1900-1942*, Leiden, KITLV Press.

Tromp, S.W., "Eenige mededelingen omtrent Boegineezen van Koetei" dalam *BKI*, tahun 1897, vol.36

Velden, D. van, 1977, *De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog*, Franeker, T. Wever Uitgeverij.

Veth, P.J., 1861, *Aardrijkskundige en Statistische Woordenboek van Nederlandsch Indië, eerste deel*, Amsterdam, P.N. van Kampen.

Young, J.W., "Schets van toestanden op Borneo door de opiumpacht in het leven geroepen" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië*, tahun 1894, vol. I.

Zerner, Charles, 2003, *Culture and the Question of rights: coast and seas in Southeast Asia*, Durham, Duke University Press.



BALIKPAPAN

DARI RAWA MENJADI
SUMBER HARTA 1907 – 1942

Penemuan hasil tambang yang sangat strategis diperut bumi Kalimantan Timur khususnya Balikpapan telah mengangkat daerah Balikpapan dari sebuah pemukiman nelayan di tepi teluk yang penuh dengan rawa-rawa menjadi sebuah sentra tambang yang sangat strategis. Proses sejarah membuktikan telah terjadi perubahan ekonomi dan sosial yang sangat besar di Balikpapan akibat penemuan tambang minyak oleh Belanda. Pada periode 1907 – 1942 adalah periode dimana Belanda telah berhasil meletakkan fondasi bagi pembangunan kota Balikpapan. Fondasi bukan hanya dilihat dari fisiknya saja tetapi juga dalam hal perencanaan tata ruang dan morfologi kota. Penelitian ini akan mencoba untuk merekonstruksi proses perubahan dan perkembangan Balikpapan dari sisi ekonomi dan sosial tanpa mengesampingkan sisi politiknya sebagai pendukung kebijakan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah dalam metode sejarah yaitu hereustik (pengumpulan data), kritik (ekstern dan intern), interpretasi, dan rekonstruksi. Penggunaan sumber-sumber sejarah seperti arsip Belanda, surat kabar, majalah langka menjadi hal yang penting dalam mendukung penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan sejarah lokal dan sejarah nasional.

KEPEL
PRESS

Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6
Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telepon: 0274-884500, 081-227-10912
e-mail: amara_books@yahoo.com



BPNB Pontianak

ISBN 978-602-1228-93-7



KTI -